



PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(CALK)**

**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN ANGGARAN 2024**



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

TAHUN ANGGARAN 2024

BAB I – PENDAHULUAN

Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, telah menetapkan pembagian kewenangan (*power sharing*) dan pembagian keuangan (*financial sharing*) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Setiap Pemerintah Daerah diberikan kebebasan dan kewenangan penuh untuk melaksanakan dan mengelola kegiatan pemerintahan secara mandiri, dengan tujuan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan di segala bidang secara merata.

Menyadari hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran (TA) 2024, sebagai alat akuntabilitas kepada publik dan manajemen pemerintahan, agar tercapainya visi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yakni:

**“Menuju Terwujudnya Masyarakat Kutai Kartanegara yang
Sejahtera dan Berkeadilan”**

Dengan adanya reformasi di bidang keuangan daerah, yang ditandai dengan lahirnya UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah berusaha menerapkan ketentuan-ketentuan terbaru dalam pengelolaan keuangan daerah. Lebih lanjut, dalam TA 2024, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan pedoman teknis dalam rangka implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Berbasis Akrual TA 2024 disusun dan disajikan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 19 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih (LPSAL);
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional (LO);
- e. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
- f. Laporan Arus Kas (LAK); dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).



1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

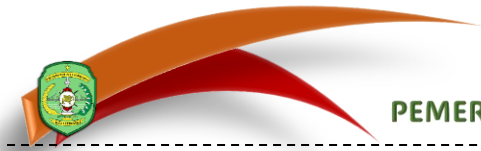
Pelaporan keuangan pemerintah daerah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan:

- a. menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- b. menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- c. menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
- f. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2024 berdasar pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
- e. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;



- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 37 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- k. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 19 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024;
- m. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 98 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024;
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024;
- o. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

CaLK LKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Berbasis AkruaI tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut.

BAB I Pendahuluan

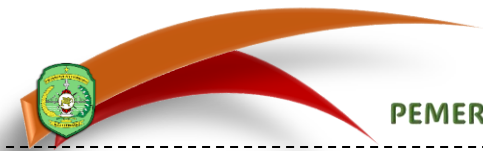
- 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Pendapatan Daerah
- 2.3 Kebijakan Belanja Daerah
- 2.4 Kebijakan Pembiayaan Daerah
- 2.5 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan



- 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

BAB IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas pelaporan
- 4.2 Prinsip akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan
- 4.3 keuangan
- 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP

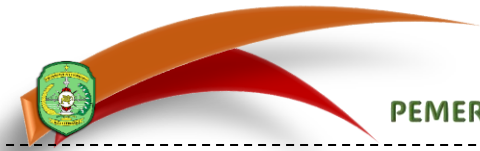
BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

- 5.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- 5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
- 5.3 Neraca;
- 5.4 Laporan Operasional (LO);
- 5.5 Laporan Arus Kas (LAK); dan
- 5.6 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

BAB VI Penjelasan atas Informasi-informasi Non Keuangan

- 6.1. Domisili dan Bentuk Hukum Entitas Pelaporan
- 6.2 Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas

BAB VII Penutup



BAB II – EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi pemerintah daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan APBD TA 2024 mengacu pada indikator sosial ekonomi pemerintah daerah tahun 2024 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu (minimal):

- a. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,28%;
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,11%;
- c. Gini Ratio sebesar 0,307%;
- d. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 75,95%;
- e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,62%;
- f. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) sebesar Rp240.700.140.770.914,00.

2.1.1. Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Kabupaten Kutai Kartanegara periode tertentu. Persentase penduduk miskin Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2 . 1 . 1 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/turun
1	Kab/Kota (%)	7,61	7,28	Turun
2	Kab/Kota (Ribuan Orang)	60,86	59,00	Turun
3	Provinsi (%)	6,11	5,78	Turun
4	Nasional (%)	9,36	9,03	Turun

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Kutai Kartanegara

Persentase penduduk miskin Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2024 sebesar 7,28 persen mengalami penurunan dibanding tahun 2023 dan tahun 2022 yaitu masing-masing sebesar 7,61 persen dan 7,96 persen. Persentase penduduk miskin Kabupaten Kutai Kartanegara masih di atas Provinsi Kalimantan Timur tetapi sudah di bawah rata-rata nasional, maka dalam perencanaan penganggaran tahun mendatang harus mendapat prioritas untuk menekan angka kemiskinan.

Kedalaman kemiskinan menggambarkan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah



bersangkutan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Tingkat kedalaman kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat pada tabel 2.1.2.

Tabel 2 . 1 . 2 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/Turun
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kab/Kota	0,91	0,65	Turun
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi	0,771	0,799	Naik
3	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,528	1,461	Turun

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Kutai Kartanegara

Keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Tingkat keparahan kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat pada tabel 2.1.3.

Tabel 2 . 1 . 3 Tingkat Keparahannya Kemiskinan Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/Turun
1	Tingkat Keparahannya Kemiskinan Kab/Kota	0,17	0,10	Turun
2	Tingkat Keparahannya Kemiskinan Provinsi	0,140	0,154	Naik
3	Tingkat Keparahannya Kemiskinan Nasional	0,377	0,347	Turun

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Kutai Kartanegara

2.1.2. Tingkat Pengangguran Terbuka

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari: (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, (iii) mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (iv) mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data pada BPS Kabupaten Kutai Kartanegara Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024 adalah sebesar 4,11%, meningkat dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 4,05% dan tahun 2022 sebesar 4,14%. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

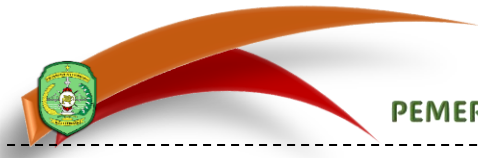
Tabel 2 . 1 . 4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Pengangguran Terbuka Kab/Kota (%)	4,05	4,11	Naik
2	Tingkat Pengangguran Provinsi (%)	5,31	5,14	Turun
3	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	5,32	4,91	Turun

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Kutai Kartanegara

2.1.3. Indeks Gini (Gini Ratio)

Indeks Gini atau *Gini Ratio* adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai



pengeluaran konsumsi dengan distribusi *uniform* yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana:

- a. Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama; dan
- b. Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada BPS Kabupaten Kutai Kartanegara realisasi pencapaian *Gini Ratio* Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024 sebesar 0,307 poin, tahun 2023 sebesar 0,284 poin dan tahun 2022 sebesar 0,269 poin, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 2.1.5 Gini Ratio Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Gini Rasio	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/turun (%)
1	Tingkat Kab/Kota	0,284	0,307	Naik
2	Tingkat Provinsi	0,322	0,310	Turun
3	Tingkat Nasional	0,388	0,379	Turun

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Kutai Kartanegara

2.1.4. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu harapan hidup/umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Sesuai dengan *United Nations Development Programme* (UNDP) Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu:

- a. Rendah (<60);
- b. Sedang ($60 \leq IPM < 70$);
- c. Tinggi ($70 \leq IPM < 80$); dan
- d. Sangat Tinggi (>80).

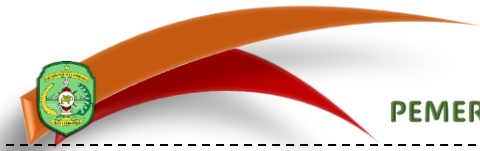
Sesuai dengan data pada BPS Kabupaten Kutai Kartanegara realisasi pencapaian IPM Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024 adalah sebesar 75,91 poin, tahun 2023 sebesar 75,3 poin, tahun 2022 sebesar 74,67 poin dengan kategori tinggi sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.1.6 Indeks Pembangunan Manusia

No	IPM (Tingkat)	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/turun
1	Kabupaten/Kota	75,30	75,91	Naik
2	Provinsi	78,20	78,83	Naik
3	Indonesia/Nasional	74,39	74,20	Naik

Sumber Dokumen BPS Kabupaten Kutai Kartanegara

Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024 adalah sebesar 75,91 poin, dibandingkan tahun 2023 sebesar 75,3 poin mengalami kenaikan sebesar 0,61 poin. Peningkatan IPM tersebut disebabkan meningkatnya umur Angka Harapan Hidup (AHH) dan/atau Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama



Sekolah (RLS) dan/atau standar hidup yang berkaitan dengan Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita. Umur harapan hidup saat lahir mencapai 72,94 tahun pada tahun 2024, lebih lama 0,19 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Kemudian, rata-rata lama sekolah selama 9,27 tahun dengan harapan lama sekolah 13,65 tahun. Sementara, Standar Hidup, PNB per kapita per tahun sebesar Rp12.957,00 atau meningkat Rp634,00 dibandingkan tahun sebelumnya.

2.1.5. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2010. Laju pertumbuhan ekonomi sampai dengan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2 . 1 . 7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara

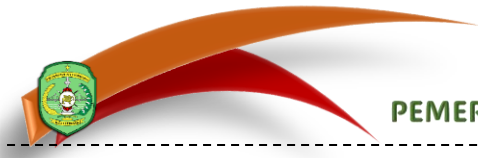
No	Uraian	Kabupaten/Kota				Provinsi
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	PDRB (harga konstan 2010) (juta Rp)	120.953.677,35	124.197.100,21	128.798.427,81	135.406.045,93	143.009.773,88
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	-4,21	2,67	3,71	4,48	5,62

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Kutai Kartanegara

Pada periode tahun 2020 s.d. 2024, pertumbuhan perekonomian berkisar antara 2 (dua) hingga 5 (empat) persen dan sempat turun pada tahun 2020 saat terjadi pandemi COVID-19. Pada tahun 2024 dalam skala provinsi laju pertumbuhan Kabupaten Kutai Kartanegara menempati urutan 8 (delapan) dari laju pertumbuhan kota atau kabupaten lain dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Pada tahun 2016 skala nasional laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara menempati urutan 13 dari laju pertumbuhan di wilayah Indonesia. Sedangkan untuk peringkat laju pertumbuhan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024 belum dapat disajikan.

2.1.6. Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya, inflasi terbagi empat kategori yang meliputi: (i) inflasi ringan (*creeping inflation*) dengan laju kurang dari 10% dalam satu tahun, (ii) inflasi sedang (*galloping inflation*), yakni inflasi dengan laju berkisar antara 10-30% setahun, (iii) inflasi berat (*high inflation*), yakni inflasi dengan laju berkisar antara 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan, dan (iv) hiperinflasi (*hyper inflation*), yakni inflasi yang sangat



dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

2.1.7. Struktur Perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara

Struktur perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1.8 PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha

Dalam Jutaan Rupiah

Table with 7 columns: No, Uraian, Tahun 2020, Tahun 2021, Tahun 2022, Tahun 2023, Tahun 2024. Rows include various economic sectors like Agriculture, Manufacturing, and Services, ending with a total PDRB row.

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Kutai Kartanegara

Kuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

Penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, dengan cara mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan



pengelolaan anggaran secara baik. Aspek penting dalam penyusunan anggaran adalah penyalarsan antara kebijakan (*policy*), perencanaan (*planning*) dengan penganggaran (*budgeting*) antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Struktur APBD Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari: (1) penerimaan daerah yang didalamnya terdapat Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah; (2) pengeluaran daerah yang didalamnya terdapat Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan.

Kebijakan keuangan Kabupaten Kutai Kartanegara, merupakan upaya-upaya strategis dalam rangka mengoptimalkan potensi keuangan daerah bagi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah, yang dioperasionalkan di dalam APBD.

2.2. Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah meliputi:

- a. Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
- b. Dana Perimbangan yang berasal dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang berasal dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

Berdasarkan atas kebijakan umum pendapatan daerah pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2023 s.d. 2026, secara umum kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah:

Sejalan dengan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang terus meningkat, kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui optimalisasi potensi pendapatan daerah dan penerimaan daerah lainnya.

Berdasarkan pengendalian dan evaluasi semester pertama maka harus dilakukan penyesuaian karena adanya regulasi berkenaan dengan rincian transfer ke daerah diantaranya Peraturan Menteri Keuangan berkenaan Lebih dan Kurang Salur. Dalam hal ini peningkatan tersebut berasal dari DBH Minerba dengan mempertimbangkan potensi pendapatan yang belum dibayarkan.

Sedangkan PAD dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah diproyeksikan tidak mengalami perubahan

2.3. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah meliputi:

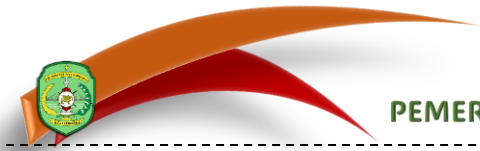
- a. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
- b. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.



- c. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
- d. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.

Kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024, terlebih dahulu menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat tentang *mandatory spending* dan kebijakan pemerintah daerah yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024 :

- a. *Mandatory spending* adalah pengeluaran atau belanja daerah yang wajib dialokasikan pada proporsi tertentu sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan meliputi:
 - 1) Alokasi anggaran belanja fungsi pendidikan paling sedikit sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 Pasal 31 ayat (4) dan UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 ayat (1);
 - 2) Alokasi anggaran belanja fungsi kesehatan paling sedikit sebesar 10% dari APBD di luar gaji sesuai amanat UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - 3) Alokasi anggaran belanja infrastruktur yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan/atau pemeliharaan fasilitas pelayanan publik yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah paling rendah sebesar 40% sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 - 4) Alokasi anggaran belanja fungsi pengawasan paling sedikit sebesar 0,5% dari APBD sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 - 5) Alokasi anggaran belanja untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggaraan pemerintah daerah paling sedikit sebesar 0,16% dari APBD sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 - 6) Alokasi anggaran belanja untuk bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit sebesar 10% dari dana perimbangan yang diterima dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 yang kemudian ditegaskan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

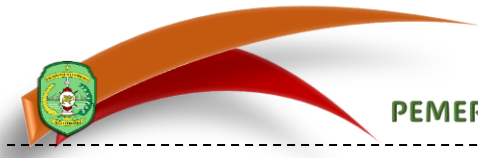


- b. Prioritas Pemenuhan Belanja Wajib dan Mengikat yaitu belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain: pendidikan dan kesehatan; dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga serta belanja mengikat yang merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam Tahun anggaran yang bersangkutan seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa berupa operasional rutin perkantoran, belanja hibah, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.
- c. Prioritas pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam Pasal 289 yang menyebutkan Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan SPM, yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Terhadap belanja daerah maka ditentukan secara tegas dan jelas bahwa belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai pelaksanaan SPM. Atas prioritas tersebut, maka SPM telah menjamin hak konstitusional masyarakat.
- d. Prioritas Pemenuhan Belanja Program Dedikasi (*Major Project*) merupakan prioritas pembangunan daerah yang merupakan program unggulan (*dedicated*) Kepala Daerah. Terdapat 23 program major project dedikasi dari Kepala Daerah terpilih.
- e. Prioritas lainnya yang harus dijadikan arah kebijakan dalam belanja daerah merupakan dukungan belanja terhadap prioritas Nasional, prioritas Provinsi, hal ini dilakukan dalam rangka mendukung keterkaitan pencapaian antara sasaran dan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD dengan sasaran Prioritas Nasional (RKP) dan Prioritas Provinsi (RKPD Provinsi) serta belanja arahan hasil audit yaitu penyelesaian terhadap konstruksi dalam pengerjaan (KDP). Mengedepankan belanja yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan serta mendukung kebijakan nasional. Peningkatan kinerja program dan kegiatan dilakukan secara Tematik kepada pembangunan sektor pertanian dalam arti luas “Kutai Kartanegara sebagai Lumbung Pangan Kalimantan Timur” (padi, hortikultura, peternakan, perikanan dan hilirisasi pertanian), infrastruktur konektivitas antar wilayah, pendidikan, kesehatan, kemiskinan, penyediaan air bersih, penanganan air limbah, persampahan, pariwisata, UMKM dan persiapan Pilkada Serentak 2024.

2.4. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah meliputi:

- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas SiLPA Tahun Anggaran Lalu, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, dan Penerimaan Piutang Daerah;
- b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, dan Pembayaran Pokok Utang; dan
- c. SiLPA Tahun Berjalan.



- a. Pembiayaan daerah merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Penerimaan Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Pada RKPD Tahun 2024 telah diproyeksikan SiLPA sebesar Rp0,00. Adapun perubahan pembiayaan pada perubahan RKPD Tahun 2024 dialokasikan berdasarkan hasil audit BPK terhadap LKPD TA.2023. Alokasi SiLPA tersebut diantaranya merupakan uang yang terdapat pada Kas di daerah, di BLUD, di Bendahara BOS dan sebagainya.

2.5. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Indikator pencapaian target kinerja APBD terlihat dari realisasi pendapatan sebesar 88,75% yaitu senilai Rp12.702.146.936.113,90 dari alokasi anggaran Rp14.312.025.946.608,00. Realisasi belanja daerah sebesar 88,14% yaitu senilai Rp12.808.140.240.643,60 dari alokasi anggaran Rp14.531.000.000.000,00. Adapun rincian realisasi pendapatan, belanja adalah sebagai berikut :

Tabel 2 . 1 . 9 Rincian Realisasi Pendapatan dan Belanja

No.	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%
1	<u>Pendapatan Daerah</u>			
2	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			
3	Pajak Daerah	160.000.000.000,00	165.870.568.096,40	103,67
4	Retribusi Daerah	7.542.820.000,00	5.879.733.796,00	77,95
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	32.000.000.000,00	88.383.259.737,59	276,20
6	Lain-Lain PAD Yang Sah	533.358.595.061,00	527.466.608.979,49	98,90
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	732.901.415.061,00	787.600.170.609,48	107,46
8	Pendapatan Transfer			
9	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat			
10	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	11.092.859.540.547,00	9.840.984.241.170,00	88,71
11	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	617.587.154.000,00	608.978.151.168,00	98,61
12	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	160.753.615.000,00	152.452.133.560,00	94,84
13	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	403.162.646.000,00	354.448.698.229,73	87,92
14	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	12.274.362.955.547,00	10.956.863.224.127,70	89,27
15	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya			
16	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00
17	Dana Desa	195.105.755.000,00	195.105.755.000,00	100,00
18	Insentif Fiskal	34.790.318.000,00	34.790.318.000,00	100,00
19	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	229.896.073.000,00	229.896.073.000,00	100,00
20	Pendapatan Transfer Antar Daerah			
21	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	766.425.503.000,00	588.414.513.069,00	76,77
22	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	58.440.000.000,00	58.440.000.000,00	100,00



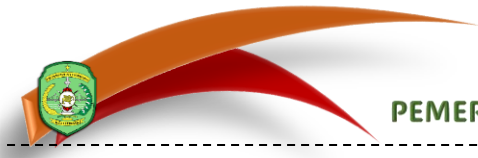
No.	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%
23	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi	824.865.503.000,00	646.854.513.069,00	78,42
24	Total Pendapatan Transfer	13.329.124.531.547,00	11.833.613.810.196,70	88,78
25	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah			
26	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00
27	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	250.000.000.000,00	80.932.955.307,69	32,37
28	Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang Sah	250.000.000.000,00	80.932.955.307,69	32,37
29	Jumlah Pendapatan	14.312.025.946.608,00	12.702.146.936.113,90	88,75
30	Belanja Daerah			
31	Belanja Operasi			
32	Belanja Pegawai	2.315.252.391.445,96	2.031.277.587.743,00	87,73
33	Belanja Barang Dan Jasa	4.673.176.313.252,26	4.070.345.469.854,34	87,10
34	Belanja Subsidi	134.594.500,00	101.040.120,00	75,07
35	Belanja Hibah	293.603.569.400,02	246.099.465.443,00	83,82
36	Belanja Bantuan Sosial	26.297.117.000,00	25.188.000.000,00	95,78
37	Jumlah Belanja Operasi	7.308.463.985.598,24	6.373.011.563.160,34	87,20
38	Belanja Modal			
39	Belanja Modal Tanah	69.771.831.992,00	62.606.649.543,00	89,73
40	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.485.656.834.108,66	1.303.090.381.381,00	87,71
41	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.961.404.549.197,50	1.646.496.068.022,73	83,94
42	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.541.849.901.434,60	2.281.781.596.417,52	89,77
43	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	11.047.354.497,00	5.811.543.160,00	52,61
44	Belanja Modal Aset Lainnya	18.654.683.567,00	15.659.928.500,00	83,95
45	Jumlah Belanja Modal	6.088.385.154.796,76	5.315.446.167.024,25	87,30
46	Belanja Tidak Terduga			
47	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00	0,00	0,00
48	Jumlah Belanja Tak Terduga	10.000.000.000,00	0,00	0,00
49	Jumlah Belanja	13.406.849.140.395,00	11.688.457.730.184,60	87,18
50	Belanja Transfer			
51	Belanja Bagi Hasil			
52	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	16.000.000.000,00	16.000.000.000,00	100,00
53	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	754.282.000,00	754.282.000,00	100,00
54	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	1.107.396.577.605,00	1.102.928.228.459,00	99,60
55	Jumlah Transfer/Bagi Hasil Ke Desa	1.124.150.859.605,00	1.119.682.510.459,00	99,60
56	Jumlah Belanja Dan Transfer	14.531.000.000.000,00	12.808.140.240.643,60	88,14
57	Surplus/(Defisit)	-218.974.053.392,00	-105.993.304.529,69	48,40
58	Pembiayaan Daerah			



No.	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%
59	Penerimaan Pembiayaan			
60	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	295.974.053.392,00	295.974.725.354,16	100,00
61	Jumlah Penerimaan	295.974.053.392,00	295.974.725.354,16	100,00
62	Pengeluaran Pembiayaan			
63	Penyertaan Modal Daerah	77.000.000.000,00	24.045.000.000,00	31,23
64	Jumlah Pengeluaran	77.000.000.000,00	24.045.000.000,00	31,23
65	Pembiayaan Netto	218.974.053.392,00	271.929.725.354,16	124,18
66	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	0,00	165.936.420.824,47	100,00

Salah satu dimensi yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah adalah dimensi penyerapan anggaran dalam APBD dan di dalam dimensi tersebut terdapat sembilan indikator. Adapun capaian empat indikator tersebut akan bernilai maksimal saat empat indikator tersebut memiliki realisasi belanja minimal 80%. Adapun capaian Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap empat indikator tersebut di tahun 2024 adalah :

- Realisasi belanja operasional sebesar 87,20% yaitu sebesar Rp6.373.011.563.160,34 dari alokasi anggaran Rp7.308.463.985.598,24.
- Realisasi belanja modal sebesar 87,30% yaitu senilai Rp5.315.446.167.024,25 dari alokasi anggaran Rp6.088.385.154.796,76.
- Tidak terdapat realisasi belanja tidak terduga pada tahun 2024 dari anggaran sebesar Rp10.000.000.000,00.
- Realisasi belanja transfer sebesar 99,60% yaitu sebesar Rp1.119.682.510.459,00 dari anggaran senilai Rp1.124.150.859.605,00.



BAB III - IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah dicerminkan dalam APBD yang merupakan rencana tahunan pemerintah daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun. APBD juga merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara.

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

3.1.1. Pendapatan

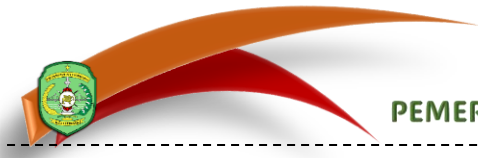
Target Pendapatan Kabupaten Kutai Kartanegara TA 2024 sebesar Rp14.312.025.946.608,00 terealisasi sebesar Rp12.702.146.936.113,90 atau 88,75%, nilai realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp4.914.923.113.753,31 atau 63,12% apabila dibandingkan dengan realisasi Pendapatan daerah TA 2023 sebesar Rp7.787.223.822.360,59.

Realisasi Pendapatan merupakan bagian dari kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp787.600.170.609,48, Pendapatan Transfer sebesar Rp11.833.613.810.196,70, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp80.932.955.307,69 sebagaimana ditunjukkan pada gambar 3.1.1.

Gambar 3.1.1 Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara TA 2024 dan 2023

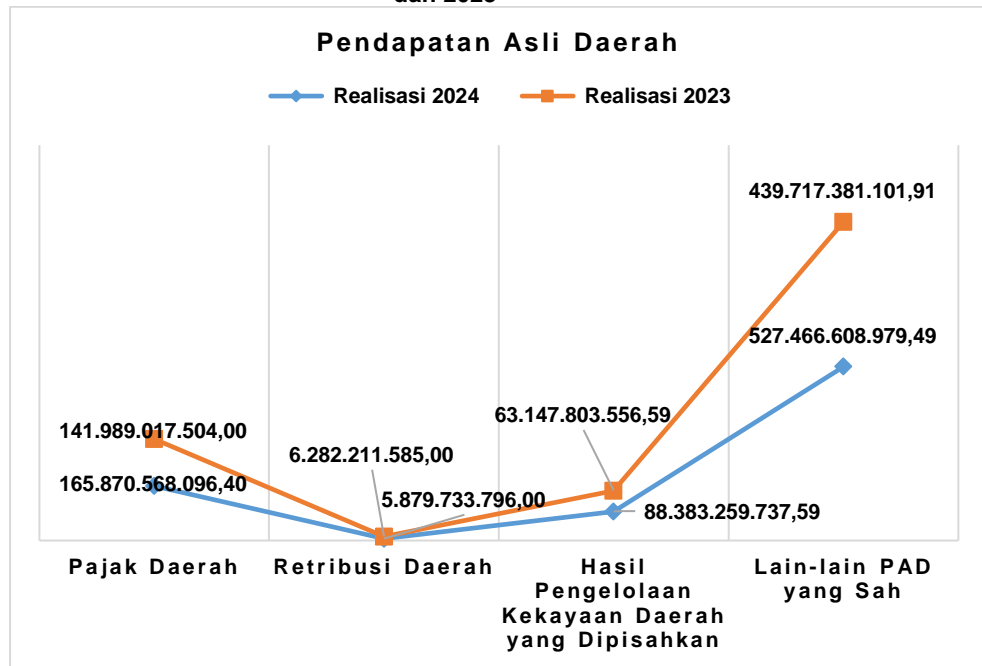


Target Pendapatan Asli Daerah TA 2024 sebesar Rp732.901.415.061,00 terealisasi sebesar Rp787.600.170.609,48 atau 107,46%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp651.136.413.747,50, maka realisasi PAD mengalami peningkatan sebesar Rp136.463.756.861,98 atau 20,96%.



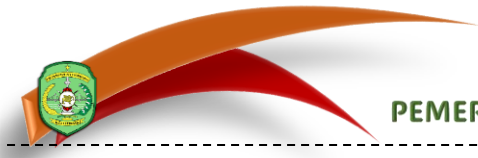
Rincian PAD terdiri dari Pajak Daerah sebesar Rp165.870.568.096,40, Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp5.879.733.796,00, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar Rp88.383.259.737,59 dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Rp527.466.608.979,49 sebagaimana gambar 3.1.2 berikut.

Gambar 3.1.2 PAD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara TA 2024 dan 2023



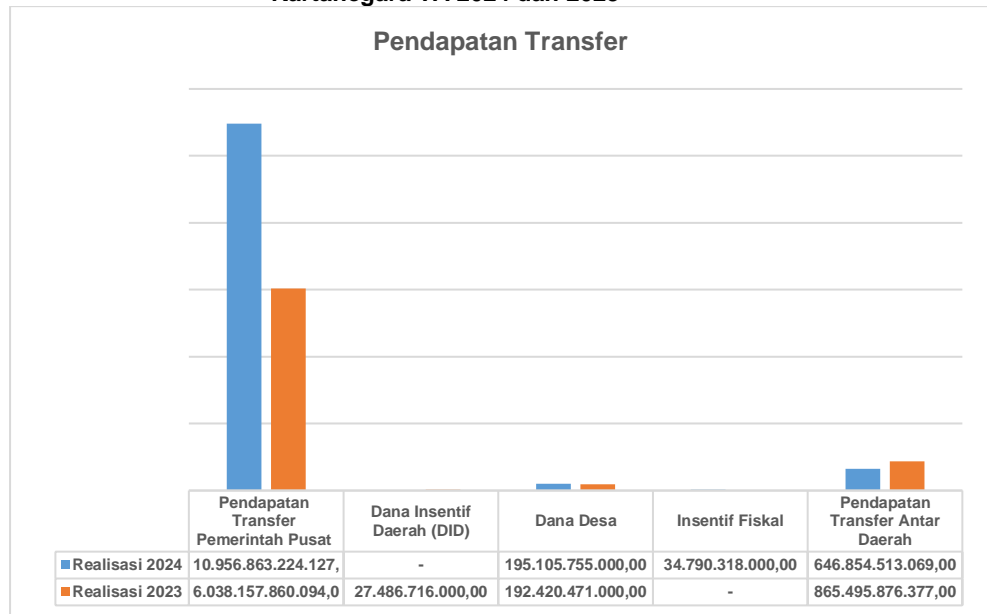
Gambar di atas menunjukkan bahwa untuk TA 2024 dan 2023 sumber utama PAD adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Pajak Daerah TA 2024 terealisasi sebesar Rp165.870.568.096,40 atau 103,67% dari target sebesar Rp160.000.000.000,00 dan mengalami peningkatan sebesar Rp23.881.550.592,40 atau 16,82% dibandingkan pada TA 2023 sebesar Rp141.989.017.504,00.
- b. Pendapatan Retribusi Daerah TA 2024 terealisasi sebesar Rp5.879.733.796,00 atau 77,95% dari target sebesar Rp7.542.820.000,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp402.477.789,00 atau 6,41% dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp6.282.211.585,00.
- c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2024 terealisasi sebesar Rp88.383.259.737,59 atau 276,15% dari target sebesar Rp32.000.000.000,00 dan mengalami peningkatan sebesar Rp25.235.456.181,00 atau 39,96% dibandingkan pada TA 2023 sebesar Rp63.147.803.556,59.
- d. Lain-lain PAD yang Sah TA 2024 terealisasi sebesar Rp527.466.608.979,49 atau 98,90% dari target sebesar Rp527.466.608.979,49 dan mengalami peningkatan sebesar Rp87.749.227.877,58 atau 19,96% dibandingkan pada TA 2023 sebesar Rp439.717.381.101,91.



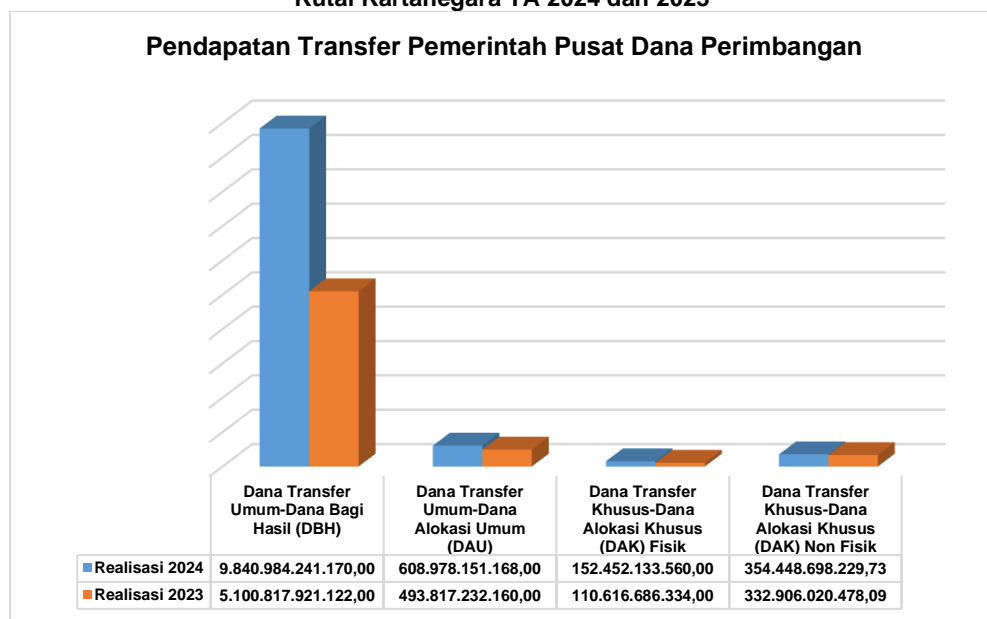
Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2024 adalah sebesar Rp11.833.613.810.196,70 atau 88,78% dari anggaran sebesar Rp13.329.124.531.547,00. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah (DID), Dana Desa, Insentif Fiskal dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Gambaran realisasi pendapatan transfer dapat dilihat pada gambar berikut.

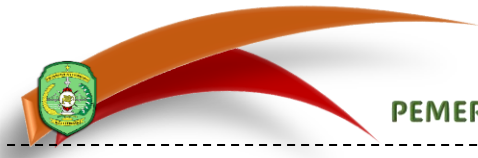
Gambar 3 . 1 . 3 Pendapatan Transfer Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara TA 2024 dan 2023



Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan TA 2024 terealisasi sebesar Rp10.956.863.224.127,70 atau 89,27% dari target sebesar Rp12.274.362.955.547,00. Secara keseluruhan pencapaian kinerja Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan selama TA 2024 dan perbandingannya dengan TA 2023 ditunjukkan dalam gambar 3.1.4 berikut.

Gambar 3 . 1 . 4 Pendapatan Transfer Dana Perimbangan Pada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara TA 2024 dan 2023





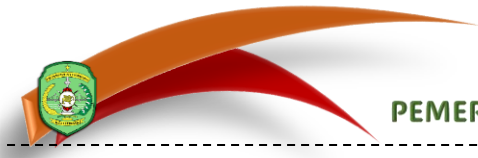
Gambar di atas menunjukkan bahwa untuk TA 2024 dan 2023 sumber utama Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan adalah dari:

- a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) TA 2024 terealisasi sebesar Rp9.840.984.241.170,00 atau 88,71% dari anggaran sebesar Rp11.092.859.540.547,00, dan mengalami peningkatan sebesar Rp4.740.166.320.048,00 atau 92,93% dibandingkan pada TA 2023 sebesar Rp5.100.817.921.122,00.
- b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2024 terealisasi sebesar Rp608.978.151.168,00 atau 98,61% dari anggaran sebesar Rp617.587.154.000,00, dan mengalami peningkatan sebesar Rp115.160.919.008,00 atau 23,32% dibandingkan pada TA 2023 sebesar Rp493.817.232.160,00.
- c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA 2024 terealisasi sebesar Rp152.452.133.560,00 atau 94,84% dari anggaran sebesar Rp160.753.615.000,00 dan mengalami peningkatan sebesar Rp41.835.447.226,00 atau 37,82% dibandingkan pada TA 2023 sebesar Rp110.616.686.334,00.
- d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik TA 2024 terealisasi sebesar Rp354.448.698.229,73 atau 87,92% dari anggaran sebesar Rp403.162.646.000,00 dan mengalami peningkatan sebesar Rp21.542.677.751,64 atau 6,47% dibandingkan pada TA 2023 sebesar Rp332.906.020.478,09.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya TA 2024 terealisasi sebesar Rp229.896.073.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp229.896.073.000,00. Secara keseluruhan pencapaian kinerja Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya selama TA 2024 dan perbandingannya dengan TA 2023 ditunjukkan dalam gambar 3.1.5 berikut.

Gambar 3 . 1 . 5 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Pada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara TA 2024 dan 2023



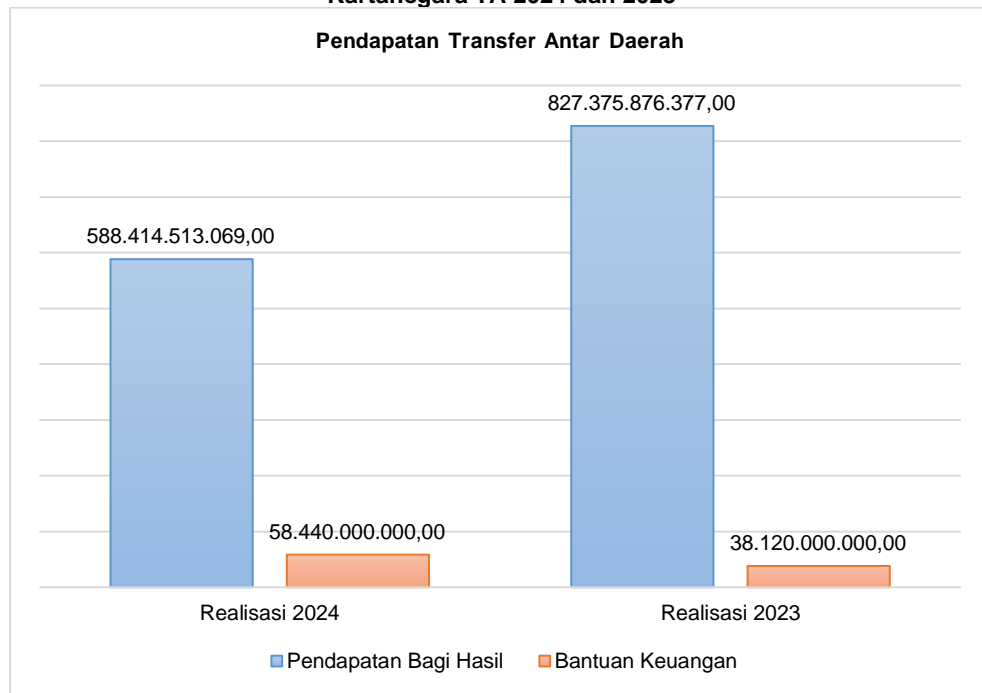


Gambar di atas menunjukkan bahwa untuk TA 2024 dan 2023 sumber utama Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya adalah dari:

- a. Dana Insentif Daerah (DID) TA 2024 terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dan mengalami penurunan sebesar Rp27.486.716.000,00 atau 100,00% dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp27.486.716.000,00;
- b. Dana Desa TA 2024 terealisasi sebesar Rp195.105.755.000,00 atau 100,00% dan mengalami peningkatan sebesar Rp2.685.284.000,00 atau 1,40% dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp192.420.471.000,00; dan
- c. Insentif Fiskal TA 2024 terealisasi sebesar Rp34.790.318.000,00 atau 100,00% dan mengalami peningkatan sebesar Rp34.790.318.000,00 atau 100,00% dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp0,00;

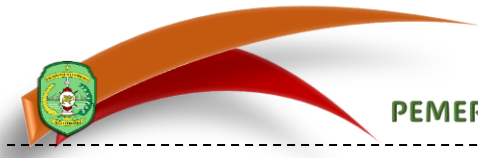
Pendapatan Transfer Antar Daerah TA 2024 terealisasi sebesar Rp646.854.513.069,00 atau 78,42% dari anggaran sebesar Rp824.865.503.000,00. Secara keseluruhan pencapaian kinerja Pendapatan Transfer Antar Daerah selama TA 2024 dan perbandingannya dengan TA 2023 ditunjukkan dalam gambar 3.1.6 berikut

Gambar 3 . 1 . 6 Pendapatan Transfer Antar Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara TA 2024 dan 2023



Gambar di atas menunjukkan bahwa untuk TA 2024 dan 2023 sumber utama Pendapatan Transfer Antar Daerah adalah dari:

- a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak TA 2024 terealisasi sebesar Rp588.414.513.069,00 atau 76,77% dan mengalami penurunan sebesar Rp238.961.363.308,00 atau 28,88% dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp827.375.876.377,00; dan
- b. Bantuan Keuangan TA 2024 terealisasi sebesar Rp58.440.000.000,00 atau 100,00% dan mengalami peningkatan sebesar Rp20.320.000.000,00 atau 53,31% dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp38.120.000.000,00.



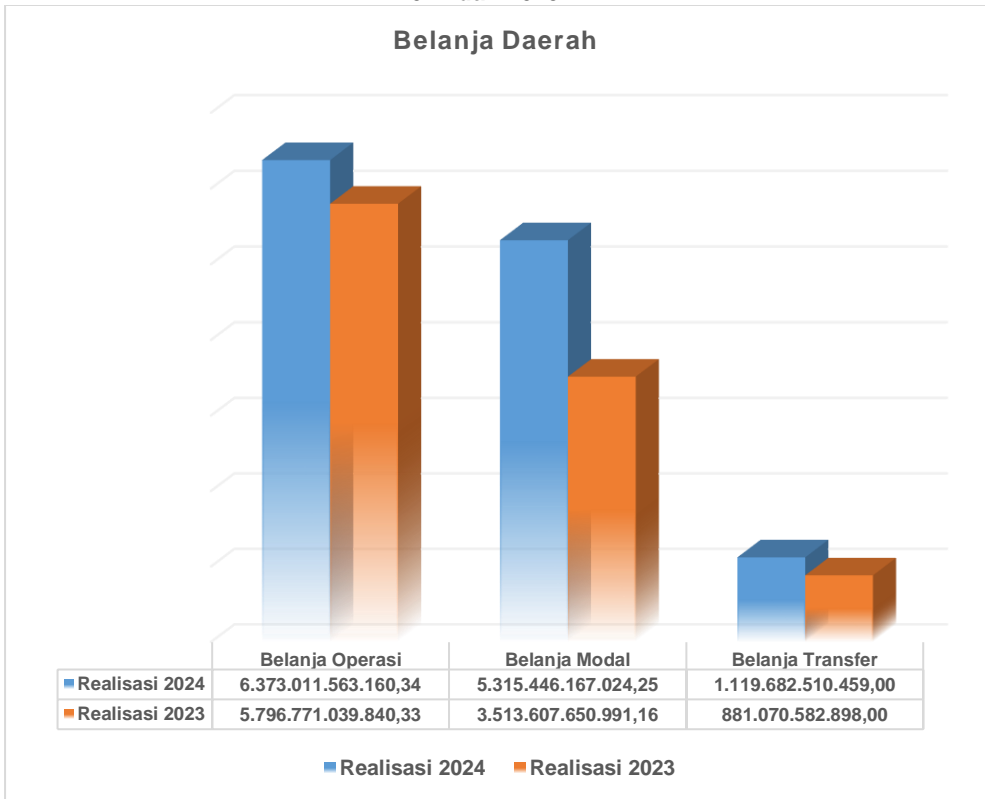
Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah TA 2024 adalah sebesar Rp80.932.955.307,69 atau 32,37% dari anggaran sebesar Rp250.000.000.000,00. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah terdiri atas Pendapatan Hibah dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dengan realisasi sebagai berikut:

- a. Pendapatan Hibah TA 2024 terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp0,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp3.567.000.000,00 dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp3.567.000.000,00; dan
- b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan TA 2024 terealisasi sebesar Rp80.932.955.307,69 atau 32,37% dari anggaran sebesar Rp250.000.000.000,00 dan mengalami peningkatan sebesar Rp71.973.470.165,69 atau 803,32% dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp8.959.485.142,00.

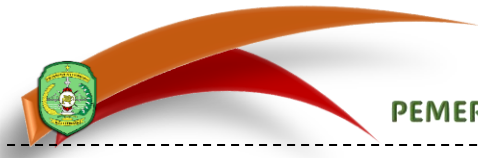
3.1.2. Belanja

Realisasi belanja TA 2024 adalah sebesar Rp12.808.140.240.643,60 atau 88,14% dari anggaran sebesar Rp14.531.000.000.000,00. Proporsi terbesar realisasi belanja adalah Belanja Operasi sebesar Rp6.373.011.563.160,34 atau 87,20%, sedangkan Belanja Modal sebesar Rp5.315.446.167.024,25 atau 87,30% dan Belanja Transfer sebesar Rp1.119.682.510.459,00 atau 99,60% yang dapat dilihat pada gambar berikut.

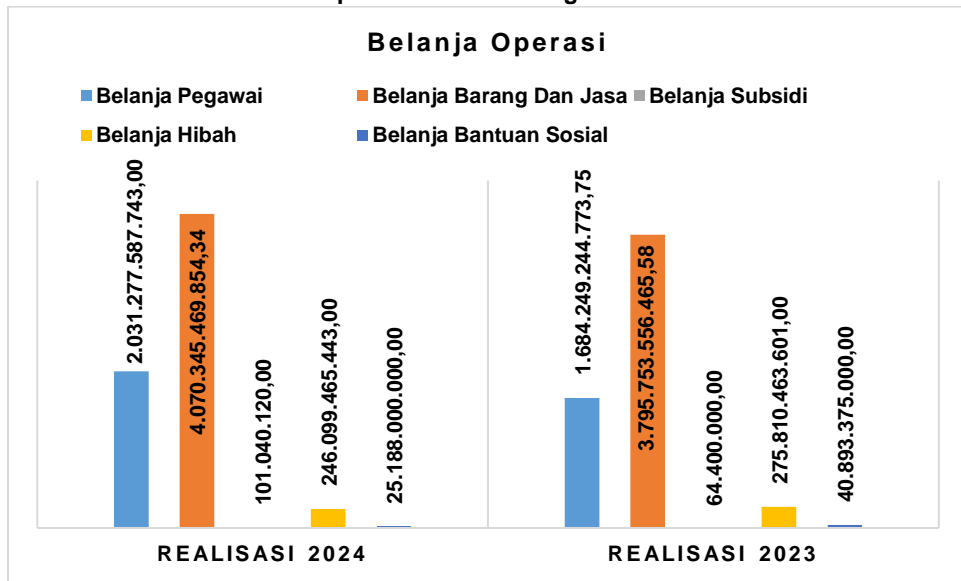
Gambar 3 . 1 . 7 Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara TA 2024 dan 2023



Perbandingan kinerja Belanja Operasi TA 2024 dan 2023 ditunjukkan dalam gambar 3.1.8 berikut.



Gambar 3 . 1 . 8 Belanja Operasi
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara TA 2024 dan 2023

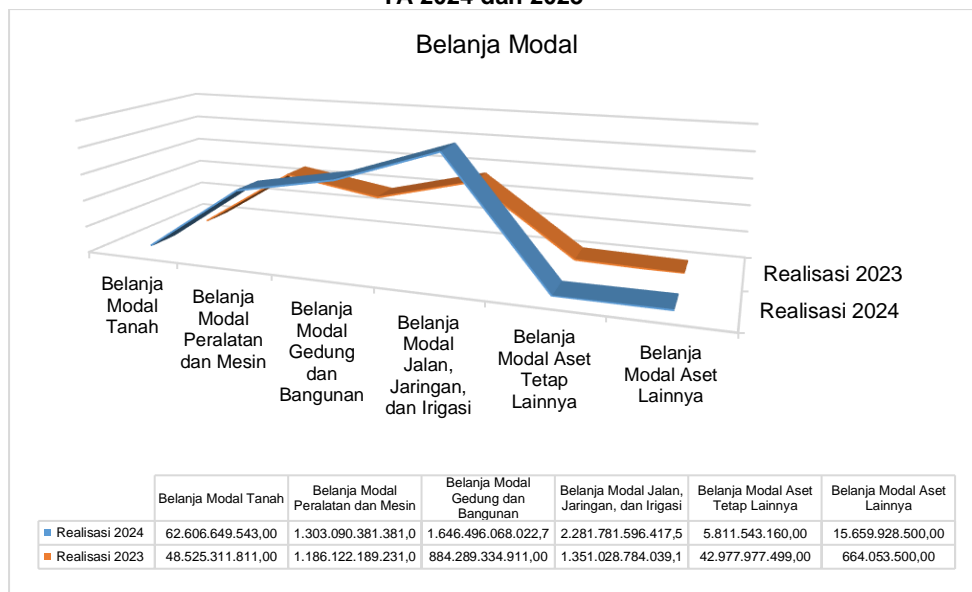


Dari gambar 3.1.8 diketahui informasi sebagai berikut.

- Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 sebesar Rp2.031.277.587.743,00 atau 87,73% dari anggaran sebesar Rp2.315.252.391.445,96, dan mengalami peningkatan sebesar Rp347.028.342.969,25 atau 20,60% dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp1.684.249.244.773,75.
- Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2024 sebesar Rp4.070.345.469.854,34 atau 87,10% dari anggaran sebesar Rp4.673.176.313.252,26 dan mengalami peningkatan sebesar Rp274.591.913.388,76 atau 7,23% dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp3.795.753.556.465,58.
- Realisasi Belanja Subsidi TA 2024 sebesar Rp101.040.120,00 atau 75,07% dari anggaran sebesar Rp134.594.500,00 dan mengalami peningkatan sebesar Rp36.640.120,00 atau 56,89% dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp64.400.000,00.
- Realisasi Belanja Hibah TA 2024 sebesar Rp246.099.465.443,00 atau 83,82% dari anggaran sebesar Rp293.603.569.400,02 dan mengalami penurunan sebesar Rp29.710.998.158,00 atau 10,77% dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp275.810.463.601,00.
- Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2024 sebesar Rp25.188.000.000,00 atau 95,78% dari anggaran sebesar Rp26.297.117.000,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp15.705.375.000,00 atau 38,41% dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp40.893.375.000,00.

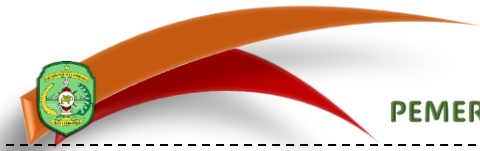
Realisasi Belanja Modal TA 2024 sebesar Rp5.315.446.167.024,25 atau 87,30% dari anggaran sebesar Rp6.088.385.154.796,76 dan mengalami peningkatan sebesar Rp1.801.838.516.033,09 atau 51,28% bila dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp3.513.607.650.991,16. Perbandingan kinerja Belanja Modal TA 2024 dan 2023 ditunjukkan dalam gambar 3.1.9.

Gambar 3.1.9 Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara TA 2024 dan 2023



Dari gambar 3.1.9 diketahui terdapat informasi sebagai berikut:

- Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2024 sebesar Rp62.606.649.543,00 atau 89,73% dari anggaran sebesar Rp69.771.831.992,00 dan mengalami peningkatan sebesar Rp14.081.337.732,00 atau 29,02% dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp48.525.311.811,00;
- Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 sebesar Rp1.303.090.381.381,00 atau 87,71% dari anggaran sebesar Rp1.485.656.834.108,66 dan mengalami peningkatan sebesar Rp116.968.192.150,00 atau 9,86% dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp1.186.122.189.231,00;
- Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 sebesar Rp1.646.496.068.022,73 atau 83,94% dari anggaran sebesar Rp1.961.404.549.197,50 dan mengalami peningkatan sebesar Rp762.206.733.111,73 atau 86,19% dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp884.289.334.911,00;
- Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2024 sebesar Rp2.281.781.596.417,52 atau 89,77% dari anggaran sebesar Rp2.541.849.901.434,60 dan mengalami peningkatan sebesar Rp930.752.812.378,36 atau 68,89% dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp1.351.028.784.039,16;
- Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2024 sebesar Rp5.811.543.160,00 atau 52,61% dari anggaran sebesar Rp11.047.354.497,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp37.166.434.339,00 atau 86,48% dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp42.977.977.499,00; dan
- Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya TA 2024 sebesar Rp15.659.928.500,00 atau 83,95% dari anggaran sebesar Rp18.654.683.567,00 dan mengalami peningkatan sebesar Rp14.995.875.000,00 atau 2.258,23% dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp664.053.500,00.



Tidak terdapat realisasi Belanja Tak Terduga pada TA 2024 dari anggaran sebesar Rp10.000.000.000,00 dan untuk realisasi Belanja Transfer TA 2024 adalah sebesar Rp1.119.682.510.459,00 atau 99,60% dari anggaran sebesar Rp1.124.150.859.605,00 serta mengalami peningkatan sebesar Rp238.611.927.561,00 atau 27,08% dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp881.070.582.898,00.

Dalam APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 sebesar Rp14.608.000.000.000,00, terdapat proporsi belanja atau pengeluaran daerah yang wajib dialokasikan sesuai peraturan perundang-undangan (*mandatory spending*) dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran belanja fungsi pendidikan sebesar Rp2.949.063.776.632,00 atau 20,29% dari total APBD yang telah direalisasikan belanjanya sebesar Rp2.259.551.114.101,00;
2. Anggaran belanja fungsi kesehatan sebesar Rp2.045.334.801.835,00 atau 16,58 dari total APBD di luar belanja gaji yang telah direalisasikan belanjanya sebesar Rp1.463.543.883.483,16;
3. Anggaran belanja infrastruktur sebesar Rp6.417.047.181.901,00 atau 47,86 dari total APBD yang telah direalisasikan belanjanya sebesar Rp5.591.483.165.624,25;
4. Anggaran belanja fungsi pengawasan sebesar Rp56.319.493.266,00 atau 0,39% dari total APBD yang telah direalisasikan belanjanya sebesar Rp38.368.556.064,00;
5. Anggaran belanja untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggaraan pemerintah daerah sebesar Rp55.847.940.696,00 atau 0,38% dari total APBD yang telah direalisasikan belanjanya sebesar Rp15.970.159.424,00;
6. Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp682.494.000.000,00 atau 14,26% dari total APBD yang telah direalisasikan belanjanya sebesar Rp681.825.531.666,00.

Kabupaten Kutai Kartanegara juga mengalokasikan anggaran untuk pengendalian inflasi sebesar Rp2.432.666.084.528,00 dengan realisasi belanja sebesar Rp2.382.383.996.209,00 atau 97,93%, yang pelaksanaan kegiatannya ada di beberapa perangkat daerah, diantaranya yaitu :

1. Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Satgas Pangan dan Dinas Ketahanan Pangan menetapkan anggaran Rp1.750.000.000,00 dengan realisasi belanja Rp1.541.880.700,00 melaksanakan kegiatan operasi pasar, sidak pasar, monitoring harga dan stok pangan serta gudang distributor;
2. Dinas Ketahanan Pangan menetapkan anggaran Rp6.175.000.000,00 dengan realisasi belanja Rp5.829.117.047,00 atau sebesar 94,40% untuk melaksanakan kegiatan :
 - a. Penyediaan infrastruktur lumbung pangan;
 - b. Penyediaan infrastruktur lantai jemur;
 - c. Penyediaan sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan.



3. Dinas Kelautan dan Perikanan menetapkan anggaran Rp452.587.550.878,00 dengan realisasi belanja Rp419.597.195.247,00 atau sebesar 92,71% untuk melaksanakan kegiatan:
 - a. Pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil;
 - b. Pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil;
 - c. Pelaksanaan fasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitraan usaha;
 - d. Penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap;
 - e. Pengembangan kapasitas nelayan kecil;
 - f. Pelaksanaan fasilitas bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan kemitraan usaha;
 - g. Penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan
4. Dinas Pertanian dan Peternakan menetapkan anggaran Rp101.014.777.456,00 dengan realisasi belanja Rp93.714.278.041,00 atau sebesar 92,77% untuk melaksanakan kegiatan:
 - a. Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian;
 - b. Perjalanan kemurnian dan kelestarian sumber daya genetik (sdg) hewan/tanaman;
 - c. Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
 - d. Pengembangan prasarana pertanian;
 - e. Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah kabupaten/kota;
 - f. Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah kabupaten/kota;
 - g. Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota.
5. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menetapkan anggaran Rp9.975.000.000,00 dengan realisasi belanja Rp3.988.898.422,00 atau sebesar 39,99% untuk melaksanakan kegiatan:
 - a. Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi, pengolahan, pemasaran, sdm serta desain dan teknologi;
 - b. Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro, melalui pelatihan;
 - c. Pembentukan Klinik UKM;
 - d. Partisipasi pada Pelaksanaan Event Promosi produk lokal (Melibatkan UMK).
6. Dinas Ketahanan Pangan menetapkan anggaran Rp5.601.973.136,00 dengan realisasi belanja Rp5.130.426.814,00 atau sebesar 91,58% untuk melaksanakan kegiatan pengadaan cadangan pangan pemerintah.
7. Dinas Pekerjaan Umum menetapkan anggaran Rp1.855.161.783.058,00 dengan realisasi belanja Rp1.852.177.777.058,00 atau sebesar 99,84% untuk melaksanakan kegiatan penyelenggaraan jalan kabupaten, pembangunan jembatan, penggantian jembatan dan rehabilitasi jembatan.



Dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menambahkan indikator kinerja tambahan terlaksananya koordinasi konvergensi penurunan stunting. Upaya percepatan penurunan prevalensi stunting dilakukan mulai dari tingkat desa hingga kabupaten. Anggaran untuk Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting yang melekat pada APBD Tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp323.074.175.757,00. Adapun kegiatan yang dilakukan untuk percepatan penurunan prevalensi stunting diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pada Dinas Kesehatan menetapkan anggaran sebesar Rp13.819.292.375,00 dengan realisasi sebesar Rp12.103.904.780,37 atau sebesar 87,59% yang terdiri dari kegiatan :
 - a. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;
 - b. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah;
 - c. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat;
 - d. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan;
 - e. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat;
 - f. Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat;
 - g. Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, advokasi, kemitraan, dan pemberdayaan Masyarakat.
2. Pada Badan Riset Daerah menetapkan anggaran sebesar Rp100.000.000,00 melalui kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan.
3. Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menetapkan anggaran sebesar Rp7.824.899.000,00 dengan realisasi sebesar Rp6.133.420.743,30 atau sebesar 78.38% yang terdiri dari kegiatan :
 - a. Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB);
 - b. Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB;
 - c. Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita);
 - d. Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita);
 - e. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) program KKBPK sesuai kearifan budaya lokal;



- f. Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja;
 - g. Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok);
 - h. Pengendalian Program KKBPK;
 - i. Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga;
 - j. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas;
 - k. Penyediaan Data dan Informasi Keluarga;
 - l. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga);
 - m. Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA));
 - n. Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)).
4. Dinas Ketahanan Pangan menetapkan anggaran Rp7.824.899.000,00 dengan realisasi belanja Rp6.133.420.743,30 atau sebesar 78,38% yang terdiri dari kegiatan :
- a. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
 - b. Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan;
 - d. Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika menetapkan anggaran Rp125.000.000,00 dengan realisasi belanja Rp116.632.500,00 atau sebesar 93,31% untuk pelaksanaan kegiatan kampanye nasional pencegahan stunting.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menetapkan anggaran Rp44.821.925.350,00 dengan realisasi belanja Rp41.526.876.922,82 atau sebesar 92,65% untuk pelaksanaan kegiatan :
- a. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga;



- b. Fasilitasi Penyediaan sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasayaraatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat;
 - c. Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
 - d. Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDes dan Lembaga Kerjasama antar Desa;
 - e. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga;
 - f. Fasilitasi pengembangan usaha Ekonomi masyarakat dan pemerintah Desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa;
 - g. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat;
 - h. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa;
 - i. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat;
 - j. Pelaksanaan Penugasan urusan / Kewenangan Kabupaten / Kota yang dilaksanakan oleh desa;
 - k. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;
 - l. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa / Kel Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat;
 - m. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa;
 - n. Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa; dan
 - o. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan.
7. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menetapkan anggaran Rp750.000.000,00 untuk pelaksanaan kegiatan :
- a. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif; dan
 - b. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.
8. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan anggaran Rp1.600.000.000,00 dengan realisasi belanja Rp234.920.000,00 atau sebesar 14,68% untuk pelaksanaan kegiatan :
- a. Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan;
 - b. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD.



9. Dinas Kelautan dan Perikanan menetapkan anggaran Rp4.245.000.000,00 dengan realisasi belanja Rp3.786.847.000,00 atau sebesar 89,21% untuk pelaksanaan kegiatan :
 - a. Pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil;
 - b. Penyediaan Data dan Informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
 - c. Peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
 - d. Pemberian fasilitasi bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.
10. Dinas Pertanian dan Peternakan menetapkan anggaran Rp1.270.855.000,00 dengan realisasi belanja Rp1.121.651.627,50 atau sebesar 88,26% untuk pelaksanaan kegiatan :
 - a. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa;
 - b. Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM);
 - c. Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan;
 - d. Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan;
 - e. Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian.
11. Dinas Pekerjaan Umum menetapkan anggaran Rp222.893.229.842,00 dengan realisasi belanja Rp214.972.887.984,92 atau sebesar 96,45% untuk pelaksanaan kegiatan :
 - a. Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan;
 - b. Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan;
 - c. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan;
 - d. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
 - e. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
 - f. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD);
 - g. Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat;
 - h. Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD);

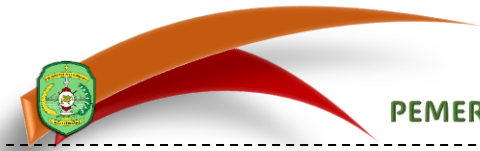


- i. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD); dan
 - j. Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja.
12. Dinas Sosial menetapkan anggaran Rp15.439.308.690,00 dengan realisasi belanja Rp14.271.338.367,94 atau sebesar 92,44% untuk pelaksanaan kegiatan:
- a. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga;
 - b. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - c. Penyediaan Permakanan Kepada Lanjut Usia Terlantar, Penyandang Disabilitas dan Anak Terlantar.

Berikut pengukuran capaian kinerja Tahun 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1.1 Capaian Kinerja Tahun 2023 dan 2024

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian		Keterangan
					2023	2024	
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1	NILAI SAKIP	Nilai	67,86	65,92	Menurun 1,94
2	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	2	Indeks Persepsi Anti Korupsi	Nilai	8,66	6,71	Menurun 1,95
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	3	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	Nilai	8,41	8,7	Meningkat 0,29
4	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan, Ketahanan Sosial dan Pelestarian Kebudayaan	4	Indeks Pendidikan	Nilai	0,688	0,688	Tetap
		5	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Nilai	53,23	57,42	Meningkat 4,19
5	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	6	Indeks Kesehatan	Nilai	0,812	0,836	Meningkat 0,024
6	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	7	Indeks Pembangunan Gender	Nilai	81,08	81,08	Angka kinerja tahun 2024 belum tersedia
7	Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat	8	Indeks Gini	Nilai	0,284	0,307	Menurun 0,023
		9	Indeks Desa Membangun	Nilai	0,776	0,797	Meningkat 0,021
8	Menurunnya pengangguran di masyarakat	10	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,05	4,11	Menurun 0,06
		11	PDRB Per Kapita	Rp	270,72	270,72	Angka kinerja tahun 2024 belum tersedia
9	Meningkatnya pengelolaan pertanian	12	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian,	%	2,91	2,91	Angka kinerja tahun 2024 belum tersedia



No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian		Keterangan
					2023	2024	
	berbasis potensi unggulan daerah		Kehutanan dan Perikanan				
10	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah	13	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata	%	3,74	6,6	Angka kinerja tahun 2024 belum tersedia
11	Berkembangnya Ekosistem Ekonomi Kreatif	14	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	%	6,96	6,8	Angka kinerja tahun 2024 belum tersedia
12	Meningkatnya daya saing investasi daerah	15	Tingkat Pertumbuhan Investasi	%	51,38	10,85	Menurun 40,53
13	Meningkatnya kualitas permukiman masyarakat dan ketersediaan air bersih	16	Cakupan Layanan Air Bersih	%	82,18	97,49	Angka kinerja tahun 2024 belum tersedia
		17	Persentase Rumah Layak Huni	%	93,49	93,49	Angka kinerja tahun 2024 belum tersedia
14	Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas wilayah	18	Indeks Aksesibilitas Wilayah	%	76,19	76,49	Angka kinerja tahun 2024 belum tersedia
15	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	19	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	72,41	73,59	Meningkat 1,18
16	Meningkatnya ketahanan bencana daerah	20	Indeks Risiko Bencana	Nilai	114,3	118,8	Menurun 4,5

Dari data pada tabel di atas secara garis besar capaian kinerja 2024 menunjukkan angka peningkatan capaian kinerja jika dibandingkan dengan tahun 2023.

Penjelasan dari capaian yang diperoleh pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang ditunjukkan oleh tabel di atas, beserta manfaat yang dirasakan oleh masyarakat diantaranya adalah:

1. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan, Ketahanan Sosial dan Pelestarian Kebudayaan” dengan indikator Indeks Pendidikan & Indeks Pembangunan Kebudayaan mencapai 98,29% dan termasuk predikat “Sangat Berhasil”. Evaluasi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan metode *desk evaluation*, dengan hasil capaian sebesar 65,92 Predikat B. Capaian ini menurun 1,94 dari capaian Tahun 2023, namun capaian ini lebih rendah 7,08 dari target kinerja RPJMD 2024 yaitu sebesar 73.
2. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah” dengan indikator Indeks Persepsi Anti Korupsi mencapai 133,231% dan termasuk predikat “Sangat Berhasil”. Untuk Hasil Indeks Persepsi Anti Korupsi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023.
3. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik” dengan indikator Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik mencapai 94,494% dan termasuk predikat “Berhasil”.

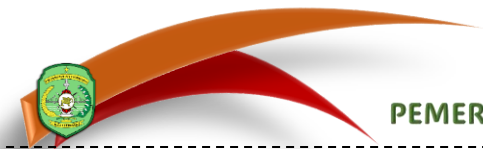


4. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan, Ketahanan Sosial dan Pelestarian Kebudayaan” dengan indikator Indeks Pendidikan & Indeks Pembangunan Kebudayaan mencapai 103,97% dan termasuk predikat “Sangat Berhasil”. Pada Tahun 2010 dalam komponen pengukuran Indeks Pembangunan Manusia, Indeks terendah dicapai oleh Indeks pengetahuan, yang hanya mencapai angka 57,79. Pada tahun 2022 Indeks pengetahuan meningkat 10,87 poin menjadi 68,66. Kendati memiliki nilai terendah, tetapi pertumbuhan Indeks pengetahuan merupakan pertumbuhan tercepat dibanding Indeks yang lain. Selama 12 tahun, Indeks pengetahuan mampu tumbuh 10,87 persen. Komitmen dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam meningkatkan Indeks Pendidikan salah satunya menjadikan Program Beasiswa Idaman dan Program 1000 guru sarjana, menjadi program dedikasi/ prioritas. Beasiswa 1000 Guru Sarjana dibagi dalam 3 kategori yaitu beasiswa guru non PNS/ Tenaga Pendidik, Beasiswa Calon Guru dan Beasiswa Pasca Sarjana (S2 dan S3), sedangkan Beasiswa Kukar Idaman dibagi dalam 7 kategori yaitu Beasiswa Berkebutuhan Khusus, Beasiswa Sekolah Menengah Atas/ Kejuruan/ Madrasah, Beasiswa Santri Pondok Pesantren, Beasiswa Stimulan (S1), Beasiswa Khusus (Yatim Piatu terdampak COVID-19) Beasiswa Santri Lanjut Perguruan Tinggi dan Beasiswa Tematik.
5. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat” dengan indikator Indeks Kesehatan mencapai 102,33% dan termasuk predikat “Sangat Berhasil”. Pada Tahun 2024 Indeks Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara mencapai 0,836, capaian ini meningkat 0,024 jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2023 angka Indeks kesehatan bisa mencapai 0,812. Setiap tahunnya Indeks Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara terus meningkat.
6. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Peran Serta Perempuan Dalam Pembangunan” dengan indikator Indeks Pembangunan Gender mencapai 100,949% dan termasuk predikat “Sangat Berhasil”. Kutai Kartanegara telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan, adanya perda ini bertujuan memberikan acuan dalam menyusun strategi pengintegrasian gender atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, mewujudkan perencanaan berperspektif gender, mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender, meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peran dan tanggung jawab, memperkuat pemberdayaan perempuan, meningkatkan dan mendorong peran aktif Lembaga non pemerintahan dan masyarakat yang menangani pembangunan gender di daerah.
7. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat dan Kualitas Hidup Masyarakat” dengan indikator Indeks Gini dan Indeks Desa Membangun mencapai 105,4% dan termasuk predikat “Sangat Berhasil”. Angka realisasi 2024 Indeks Gini atau Gini Ratio terealisasi sebesar 0,307, angka ini meningkat sebesar 0,023 poin dari Tahun



2023 sebesar 0,284. Target tahun 2024 sebesar 0,28 sehingga capaiannya adalah sebesar 109,64%.

8. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Menurunnya Pengangguran di Masyarakat” dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka mencapai 94,62% dan termasuk predikat “Berhasil”.
9. Pada tahun lalu pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Pengelolaan Pertanian Berbasis Potensi Unggulan Daerah” dengan indikator Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan mencapai 47,317% dan termasuk predikat “Kurang Berhasil”.
10. Pada tahun lalu, hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah” dengan indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata mencapai 262,950% dan termasuk predikat “Sangat Berhasil”.
11. Pada tahun lalu, hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Berkembangnya Ekosistem Kreatif” dengan indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi Kreatif mencapai 103,82% dan termasuk predikat “Sangat Berhasil”.
12. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Daya Saing Investasi Daerah” dengan indikator Tingkat Pertumbuhan Investasi mencapai 620% dan termasuk predikat “Sangat Berhasil”. Kabupaten Kutai Kartanegara di Tahun 2024 berhasil mencapai Tingkat Pertumbuhan Nilai Investasi sebesar 10,85%.
13. Pada tahun lalu, hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Permukiman Masyarakat dan Ketersediaan Air Bersih” dengan indikator Cakupan Layanan Air Bersih dan Persentase Rumah Layak Huni mencapai 96,87% dan termasuk predikat “Sangat Berhasil”.
14. Pada tahun lalu, hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Aksesibilitas dan Konektivitas Wilayah” dengan indikator Indeks Aksesibilitas Wilayah mencapai 90,62% dan termasuk predikat “Berhasil”.
15. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup” dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup mencapai 99,70% dan termasuk predikat “Sangat Berhasil”. Jika dilihat dari realisasi IKLH tahun 2024 sebesar 73,59, capaian ini lebih tinggi 1,18 dari capaian IKLH di Tahun 2023 yaitu 72,41. Nilai capaian hanya sekitar 99,70% dari target IKLH 73,59, namun tetap masuk dalam Kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup “BAIK”. dan
16. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Ketahanan Bencana Daerah” dengan indikator Indeks Risiko Bencana mencapai 86,08% dan termasuk predikat “Berhasil”. Sampai saat ini nilai Indeks Risiko Bencana hasil perhitungan dari IRBI oleh Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana BNPB. Berdasarkan Surat Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor B-06.23/BNPB/D-I/SS.01.03/01/2025 Tanggal 08 Januari 2025, Nilai Indeks Risiko Bencana Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 adalah 118,80 dan masuk ke tingkat RISIKO SEDANG. Capaian ini menurun 4,5 jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2023 yaitu sebesar 114,3.



3.2. Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Secara umum permasalahan yang masih dihadapi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024 antara lain :

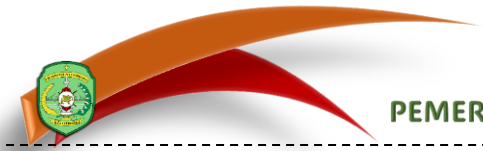
- a. Keterlambatan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
- b. Kurang optimalnya pengawalan dan evaluasi terhadap rencana pengadaan yang telah diumumkan;
- c. Pengaturan anggaran kas yang belum mengakomodir kebutuhan pelaksanaan kegiatan;
- d. Kesalahan penganggaran yang akhirnya tidak bisa membelanjakan rincian objek belanja yang dimaksud;
- e. Tambahan pagu anggaran belanja kegiatan pada APBD-P tahun 2024 tidak terlaksana dikarenakan waktu yang pendek;
- f. Keterlambatan dalam penyelesaian administrasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan;
- g. Penagihan kegiatan dilakukan pada akhir tahun anggaran, tidak per termin sesuai dengan kemajuan kegiatan;
- h. Tidak tercapainya target pendapatan transfer sehingga banyak pekerjaan yang tidak terbayarkan;
- i. Keterbatasan kapasitas dan kualitas SDM di bidang pengelolaan keuangan dan pengadaan barang/jasa;
- j. Kecenderungan SKPD menunda tagihan; dan
- k. Penyesuaian terhadap aplikasi pengelolaan keuangan terutama proses penganggaran, penatausahaan dan pelaporan.

Dalam mengatasi beberapa permasalahan yang dihadapi, serta untuk tetap menjaga konsistensi dalam pemenuhan target penerimaan yang telah ditetapkan, maka dilakukan beberapa upaya sebagai berikut:

- a. Eksekutif dan Legislatif melakukan koordinasi kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan meminta Kementerian Keuangan melalui Dirjen Perimbangan Keuangan untuk segera melakukan penyesuaian pola transfer dan hal-hal lain terhadap yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. Percepatan pembayaran kewajiban pada awal tahun 2024 terhadap pekerjaan tahun 2024 yang tidak terbayarkan;
- c. Berupaya melakukan pengadaan dini dimulai akhir bulan Agustus tahun sebelumnya setelah nota kesepakatan KUA-PPAS ditandatangani Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD;
- d. Optimalisasi pengawalan dan evaluasi terhadap rencana serta pelaksanaan pengadaan barang dan jasa agar tidak terjadi perlambatan pada prosesnya;



- e. Berupaya mengarahkan pola pembayaran tagihan pihak ketiga berdasarkan termin sesuai dengan kemajuan kegiatan;
- f. Berupaya membentuk pola pemberian *reward* dan *punishment* terhadap realisasi serapan anggaran;
- g. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola keuangan terutama saat ini harus beradaptasi dengan penggunaan aplikasi pengelolaan keuangan;
- h. Kepala Daerah mendorong Badan Pendapatan Daerah untuk melakukan diversifikasi penerimaan daerah sehingga mampu menghasilkan PAD yang bisa mengurangi ketergantungan dana transfer dari Pemerintah Pusat; dan
- i. Kepala Daerah mendorong Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk lebih korektif dalam menyusun APBD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga bisa meminimalisasi kesalahan.



BAB IV - KEBIJAKAN AKUNTANSI

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah, Kabupaten Kutai Kartanegara telah menetapkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 37 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis AkruaI.

Kebijakan Akuntansi yang dipakai dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Berbasis AkruaI didasarkan pada Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 19 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis AkruaI terdiri dari:

- a. Sistem Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
- b. Sistem Akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD); dan
- c. Bagan Akun Standar.

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis AkruaI terdiri dari:

- a. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan; dan
- b. Kebijakan Akuntansi Akun.

Implementasi kebijakan akuntansi harus dilakukan oleh Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi secara bersamaan untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan transparan serta sesuai dengan ketentuan.

4.1. Entitas Pelaporan

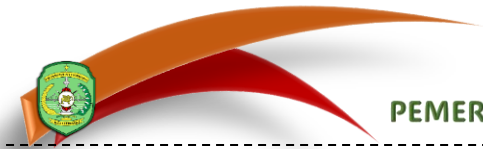
Entitas Pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih Entitas Akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan Bendahara Umum Daerah (BUD) wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara selaku Entitas Pelaporan menyusun laporan keuangan yang meliputi:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan SAL;
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Arus Kas;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan.

SKPD selaku Entitas Akuntansi menyusun laporan keuangan yang meliputi:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Neraca;



- c. Laporan Operasional;
- d. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- e. Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan dihasilkan dari sistem akuntansi. Sistem akuntansi meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dilakukan secara manual dan menggunakan aplikasi komputer. Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi menyelenggarakan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. Kepala SKPD sebagai Entitas Akuntansi menyusun laporan keuangan SKPD yang disampaikan kepada PPKD untuk digabung menjadi laporan keuangan pemerintah daerah.

4.2. Prinsip Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Terdapat delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut:

- a. basis akuntansi;
- b. prinsip nilai historis;
- c. prinsip realisasi;
- d. prinsip substansi mengungguli formalitas;
- e. prinsip periodisitas;
- f. prinsip konsistensi;
- g. prinsip pengungkapan lengkap; dan
- h. prinsip penyajian wajar.

Berikut uraian singkat delapan Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

4.2.1. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan Pendapatan-LO, Beban, Aset, Kewajiban, dan Ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.

Basis akrual untuk Laporan Operasional berarti bahwa Pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) atau oleh Entitas Pelaporan dan Beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau Entitas Pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada Laporan Operasional.



Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa Pendapatan-LRA dan Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat kas diterima di RKUD atau oleh Entitas Pelaporan; serta Belanja, Transfer dan Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari RKUD. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa Aset, Kewajiban, dan Ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan organisasi mandiri dan menjadi pusat pertanggungjawaban yang harus melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai suatu entitas pelaporan.

4.2.2. Prinsip Nilai Historis

Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Utang dicatat sebesar jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.

Penggunaan nilai historis lebih dapat diandalkan daripada nilai yang lain, karena nilai perolehan lebih objektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar Aset atau Kewajiban terkait.

4.2.3. Prinsip Realisasi

Bagi pemerintah daerah, Pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah daerah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar Utang dan Belanja dalam periode tersebut. Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka Pendapatan atau Belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.

Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching cost against revenue principle*) tidak ditekankan dalam akuntansi pemerintah daerah, sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi sektor swasta.

4.2.4. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal

Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.2.5. Prinsip Periodisitas

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama



yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan.

4.2.6. Prinsip Konsistensi

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.2.7. Prinsip Pengungkapan Lengkap

Laporan keuangan pemerintah daerah menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

4.2.8. Prinsip Penyajian Wajar

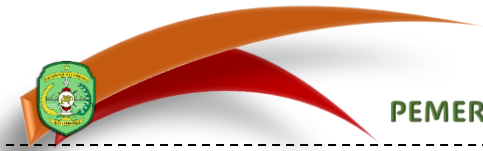
Laporan keuangan menyajikan dengan wajar LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, LPE, dan CaLK. Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan pemerintah daerah ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan Aset atau Pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja mencatat Kewajiban atau Belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024 dijelaskan lebih lanjut dalam kebijakan akuntansi sesuai Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2024. Pengukuran akun-akun pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara menggunakan mata uang rupiah.

4.3.1. Kebijakan Akuntansi Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.



a. Aset Lancar

Aset Lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi Kas dan Setara Kas, Investasi Jangka Pendek, Piutang, Beban Dibayar Dimuka dan Persediaan.

1. Kas dan Setara Kas

- a) Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah/dalam penguasaan pemerintah daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh uang yang harus dipertanggungjawabkan, saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran. Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas yaitu Investasi Jangka Pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek, yaitu 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.
- b) Kas antara lain terdiri dari:
 - 1) Kas di Kas Daerah;
 - 2) Kas di Bendahara Penerimaan;
 - 3) Kas di Bendahara Pengeluaran;
 - 4) Kas di Badan Layanan Umum Daerah;
 - 5) Kas di Bendahara Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;
 - 6) Kas di Bendahara BOS; dan
 - 7) Kas Lainnya.
- c) Setara kas terdiri dari:
 - 1) simpanan di bank dalam bentuk deposito dengan masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang; dan
 - 2) Investasi Jangka Pendek lainnya yang sangat likuid dan bebas risiko yang signifikan dengan masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang.
- d) Kas Lainnya terdiri dari:
 - 1) pendapatan yang diterima langsung oleh SKPD tanpa melalui kas daerah dan langsung digunakan oleh entitas yang menerimanya; dan
 - 2) uang yang bukan berasal dari UP/GU/TU yang pada akhir tahun masih terdapat dalam pengelolaan bendahara pengeluaran seperti uang infaq dan uang pajak yang belum disetor.

2. Investasi Jangka Pendek

Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas yang artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan berisiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan. Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas:



- a) Deposito lebih dari 3 (tiga) bulan, kurang dari 12 (dua belas) bulan dan Deposito lebih dari 3 (tiga) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*) sampai 12 bulan;
- b) Surat Utang Negara (SUN) yang jatuh tempo sampai dengan 12 bulan; dan
- c) Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

3. Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Piutang dapat terjadi karena:

- a) pungutan pendapatan daerah;
- b) perikatan;
- c) transfer antar pemerintah; dan
- d) kerugian daerah.

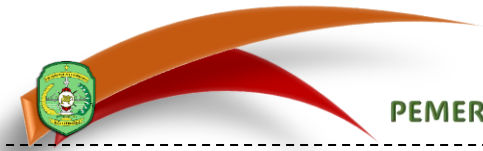
Piutang yang terjadi karena pungutan pendapatan daerah antara lain piutang pajak dan piutang pendapatan daerah selain pajak. Piutang yang terjadi karena perikatan yang meliputi pinjaman antar daerah, perikatan jual beli, perikatan kemitraan, pemberian fasilitas/jasa, dan transaksi dibayar dimuka. Piutang terjadi karena transfer antar pemerintah atas hak pemerintah daerah berupa dana transfer belum diterima oleh pemerintah daerah baik dari pemerintah yang lebih tinggi maupun antar pemerintah daerah. Piutang yang terjadi karena kerugian daerah merupakan piutang atas Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan Tuntutan Perbendaharaan (TP).

Piutang yang timbul karena ketentuan perundang-undangan seperti pajak dan retribusi daerah diakui setelah diterbitkan surat ketetapan atau saat terbitnya Surat Keputusan (SK) yang menetapkan kekurangan atas realisasi pembayaran pajak/retribusi/PAD lainnya atau surat tagihan atau koreksinya. Piutang yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, dapat diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di Neraca, apabila memenuhi kriteria:

- a) harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
- b) jumlah piutang dapat diukur;
- c) telah diterbitkan surat penagihan/sejenisnya dan/atau telah dilaksanakan penagihan; dan
- d) belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Piutang yang timbul karena transfer antar pemerintah diakui sebagai berikut:

- a) Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer;



- b) Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui jika terdapat jumlah DAU menurut Peraturan Presiden yang belum ditransfer, dan Pemerintah Pusat mengakuinya dengan menerbitkan dokumen yang sah atas hal tersebut; dan
- c) Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui bila terdapat klaim pembayaran oleh daerah yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya, tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran.

Piutang Kerugian Daerah diakui sebagai berikut:

- a) adanya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai; dan
- b) Apabila penyelesaian TP/TGR dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada Surat Ketetapan yang telah diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.

Pada prinsipnya piutang disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu sebesar nilai nominal piutang dikurangi dengan penyisihan piutang. Nilai nominal piutang yang timbul karena ketentuan perundang-undangan:

- a) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan atau surat tagihan yang diterbitkan atau koreksinya;
- b) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; dan
- c) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh Pengadilan.

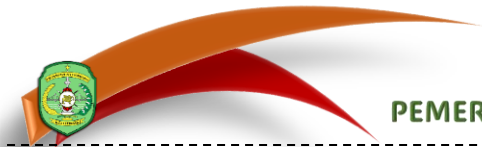
Nilai nominal piutang yang berasal dari perikatan, disajikan sebagai berikut:

- a) Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang pada akhir periode pelaporan.

- b) Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam



perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

c) Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

d) Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Nilai nominal piutang yang berasal dari transfer disajikan sebagai berikut:

- a) DBH disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
- b) DAU disajikan sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat; dan
- c) DAK disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat yang belum diterima.

Nilai Nominal piutang yang berasal dari ganti rugi disajikan sebesar nilai yang belum diselesaikan sampai dengan tanggal pelaporan.

4. Penyisihan Piutang

- a) Penyisihan piutang karena peraturan perundang-undangan seperti pajak dan retribusi diatur sebagai berikut.

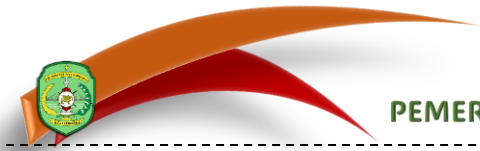
Tabel 4 . 3 . 1 Penyisihan Piutang Pajak Daerah

No.	Umur	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	0 - 1 tahun	Lancar	0%
2	Di atas 1 - 2 tahun	Lancar dengan Perhatian	10%
3	Di atas 2 - 3 tahun	Kurang Lancar	25%
4	Di atas 3 - 4 tahun	Diragukan	50%
5	Di atas 4 tahun	Macet	100%

Tabel 4 . 3 . 2 Penyisihan Piutang Retribusi Daerah

No.	Umur	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	0 - 1 tahun	Lancar	0%
2	Di atas 1 - 2 tahun	Lancar dengan Perhatian Khusus	10%
3	Di atas 2 - 3 tahun	Kurang Lancar	25%
4	Di atas 3 - 4 tahun	Diragukan	50%
5	Di atas 4 tahun	Macet	100%

- b) Penyisihan piutang yang berasal dari perikatan, pemberian pinjaman, penjualan dan pemberian fasilitas jasa, transfer antar pemerintah, karena ganti rugi, dan piutang lainnya disajikan sebagai berikut.



Tabel 4 . 3 . 3 Penyisihan Piutang Lainnya

No.	Umur	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	0 - 1 tahun	Lancar	0%
2	Di atas 1 - 2 tahun	Kurang Lancar	25%
3	Di atas 2 - 3 tahun	Diragukan	50%
4	Di atas 3 Tahun	Macet	100%

Dalam hal terdapat fakta/bukti yang menunjukkan bahwa piutang benar-benar tidak dapat ditagih, atas piutang tersebut dilakukan penyisihan 100% sesuai dengan fakta bukti yang dimaksud.

- c) Penyisihan piutang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) diatur dengan ketentuan yang mengatur tentang BLUD.
5. Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka adalah biaya – biaya yang belum merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk membayarnya pada periode bersangkutan namun sudah dibayarkan terlebih dahulu, beban dibayar dimuka diakui ketika Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi lainnya dari entitas pihak lain telah atau masih tetap terpenuhi dan nilainya dapat diukur dan diestimasi.

Beban dibayar dimuka dicatat sebesar nilai sisa yang belum dipergunakan manfaat ekonominya, beban dibayar dimuka disajikan berdasarkan sisa nilai manfaat dengan metode perhitungan harian dari nilai kontrak.

6. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan diakui:

- a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan
- b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Untuk melakukan pengukuran atas Persediaan, maka pencatatan Persediaan menjadi pertimbangan dalam melakukan pengukuran. Pengukuran nilai Persediaan dilakukan dengan menggunakan harga pembelian terakhir jika persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi.

b. Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi Jangka Panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya terdiri dari Investasi Nonpermanen



dan Investasi Permanen. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan Investasi Nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk tidak dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Sedangkan pengertian tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai Investasi Jangka Panjang apabila memenuhi salah satu kriteria:

1. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;
2. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*); dan
3. Dimaksudkan untuk dimiliki untuk jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Pengeluaran untuk memperoleh Investasi Jangka Panjang diakui sebagai Pengeluaran Pembiayaan. Investasi Jangka Panjang terdiri atas:

1. Investasi Nonpermanen

Investasi Nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi Nonpermanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya. Investasi Nonpermanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga. Investasi Nonpermanen lainnya dalam bentuk piutang dana bergulir atau dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Investasi Nonpermanen antara lain dapat berupa:

- a) Pembelian Surat Utang Negara;
 - b) Pinjaman kepada Perusahaan Negara/Daerah;
 - c) Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya;
 - d) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
 - e) Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja bergulir; dan
 - f) Investasi Nonpermanen Lainnya.
- #### 2. Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi Permanen yang dilakukan



oleh pemerintah daerah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi Jangka Panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut. Investasi Permanen terdiri dari:

- a) Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/ perusahaan daerah, lembaga keuangan negara, badan hukum milik negara, badan internasional dan badan hukum lainnya bukan milik negara; dan
- b) Investasi Permanen Lainnya.

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode, yaitu :

- a) Metode Biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

- b) Metode Ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah daerah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah daerah akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

- c) Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

c. Aset Tetap

Pengakuan Aset Tetap akan sangat andal jika Aset Tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah. Dalam hal tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara tanggal diterimanya hak kepemilikan atas Aset Tetap dan direalisasinya pembayaran dalam bentuk kas, Aset Tetap dapat diakui pada saat realisasi. Untuk dapat diakui sebagai Aset Tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:



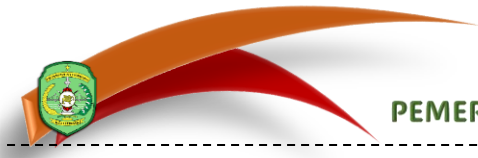
1. berwujud;
2. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
3. biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
4. tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
5. diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
6. memiliki nilai minimal sebesar batas kapitalisasi.

Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Aset Tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan suatu Aset Tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Biaya administrasi dan umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya Aset Tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan Aset Tetap atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Namun kalau biaya administrasi dan umum tersebut diatribusikan pada perolehannya maka merupakan bagian dari perolehan Aset Tetap. Atribusi biaya umum dan administrasi yang terkait langsung pengadaan Aset Tetap konstruksi maupun Non konstruksi yang sejenis dalam hal pengadaan lebih dari satu aset dapat dilakukan secara proporsional dengan nilai aset, atau dengan membagi secara proporsional dengan jumlah aset yang diadakan, atau dengan membebankan kepada aset tertentu yang paling material.

Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (*Capitalization Threshold*) Perolehan Awal Aset Tetap merupakan Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak. Nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap atas perolehan Aset Tetap adalah nilai per unitnya sebagai berikut :

Tabel 4 . 3 . 4 Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi

Kode Rekening	Uraian	Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi (Rp)
1.3.1	Tanah	1,00
1.3.2	Peralatan Dan Mesin, Terdiri Atas :	
1.3.2.01	Alat Besar	1.000.000,00
1.3.2.02	Alat Angkutan	1.000.000,00
1.3.2.03	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	1.000.000,00
1.3.2.04	Alat Pertanian	1.000.000,00
1.3.2.05	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	1.000.000,00
1.3.2.06	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	1.000.000,00
1.3.2.07	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	1.000.000,00
1.3.2.08	Alat Laboratorium	1.000.000,00
1.3.2.09	Alat Persenjataan	1.000.000,00
1.3.2.10	Komputer	1.000.000,00
1.3.2.11	Alat Eksplorasi	1.000.000,00
1.3.2.12	Alat Pengeboran	1.000.000,00
1.3.2.13	Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian	1.000.000,00
1.3.2.14	Alat Bantu Eksplorasi	1.000.000,00



Kode Rekening	Uraian	Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi (Rp)
1.3.2.15	Alat Keselamatan Kerja	1.000.000,00
1.3.2.16	Alat Peraga	1.000.000,00
1.3.2.17	Peralatan Proses/Produksi	1.000.000,00
1.3.2.18	Rambu – Rambu	20.000.000,00
1.3.2.19	Peralatan Olahraga	100.000,00
1.3.3	Gedung Dan Bangunan, Terdiri Atas :	
1.3.3.01	Bangunan Gedung	20.000.000,00
1.3.3.02	Monumen	20.000.000,00
1.3.3.03	Bangunan Menara	20.000.000,00
1.3.3.04	Tugu Titik Kontrol/Pasti	20.000.000,00
1.3.4	Jalan, Irigasi Dan Jaringan, Terdiri Atas :	
1.3.4.01	Jalan dan Jembatan	1,00
1.3.4.02	Bangunan Air	1,00
1.3.4.03	Instalasi	1,00
1.3.4.04	Jaringan	1,00
1.3.5	Aset Tetap Lainnya, Terdiri Atas :	
1.3.5.01	Bahan Perpustakaan	100.000,00
1.3.5.02	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	100.000,00
1.3.5.03	Hewan	100.000,00
1.3.5.04	Biota Perairan	100.000,00
1.3.5.05	Tanaman	100.000,00
1.3.5.06	Barang Koleksi Non Budaya	100.000,00
1.3.5.07	Aset Tetap Dalam Renovasi	20.000.000,00
1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1,00

Aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari satu tahun yang digunakan untuk pemerintah daerah atau masyarakat umum dan tidak dimaksudkan untuk dijual dengan nilai pengadaan per unitnya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap atau lebih, diklasifikasikan sebagai Aset Tetap dan dianggarkan dalam Belanja Modal. Aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari satu tahun yang digunakan untuk pemerintah daerah atau masyarakat umum dengan nilai pengadaan per unitnya di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi dicatat secara ekstrakomptabel dan dianggarkan dalam belanja barang/jasa.

Aset Tetap disajikan dengan diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Aset Tetap terdiri dari:

1. Tanah

Tanah yang dikelompokkan dalam Aset Tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap digunakan. Dalam akun Tanah termasuk tanah yang digunakan untuk Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan. Tidak seperti institusi nonpemerintah, pemerintah daerah tidak dibatasi satu periode tertentu untuk kepemilikan dan/atau penguasaan tanah yang dapat dibentuk hak pakai, hak pengelolaan, dan hak atas tanah lainnya yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, setelah perolehan awal tanah, pemerintah daerah tidak memerlukan biaya untuk mempertahankan hak atas tanah tersebut. Tanah memenuhi definisi Aset Tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada kebijakan ini.



2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup antara lain: alat besar, alat angkutan, alat bengkel, alat ukur, alat pertanian, alat kantor, alat rumah tangga, alat studio, alat komunikasi, alat pemancar, alat kedokteran, alat kesehatan, alat laboratorium, alat persenjataan, komputer, alat eksplorasi, alat pemboran, alat produksi, pengolahan, pemurnian, alat bantu eksplorasi, alat keselamatan kerja, alat peraga, unit peralatan proses produksi, rambu-rambu, dan peralatan olahraga yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan serta dalam kondisi siap digunakan.

3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dalam kondisi siap digunakan. Gedung dan Bangunan di Neraca meliputi antara lain bangunan gedung, monumen, bangunan menara, dan tugu titik kontrol/pasti.

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi, dan Jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi yang siap digunakan. Jalan, Irigasi, dan Jaringan di Neraca antara lain meliputi jalan dan jembatan; bangunan air, instalasi, dan jaringan. Akun ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan Jalan, Irigasi, dan Jaringan. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam akun Tanah.

5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya mencakup Aset Tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Aset Tetap di atas yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset yang termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah bahan perpustakaan, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga, hewan, biota perairan, tanaman, barang koleksi Non budaya, dan Aset Tetap Renovasi. Aset Tetap Renovasi yaitu biaya renovasi atas Aset Tetap yang bukan milik Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Biaya renovasi atas Aset Tetap Renovasi yang bukan milik Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang dimaksud bila memenuhi kriteria:

- a) Renovasi Aset Tetap tersebut meningkatkan manfaat ekonomi dan sosial Aset Tetap misalnya perubahan fungsi gedung dari gudang menjadi ruang kerja dan kapasitasnya naik, maka renovasi tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap Renovasi. Apabila renovasi atas Aset Tetap yang disewa tidak menambah manfaat ekonomi, maka dianggap sebagai Beban Operasional.
- b) Apabila manfaat ekonomi renovasi tersebut lebih dari satu tahun buku, dan memenuhi kriteria di atas, biaya renovasi dikapitalisasi sebagai Aset Tetap Renovasi, sedangkan apabila manfaat ekonomik



renovasi kurang dari 1 tahun buku, maka pengeluaran tersebut diperlakukan sebagai Beban Operasional tahun berjalan.

- c) Jumlah biaya moneter biaya renovasi tersebut material dan memenuhi syarat butir a dan b di atas, maka pengeluaran tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap Renovasi. Apabila tidak material, biaya renovasi dianggap sebagai Beban Operasional.
- d) Biaya renovasi tersebut dianggap material jika pengeluaran atas renovasi tersebut di atas Rp20.000.000,00.

6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup Aset Tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal Neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.

Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:

- a) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- b) Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
- c) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Beberapa hal terkait pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:

- a) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut Tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
- b) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
- c) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
- d) Uang muka kerja yang diberikan; dan
- e) Retensi.

Aset Tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi Aset Tetap dan harus disajikan di pos Aset Lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai Aset Tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Jika Aset Tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh. Biaya perolehan dari masing-masing Aset Tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan

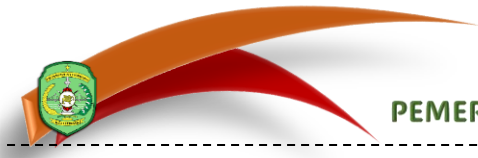


mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu Aset Tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan (dikapitalisasi).

Kapitalisasi Aset Tetap ditetapkan dalam kebijakan akuntansi ini berupa suatu batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu untuk dapat digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran dikapitalisasi atau tidak. Selain Belanja Modal untuk perolehan Aset Tetap dan Aset Lainnya, belanja untuk pengeluaran-pengeluaran sesudah perolehan Aset Tetap atau Aset Lainnya dapat juga dimasukkan sebagai Belanja Modal yang menambah Aset Tetap. Pengeluaran tersebut dapat dikategorikan sebagai Belanja Modal yang menambah Aset Tetap jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

1. Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:
 - a) meningkatnya kapasitas / volume, adalah bertambahnya kemampuan / jumlah / ukuran Aset Tetap yang sudah ada; dan/atau
 - b) meningkatnya efisiensi, adalah meningkatnya output dari Aset Tetap yang sudah ada; dan/atau
 - c) meningkatnya mutu produksi, adalah bertambahnya kualitas dari produk yang dihasilkan oleh Aset Tetap; dan/atau
 - d) penambahan fungsi, adalah bertambahnya fungsi yang dapat dilakukan oleh Aset Tetap; dan/atau
 - e) meningkatnya standar kinerja, adalah meningkatnya jumlah atau kualitas standar kinerja Aset Tetap.
2. Barang Milik Daerah/Aset Tetap semula tersebut tidak dalam proses penghapusan;
3. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/Aset Tetap tersebut material/melebihi atau sama dengan batas minimal kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana ketentuan batasan minimal kapitalisasi Aset Tetap yang dijelaskan di Kebijakan Akuntansi Aset Tetap; dan
4. Aset Tetap yang mengalami overhaul/renovasi/perbaikan yang sifatnya dapat dikapitalisasi, masa manfaat aset bertambah sesuai dengan tabel berikut:



Tabel 4 . 3 . 5 Aset Tetap yang Mengalami Overhaul/Renovasi/Perbaikan yang Sifatnya Dapat Dikapitalisasi

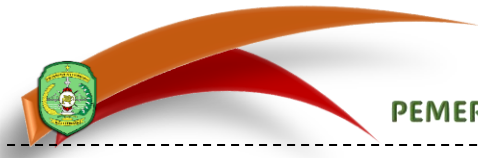
Uraian	Masa Manfaat	Jenis	Persentase dari Nilai Perolehan	Penambahan Masa Manfaat
Peralatan Dan Mesin				
Alat Besar Darat	10	Overhaul	0% - 30%	1
		Overhaul	>30% - 45%	3
		Overhaul	>45% - 65%	5
Alat Besar Apung	8	Overhaul	0% - 30%	1
		Overhaul	>30% - 45%	2
		Overhaul	>45% - 65%	4
Alat Bantu	7	Overhaul	0% - 30%	1
		Overhaul	>30% - 45%	2
		Overhaul	>45% - 65%	4
Alat Angkutan Darat Bermotor	7	Overhaul	0% - 25%	1
		Overhaul	>25% - 50%	2
		Overhaul	>50% - 75%	3
		Overhaul	>75% - 100%	4
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2	Renovasi	0% - 25%	0
		Renovasi	>25% - 50%	1
		Renovasi	>50% - 75%	1
		Renovasi	>75% - 100%	1
Alat Angkutan Apung Bermotor	10	Overhaul	0% - 25%	2
		Overhaul	>25% - 50%	3
		Overhaul	>50% - 75%	4
		Overhaul	>75% - 100%	6
Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	3	Renovasi	0% - 25%	1
		Renovasi	>25% - 50%	1
		Renovasi	>50% - 75%	1
		Renovasi	>75% - 100%	2
Alat Angkutan Bermotor Udara	20	Overhaul	0% - 25%	3
		Overhaul	>25% - 50%	6
		Overhaul	>50% - 75%	9
		Overhaul	>75% - 100%	12
Alat Bengkel Bermesin	10	Overhaul	0% - 25%	1
		Overhaul	>25% - 50%	2
		Overhaul	>50% - 75%	3
		Overhaul	>75% - 100%	4
Alat Bengkel Tak Bermesin	5	Renovasi	0% - 25%	0
		Renovasi	>25% - 50%	0
		Renovasi	>50% - 75%	1
		Renovasi	>75% - 100%	1
Alat Ukur	5	Overhaul	0% - 25%	1
		Overhaul	>25% - 50%	2
		Overhaul	>50% - 75%	2
		Overhaul	>75% - 100%	3
Alat Pengolahan	4	Overhaul	0% - 20%	1
		Overhaul	>21% - 40%	2
		Overhaul	>51% - 75%	5
Alat Kantor	5	Overhaul	0% - 25%	0
		Overhaul	>25% - 50%	1
		Overhaul	>50% - 75%	2
Alat Rumah Tangga	5	Overhaul	>75% - 100%	3
		Overhaul	0% - 25%	1
		Overhaul	>25% - 50%	2
		Overhaul	>50% - 75%	2
	5	Renovasi	0% - 25%	1



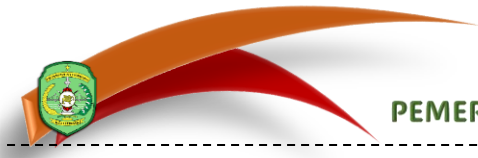
Uraian	Masa Manfaat	Jenis	Persentase dari Nilai Perolehan	Penambahan Masa Manfaat
Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat		Renovasi	>25% - 50%	2
		Renovasi	>50% - 75%	2
		Renovasi	>75% - 100%	3
Alat Studio	5	Overhaul	0% - 25%	1
		Overhaul	>25% - 50%	2
		Overhaul	>50% - 75%	2
Alat Komunikasi	5	Overhaul	>75% - 100%	3
		Overhaul	0% - 25%	1
		Overhaul	>25% - 50%	1
Peralatan Pemancar	10	Overhaul	>50% - 75%	2
		Overhaul	>75% - 100%	3
		Overhaul	0% - 25%	2
Peralatan Komunikasi Navigasi	5	Overhaul	>25% - 50%	3
		Overhaul	>50% - 75%	4
		Overhaul	>75% - 100%	5
Alat Kedokteran	5	Overhaul	0% - 25%	0
		Overhaul	>25% - 50%	1
		Overhaul	>50% - 75%	2
Alat Kesehatan Umum	5	Overhaul	>75% - 100%	3
		Overhaul	0% - 25%	0
		Overhaul	>25% - 50%	1
Unit Alat Laboratorium	5	Overhaul	>50% - 75%	2
		Overhaul	>75% - 100%	3
		Overhaul	0% - 25%	2
Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15	Overhaul	>25% - 50%	3
		Overhaul	>50% - 75%	4
		Overhaul	>75% - 100%	4
Alat Peraga Praktek Sekolah	10	Overhaul	0% - 25%	3
		Overhaul	>25% - 50%	5
		Overhaul	>50% - 75%	7
Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	15	Overhaul	>75% - 100%	8
		Overhaul	0% - 25%	3
		Overhaul	>25% - 50%	5
Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	10	Overhaul	>50% - 75%	7
		Overhaul	>75% - 100%	8
		Overhaul	0% - 25%	3
Radiation Application And Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	10	Overhaul	>25% - 50%	5
		Overhaul	>50% - 75%	7
		Overhaul	>75% - 100%	8
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7	Overhaul	0% - 25%	1
		Overhaul	>25% - 50%	2
		Overhaul	>50% - 75%	3
		Overhaul	>75% - 100%	4



Uraian	Masa Manfaat	Jenis	Persentase dari Nilai Perolehan	Penambahan Masa Manfaat
Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	15	Overhaul	0% - 25%	3
		Overhaul	>25% - 50%	5
		Overhaul	>50% - 75%	7
		Overhaul	>75% - 100%	8
Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi	8	Overhaul	0% - 25%	1
		Overhaul	>25% - 50%	2
		Overhaul	>50% - 75%	3
		Overhaul	>75% - 100%	4
Senjata Api	10	Overhaul	0% - 25%	1
		Overhaul	>25% - 50%	2
		Overhaul	>50% - 75%	3
		Overhaul	>75% - 100%	4
Persenjataan Non Senjata Api	5	Overhaul	0% - 25%	0
		Overhaul	>25% - 50%	0
		Overhaul	>50% - 75%	1
		Overhaul	>75% - 100%	1
Senjata Sinar	5	Overhaul	0% - 25%	0
		Overhaul	>25% - 50%	0
		Overhaul	>50% - 75%	0
		Overhaul	>75% - 100%	2
Alat Khusus Kepolisian	5	Overhaul	0% - 25%	0
		Overhaul	>25% - 50%	0
		Overhaul	>50% - 75%	0
		Overhaul	>75% - 100%	2
Komputer Unit	4	Overhaul	0% - 25%	1
		Overhaul	>25% - 50%	1
		Overhaul	>50% - 75%	2
		Overhaul	>75% - 100%	2
Peralatan Komputer	4	Overhaul	0% - 25%	1
		Overhaul	>25% - 50%	1
		Overhaul	>50% - 75%	2
		Overhaul	>75% - 100%	2
Alat Eksplorasi Topografi	5	Overhaul	0% - 25%	0
		Overhaul	>25% - 50%	1
		Overhaul	>50% - 75%	2
		Overhaul	>75% - 100%	3
Alat Eksplorasi Geofisika	5	Overhaul	0% - 25%	0
		Overhaul	>25% - 50%	1
		Overhaul	>50% - 75%	2
		Overhaul	>75% - 100%	3
Alat Pengeboran Mesin	5	Overhaul	0% - 25%	0
		Overhaul	>25% - 50%	1
		Overhaul	>50% - 75%	2
		Overhaul	>75% - 100%	3
Alat Pengeboran Non Mesin	5	Overhaul	0% - 25%	0
		Overhaul	>25% - 50%	1
		Overhaul	>50% - 75%	2
		Overhaul	>75% - 100%	3
Sumur	5	Overhaul	0% - 25%	0
		Overhaul	>25% - 50%	1
		Overhaul	>50% - 75%	2
		Overhaul	>75% - 100%	3
Produksi	5	Overhaul	0% - 25%	0
		Overhaul	>25% - 50%	1
		Overhaul	>50% - 75%	2
		Overhaul	>75% - 100%	3



Uraian	Masa Manfaat	Jenis	Persentase dari Nilai Perolehan	Penambahan Masa Manfaat
Pengolahan Dan Pemurnian	5	Overhaul	0% - 25%	0
		Overhaul	>25% - 50%	1
		Overhaul	>50% - 75%	2
		Overhaul	>75% - 100%	3
Alat Bantu Eksplorasi	5	Overhaul	0% - 25%	0
		Overhaul	>25% - 50%	1
		Overhaul	>50% - 75%	2
		Overhaul	>75% - 100%	3
Alat Bantu Produksi	5	Overhaul	0% - 25%	0
		Overhaul	>25% - 50%	1
		Overhaul	>50% - 75%	2
		Overhaul	>75% - 100%	3
Alat Deteksi	5	Overhaul	0% - 25%	0
		Overhaul	>25% - 50%	1
		Overhaul	>50% - 75%	2
		Overhaul	>75% - 100%	3
Alat Pelindung	5	Overhaul	0% - 25%	0
		Overhaul	>25% - 50%	1
		Overhaul	>50% - 75%	2
		Overhaul	>75% - 100%	3
Alat Sar	5	Overhaul	0% - 25%	0
		Overhaul	>25% - 50%	1
		Overhaul	>50% - 75%	2
		Overhaul	>75% - 100%	3
Alat Kerja Penerbangan	5	Overhaul	0% - 25%	0
		Overhaul	>25% - 50%	1
		Overhaul	>50% - 75%	2
		Overhaul	>75% - 100%	3
Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan	5	Overhaul	0% - 25%	0
		Overhaul	>25% - 50%	1
		Overhaul	>50% - 75%	2
		Overhaul	>75% - 100%	3
Unit Peralatan Proses/Produksi	5	Overhaul	0% - 25%	0
		Overhaul	>25% - 50%	1
		Overhaul	>50% - 75%	2
		Overhaul	>75% - 100%	3
Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	10	Overhaul	0% - 25%	1
		Overhaul	>25% - 50%	2
		Overhaul	>50% - 75%	3
		Overhaul	>75% - 100%	4
Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	10	Overhaul	0% - 25%	1
		Overhaul	>25% - 50%	2
		Overhaul	>50% - 75%	3
		Overhaul	>75% - 100%	4
Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	10	Overhaul	0% - 25%	1
		Overhaul	>25% - 50%	2
		Overhaul	>50% - 75%	3
		Overhaul	>75% - 100%	4
Peralatan Olahraga	3	Overhaul	0% - 50%	1
		Overhaul	>50% - 100%	2
Gedung Dan Bangunan				
Bangunan Gedung Tempat Kerja	50	Renovasi / Rehabilitasi	0% - 30%	5
		Renovasi / Rehabilitasi	>30% - 45%	10



Uraian	Masa Manfaat	Jenis	Persentase dari Nilai Perolehan	Penambahan Masa Manfaat
		Renovasi / Rehabilitasi	>45% - 65%	15
		Renovasi / Rehabilitasi	>65% - 100%	50
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50	Renovasi / Rehabilitasi	0% - 30%	5
		Renovasi / Rehabilitasi	>30% - 45%	10
		Renovasi / Rehabilitasi	>45% - 65%	15
Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	50	Renovasi / Rehabilitasi	0% - 30%	5
		Renovasi / Rehabilitasi	>30% - 45%	10
		Renovasi / Rehabilitasi	>45% - 65%	15
Bangunan Menara Perambuan	40	Renovasi / Rehabilitasi	0% - 30%	5
		Renovasi / Rehabilitasi	>30% - 45%	10
		Renovasi / Rehabilitasi	>45% - 65%	15
Tugu/Tanda Batas	50	Renovasi / Rehabilitasi	0% - 30%	5
		Renovasi / Rehabilitasi	>30% - 45%	10
		Renovasi / Rehabilitasi	>45% - 65%	15
Jalan, Irigasi Dan Jaringan				
Jalan	10	Renovasi / Rehabilitasi	0% - 30%	2
		Renovasi / Rehabilitasi	>30% - 60%	5
		Renovasi / Rehabilitasi	>60% - 100%	10
Jembatan	50	Renovasi / Rehabilitasi	0% - 30%	5
		Renovasi / Rehabilitasi	>30% - 45%	10
		Renovasi / Rehabilitasi	>45% - 65%	15
Bangunan Air Irigasi	50	Renovasi / Rehabilitasi	0% - 5%	2
		Renovasi / Rehabilitasi	>5% - 10%	5
		Renovasi / Rehabilitasi	>10% - 20%	10
Bangunan Pengairan Pasang Surut	50	Renovasi / Rehabilitasi	0% - 5%	2
		Renovasi / Rehabilitasi	>5% - 10%	5
		Renovasi / Rehabilitasi	>10% - 20%	10
Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder	25	Renovasi / Rehabilitasi	0% - 5%	1
		Renovasi / Rehabilitasi	>5% - 10%	3

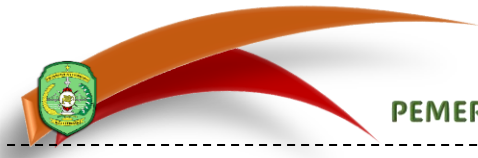


Uraian	Masa Manfaat	Jenis	Persentase dari Nilai Perolehan	Penambahan Masa Manfaat
		Renovasi / Rehabilitasi	>10% - 20%	5
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	10	Renovasi / Rehabilitasi	0% - 5%	1
		Renovasi / Rehabilitasi	>5% - 10%	2
		Renovasi / Rehabilitasi	>10% - 20%	3
		Renovasi / Rehabilitasi	>10% - 20%	3
Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah	30	Renovasi / Rehabilitasi	0% - 5%	1
		Renovasi / Rehabilitasi	>5% - 10%	2
		Renovasi / Rehabilitasi	>10% - 20%	3
Bangunan Air Bersih/Air Baku	40	Renovasi / Rehabilitasi	0% - 30%	5
		Renovasi / Rehabilitasi	>30% - 45%	10
		Renovasi / Rehabilitasi	>45% - 65%	15
Bangunan Air Kotor	40	Renovasi / Rehabilitasi	0% - 30%	5
		Renovasi / Rehabilitasi	>30% - 45%	10
		Renovasi / Rehabilitasi	>45% - 65%	15
Instalasi Air Bersih / Air Baku	30	Renovasi / Rehabilitasi	0% - 30%	2
		Renovasi / Rehabilitasi	>30% - 45%	7
		Renovasi / Rehabilitasi	>45% - 65%	10
Instalasi Air Kotor	30	Renovasi / Rehabilitasi	0% - 30%	2
		Renovasi / Rehabilitasi	>30% - 45%	7
		Renovasi / Rehabilitasi	>45% - 65%	10
Instalasi Pengolahan Sampah	10	Renovasi / Rehabilitasi	0% - 30%	1
		Renovasi / Rehabilitasi	>30% - 45%	3
		Renovasi / Rehabilitasi	>45% - 65%	5
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10	Renovasi / Rehabilitasi	0% - 30%	1
		Renovasi / Rehabilitasi	>30% - 45%	3
		Renovasi / Rehabilitasi	>45% - 65%	5
Instalasi Pembangkit Listrik	40	Renovasi / Rehabilitasi	0% - 30%	5
		Renovasi / Rehabilitasi	>30% - 45%	10
		Renovasi / Rehabilitasi	>45% - 65%	15
Instalasi Gardu Listrik	40	Renovasi / Rehabilitasi	0% - 30%	5



Uraian	Masa Manfaat	Jenis	Persentase dari Nilai Perolehan	Penambahan Masa Manfaat
		Renovasi / Rehabilitasi	>30% - 45%	10
		Renovasi / Rehabilitasi	>45% - 65%	15
Instalasi Pertahanan	30	Renovasi / Rehabilitasi	0% - 30%	1
		Renovasi / Rehabilitasi	>30% - 45%	3
		Renovasi / Rehabilitasi	>45% - 65%	5
Instalasi Gas	30	Renovasi / Rehabilitasi	0% - 30%	5
		Renovasi / Rehabilitasi	>30% - 45%	10
		Renovasi / Rehabilitasi	>45% - 65%	15
Instalasi Pengaman	20	Renovasi / Rehabilitasi	0% - 30%	1
		Renovasi / Rehabilitasi	>30% - 45%	1
		Renovasi / Rehabilitasi	>45% - 65%	3
Instalasi Lain	20	Renovasi / Rehabilitasi	0% - 30%	1
		Renovasi / Rehabilitasi	>30% - 45%	1
		Renovasi / Rehabilitasi	>45% - 65%	3
Jaringan Air Minum	30	Renovasi / Rehabilitasi	0% - 30%	2
		Renovasi / Rehabilitasi	>30% - 45%	7
		Renovasi / Rehabilitasi	>45% - 65%	10
Jaringan Listrik	40	Renovasi / Rehabilitasi	0% - 30%	5
		Renovasi / Rehabilitasi	>30% - 45%	10
		Renovasi / Rehabilitasi	>45% - 65%	15
Jaringan Telepon	20	Renovasi / Rehabilitasi	0% - 30%	2
		Renovasi / Rehabilitasi	>30% - 45%	5
		Renovasi / Rehabilitasi	>45% - 65%	10
Jaringan Gas	30	Renovasi / Rehabilitasi	0% - 30%	2
		Renovasi / Rehabilitasi	>30% - 45%	7
		Renovasi / Rehabilitasi	>45% - 65%	10

Penambahan masa manfaat dan nilai ekonomis karena overhaul/renovasi/perbaikan yang sifatnya dapat dikapitalisasi, maksimal sesuai dengan masa manfaat ekonomi Aset Tetap awal.

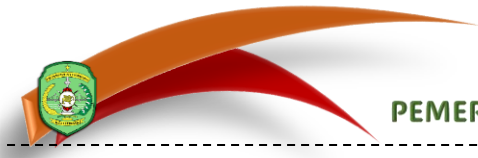


Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomik dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan Aset Tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu Aset Tetap.

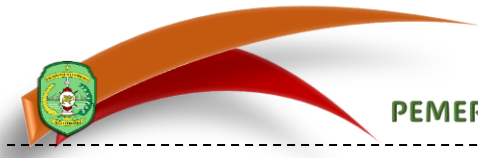
Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan Aset Tetap tersebut dikurangi Akumulasi Penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka Aset Tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun Aset Tetap. Metode Penyusutan Aset Tetap yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) yang dihitung secara bulanan sejak bulan perolehan dan dibukukan per tahun. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai Beban Penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai Aset Tetap. Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok Aset Tetap adalah sebagai berikut.

Tabel 4 . 3 . 6 Masa Manfaat Aset Tetap

Kodefikasi	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1.3	Aset Tetap	
1.3.2	Peralatan Dan Mesin	
1.3.2.1.01	Alat Besar Darat	10
1.3.2.1.02	Alat Besar Apung	8
1.3.2.1.03	Alat Bantu	7
1.3.2.2.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1.3.2.2.02	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2
1.3.2.2.03	Alat Angkutan Apung Bermotor	10
1.3.2.2.04	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	3
1.3.2.2.05	Alat Angkutan Bermotor Udara	20
1.3.2.3.01	Alat Bengkel Bermesin	10
1.3.2.3.02	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1.3.2.3.03	Alat Ukur	5
1.3.2.4.01	Alat Pengolahan	4
1.3.2.5.01	Alat Kantor	5
1.3.2.5.02	Alat Rumah Tangga	5
1.3.2.5.03	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1.3.2.6.01	Alat Studio	5
1.3.2.6.02	Alat Komunikasi	5
1.3.2.6.03	Peralatan Pemancar	10
1.3.2.6.04	Peralatan Komunikasi Navigasi	5
1.3.2.7.01	Alat Kedokteran	5
1.3.2.7.02	Alat Kesehatan Umum	5
1.3.2.8.01	Unit Alat Laboratorium	5
1.3.2.8.02	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1.3.2.8.03	Alat Peraga Praktek Sekolah	10
1.3.2.8.04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	15
1.3.2.8.05	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	10
1.3.2.8.06	<i>Radiation Application And Non Destructive Testing Laboratory Lainnya</i>	10
1.3.2.8.07	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1.3.2.8.08	Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica</i>	15



Kodefikasi	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1.3.2.8.09	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi	8
1.3.2.9.01	Senjata Api	10
1.3.2.9.02	Persenjataan Non Senjata Api	5
1.3.2.9.03	Senjata Sinar	5
1.3.2.9.04	Alat Khusus Kepolisian	5
1.3.2.10.01	Komputer Unit	4
1.3.2.10.02	Peralatan Komputer	4
1.3.2.11.01	Alat Eksplorasi Topografi	5
1.3.2.11.02	Alat Eksplorasi Geofisika	5
1.3.2.12.01	Alat Pengeboran Mesin	5
1.3.2.12.02	Alat Pengeboran Non Mesin	5
1.3.2.13.01	Sumur	5
1.3.2.13.02	Produksi	5
1.3.2.13.03	Pengolahan Dan Pemurnian	5
1.3.2.14.01	Alat Bantu Eksplorasi	5
1.3.2.14.02	Alat Bantu Produksi	5
1.3.2.15.01	Alat Deteksi	5
1.3.2.15.02	Alat Pelindung	5
1.3.2.15.03	Alat Sar	5
1.3.2.15.04	Alat Kerja Penerbangan	5
1.3.2.16.01	Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan	5
1.3.2.17.01	Unit Peralatan Proses/Produksi	5
1.3.2.18.01	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	10
1.3.2.18.02	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	10
1.3.2.18.03	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	10
1.3.2.19.01	Peralatan Olahraga	3
1.3.3	Gedung Dan Bangunan	
1.3.3.1.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1.3.3.1.02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1.3.3.2.01	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	50
1.3.3.3.01	Bangunan Menara Perambuan	40
1.3.3.4.01	Tugu/Tanda Batas	50
1.3.4	Jalan, Irigasi Dan Jaringan	
1.3.4.1.01	Jalan	10
1.3.4.1.02	Jembatan	50
1.3.4.2.01	Bangunan Air Irigasi	50
1.3.4.2.02	Bangunan Pengairan Pasang Surut	50
1.3.4.2.03	Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder	25
1.3.4.2.04	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	10
1.3.4.2.05	Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah	30
1.3.4.2.06	Bangunan Air Bersih/Air Baku	40
1.3.4.2.07	Bangunan Air Kotor	40
1.3.4.3.01	Instalasi Air Bersih / Air Baku	30
1.3.4.3.02	Instalasi Air Kotor	30
1.3.4.3.03	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1.3.4.3.04	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1.3.4.3.05	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1.3.4.3.06	Instalasi Gardu Listrik	40
1.3.4.3.07	Instalasi Pertahanan	30
1.3.4.3.08	Instalasi Gas	30
1.3.4.3.09	Instalasi Pengaman	20
1.3.4.3.10	Instalasi Lain	20
1.3.4.4.01	Jaringan Air Minum	30
1.3.4.4.02	Jaringan Listrik	40
1.3.4.4.03	Jaringan Telepon	20



Kodefikasi	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1.3.4.4.04	Jaringan Gas	30
1.3.5.02.01.002	Alat Musik Modern/Band	4
1.3.5.7.01	Aset Tetap Renovasi	Masa Kerjasama Atau Masa Umur Ekonomis, Mana Yang Lebih Pendek

Penyusutan Barang Milik Daerah tidak dilakukan terhadap Aset Tetap Tanah, Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan, Aset Tetap Lainnya (hewan, tanaman, buku perpustakaan), Aset Tetap dalam renovasi berupa Tanah dalam renovasi, Aset Tetap dalam renovasi yang tidak menambah Masa Manfaat, Aset Tetap dalam kondisi rusak berat/usang, Aset Tetap Tanah yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah, Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan Aset Tetap yang dimanfaatkan pihak lain. Untuk penyusutan Aset Tetap Renovasi ditetapkan masa manfaat Aset Tetap Renovasi pada pinjam pakai atau perjanjian sewa lain ditetapkan selama 5 tahun atau dilakukan sesuai dengan umur ekonomi mana yang lebih pendek antara masa manfaat dengan masa pinjaman/sewa. Masa manfaat Aset Tetap Renovasi jalan ditetapkan selama 10 tahun.

d. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, dan Dana Cadangan. Aset Lainnya terdiri dari :

- 1) Tagihan Piutang Penjualan Angsuran

Tagihan Penjualan Angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah. Contoh Tagihan Penjualan Angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.
- 2) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang terjadi pada pemerintah daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang terjadi pada pemerintah daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.



3) Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa:

- a) Bangun, Kelola, Serah (BKS); dan
- b) Bangun, Serah, Kelola (BSK).

4) Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud adalah Aset Tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh Aset Tidak Berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset Tidak Berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah.

Aset Tidak Berwujud diamortisasi secara garis lurus selama 5 tahun kecuali Aset Tidak Berwujud dalam pengerjaan, seluruh Aset Tidak Berwujud diamortisasi dengan metode garis lurus tanpa nilai sisa, berdasarkan masa manfaatnya yang dihitung secara bulanan sejak bulan perolehan Aset Tidak Berwujud tersebut. Dalam hal informasi tentang masa manfaat Aset Tidak Berwujud tidak diperoleh, maka masa manfaat Aset Tidak Berwujud ditetapkan selama 5 (lima) tahun.

5) Aset Lain-lain

Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat Aset Lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Contoh dari Aset Lain-lain adalah Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah karena hilang atau rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum dihapuskan, atau Aset Tetap yang dipinjam pakai kepada unit pemerintah yang lain, atau aset yang telah diserahkan ke pihak lain tetapi belum ada dokumen hibah atau serah terima atau dokumen sejenisnya.

Aset Lain-lain yang berasal dari reklasifikasi Aset Tetap karena rusak berat dihentikan penyusutannya. Aset Lain-lain yang berasal dari reklasifikasi Aset Tetap karena hilang/dalam penelusuran tetap disusutkan. Aset Lain-lain yang berasal dari reklasifikasi Aset Tetap karena dipinjampakaikan atau dikerjasamakan tetap dilakukan penyusutan.

e. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.



Dalam Neraca pemerintah daerah, Kewajiban disajikan berdasarkan likuiditasnya dan terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu:

- 1) Kewajiban Jangka Pendek; dan
- 2) Kewajiban Jangka Panjang.

Untuk meningkatkan kegunaan analisis, informasi-informasi yang harus disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah :

- 1) Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
- 2) Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
- 3) Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
- 4) Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh 8 tempo;
- 5) Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
 - a) Pengurangan pinjaman;
 - b) Modifikasi persyaratan utang;
 - c) Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
 - d) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
 - e) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
 - f) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
- 6) Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
- 7) Biaya pinjaman:
 - a) Perlakuan biaya pinjaman; dan
 - b) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan

f. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir Ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah/dikurang oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

4.3.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan RKUD yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan LRA terdiri dari:

- a. Pendapatan Pajak Asli Daerah – LRA;
- b. Pendapatan Transfer – LRA; dan



c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LRA.

Pengakuan Pendapatan-LRA ditentukan oleh BUD sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh RKUD sebagai salah satu tempat penampungannya. Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4.3.3. Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari RKUD yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga. Belanja ditentukan oleh BUD sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata saat dikeluarkannya kas dari RKUD. Belanja diakui pada saat:

- a. Kas untuk belanja yang bersangkutan telah dikeluarkan dari RKUD;
- b. Kas atas belanja yang bersangkutan telah dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran dan telah disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan;
- c. Kas yang digunakan langsung oleh satker/SKPD dan tanpa penyetoran pendapatan ke RKUD terlebih dahulu, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD; dan
- d. Kas yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.

Belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

4.3.4. Kebijakan Akuntansi Transfer

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Pengakuan Transfer sama dengan pengakuan Belanja, hanya secara klasifikasi dan tujuan dari Transfer itu yang berbeda dengan Belanja. Transfer dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

4.3.5. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan terdiri dari:

- a. Penerimaan pembiayaan, dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.



Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada RKUD. Penerimaan Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari transaksi. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran RKUD antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari RKUD. Pengeluaran Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal transaksi. Pengeluaran Pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto.

4.3.6. Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LO

Pendapatan–LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah Ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan–LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Lain-lain Pendapatan yang Sah, Pendapatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Pendapatan–LO dapat diakui:

- a. Pada saat timbulnya hak atas pendapatan; dan
- b. Pada saat pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan–LO dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan beban).

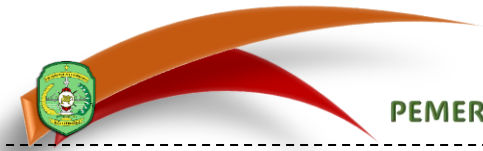
4.3.7. Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban Hibah adalah beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Beban Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Subsidi adalah beban pemerintah yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat.



Beban dapat diakui pada saat:

- a. timbulnya kewajiban;
- b. terjadinya konsumsi aset; dan
- c. terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Beban diukur sesuai dengan realisasi pengeluaran atau konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban, atau penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa pada periode tahun berkenaan. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.

4.3.8. Kebijakan Akuntansi Koreksi

Kesalahan adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Koreksi diakui saat ditemukannya kesalahan. Koreksi diukur sesuai dengan nilai kesalahan yang ditemukan.

4.3.9. Kebijakan Akuntansi Kebijakan Akuntansi Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan

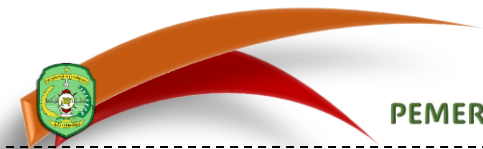
Pemerintah daerah menyesuaikan jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan karena adanya peristiwa penyesuaian setelah tanggal pelaporan. Untuk menentukan suatu peristiwa memenuhi definisi peristiwa setelah tanggal pelaporan, perlu dilakukan identifikasi tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit.

Tanggal pelaporan adalah tanggal terakhir dari periode pelaporan keuangan tersebut. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit adalah tanggal saat audit laporan keuangan telah selesai yang dinyatakan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan auditor atau tanggal saat pemerintah menyatakan bertanggung jawab atas laporan keuangan, apabila laporan keuangan tersebut tidak diaudit.

Proses yang terjadi di antara penyusunan laporan keuangan dan otorisasi penerbitan laporan keuangan dapat berbeda tergantung pada sifat organisasi, struktur organisasi, ketentuan yang wajib diikuti oleh pemerintah daerah serta prosedur yang ditetapkan dalam proses penyusunan dan penyelesaian laporan keuangan.

Dalam periode antara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, pemerintah daerah mungkin mengumumkan kebijakan yang dapat berdampak pada penyajian/pengungkapan pos-pos dalam laporan keuangan. Sejauh mana peristiwa akibat kebijakan pemerintah daerah berdampak pada penyesuaian laporan keuangan tergantung pada

- a. apakah kejadian/peristiwa tersebut memberikan informasi yang cukup tentang kondisi terkini pada tanggal pelaporan; dan
- b. apakah terdapat bukti yang cukup memadai dapat diperoleh atau dapat dipenuhi.



4.3.10. Kebijakan Akuntansi Proverti Investasi

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

- a. digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
- b. dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Dalam hal pemerintah daerah memiliki aset yang digunakan sebagian untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai dan sebagian lain digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah, penentuan klasifikasi asetnya sebagai berikut :

- a. apabila masing-masing bagian aset tersebut dapat dijual terpisah, pemerintah daerah mempertanggungjawabkannya secara terpisah; dan
- b. apabila masing-masing bagian aset tersebut tidak dapat dijual secara terpisah, maka aset tersebut dikatakan sebagai properti investasi hanya jika bagian yang tidak signifikan (kurang dari atau sama dengan 20% aset tetap) digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah.

Suatu aset diakui sebagai properti investasi jika dan hanya jika:

- a. besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke pemerintah daerah di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
- b. biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.

Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan. Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.

Kewajiban kontraktual untuk membeli, mengembangkan properti investasi atau pemeliharaan atau peningkatan, membangun atau untuk perbaikan, properti investasi yang disewa oleh entitas pemerintah lain.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam SAP Pemerintah Daerah

Untuk mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual di lingkungan pemerintah daerah maka ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan yaitu Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 mengatur Standar Akuntansi Pemerintah berdasarkan basis kas dan berdasarkan basis kas menuju akrual. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengatur Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan basis akrual. Sedangkan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan SAP berbasis akrual pada Pemerintah Daerah.

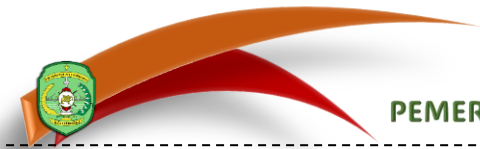


Kebijakan akuntansi pemerintah daerah menjadi dasar pijakan dalam penyusunan laporan keuangan. Kebijakan ini berisi prinsip-prinsip, ataupun aturan yang lebih spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan keuangan. Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur dasar perihal pengakuan, metode pengukuran, serta prosedur pengungkapan akuntansi aktiva, hutang, modal, pendapatan, belanja, maupun pembiayaan serta tampilan dalam laporan keuangan. Laporan keuangan bermanfaat bagi para pengguna karena mengandung informasi yang dibutuhkan sesuai dengan kepentingan masing-masing pengguna. Para pengguna laporan keuangan memerlukan informasi mengenai kebijakan akuntansi yang digunakan untuk melakukan evaluasi ataupun untuk keperluan lainnya. Tanpa mengetahui kebijakan akuntansi yang digunakan, pengguna laporan keuangan tidak mungkin mampu membuat evaluasi secara akurat dan jelas. Kebijakan akuntansi daerah ditetapkan melalui peraturan kepala daerah dengan mengacu kepada SAP. Kebijakan akuntansi Kabupaten Kutai Kartanegara diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) merupakan suatu instrumen untuk mengoperasionalkan prinsip-prinsip akuntansi yang telah ditetapkan dalam SAP dan kebijakan akuntansi. SAPD menunjukkan rangkaian proses akuntansi yang terdiri dari proses identifikasi transaksi keuangan, menjurnal ke dalam buku jurnal, memposting ke buku besar, menyusun neraca saldo, menyusun kertas kerja konsolidasian, dan diakhiri dengan penyusunan laporan keuangan. SAPD adalah instrumen penting yang perlu dipersiapkan dalam upaya pelaksanaan SAP yang berbasis akrual. SAPD juga merupakan alat yang dapat mendukung prinsip-prinsip dasar yang sesuai dengan SAP. Adapun penjelasan setiap tahapan dapat dijelaskan dengan bagan alur ataupun dengan mendeskripsikan masing-masing peran. Hal yang terpenting bahwa SAPD sebagai pedoman bisa dimengerti dan diaplikasikan oleh para bagian masing-masing. SAPD terdiri dari:

- a. Sistem Akuntansi SKPKD mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi, penyusunan laporan keuangan SKPKD serta penyusunan penyusunan laporan keuangan konsolidasian pemerintah daerah; dan
- b. Sistem Akuntansi SKPD mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian, koreksi dan penyusunan laporan keuangan SKPD.

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara diatur dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 37 Tahun 2014.



BAB V - PENJELASAN POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Penjelasan Pos – Pos Laporan Realisasi Anggaran

APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2023 tanggal 22 Desember 2023, dan Penjabaran APBD ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2023 tanggal 22 Desember 2023. Perubahan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2024 tanggal 21 Oktober Tahun 2024 dan Penjabaran Perubahan APBD ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2024 tanggal 21 Oktober 2024.

5.1.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah merupakan sumber pendanaan bagi pemerintah, demikian pula bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Pendapatan dapat berasal dari potensi daerah yang bersangkutan maupun dari provinsi dan pusat. Pendapatan dibagi menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer (Dana Perimbangan), dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Tabel 5 . 1 . 1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
Pendapatan Asli Daerah	732.901.415.061,00	787.600.170.609,48	107,46	651.136.413.747,50	136.463.756.861,98
Pendapatan Transfer	13.329.124.531.547,00	11.833.613.810.196,70	88,78	7.123.560.923.471,09	4.710.052.886.725,64
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	250.000.000.000,00	80.932.955.307,69	32,37	12.526.485.142,00	68.406.470.165,69
Jumlah	14.312.025.946.608,00	12.702.146.936.113,90	88,75	7.787.223.822.360,59	4.914.923.113.753,31

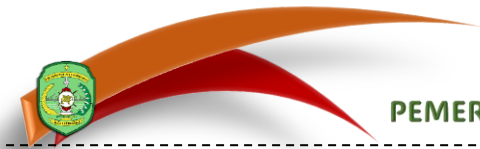
Berdasarkan dari tabel 5.1.1 menunjukkan bahwa anggaran pendapatan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara TA 2024 terealisasi sebesar Rp12.702.146.936.113,90 atau 88,75% dari target pendapatan yang direncanakan sebesar Rp14.312.025.946.608,00. Dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp7.787.223.822.360,59 maka realisasi Pendapatan Daerah TA 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp4.914.923.113.753,31 atau sebesar 63,11%. Realisasi masing-masing kelompok Pendapatan Daerah dapat diuraikan sebagai berikut.

5.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Realisasi Pendapatan Asli Daerah periode TA 2024 dan 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 . 1 . 2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
Pendapatan Pajak Daerah	160.000.000.000,00	165.870.568.096,40	103,67	141.989.017.504,00	23.881.550.592,40
Pendapatan Retribusi Daerah	7.542.820.000,00	5.879.733.796,00	77,95	6.282.211.585,00	-402.477.789,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	32.000.000.000,00	88.383.259.737,59	276,20	63.147.803.556,59	25.235.456.181,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	533.358.595.061,00	527.466.608.979,49	98,90	439.717.381.101,91	87.749.227.877,58
Jumlah	732.901.415.061,00	787.600.170.609,48	107,46	651.136.413.747,50	136.463.756.861,98



Pendapatan Asli Daerah TA 2024 ditargetkan sebesar Rp732.901.415.061,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp787.600.170.609,48 atau 107,46%, jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2023 sebesar Rp651.136.413.747,50 maka realisasi TA 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp136.463.756.861,98 atau sebesar 20,96%. Penjelasan rinci pos Pendapatan Asli Daerah diuraikan sebagai berikut.

5.1.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah merupakan pendapatan yang bersumber dari kontribusi wajib pajak kepada daerah, yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah guna kemakmuran rakyat. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara memungut pajak daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berlaku sejak tanggal 4 Januari 2024. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara selaku instansi pemungut dan pengelola pajak daerah selalu melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi dengan mengacu pada tarif yang diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

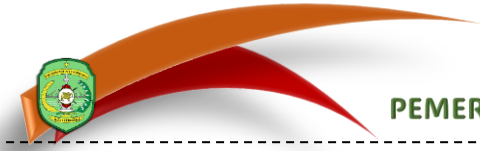
Dampak regulasi baru pada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu Perda Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, antara lain :

- 1) Pajak Parkir mengalami perubahan tarif dari 25% menjadi 10%.
2) Penurunan tarif Pajak Sarang Burung Walet semula sebesar 10% menjadi 5%, namun penerimaan daerah tetap mengalami penurunan;
3) Tarif Pajak Hiburan atas jasa hiburan pada diskotik, karaoke, klub malam, bar dan mandi uap/gas ditetapkan sebesar 40% yang semula 25%. Hal tersebut sempat menjadi polemik bagi pelaku usaha hiburan dan pada kenyataannya realisasi Pajak Hiburan mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya sebesar 23,04%;
4) Nilai Jual Tanah Kena Pajak BPHTB mengalami perubahan nilai dari Rp60.000.000,00 menjadi Rp80.000.000,00 namun penerimaan pajak daerah tetap mengalami penurunan.

Pendapatan Pajak Daerah - LRA TA 2024 ditargetkan sebesar Rp160.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp165.870.568.096,40 atau 103,67%. Dibandingkan dengan realisasi Pendapatan TA 2023 sebesar Rp141.989.017.504,00 Pendapatan Pajak Daerah untuk TA 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp23.881.550.592,40 atau 16,82%. Rincian realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2024 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 5. 1 .3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah

Table with 6 columns: Uraian, Anggaran 2024 (Rp), Realisasi 2024 (Rp), %, Realisasi 2023 (Rp), Kenaikan/ (Penurunan) (Rp). Rows include Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, and Pajak Sarang Burung Walet.

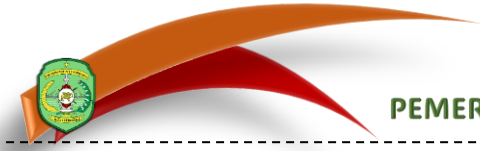


Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.225.000.000,00	2.545.756.837,00	114,42	1.329.792.110,00	1.215.964.727,00
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	9.000.000.000,00	7.579.088.118,00	84,21	8.339.952.905,00	-760.864.787,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	22.000.000.000,00	6.597.231.984,00	29,99	13.466.782.510,00	-6.869.550.526,00
Jumlah	160.000.000.000,00	165.870.568.096,40	103,67	141.989.017.504,00	23.881.550.592,40

Pajak Hotel TA 2024 sebesar Rp1.637.830.894,00 mengalami peningkatan sebesar Rp261.188.583,00 atau 18,97% dari jumlah pada TA 2023 sebesar Rp1.376.642.311,00. Peningkatan realisasi pajak hotel ini dikarenakan nilai Pelaporan SPTPD/Nota Perhitungan pajak hotel Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp335.812.838,00 atau 17,70% yang tadinya nilai keseluruhan Pelaporan SPTPD/Nota Perhitungan pajak hotel Tahun 2023 sebesar Rp1.897.488.823,00 sedangkan untuk Tahun 2024 nilai keseluruhan Pelaporan SPTPD/Nota Perhitungan pajak hotel sebesar Rp1.561.675.985,00. Peningkatan realisasi Pajak Hotel ini dikarenakan beberapa faktor yaitu: (1) adanya pertumbuhan Wajib Pajak aktif sebesar 5%; (2) penerbitan surat teguran untuk Wajib Pajak mencapai angka 698 Surat Teguran; (3) tingkat kepatuhan Wajib Pajak sebesar 73%; (4) adanya validitas data pajak sebesar 74%; (5) pemutakhiran sejumlah 3 data pajak; dan (6) penyelesaian piutang sebesar Rp.76.154.909,00.

Realisasi pendapatan Pajak Restoran TA 2024 sebesar Rp53.083.192.488,40 mengalami kenaikan sebesar Rp6.087.035.830,40 atau 12,95% dari jumlah pada TA 2023 sebesar Rp46.996.156.658,00. Dari sisi nilai Pelaporan SPTPD/Nota Perhitungan, pajak restoran Tahun 2024 sebesar Rp45.322.831.498,40 jika dibandingkan dengan nilai Pelaporan SPTPD/Nota Perhitungan pajak restoran Tahun 2023 sebesar Rp53.229.871.723,14 mengalami penurunan sebesar Rp7.907.040.224,74 atau 14,85%. Peningkatan realisasi Pajak Restoran ini dikarenakan beberapa faktor yaitu: (1) adanya pertumbuhan Wajib Pajak aktif sebesar 3%; (2) penerbitan surat teguran untuk Wajib Pajak mencapai angka 4.872 Surat Teguran; (3) tingkat kepatuhan Wajib Pajak sebesar 45%; (4) adanya validitas data pajak sebesar 45%; (5) pemutakhiran sejumlah 207 data pajak; dan (6) penyelesaian piutang sebesar Rp7.760.360.990,00.

Pajak Hiburan TA 2024 sebesar Rp544.304.064,00 mengalami penurunan sebesar Rp162.957.201,00 atau 9,88% dari jumlah pada TA 2023 sebesar Rp643.689.253,00 sedangkan dari sisi nilai Pelaporan SPTPD/Nota Perhitungan pajak hiburan mengalami penurunan sebesar Rp119.438.401,00 atau 18,07%. Nilai Pelaporan SPTPD/Nota Perhitungan Tahun 2023 sebesar Rp660.823.165,00 dan Tahun 2024 sebesar Rp541.384.764,00. Penurunan realisasi Pajak Hiburan ini dikarenakan beberapa faktor yaitu: (1) menurunnya jumlah Wajib Pajak aktif sebesar 12%; (2) penerbitan surat teguran untuk Wajib Pajak ada di angka 503 Surat Teguran; (3) tingkat kepatuhan Wajib Pajak sebesar 53%; (4) adanya validitas data pajak sebesar 53%; (5) pemutakhiran sejumlah 26 data pajak; (6) penyelesaian piutang sebesar Rp2.919.300,00.



Pajak Reklame TA 2024 sebesar Rp2.658.759.041,00 mengalami kenaikan Rp272.434.029,00, atau 11,42% dari realisasi Tahun 2023 sebesar Rp2.386.325.012,00. Peningkatan realisasi Pajak Reklame ini dikarenakan beberapa hal yaitu: (1) adanya penurunan Wajib Pajak aktif sebesar 20%; (2) penerbitan surat teguran untuk Wajib Pajak di angka 20.232 Surat Teguran; (3) tingkat kepatuhan Wajib Pajak sebesar 8%; (4) adanya validitas data pajak sebesar 8%; (5) pemutakhiran sejumlah 794 data pajak; dan (6) penyelesaian piutang sebesar Rp45.220.475,00.

Pajak Penerangan Jalan TA 2024 sebesar Rp88.208.928.874,00 mengalami kenaikan sebesar Rp23.984.826.580,00 atau 37,35% dari jumlah pada TA 2023 sebesar Rp64.224.102.294,00. Peningkatan realisasi ini disebabkan oleh penambahan jumlah pelanggan PLN di lingkup masyarakat dan komersial yang ditunjukkan oleh jumlah realisasi Pajak dari pemungutan PLN sejumlah Rp85.172.977.339,00.

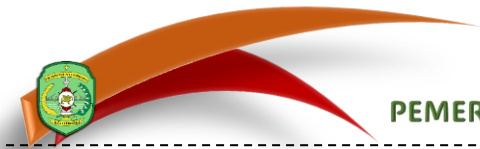
Pajak Parkir Tahun 2024 sebesar Rp265.418.635,00 mengalami kenaikan sebesar Rp52.275.635,00 atau 24,53% dari realisasi Tahun 2023 sebesar Rp213.143.000,00. Peningkatan realisasi Pajak Parkir ini dikarenakan beberapa faktor yaitu: (1) adanya peningkatan Wajib Pajak aktif sebesar 13%; (2) penerbitan surat teguran untuk Wajib Pajak di angka 121 Surat Teguran; (3) tingkat kepatuhan Wajib Pajak sebesar 71%; (4) adanya validitas data pajak sebesar 71%; (5) pemutakhiran sejumlah 1 data pajak; dan (6) penyelesaian piutang sebesar Rp9.197.500,00.

Pajak Air Tanah TA 2024 sebesar Rp2.681.687.161,00 mengalami penurunan sebesar Rp163.322.278,00 atau 5,74% dari realisasi Tahun 2023 Rp2.845.009.439,00. Penurunan realisasi Pajak Air Tanah ini dikarenakan adanya beberapa faktor yaitu: tidak adanya penambahan jumlah Wajib Pajak; (2) penerbitan surat teguran untuk Wajib Pajak di angka 279 Surat Teguran; (3) tingkat kepatuhan Wajib Pajak sebesar 76%; (4) adanya validitas data pajak sebesar 76%; (5) pemutakhiran sejumlah 2 data pajak; dan (6) penyelesaian piutang sebesar Rp128.492.858,72.

Pajak Sarang Burung Walet TA 2024 sebesar Rp68.370.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp35.480.000,00 atau 34,16% dari realisasi Tahun 2023 sebesar Rp103.850.000,00. Penurunan realisasi Pajak Sarang Burung Walet tersebut dikarenakan beberapa faktor yaitu: (1) tidak adanya penambahan jumlah Wajib Pajak; (2) penerbitan surat teguran untuk Wajib Pajak di angka 1.239 Surat Teguran; (3) tingkat kepatuhan Wajib Pajak hanya sebesar 3%; (4) validitas data pajak sebesar 3%; (5) pemutakhiran sejumlah 1 data pajak; dan (6) tidak adanya penyelesaian piutang pajak.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan TA 2024 sebesar Rp2.545.756.837,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.215.964.727,00 atau 91,44% dari realisasi Tahun 2023 sebesar Rp1.329.792.110,00. Peningkatan realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ini dikarenakan beberapa faktor yaitu: (1) adanya peningkatan Wajib Pajak aktif sebesar 1%; (2) penerbitan surat teguran untuk Wajib Pajak di angka 520 Surat Teguran; (3) tingkat kepatuhan Wajib Pajak sebesar 26%; (4) adanya validitas data pajak sebesar 26%; (5) pemutakhiran sejumlah 8 data pajak;

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada TA 2024 sebesar Rp7.579.088.118,00 mengalami Penurunan sebesar Rp760.864.787,00 atau 9,12% dari jumlah pada TA 2023 sebesar Rp8.339.952.905,00. Penurunan



realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ini dikarenakan beberapa faktor yaitu: (1) tingkat kepatuhan wajib pajak ada diangka 23%; (2) terdapat piutang pajak sebesar Rp80.634.536.087,00, banyaknya nilai piutang menjadi salah satu penyebab wajib pajak enggan membayar PBB-P2; (3) Sosialisasi terkait pembayaran PBB-P2 dan kebijakan layanan *online* yang masih kurang optimal.

Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) TA 2024 sebesar Rp6.597.231.984,00 yaitu mengalami penurunan sebesar Rp6.869.550.526,00 dengan persentase 51,01% dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp13.466.782.510,00. Dikarenakan fokus pada wajib pajak yang memiliki nilai BPHTB besar, seperti perolehan/perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) dan pada tahun 2024 terdapat potensi BPHTB yang besar, yang gagal bayar dari perpanjangan HGU.

Secara umum tingginya pertumbuhan pajak daerah TA 2024 dan realisasi yang melampaui target disebabkan karena, meningkatnya kepatuhan WP, meningkatnya penyelesaian piutang pajak daerah, meningkatnya validitas data WP dan meningkatnya tata kelola pemungutan pajak daerah.

5.1.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Pemungutan dan Pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Perhubungan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Perkebunan, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, sebagai unit penghasil.

Retribusi pada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pendapatan Retribusi Daerah TA 2024 ditargetkan sebesar Rp7.542.820.000,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp5.879.733.796,00 atau 77,95%. Dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2023 sebesar Rp6.282.211.585,00 maka Pendapatan Retribusi Daerah TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp402.477.789,00 atau 6,41%. Rincian realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2024 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 5 . 1 .4 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Retribusi Daerah

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
Retribusi Jasa Umum	2.232.545.732,00	118.995.900,00	5,33	1.757.969.485,00	-1.638.973.585,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	500.000.000,00	52.400.000,00	10,48	102.725.000,00	-50.325.000,00



Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	822.545.732,00	54.765.000,00	6,66	53.800.000,00	965.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar	0,00	0,00		825.398.685,00	-825.398.685,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	645.000.000,00	4.968.400,00	0,77	430.377.800,00	-425.409.400,00
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	30.000.000,00	0,00	0,00	41.100.000,00	-41.100.000,00
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	60.000.000,00	6.862.500,00	11,44	81.125.000,00	-74.262.500,00
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	175.000.000,00	0,00	0,00	223.443.000,00	-223.443.000,00
Retribusi Jasa Usaha	3.310.274.268,00	3.633.198.002,00	109,76	2.006.832.800,00	1.626.365.202,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	150.000.000,00	54.755.542,00	36,50	84.525.000,00	-29.769.458,00
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	700.000.000,00	569.688.458,00	81,38	0,00	569.688.458,00
Retribusi Terminal	15.000.000,00	21.465.000,00	143,10	18.315.000,00	3.150.000,00
Retribusi Tempat Khusus Parkir	25.000.000,00	258.670.000,00	1.034,68	166.012.000,00	92.658.000,00
Retribusi Rumah Potong Hewan	150.000.000,00	35.100.000,00	23,40	40.275.000,00	-5.175.000,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	527.454.268,00	319.649.000,00	60,60	296.074.800,00	23.574.200,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.000.000.000,00	1.692.704.000,00	169,27	1.376.651.000,00	316.053.000,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	742.820.000,00	681.166.002,00	91,70	24.980.000,00	656.186.002,00
Retribusi Perizinan Tertentu	2.000.000.000,00	2.127.539.894,00	106,38	2.517.409.300,00	-389.869.406,00
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0,00	0,00		3.904.200,00	-3.904.200,00
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.500.000.000,00	2.127.539.894,00	141,84	2.513.505.100,00	-385.965.206,00
Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	7.542.820.000,00	5.879.733.796,00	77,95	6.282.211.585,00	-402.477.789,00

Retribusi di TA 2024 yang mengalami penurunan pendapatan dibanding TA 2023 antara lain Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.

Secara umum penurunan pendapatan retribusi daerah disebabkan karena beberapa jenis retribusi daerah ditiadakan sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta belum optimalnya pengelolaan retribusi daerah baik dari sisi perencanaan tata kelola dan pengawasan.

5.1.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah pendapatan yang diterima dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berupa PAD dari pembagian laba atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pada perusahaan daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Realisasi TA 2024 dapat dirinci pada tabel berikut.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024



Tabel 5 . 1 .5 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	32.000.000.000,00	88.383.259.737,59	276,20	63.147.803.556,59	25.235.456.181,00
Jumlah	32.000.000.000,00	88.383.259.737,59	276,20	63.147.803.556,59	25.235.456.181,00

Pada tabel di atas diketahui bahwa Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2024 ditargetkan sebesar Rp32.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp88.383.259.737,59 atau 276,20%. Dibandingkan dengan realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tahun 2023 sebesar Rp63.147.803.556,59 maka pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mengalami peningkatan sebesar Rp25.235.456.181,00 atau 39,96%.

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2024 sebesar Rp88.383.259.737,59 dan TA 2023 sebesar Rp63.147.803.556,59 dapat dirinci pada tabel berikut :

Tabel 5 . 1 .6 Realisasi Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD

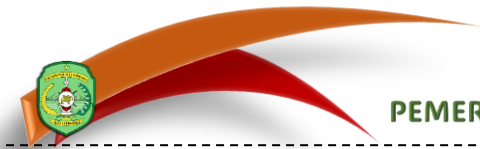
Uraian	Realisasi 2024 Tahun Buku 2023 (Rp)	Realisasi 2023 Tahun Buku 2022 dan 2021 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
PT. BPD Kaltimara	24.045.324.774,59	22.721.316.372,59	1.324.008.402,00
PT. BPR Ingetad Bangun Utama	193.685.205,00	171.114.727,00	22.570.478,00
PT. Mahakam Gerbang Raja Migas	63.551.996.071,00	39.994.963.760,00	23.557.032.311,00
PT. Tunggang Parangan	381.800.000,00	260.408.697,00	121.391.303,00
PT. Kukar Sejahtera Dambaan Etam	210.453.687,00	0,00	210.453.687,00
Jumlah	88.383.259.737,59	63.147.803.556,59	25.235.456.181,00

5.1.1.1.4. Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang Sah merupakan salah satu unsur pendapatan dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah untuk periode TA 2024 dan 2023 dapat dirinci pada tabel berikut.

Tabel 5 . 1 .7 Anggaran dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	200.000.000,00	926.732.590,00	463,37	804.467.805,00	122.264.785,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	16.331.809.021,98	2.027.418.888,00	12,41	1.228.574.407,00	798.844.481,00
Jasa Giro	18.000.000.000,00	29.050.269.306,63	161,39	70.419.488.793,59	-41.369.219.486,96



Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
Pendapatan Bunga	0,00	107.573.854.686,00	100,00	8.614.181.725,00	98.959.672.961,00
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0,00	11.950.000,00	0,00	0,00	11.950.000,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	729.614.753,20	645.544.230,90	88,48	262.259.177,00	383.285.053,90
Pendapatan Denda Pajak Daerah	732.375.603,00	534.724.577,00	73,01	447.254.146,32	87.470.430,68
Pendapatan dari Pengembalian	20.087.133.891,82	27.301.698.354,61	135,92	19.178.335.445,09	8.123.362.909,52
Pendapatan BLUD	477.277.661.791,00	359.394.416.346,35	75,30	308.963.317.416,40	50.431.098.929,95
Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	0,00	0,00	0,00	29.799.502.186,51	-29.799.502.186,51
Jumlah	533.358.595.061,00	527.466.608.979,49	98,90	439.717.381.101,91	87.749.227.877,58

Pada tabel di atas menggambarkan bahwa Lain-lain PAD yang Sah TA 2024 ditargetkan sebesar Rp533.358.595.061,00 dengan realisasi sebesar Rp527.466.608.979,49 atau 98,90%. Dibandingkan dengan realisasi pendapatan Lain-lain PAD yang sah tahun 2023 sebesar Rp439.717.381.101,91 maka pendapatan Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2024 mengalami peningkatan realisasi sebesar Rp87.749.227.877,58 atau 19,96%.

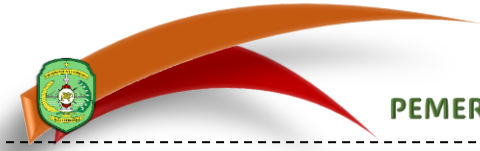
Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah TA 2024 mengalami kenaikan yang signifikan adalah dari Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah Remunerasi Dana Bagi Hasil *Treasury Deposit Facility* (TDF) sebesar Rp98.959.672.961,00.

5.1.1.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer merupakan pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Perbandingan antara rencana dengan realisasi yang telah dicapai dari masing-masing komponen Pendapatan Transfer tahun 2024 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 5.1.8 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	12.274.362.955.547,00	10.956.863.224.127,70	89,27	6.038.157.860.094,09	4.918.705.364.033,61
Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	229.896.073.000,00	229.896.073.000,00	100,00	219.907.187.000,00	9.988.886.000,00
Transfer Pemerintah Provinsi	824.865.503.000,00	646.854.513.069,00	78,42	865.495.876.377,00	-218.641.363.308,00
Jumlah	13.329.124.531.547,00	11.833.613.810.196,70	88,78	7.123.560.923.471,09	4.710.052.886.725,61

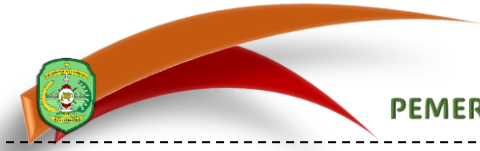


Pendapatan Transfer TA 2024 ditargetkan sebesar Rp13.329.124.531.547,00 dengan realisasi sebesar Rp11.833.613.810.196,70 atau 88,78%. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer tahun 2023 sebesar Rp7.123.560.923.471,09 maka realisasi tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp4.710.052.886.725,61 atau 66,12%.

Peningkatan pendapatan transfer kurang salur yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159 Tahun 2023 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Tahun 2023 dan Keputusan Menteri Keuangan nomor 38/KM.7/2023 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2023 yang oleh pemerintah pusat dilakukan secara tunai sebesar Rp20.000,00 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159 Tahun 2023 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Tahun 2023, Dalam bentuk Non Tunai atau *Treasury Deposit Facility (TDF)* yang dicairkan pada Tahun 2024 Tahap 1 sebesar Rp178.386.416.310,00 disalurkan ke RKUD tanggal 25 Maret 2024, Tahap 2 sebesar Rp361.621.093.859,00 disalurkan ke RKUD tanggal 27 Maret 2024, Tahap 3 sebesar Rp1.692.269.236.915,00 disalurkan ke RKUD tanggal 3 Juni 2024, Tahap 4 sebesar Rp179.277.031.695,00 disalurkan ke RKUD tanggal 12 Juni 2024 dan Tahap 5 sebesar Rp1.512.992.185.221,00 disalurkan ke RKUD tanggal 1 November 2024 sehingga Total pencairan TDF sebesar Rp3.924.545.964.000,00. Sedangkan untuk Bagi Hasil Pajak Provinsi Kalimantan Timur dilakukan Penyesuaian Bagi Hasil Pajak Provinsi Kalimantan Timur Kepada Kab/Kota dengan rincian Anggaran Murni APBD 2024 sebesar Rp744.600.543.000,00 dikurang dengan penyesuaian anggaran P – APBD 2024 sebesar Rp242.038.000,00, penyesuaian Pajak Rokok sebesar Rp1.135.265.551,00 dan ditambahkan kurang salur P-APBD 2024 sebesar Rp22.583.270.000,00 sehingga total penyesuaian bagi hasil pajak provinsi sebesar Rp765.806.509.449,00 dengan realisasi dari periode Januari sampai dengan November Tahun 2024 sebesar Rp588.414.513.069. Sesuai Keputusan Gubernur Kalimantan Timur dan Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Timur tentang Perubahan APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024 nomor 100.3.3.1/0419-V/BPKAD tentang Penetapan kurang Salur Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah provinsi kepada Kabupaten/kota se Kalimantan Timur oleh pemerintah Provinsi untuk Pemerintah Kabupaten sebesar Rp89.935.597.000,00

5.1.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan TA 2024 ditargetkan sebesar Rp12.274.362.955.547,00 dengan realisasi sebesar Rp10.956.779.923.465,30 atau 89,27%. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan tahun 2023 sebesar Rp6.038.157.860.094,09 maka realisasi tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp4.918.622.063.371,19 atau 81,46%.



Tabel 5 . 1 .9 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

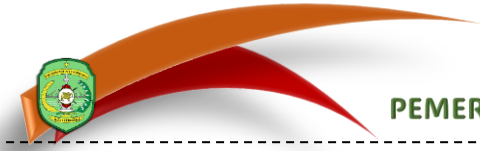
Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	11.092.859.540.547,00	9.840.984.241.170,00	88,71	5.100.817.921.122,00	4.740.166.320.048,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	617.587.154.000,00	608.978.151.168,00	98,61	493.817.232.160,00	115.160.919.008,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	160.753.615.000,00	152.452.133.560,00	94,84	110.616.686.334,00	41.835.447.226,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	403.162.646.000,00	354.448.698.229,73	87,92	332.906.020.478,09	21.542.677.751,64
Jumlah	12.274.362.955.547,00	10.956.863.224.127,70	89,27	6.038.157.860.094,09	4.918.705.364.033,64

a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) TA 2024 ditargetkan sebesar Rp11.092.859.540.547,00 dengan realisasi sebesar Rp9.840.984.241.170,00 atau 88,71%. Jika dibandingkan dengan realisasi Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) tahun 2023 sebesar Rp5.100.817.921.122,00 maka realisasi tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp4.740.166.320.048,00 atau 92,93% sebagaimana diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 5 . 1 .10 Anggaran dan Realisasi Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)

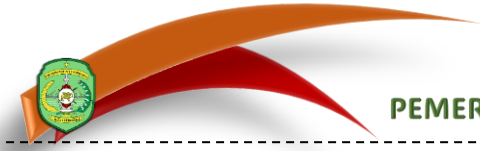
Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	973.130.469.478,00	863.128.460.000,00	88,70	809.635.265.472,00	53.493.194.528,00
DBH PPh Pasal 21	59.082.308.319,20	84.072.913.000,00	142,30	64.971.301.321,00	19.101.611.679,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND	547.668.000,00	633.024.000,00	115,59	850.738.616,00	-217.714.616,00
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	561.000,00	565.170,00	100,74	53.285,00	511.885,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	1.805.819.955.543,00	144.332.953.000,00	7,99	252.335.124.213,00	-108.002.171.213,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	205.667.118.000,00	317.256.143.000,00	154,26	260.536.229.054,00	56.719.913.946,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	10.172.892.000,00	14.020.900.000,00	137,83	14.352.467.607,00	-331.567.607,00
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	7.995.922.970.778,00	8.381.336.377.000,00	104,82	3.657.170.744.989,00	4.724.165.632.011,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	21.109.711.820,80	16.031.328.000,00	75,94	37.710.972.354,00	-21.679.644.354,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUPH)	0,00	214.128.000,00	100,00	132.800.000,00	81.328.000,00



Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	3.976.142.608,00	2.527.707.000,00	63,57	3.122.224.211,00	-594.517.211,00
DBH Sawit	17.429.743.000,00	17.429.743.000,00	100,00	0,00	17.429.743.000,00
Jumlah	11.092.859.540.547,00	9.840.984.241.170,00	88,71	5.100.817.921.122,00	4.740.166.320.048,00

Beberapa informasi terkait realisasi Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagai berikut:

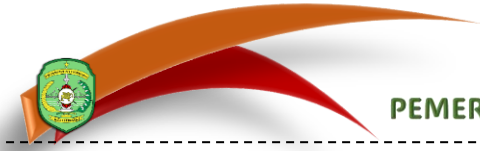
1. Dana Bagi Hasil (DBH) dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH tersebut mencakup penyelesaian kurang salur. DBH bersumber dari DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam atau DBH Bukan Pajak, dan untuk keterangan rincian alokasi disesuaikan dengan Peraturan Presiden nomor 76 Tahun 2023.
2. Dana Bagi Hasil TA 2024 ditargetkan sebesar Rp11.092.859.540.547,00 dengan realisasi sebesar Rp9.840.984.241.170,00 atau 88,71%. Dibandingkan dengan realisasi pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak tahun 2023 sebesar Rp5.100.817.921.122,00 maka realisasi tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp4.740.166.320.048,00 atau 92,93%.
3. Dana Bagi Hasil PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota dari pagu alokasi sebesar Rp547.184.802.000,00 telah disalurkan dan ditransfer sebesar Rp863.128.460.000,00. Nilai tersebut terdiri dari Dana Bagi Hasil reguler secara tunai sebesar Rp547.184.802.000,00 dan pencairan dari TDF sebesar Rp315.943.658.000,00.
4. Dana Bagi Hasil Pajak PPh 21 dari pagu alokasi sebesar Rp64.607.757.000,00 telah disalurkan dan ditransfer sebesar Rp84.072.913.000,00. Nilai tersebut terdiri dari Dana Bagi Hasil reguler secara tunai sebesar Rp64.607.757.000,00 dan pencairan dari TDF sebesar Rp19.465.156.000,00.
5. Dana Bagi Hasil Pajak WPOPND perubahan pagu alokasi sebesar Rp547.668.000,00 telah disalurkan dan ditransfer sebesar Rp633.024.000,00. Nilai tersebut terdiri dari Dana Bagi Hasil reguler secara tunai sebesar Rp547.668.000,00 dan pencairan dari TDF sebesar Rp85.356.000,00.
6. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Cukai Hasil Tembakau (CHT) pagu alokasi sebesar Rp561.000,00 yang disalurkan dan ditransfer sebesar Rp565.170,00.
7. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Minyak Bumi pagu alokasi sebesar Rp119.429.860.000,00 telah disalurkan dan ditransfer sebesar Rp144.332.953.000,00. Nilai tersebut terdiri dari Dana Bagi Hasil reguler secara tunai sebesar Rp119.429.860.000,00 pencairan dari TDF sebesar Rp24.903.093.000,00.
8. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Gas Bumi pagu alokasi sebesar Rp205.667.118.000,00 telah disalurkan dan ditransfer sebesar Rp317.256.143.000,00. Nilai tersebut terdiri dari Dana Bagi Hasil



- reguler secara tunai sebesar Rp205.667.118.000,00 pencairan dari TDF sebesar Rp111.589.025.000,00.
9. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Landrent perubahan pagu alokasi sebesar Rp10.172.892.000,00 telah disalurkan dan ditransfer sebesar Rp14.020.900.000,00. Nilai tersebut terdiri dari Dana Bagi Hasil reguler secara tunai sebesar Rp10.172.892.000,00 pencairan dari TDF sebesar Rp3.848.008.000,00.
 10. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Royalty pagu alokasi sebesar Rp4.938.601.104.000,00 telah disalurkan dan ditransfer sebesar Rp8.381.336.377.000,00. Nilai tersebut terdiri dari Dana Bagi Hasil reguler secara tunai sebesar Rp4.938.601.104.000,00 pencairan dari TDF sebesar Rp3.442.735.273.000,00.
 11. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak PSDH pagu alokasi sebesar Rp10.269.061.000,00 telah disalurkan dan ditransfer sebesar Rp16.031.328.000,00. Nilai tersebut terdiri dari Dana Bagi Hasil reguler secara tunai sebesar Rp10.269.061.000,00 pencairan dari TDF sebesar Rp5.762.267.000,00.
 12. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak IIUPH sesuai Peraturan Presiden nomor 76 Tahun 2023 untuk penetapan alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara tahun 2024 tidak dialokasikan. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan nomor 38/KM.7/2023 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2023 terdapat kurang salur sebesar Rp214.218.000,00; sehingga pada alokasi tidak dianggarkan tetapi ada realisasi.
 13. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Perikanan pagu alokasi sebesar Rp2.527.707.000,00 telah disalurkan dan ditransfer sebesar Rp2.527.707.000,00.
 14. Dana Bagi Hasil Sawit pagu alokasi sebesar Rp17.429.743.000,00 telah disalurkan dan ditransfer sebesar Rp17.429.743.000,00 secara bertahap. Tahap pertama sebesar 50% dengan syarat menyampaikan realisasi penggunaan DBH Sawit tahun sebelumnya dan Rancangan Kegiatan Penganggaran DBH Sawit tahun berjalan paling lambat 30 April tahun anggaran berjalan. Sedangkan tahap kedua sisanya sebesar 50% dengan syarat menyampaikan laporan realisasi penggunaan DBH Sawit semester pertama tahun anggaran berjalan paling lambat 30 September tahun anggaran berjalan.

b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2024 ditargetkan sebesar Rp617.587.154.000,00 dengan realisasi sebesar Rp608.978.151.168,00 atau 98,61%. Jika dibandingkan dengan realisasi Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2023 sebesar Rp493.817.232.160,00 maka realisasi tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp115.160.919.008,00 atau 23,32% sebagaimana diuraikan pada tabel berikut.



Tabel 5 . 1 .11 Anggaran dan Realisasi Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	617.587.154.000,00	608.978.151.168,00	98,61	493.817.232.160,00	115.160.919.008,00
Jumlah	617.587.154.000,00	468.764.454.000,00	103,48	493.817.232.160,00	115.160.919.008,00

DAU – LRA adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

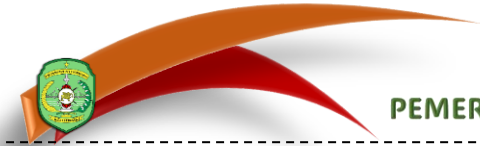
c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA 2024 ditargetkan sebesar Rp160.753.615.000,00 dengan realisasi sebesar Rp152.452.133.560,00 atau 94,84%. Jika dibandingkan dengan realisasi Dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus Fisik TA 2023 sebesar Rp110.616.686.334,00 maka realisasi tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp41.835.447.226,00 atau 37,82% sebagaimana diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 5 . 1 .12 Anggaran dan Realisasi Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

URAIAN	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	4.134.678.000,00	1.033.669.500,00	25,00	1.388.006.000,00	-354.336.500,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	34.201.041.000,00	30.684.781.550,00	89,72	26.395.584.863,00	4.289.196.687,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	25.365.372.000,00	23.320.155.900,00	91,94	26.134.318.430,00	-2.814.162.530,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	11.615.731.000,00	9.593.156.000,00	82,59	0,00	9.593.156.000,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	33.100.715.000,00	36.059.048.510,00	108,94	39.774.412.536,00	-3.715.364.026,00
DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	950.026.000,00	870.885.500,00	91,67	6.135.314.423,00	-5.264.428.923,00
DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	0,00	0,00		7.982.506.532,00	-7.982.506.532,00
DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	33.755.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	12.961.833.000,00	46.353.905.000,00	357,62	0,00	46.353.905.000,00
DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	4.669.089.000,00	4.536.531.600,00	97,16	2.806.543.550,00	1.729.988.050,00
Jumlah	160.753.615.000,00	152.452.133.560,00	94,84	110.616.686.334,00	41.835.447.226,00

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik LRA merupakan transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan yang peruntukannya telah ditentukan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.



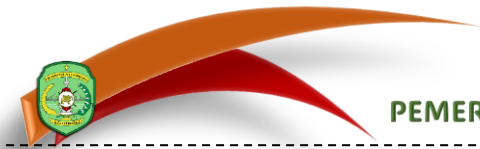
d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik TA 2024 ditargetkan sebesar Rp403.162.646.000,00 dengan realisasi sebesar Rp354.448.698.229,73 atau 87,92%. Jika dibandingkan dengan realisasi Dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus Non Fisik TA 2023 sebesar Rp332.906.020.478,09 maka realisasi tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp21.542.677.751,64 atau 6,47% sebagaimana diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 5 . 1 .13 Anggaran dan Realisasi Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

URAIAN	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
DAK Non Fisik-BOS Reguler	129.763.680.000,00	113.049.952.810,73	87,12	0,00	113.049.952.810,73
DAK Non Fisik-BOS Kinerja	0,00	2.547.500.000,00	100,00	0,00	2.547.500.000,00
DAK Non Fisik-TPG PNSD	198.759.377.000,00	193.997.738.000,00	97,60	183.755.966.380,00	10.241.771.620,00
DAK Non Fisik-TKG PNSD	7.503.598.000,00	9.048.938.000,00	120,59	7.868.557.000,00	1.180.381.000,00
DAK Non Fisik-BOP PAUD	11.887.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	3.744.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	33.468.569.000,00	0,00	0,00	2.481.507.656,00	-2.481.507.656,00
DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	5.841.169.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	1.994.366.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	360.778.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	406.000.000,00	0,00	0,00	4.676.168.584,00	-4.676.168.584,00
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata	0,00	0,00	0,00	502.367.100,00	-502.367.100,00
DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	610.423.000,00	464.751.500,00	76,14	359.166.929,00	105.584.571,00
DAK Non Fisik-BOKKB-KB	7.291.565.000,00	8.248.129.830,00	113,12	0,00	8.248.129.830,00
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	0,00	203.796.950,00	100,00	396.194.630,00	-192.397.680,00
DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	0,00	955.609.526,00	100,00	884.480.000,00	71.129.526,00
DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	1.187.875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik-PK2UMK	343.484.000,00	343.484.000,00	100,00	0,00	343.484.000,00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	0,00	0,00	0,00	110.181.369.294,00	-110.181.369.294,00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	0,00	0,00	0,00	2.491.987.269,41	-2.491.987.269,41
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	0,00	0,00	0,00	2.108.325.835,68	-2.108.325.835,68
DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	0,00	25.588.797.613,00	100,00	17.199.929.800,00	8.388.867.813,00
Jumlah	403.162.646.000,00	354.448.698.229,73	87,92	332.906.020.478,09	21.542.677.751,64

Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik – LRA merupakan transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan yang peruntukannya telah ditentukan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.



5.1.1.2.2. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya TA 2024 ditargetkan sebesar Rp229.896.073.000,00 dengan realisasi sebesar Rp229.896.073.000,00 atau 100%. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya tahun 2023 sebesar Rp219.907.187.000,00 maka realisasi tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp9.988.886.000,00 atau 4,54%.

Tabel 5.1.14 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00	27.486.716.000,00	-27.486.716.000,00
Dana Desa	195.105.755.000,00	195.105.755.000,00	100,00	192.420.471.000,00	2.685.284.000,00
Insentif Fiskal	34.790.318.000,00	34.790.318.000,00	100,00	0,00	34.790.318.000,00
Jumlah	229.896.073.000,00	229.896.073.000,00	100,00	219.907.187.000,00	9.988.886.000,00

a. Dana Insentif Daerah (DID)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, memang terdapat penyesuaian alokasi anggaran, termasuk pada insentif fiskal. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tidak mendapatkan alokasi Dana Insentif Daerah (DID) untuk Tahun Anggaran 2024.

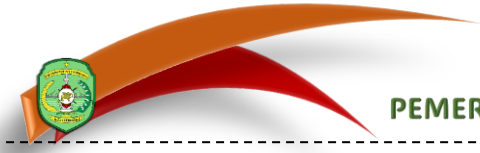
b. Dana Desa

Pendapatan Dana Desa TA 2024 ditargetkan sebesar Rp195.105.755.000,00 dengan realisasi sebesar Rp195.105.755.000,00 dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp192.420.471.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp2.685.284.000,00 atau 1,40%. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145/PMK.07/2023 tentang Pengelolaan Dana Desa dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 serta Keputusan Menteri Keuangan Nomor 352 Tahun 2024 tentang Rincian Insentif Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp5.636.124.000,00.

c. Insentif Fiskal

Pada TA 2024 Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mendapatkan alokasi Dana Insentif Fiskal sebesar Rp34.790.318.000,00 dengan realisasi sebesar Rp34.790.318.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada TA 2024 Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mendapatkan alokasi Dana Insentif Fiskal sebesar Rp34.790.318.000,00 dengan realisasi sebesar Rp34.790.318.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
2. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun sebelumnya Pada Tahun Anggaran 2024 mendapatkan alokasi sebesar Rp22.831.843.000,00;
3. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295 Tahun 2024 tentang Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kategori Pengendalian Inflasi Daerah Periode Pertama Menurut Provinsi Kabupaten/Kota mendapatkan alokasi sebesar Rp6.115.990.000,00;



4. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 353 Tahun 2024 tentang Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kelompok Kategori Kesejahteraan Masyarakat menurut Provinsi Kabupaten/Kota mendapatkan alokasi sebesar Rp5.842.485.000,00.

5.1.1.2.3. Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya (Transfer Pemerintah Provinsi)

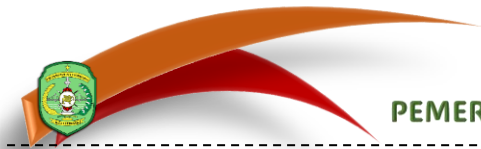
Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi berupa Pendapatan Bagi Hasil Pajak, dan Pendapatan Bagi Hasil Lainnya dialokasikan pada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dapat menganggarkan Bantuan Keuangan pemerintah provinsi didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya, sesuai kemampuan keuangan masing-masing daerah dapat diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 5 . 1 .15 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya (Transfer Pemerintah Provinsi)

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	766.425.503.000,00	588.414.513.069,00	76,77	827.375.876.377,00	-238.961.363.308,00
Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	58.440.000.000,00	58.440.000.000,00	100,00	38.120.000.000,00	20.320.000.000,00
Jumlah	824.865.503.000,00	646.854.513.069,00	78,42	865.495.876.377,00	-218.641.363.308,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi TA 2024 berupa Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi yang ditargetkan sebesar Rp824.865.503.000,00 dengan realisasi sebesar Rp646.854.513.069,00 atau 78,42%. Dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2023 sebesar Rp865.495.876.377,00, maka realisasi pendapatan Transfer Antar Daerah mengalami penurunan sebesar Rp218.641.363.308,00 atau 25,26%.

- a. Setelah melalui hasil perhitungan dan rekonsiliasi bagi hasil pajak provinsi kepada pemerintah Kabupaten/Kota, maka Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mendapat penyesuaian alokasi berdasarkan surat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 900.1.14.3/15882/BPKAD-III hal Penyesuaian Bagi Hasil Pajak Kepada Kabupaten/Kota sebesar Rp766.425.503.000,00 dengan rincian Bagi Hasil Pajak 2024 APBD Murni sebesar Rp744.500.543.503,00 dengan kurang salur Tahun 2023 sebesar Rp21.824.960.000,00.
- b. Sesuai dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur nomor 100.3.3.1/0419-V/BPKAD tentang Penetapan Nilai Kurang salur Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi kepada Kabupaten/Kota Se Kalimantan Timur Tahun 2024 sebesar Rp89.759.961.000,00 dengan rincian kurang salur tahun 2023 sebesar Rp41.176.691.000,00 dan kurang salur tahun 2024 sebesar Rp37.119.966.000,00.



- c. Pendapatan bantuan keuangan terdiri Bantuan Keuangan Non Spesifik sebesar Rp38.500.000.000,00 dan Spesifik sebesar Rp19.940.000.000,00 sesuai dengan Surat Penetapan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 900.1/17865/BPKAD-III tentang Alokasi Belanja Keuangan pada APBD TA 2024 setelah Klarifikasi. Alokasi Bantuan Keuangan tersebut disalurkan 100% dengan total nilai sebesar Rp58.400.000.000,00 kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga kegiatan-kegiatan yang bersumber dana dari bantuan keuangan provinsi dapat terserap sesuai target.

5.1.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah TA 2024 merupakan penerimaan yang berasal Lain-lain Pendapatan dan Pendapatan Bagi Hasil Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara TA 2024 dengan realisasi sebesar Rp250.000.000.000,00. Realisasi Lain-lain Pendapatan sebesar Rp2.603.000.000,00 adalah Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan hukum Indonesia.

Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara sebesar Rp78.329.955.307,69 adalah Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang berasal dari PT. Kaltim Prima Coal sebesar Rp54.611.131.775,69, PT. Kideco Jaya Agung Rp9.767.213.171,00 dan PT. Multi Harapan Utama sebesar Rp13.951.610.361,00.

Tabel 5 . 1 .16 Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

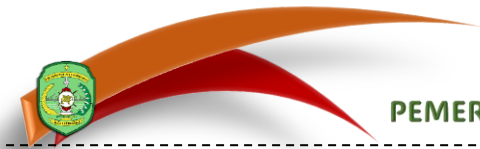
Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	3.567.000.000,00	-3.567.000.000,00
Lain-lain Pendapatan	250.000.000.000,00	2.603.000.000,00	1,04	8.959.485.142,00	-6.356.485.142,00
Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara	0,00	78.329.955.307,69	100,00	0,00	78.329.955.307,69
Jumlah	250.000.000.000,00	80.932.955.307,69	32,37	12.526.485.142,00	68.406.470.165,69

5.1.2. Belanja Daerah

Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara TA 2024 telah direalisasikan sebesar Rp11.688.457.730.184,60 atau 87,18% dari anggaran sebesar Rp13.406.849.140.395,00. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah TA 2024 serta realisasi TA 2023 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 5 . 1 .17 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
Belanja					
Belanja Operasi	7.308.463.985.598,24	6.373.011.563.160,34	87,20	5.796.771.039.840,33	576.240.523.320,01
Belanja Modal	6.088.385.154.796,76	5.315.446.167.024,25	87,30	3.513.607.650.991,16	1.801.838.516.033,09
Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	13.406.849.140.395,00	11.688.457.730.184,60	87,18	9.310.378.690.831,49	2.378.079.039.353,10



Data tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Daerah TA 2024 sebesar Rp13.406.849.140.395,00 terealisasi sebesar Rp11.688.457.730.184,60 atau 87,18% dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp9.310.378.690.831,49 mengalami peningkatan sebesar Rp2.378.079.039.353,10 atau 25,54%.

5.1.2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi dibagi ke dalam Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dengan target anggaran dan realisasi TA 2024 dan tahun 2023 dapat diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 5 . 1 .18 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	2.315.252.391.445,96	2.031.277.587.743,00	87,73	1.684.249.244.773,75	347.028.342.969,25
Belanja Barang Dan Jasa	4.673.176.313.252,26	4.070.345.469.854,34	87,10	3.795.753.556.465,58	274.591.913.388,76
Belanja Subsidi	134.594.500,00	101.040.120,00	75,07	64.400.000,00	36.640.120,00
Belanja Hibah	293.603.569.400,02	246.099.465.443,00	83,82	275.810.463.601,00	-29.710.998.158,00
Belanja Bantuan Sosial	26.297.117.000,00	25.188.000.000,00	95,78	40.893.375.000,00	-15.705.375.000,00
Jumlah	7.308.463.985.598,24	6.373.011.563.160,34	87,20	5.796.771.039.840,33	576.240.523.320,01

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi TA 2024 direncanakan sebesar Rp7.308.463.985.598,24 dengan realisasi sebesar Rp6.373.011.563.160,34 atau 87,20%. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Operasi TA 2024 dijelaskan sebagai berikut.

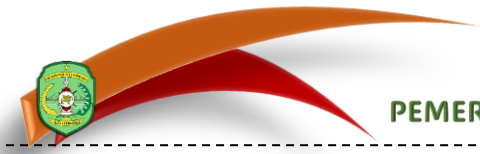
5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai adalah kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan baik yang bertugas di dalam maupun di luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah.

Akun Belanja Pegawai ini meliputi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN, Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD, Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH, Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH, Belanja Pegawai BOS, dan Belanja Pegawai BLUD. Anggaran dan realisasi Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara TA 2024 dapat diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 5 . 1 .19 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
Belanja Gaji Dan Tunjangan ASN	1.055.768.614.222,71	983.159.161.499,00	93,12	872.655.556.057,75	110.503.605.441,25



Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	904.759.669.268,25	740.876.036.219,00	81,89	495.367.583.756,00	245.508.452.463,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	285.700.008.436,00	253.548.512.701,00	88,75	254.767.077.888,00	-1.218.565.187,00
Belanja Gaji Dan Tunjangan DPRD	36.152.926.829,00	33.749.043.579,00	93,35	33.722.650.359,00	26.393.220,00
Belanja Gaji Dan Tunjangan KDH/WKDH	1.196.751.314,00	751.998.410,00	62,84	596.288.180,00	155.710.230,00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD Serta KDH/WKDH	1.098.051.000,00	802.090.000,00	73,05	971.660.000,00	-169.570.000,00
Belanja Pegawai BOS	17.045.643.800,00	7.129.522.500,00	41,83	7.151.227.500,00	-21.705.000,00
Belanja Pegawai BOSP	0,00	0,00	0,00	1.791.570.100,00	-1.791.570.100,00
Belanja Pegawai BLUD	13.530.726.576,00	11.261.222.835,00	83,23	17.225.630.933,00	-5.964.408.098,00
Jumlah	2.315.252.391.445,96	2.031.277.587.743,00	87,73	1.684.249.244.773,75	347.028.342.969,25

Belanja Pegawai TA 2024 direncanakan sebesar Rp2.315.252.391.445,96 dengan realisasi sebesar Rp2.031.277.587.743,00 atau 87,73%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp1.684.249.244.773,75 maka Belanja Pegawai tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp347.028.342.969,25 atau 20,60%.

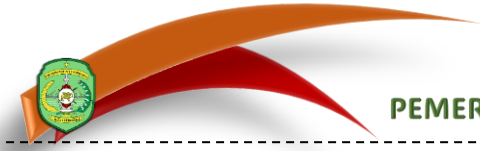
Kenaikan Belanja Pegawai disebabkan kenaikan yang cukup signifikan pada Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp110.503.605.441,25 atau 12,66% dari tahun 2023, Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebesar Rp245.508.452.463,00 atau 49,56% dari tahun 2023, Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebesar Rp155.710.230,00 atau 26,11% dari tahun 2023 karena terbitnya Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2021 tentang Besaran Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Akun Belanja Barang dan Jasa terdiri dari belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat, belanja barang dan jasa BOS, dan belanja barang dan jasa BLUD, dapat diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 5 . 1 .20 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
Belanja Barang dan Jasa					
Belanja Barang					
Belanja Barang Pakai Habis	1.942.644.227.230,94	1.790.753.500.803,13	92,18	1.887.370.670.867,00	-96.617.170.063,87

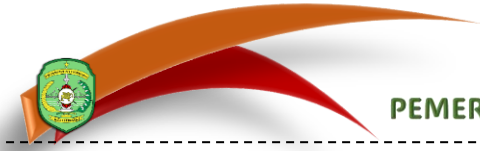


PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
Belanja Aset Tetap Yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	1.003.605.920,00	829.383.471,00	82,64	0,00	829.383.471,00
Belanja Jasa					
Belanja Jasa Kantor	878.768.389.967,55	761.234.057.386,00	86,63	578.886.069.617,00	182.347.987.769,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	101.976.129.620,00	90.114.449.117,00	88,37	67.049.993.418,00	23.064.455.699,00
Belanja Sewa Tanah	0,00	0,00	0,00	710.010.600,00	-710.010.600,00
Belanja Sewa Peralatan Dan Mesin	32.026.842.492,00	27.383.041.169,00	85,50	48.916.782.875,00	-21.533.741.706,00
Belanja Sewa Gedung Dan Bangunan	4.492.172.029,00	2.857.462.300,00	63,61	4.118.102.413,00	-1.260.640.113,00
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	101.966.000,00	-101.966.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	25.537.978.800,00	23.348.373.386,00	91,43	59.365.354.611,00	-36.016.981.225,00
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	10.212.117.750,00	8.056.049.334,00	78,89	11.274.123.175,00	-3.218.073.841,00
Belanja Beasiswa Pendidikan Pns	547.410.000,00	392.430.000,00	71,69	725.120.000,00	-332.690.000,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis Serta Pendidikan Dan Pelatihan	51.568.750.787,00	39.684.246.071,00	76,95	38.411.602.988,00	1.272.643.083,00
Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	4.229.800.105,00	4.202.020.000,00	99,34	11.700.000,00	4.190.320.000,00
Belanja Pemeliharaan					
Belanja Pemeliharaan Tanah	1.611.820.000,00	1.445.920.050,00	89,71	1.233.027.811,00	212.892.239,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	41.886.228.891,00	35.485.801.903,00	84,72	32.018.714.676,00	3.467.087.227,00
Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	126.939.641.517,00	111.766.080.056,00	88,05	102.216.376.753,00	9.549.703.303,00
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, Dan Irigasi	193.660.966.268,00	173.847.924.691,00	89,77	58.256.034.297,00	115.591.890.394,00
Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	293.314.000,00	235.000.000,00	80,12	0,00	235.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas					
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	479.408.753.979,44	378.516.546.004,00	78,95	337.210.097.396,00	41.306.448.608,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	1.551.627.000,00	1.467.839.940,00	94,60	3.772.393.968,00	-2.304.554.028,00
Belanja Uang Dan/Atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					
Belanja Uang Yang Diberikan Kepada	127.695.302.876,00	115.679.147.835,00	90,59	121.299.137.229,00	-5.619.989.394,00

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024



Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					
Belanja Jasa Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	8.449.586.957,33	6.751.093.192,00	79,90	1.593.945.187,00	5.157.148.005,00
Belanja Barang Dan Jasa BOS					
Belanja Barang Dan Jasa BOS	198.355.499.370,00	142.933.206.658,40	72,06	30.973.031.654,61	111.960.175.003,79
Belanja Barang Dan Jasa BOSP					
Belanja Barang Dan Jasa BOSP-BOS	0,00	0,00	0,00	95.631.235.828,41	-95.631.235.828,41
Belanja Barang Dan Jasa BOSP-BOP Paud	0,00	0,00	0,00	1.412.703.368,00	-1.412.703.368,00
Belanja Barang Dan Jasa BOK Puskesmas					
Belanja Barang Dan Jasa BOK Puskesmas	31.082.148.220,00	18.481.510.227,00	59,46	0,00	18.481.510.227,00
Belanja Barang Dan Jasa BLUD					
Belanja Barang Dan Jasa BLUD	409.233.999.472,00	334.880.386.260,81	81,83	313.195.361.733,56	21.685.024.527,25
Jumlah	4.673.176.313.252,26	4.070.345.469.854,34	87,10	3.795.753.556.465,58	274.591.913.388,76

Belanja Barang dan Jasa TA 2024 direncanakan sebesar Rp4.673.176.313.252,26 dengan realisasi sebesar Rp4.070.345.469.854,34 atau 87,10%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp3.795.753.556.465,58 maka Belanja Barang dan Jasa tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp274.591.913.388,76 atau 7,23%.

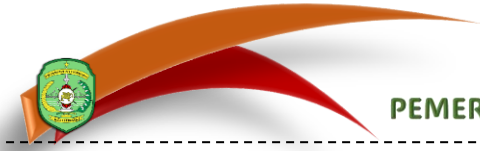
Terdapat realisasi belanja barang dan jasa yang realisasinya mengalami peningkatan signifikan adalah Belanja Sewa Aset Tidak Terwujud sebesar Rp4.190.320.000,00, Belanja Pemeliharaan Jalan Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp115.591.890.394,00 dan Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp5.157.148.005,00.

Peningkatan Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud terdapat pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp4.075.020.000,00.

Penurunan Belanja Barang Pakai Habis sebesar Rp96.617.170.063,87 dibanding realisasi tahun 2023 sebesar Rp1.887.370.670.867,00 tersebar seluruh SKPD yang dapat diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 5 . 1 .21 Realisasi Belanja Barang Pakai Habis Per SKPD Tahun 2024 dan 2023

SKPD	Nama Rekening	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Belanja Barang Pakai Habis	28.392.680.203,00	43.143.234.147,00	-14.750.553.944,00	-34,19
Dinas Kesehatan	Belanja Barang Pakai Habis	34.381.518.887,00	42.534.871.610,00	-8.153.352.723,00	-19,17
RSUD AM. Parikesit	Belanja Barang Pakai Habis	6.645.510.000,00	0,00	6.645.510.000,00	100



SKPD	Nama Rekening	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	Belanja Barang Pakai Habis	162.408.875,00	224.694.550,00	-62.285.675,00	-27,72
RSUD Dayaku Raja	Belanja Barang Pakai Habis	5.407.366.782,00	6.192.867.608,00	-785.500.826,00	-12,68
Dinas Pekerjaan Umum	Belanja Barang Pakai Habis	140.206.234.095,00	62.001.807.655,00	78.204.426.440,00	126,13
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Belanja Barang Pakai Habis	179.000.574.087,00	162.058.411.674,00	16.942.162.413,00	10,45
Satuan Polisi Pamong Praja	Belanja Barang Pakai Habis	2.156.081.450,00	9.248.954.800,00	-7.092.873.350,00	-76,69
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Belanja Barang Pakai Habis	5.794.752.819,00	5.417.734.421,00	377.018.398,00	6,96
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Belanja Barang Pakai Habis	5.913.576.032,00	3.537.749.596,00	2.375.826.436,00	67,16
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Belanja Barang Pakai Habis	6.280.110.580,00	2.517.509.705,00	3.762.600.875,00	149,46
Dinas Sosial	Belanja Barang Pakai Habis	7.960.870.650,00	9.598.216.150,00	-1.637.345.500,00	-17,06
Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	Belanja Barang Pakai Habis	1.698.615.716,00	2.032.447.889,00	-333.832.173,00	-16,43
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Belanja Barang Pakai Habis	5.618.926.625,00	10.494.337.799,00	-4.875.411.174,00	-46,46
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Belanja Barang Pakai Habis	2.625.205.900,00	2.802.005.350,00	-176.799.450,00	-6,31
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Belanja Barang Pakai Habis	86.838.398.005,00	27.563.356.691,00	59.275.041.314,00	215,05
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Belanja Barang Pakai Habis	6.654.890.274,00	2.770.990.524,00	3.883.899.750,00	140,16
Dinas Perhubungan	Belanja Barang Pakai Habis	12.278.050.563,00	7.663.842.846,00	4.614.207.717,00	60,21
Dinas Komunikasi dan Informatika	Belanja Barang Pakai Habis	11.052.423.693,00	4.847.367.343,00	6.205.056.350,00	128,01
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Belanja Barang Pakai Habis	6.227.191.250,00	6.850.876.450,00	-623.685.200,00	-9,10
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Belanja Barang Pakai Habis	1.148.820.237,00	2.628.480.512,00	-1.479.660.275,00	-56,29
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Belanja Barang Pakai Habis	30.845.910.169,00	34.774.542.269,00	-3.928.632.100,00	-11,30
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Belanja Barang Pakai Habis	4.997.993.769,00	3.644.551.011,00	1.353.442.758,00	37,14
Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Belanja Barang Pakai Habis	8.498.201.850,00	5.841.578.234,00	2.656.623.616,00	45,48

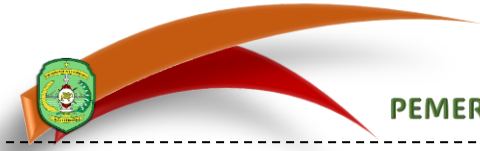
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024

**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

SKPD	Nama Rekening	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Belanja Barang Pakai Habis	3.980.475.246,00	3.279.940.679,00	700.534.567,00	21,36
Dinas Ketahanan Pangan	Belanja Barang Pakai Habis	13.757.525.311,00	10.935.432.416,00	2.822.092.895,00	25,81
Dinas Kelautan dan Perikanan	Belanja Barang Pakai Habis	428.929.599.444,00	371.681.991.795,00	57.247.607.649,00	15,40
Dinas Pariwisata	Belanja Barang Pakai Habis	9.411.974.073,00	14.210.201.224,00	-4.798.227.151,00	-33,77
Dinas Pertanian dan Peternakan	Belanja Barang Pakai Habis	121.726.209.227,00	210.821.736.526,00	-89.095.527.299,00	-42,26
Dinas Perkebunan	Belanja Barang Pakai Habis	21.682.671.525,00	21.590.413.636,00	92.257.889,00	0,43
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Belanja Barang Pakai Habis	2.443.358.050,00	1.749.345.330,00	694.012.720,00	39,67
Sekretariat Daerah	Belanja Barang Pakai Habis	24.929.535.414,00	32.998.279.821,00	-8.068.744.407,00	-24,45
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Belanja Barang Pakai Habis	21.108.171.908,00	25.559.393.219,00	-4.451.221.311,00	-17,42
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Belanja Barang Pakai Habis	3.324.310.800,00	3.640.752.530,00	-316.441.730,00	-8,69
Badan Pendapatan Daerah	Belanja Barang Pakai Habis	1.507.259.600,00	3.709.061.840,00	-2.201.802.240,00	-59,36
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Belanja Barang Pakai Habis	8.007.199.355,00	4.306.892.756,00	3.700.306.599,00	85,92
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Belanja Barang Pakai Habis	2.265.472.790,00	2.770.465.765,00	-504.992.975,00	-18,23
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Belanja Barang Pakai Habis	2.107.458.350,00	1.693.245.370,00	414.212.980,00	24,46
Inspektorat Kabupaten	Belanja Barang Pakai Habis	2.240.912.700,00	1.873.100.700,00	367.812.000,00	19,64
Kecamatan Tenggarong	Belanja Barang Pakai Habis	13.522.303.251,00	20.203.197.490,00	-6.680.894.239,00	-33,07
Kecamatan Muara Kaman	Belanja Barang Pakai Habis	22.903.035.100,00	31.178.708.997,00	-8.275.673.897,00	-26,54
Kecamatan Kota Bangun	Belanja Barang Pakai Habis	12.849.977.544,00	39.094.210.021,00	-26.244.232.477,00	-67,13
Kecamatan Muara Muntai	Belanja Barang Pakai Habis	9.410.556.375,00	15.649.745.978,00	-6.239.189.603,00	-39,87
Kecamatan Kenohan	Belanja Barang Pakai Habis	6.218.165.257,00	21.253.175.219,00	-15.035.009.962,00	-70,74
Kecamatan Kembang Janggut	Belanja Barang Pakai Habis	8.346.393.297,00	22.451.489.681,00	-14.105.096.384,00	-62,82
Kecamatan Tabang	Belanja Barang Pakai Habis	5.336.773.455,00	8.494.087.855,00	-3.157.314.400,00	-37,17
Kecamatan Muara Wis	Belanja Barang Pakai Habis	10.170.825.546,00	18.291.093.627,00	-8.120.268.081,00	-44,39
Kecamatan Sanga Sanga	Belanja Barang Pakai Habis	28.208.530.581,00	35.152.612.101,00	-6.944.081.520,00	-19,75

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN*Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024*



SKPD	Nama Rekening	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
Kecamatan Anggana	Belanja Barang Pakai Habis	51.474.449.668,00	60.913.921.004,00	-9.439.471.336,00	-15,50
Kecamatan Kota Bangun Darat	Belanja Barang Pakai Habis	22.163.340.178,00	19.432.685.007,00	2.730.655.171,00	14,05
Kecamatan Tenggarong Seberang	Belanja Barang Pakai Habis	63.496.087.939,00	75.979.545.236,00	-12.483.457.297,00	-16,43
Kecamatan Samboja Barat	Belanja Barang Pakai Habis	42.628.046.235,00	30.063.165.315,00	12.564.880.920,00	41,79
Kecamatan Loa Kulu	Belanja Barang Pakai Habis	45.142.103.573,00	71.507.310.297,00	-26.365.206.724,00	-36,87
Kecamatan Loa Janan	Belanja Barang Pakai Habis	39.470.121.775,00	58.109.539.406,00	-18.639.417.631,00	-32,08
Kecamatan Muara Badak	Belanja Barang Pakai Habis	32.437.359.515,00	44.616.323.840,00	-12.178.964.325,00	-27,30
Kecamatan Marangkayu	Belanja Barang Pakai Habis	21.434.968.739,00	26.491.469.143,00	-5.056.500.404,00	-19,09
Kecamatan Muara Jawa	Belanja Barang Pakai Habis	11.512.623.816,41	12.520.357.977,00	-1.007.734.160,59	-8,05
Kecamatan Samboja	Belanja Barang Pakai Habis	54.903.125.674,72	66.457.294.874,00	-11.554.169.199,28	-17,39
Kecamatan Sebulu	Belanja Barang Pakai Habis	20.916.266.980,00	40.300.055.358,00	-19.383.788.378,00	-48,10
	Jumlah	1.790.753.500.803,13	1.887.370.670.867,00	-96.617.170.063,87	-5,12

5.1.2.1.3. Belanja Subsidi

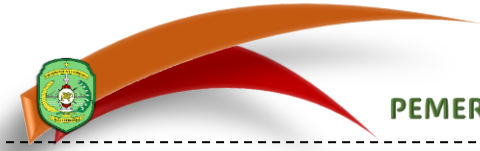
Belanja Subsidi adalah pengeluaran pemerintah daerah yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu untuk membantu biaya produksi agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat dapat diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 5 . 1 .22 Anggaran dan Realisasi Belanja Subsidi

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
Belanja Subsidi					
Belanja Subsidi Kepada BUMN	134.594.500,00	101.040.120,00	75,07	64.400.000,00	36.640.120,00
Jumlah	134.594.500,00	101.040.120,00	75,07	64.400.000,00	36.640.120,00

Belanja Subsidi TA 2024 terealisasi sebesar Rp101.040.120,00 atau 75,07% dari anggaran sebesar Rp134.594.500,00. Belanja subsidi kepada BUMN pada tahun 2024 diberikan kepada Perum Damri berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: P-264/DISHUB/HUBDAT/500.11.8/01/2024 melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara yang dianggarkan pada Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota.

Penganggaran dan pembayaran Belanja Subsidi TA 2023 dilaksanakan pada pertengahan tahun berjalan atau pada saat perubahan anggaran, Sedangkan penganggaran dan pembayaran Belanja Subsidi TA 2024 dilaksanakan satu tahun anggaran atau dari bulan Januari sampai dengan Desember 2024. Hal tersebut yang mengakibatkan Belanja Subsidi TA 2024 lebih besar dari pada tahun sebelumnya.



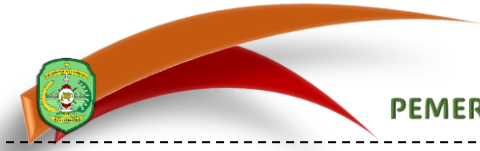
5.1.2.1.4. Belanja Hibah

Belanja Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dapat diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 5 . 1 . 23 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
Belanja Hibah					
Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat					
Belanja Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat	9.250.000.000,00	9.250.000.000,00	100,00	4.654.673.000,00	4.595.327.000,00
Belanja Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	3.895.000.000,00	-3.895.000.000,00
Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan Yang Berbadan Hukum Indonesia					
Belanja Hibah Kepada Badan Dan Lembaga Yang Bersifat Nirlaba, Sukarela Dan Sosial Yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	183.609.469.768,02	172.969.115.811,00	94,20	195.101.051.761,00	-22.131.935.950,00
Belanja Hibah Kepada Badan Dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Dan Sosial Yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	5.244.190.000,00	5.244.190.000,00	100,00	0,00	5.244.190.000,00
Belanja Hibah Kepada Badan Dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	44.830.885.382,00	38.726.385.382,00	86,38	51.020.884.240,00	-12.294.498.858,00
Belanja Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan Yang Berbadan Hukum Indonesia	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	349.310.000,00	-149.310.000,00
Belanja Hibah Dana BOS					
Belanja Hibah Uang Dana Bos Yang Diterima Oleh Satdikdas Swasta	14.975.400.000,00	5.949.600.000,00	39,73	5.680.800.000,00	268.800.000,00
Belanja Hibah Uang Dana Bos Yang Diterima Oleh Satdikmen Swasta	15.816.920.000,00	7.844.400.000,00	49,59	7.829.700.000,00	14.700.000,00
Belanja Hibah Uang Dana Bos Yang Diterima Oleh Satdiksus Swasta	18.314.680.000,00	4.553.750.000,00	24,86	5.976.150.000,00	-1.422.400.000,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik					
Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.362.024.250,00	1.362.024.250,00	100,00	1.302.894.600,00	59.129.650,00
Jumlah	293.603.569.400,02	246.099.465.443,00	83,82	275.810.463.601,00	-29.710.998.158,00

Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp9.250.000.000,00 adalah belanja hibah sistem informasi di wilayah IKN dan perbatasan Malaysia atas nama Komando Daerah Militer VI Mulawarman berdasarkan Naskah Perjanjian

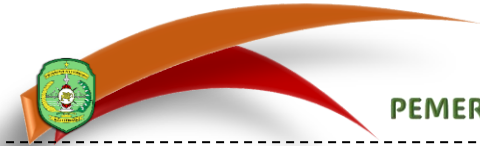


Hibah Daerah Nomor: P-42/DISKOMINFO/NPHD/500.12.16.3/03/2024, Nomor: NPHD/2/III/2024, Sub. Kegiatan Pengembangan Aplikasi Dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Belanja Hibah Kepada Badan Dan Lembaga Yang Bersifat Nirlaba, Sukarela Dan Sosial Yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp172.969.115.811,00 adalah Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 5 . 1 . 24 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

No	Penerima	Jumlah (Rp)
1	Komando Distrik Militer 0906/KKR	2.073.953.000,00
2	Kepolisian Resor Bontang	1.289.990.000,00
3	Komando Distrik Militer 0908/BTG	624.305.000,00
4	Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)	7.857.916.000,00
5	Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU)	8.420.272.200,00
6	Komisi Pemilihan Umum (KPU)	45.633.468.161,00
7	Kepolisian Resor Kutai Kartanegara	8.156.377.000,00
8	Masyarakat Miskin atau Tidak Mampu	13.875.000.000,00
9	PMI Cabang Kabupaten Kutai Kartanegara	10.655.140.000,00
10	SMP Muhammadiyah Loa Janan	177.659.000,00
11	MTS AT-TADZIR Loa Janan	177.402.000,00
12	SMP PGRI 15 Tenggarong Seberang	3.030.786.200,00
13	TK. Kemala Bhayangkari 7 Tenggarong, TK. AL-Hikmah Kota	53.939.250,00
14	Madrasah Ibtidaiyah Darul Mujahidin Kec. Tenggarong Seberang	349.187.900,00
15	KB Amanah Sanga-Sanga	224.024.000,00
16	KB. Mahakam Muara Jawa	216.883.000,00
17	Kelompok Bermain Arsa Muda Kec. Tenggarong Seberang	180.925.000,00
18	PAUD	6.085.327.000,00
19	SD Swasta	16.277.505.000,00
20	SMP SPT Separi Tenggarong Seberang	762.118.100,00
21	SMP Swasta	41.370.398.000,00
22	SMP-IT Pesisir Samboja	198.030.000,00
23	TK ABA 3 Kecamatan Tenggarong Seberang	10.780.000,00
24	TK AL-Hikmah Kota Bangun	10.717.000,00
25	TK Dahlia 2 Jembayan Kec. Loa Janan	10.780.000,00
26	TK Handayani 1 Kota Bangun	857.920.000,00
27	TK Harapan Mandiri Loa Janan	236.305.000,00
28	TK Harapan Mandiri Loa Janan, KB Mahakam Muara Jawa dan KB	86.196.000,00
29	TK IT AN Nur Sebulu	186.967.000,00
30	TK Kartika V 65 Samboja dan TK Tunas Muda Samboja	32.975.000,00
31	TK Kartika V-65 Samboja	534.921.000,00
32	TK Kemala Bhayangkari 7 Tenggarong	313.128.000,00
33	TK Kuntum Melati Kecamatan Muara Kaman	49.938.000,00
34	TK Maju Lestari Desa Batuah	214.541.000,00
35	TK Melati Putih Loa Kulu	840.999.000,00
36	TK Panca Dharma Tenggarong Seberang	28.687.000,00
37	TK PAUD Pesisir Kampung Kamal Kec. Samboja	98.736.000,00
38	TK Pertiwi Sebulu	190.989.000,00
39	TK Tunas Muda Samboja	105.873.000,00
40	TK. ABA 3 Kecamatan Tenggarong Seberang	181.752.000,00
41	TK. AL-Hikmah Kota Bangun	175.531.000,00
42	TK. Dahlia 2 Jembayan Kec. Loa Kulu	370.939.000,00
43	TK. Harapan Mandiri Loa Janan	210.281.000,00
44	TK. Islam Al Maraghi Tenggarong	49.994.000,00
45	TK. Kelurahan Sei Merdeka Kecamatan Samboja Barat	244.148.000,00



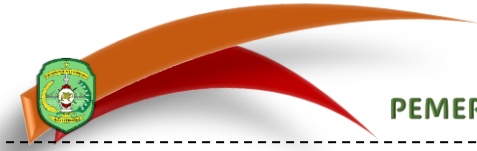
No	Penerima	Jumlah (Rp)
46	TK. Purnama MarangKayu	235.413.000,00
	Jumlah	172.969.115.811,00

Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebesar Rp5.244.190.000,00 adalah Pengeluaran Pemerintah Daerah berupa Uang kepada Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor : P-1684/BUD/NPHD/400.6/09/2024 dan 038.Sek-KD/KKKIM/IX/2024 tanggal 13 September 2024.

Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp38.726.385.382,00 adalah Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan dapat diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 5 . 1 . 25 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan

No	Penerima	Jumlah (Rp)
1	Yayasan Burdah Syifaul Qulum	2.544.739.000,00
2	Yayasan Pendidikan Ma'Arif Diponegoro Tenggarong Seberang	500.000.000,00
3	Yayasan Pondok Pesantren Al Mua'wanah	500.000.000,00
4	Yayasan Langgar An Nur Bukit Raya	200.000.000,00
5	Yayasan Darun Nidhom "Masjid Al Kahfi"	150.000.000,00
6	Yayasan Langgar Baitul Ikhsan Bukit Raya	200.000.000,00
7	Yayasan Pondok Pesantren Roudhotul Jannah Samboja	500.000.000,00
8	Yayasan Langgar Al Ikhlas Bukit Raya	200.000.000,00
9	Yayasan Al Falah Bukit Raya	200.000.000,00
10	Gereja Pantekosta Di Indonesia (Gpdi)	100.000.000,00
11	Yayasan Langgar Al Amin Samboja Barat	150.000.000,00
12	Yayasan Miftahul Jannah	200.000.000,00
13	Yayasan Langgar Al Himmah	150.000.000,00
14	Yayasan Pondok Pesantren Ishlahul Ummah Muara Kaman	250.000.000,00
15	Yayasan Masjid Maqomul Abidin	500.000.000,00
16	Yayasan Pondok Pesantren Salamul Huda	78.600.000,00
17	Panti Asuhan Al-Kahfi (Yayasan Umat Sejahtera)	900.000.000,00
18	Pondok Pesantren Sabilal Muhtadin	100.000.000,00
19	Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara	500.000.000,00
20	Yayasan Pendidikan Islam Al Barokah Karang Tunggal	200.000.000,00
21	Yayasan Langgar Al-Barakah Danau Semayang	100.000.000,00
22	Yayasan Masjid Al Iman Nurul Ihsan Bukit Biru	250.000.000,00
23	Yayasan Masjid Hidayatullah	300.000.000,00
24	Yayasan Masjid Jami' Kh. Muhammad Sadjid	1.000.000.000,00
25	Yayasan Masjid Jami Al Maarif Sanga Sanga Dalam	200.000.000,00
26	Yayasan Masjid Al Mujahidin Rahmatullah	200.000.000,00
27	Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Muara Belinau Tabang	232.415.000,00
28	Yayasan Darussalam Al Karim	200.000.000,00
29	Gkii Kota Bangun Ulu	500.000.000,00
30	Gereja Toraja Jemaat Bethel	350.000.000,00
31	Masjid Ar Rahim (Yayasan Arrahman)	200.000.000,00
32	Yayasan Masjid Nurul Khairah Desa Pela	500.000.000,00
33	Yayasan Masjid Jami' Nurul Huda Kuala Samboja	500.000.000,00
34	Yayasan Tpq Al-Fattah Durian Maluhu	250.000.000,00
35	Yayasan Musholla Al Ikhlas Kelurahan Argosari	190.781.000,00
36	Gereja Pantekosta Di Indonesia Jemaat Victory Jahab	100.000.000,00
37	Yayasan Masjid Al Hidayah Kota Bangun Darat	300.000.000,00
38	Yayasan Fasthabikul Khairat Kelurahan Panji	250.000.000,00



No	Penerima	Jumlah (Rp)
39	Yayasan Masjid Nurun Ala Nurin	498.577.000,00
40	Yayasan Langgar Anugerah Cahaya Ilahi	200.000.000,00
41	Yayasan Langgar Al Iman	100.000.000,00
42	Gereja Toraja Jemaat Ararat Santan Ulu	500.000.000,00
43	Gereja Kemah Injil Jemaat Jahab	86.967.000,00
44	Yayasan Masjid Al Kamal	500.000.000,00
45	Yayasan Masjid Baiturrahim	500.000.000,00
46	Yayasan Masjid Mafatihul Hidayah Bendang Raya	150.000.000,00
47	Yayasan Masjid Miftahul Fajar Spontan	200.000.000,00
48	Yayasan Masjid Jami Al Mujahidin Jahab	425.000.000,00
49	Masjid Al Ikhlas Wonosari (Yayasan Barokah Kota Bangun	447.150.000,00
50	Yayasan Pondok Pesantren Am-Muminun Muara Muntai	309.275.000,00
51	Musholla Wisata Danau Tanjung Sarai (Yayasan Al Safar Desa	220.000.000,00
52	Yayasan Daarus Saadah Bengkinang	219.100.318,00
53	Yayasan Daarus Saadah Bengkinang	250.899.682,00
54	Gereja Kibaid Jemaat Pulau Pinang	377.095.682,00
55	Masjid Jami' Nuruddin Wonotirto (Yayasan Nuruddin Wonotirto	200.000.000,00
56	Masjid Baitul Amin (Yayasan Darul Amin)	500.000.000,00
57	Yayasan Masjid Al Hidayah Bensamar	250.000.000,00
58	Gereja Hkbp Tenggarong	500.000.000,00
59	Gpdi Jemaat Ekklesia Ds. Buluq Sen	352.747.700,00
60	Gereja Toraja Jemaat Buntu Marannu	200.000.000,00
61	Yayasan As Sakinah Kelurahan Maluhu	200.000.000,00
62	Yayasan Masjid Nur Hidayah Sukodadi	500.000.000,00
63	Gereja Katolik Kristus Raja Desa Bangun Rejo	150.000.000,00
64	Yayasan Bina Kasih Kutai Kartanegara	1.000.000.000,00
65	Gereja Gpdi Jemaat Filadelfia Muara Jawa	180.000.000,00
66	Yayasan Masjid Al Ikhlas Timbau	200.000.000,00
67	Yayasan Masjid Jami Al Muhtadin Loa Duri	200.000.000,00
68	Gereja Katolik Stasi St. Stefanus	150.000.000,00
69	Yayasan Masjid Al Muttaqien Handil Sembilan	350.000.000,00
70	Gpdi Jemaat Anugerah Sanga Sanga	200.000.000,00
71	Yayasan Masjid Baiturrahman Kutai Kartanegara	283.020.318,00
72	Yayasan Masjid Baiturrahman Kutai Kartanegara	716.979.682,00
73	Gkii Jemaat Muara Badak	500.000.000,00
74	Yayasan Masjid Dan Tpa Asy Syfaa Santan Tengah	350.000.000,00
75	Yayasan Masjid Al Ittihad Melintang	200.000.000,00
76	Yayasan Masjid Baiturrohman Desa Bukit Pariaman	200.000.000,00
77	Yayasan Musholla Jamiatun Al Ikhlas Desa Bukit Raya	150.000.000,00
78	Yayasan Masjid Nurul Fajar Desa Perdana	500.000.000,00
79	Yayasan Rumah Imam Langgar Babussalam	100.000.000,00
80	Yayasan Masjid Al Hijrah Unikarta	100.000.000,00
81	Yayasan Pendidikan Ar Rahman	250.000.000,00
82	Yayasan Masjid Al Hijrah Unikarta	108.844.000,00
83	Yayasan Al Khair Azzahra Kelurahan Bukit Merdeka	100.000.000,00
84	Parisada Hindu Dharma Indonesia	180.000.000,00
85	Yayasan Masjid Babussalam Perumahan Penerangan	150.000.000,00
86	Yayasan Masjid Al Ikhlas Pos Dua	200.000.000,00
87	Yayasan Masjid An Nisa Palacari	500.000.000,00
88	Yayasan Langgar Al Istiqomah Desa Liang	150.000.000,00
89	Langgar Nurul Iman (Yayasan Wiji Iro Dikromo)	200.000.000,00
90	Yayasan Paiketan Arya Wang Bang Pinatih	400.000.000,00
91	Gereja Hkbp Desa Kertabuana	150.000.000,00
92	Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Nahdlatul Wathan	100.000.000,00
93	Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara (Pesparawi)	4.499.194.000,00
94	Yayasan Al Falah Desa Kota Bangun Seberang	275.000.000,00
95	Yayasan Al Munawaroh Kota Bangun Seberang	200.000.000,00



No	Penerima	Jumlah (Rp)
96	Yayasan Putra Warman Al Abqory	100.000.000,00
97	Gereja Kerapatan Pantekosta Jemaat Batesda	200.000.000,00
98	Yayasan Baitur Rahim Anggana (Masjid Jami Ar Rahim)	500.000.000,00
99	Yayasan Masjid Nurul Iman	500.000.000,00
100	Yayasan Takmir Al Hilal Tenggarong	200.000.000,00
101	Yayasan Masjid Nurul Islam Bunga Jadi	300.000.000,00
102	Yayasan Masjid An Nuur Al Ikhlas	200.000.000,00
103	Yayasan Fiisabiillillah Balikpapan (Pondok Pesantren Tarbiyatul	100.000.000,00
104	Yayasan Al-Islami Nurul An-War (Pondok Pesantren Al Islami	100.000.000,00
105	Yayasan Annur Al Ikhlas (Pondok Pesantren Annur Al Ikhlas)	100.000.000,00
106	Yayasan Al Muminun Bukit Biru	500.000.000,00
107	Yayasan Sabilul Muttaqin Benua Baru	500.000.000,00
108	Yayasan Asshobirin Koba Seberang	500.000.000,00
109	Yayasan Masjid Al Mujahidin Loa Ipuh Darat	500.000.000,00
	Jumlah Seluruhnya	38.726.385.382,00

Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp200.000.000,00 adalah Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum yang diberikan kepada Kerukunan Bubuhan Banjar Kabupaten Kutai Kartanegara.

Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta sebesar Rp5.949.600.000,00 adalah Belanja hibah atas dana BOS Kabupaten untuk Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI).

Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta sebesar Rp7.844.400.000,00 adalah untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) / Madrasah Tsanawiyah (MTs).

Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta sebesar Rp4.553.750.000,00 adalah Belanja hibah atas dana BOS Kabupaten untuk Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP), BOP Kesetaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik TA 2024 sebesar Rp1.302.894.600,00 adalah Belanja Hibah kepada partai politik yang memperoleh suara pada pemilihan umum dan memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kutai Kartanegara. Besaran anggaran dan realisasi bantuan keuangan pada partai politik berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 182/SK-BUP/HK/2024 tentang Penetapan besaran bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapat kursi hasil pemilu Tahun 2019 pada Tahun 2024. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5 . 1 . 26 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai politik PKS	81.738.000,00	81.738.000,00	100,00%	88.350.000,00	-6.612.000,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan	331.104.150,00	331.104.150,00	100,00%	172.371.800,00	158.732.350,00



Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
kepada Partai politik PDIP					
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai politik Golkar	330.265.900,00	330.265.900,00	100,00%	362.311.000,00	-32.045.100,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai politik Gerindra	198.364.450,00	198.364.450,00	100,00%	177.334.600,00	21.029.850,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai politik PAN	133.681.450,00	133.681.450,00	100,00%	129.469.800,00	4.211.650,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai politik PPP	37.160.200,00	37.160.200,00	100,00%	63.703.200,00	-26.543.000,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai politik Hanura	27.508.850,00	27.508.850,00	100,00%	47.158.000,00	-19.649.150,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai politik PKB	123.446.850,00	123.446.850,00	100,00%	130.286.800,00	-6.839.950,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai politik NASDEM	98.754.400,00	98.754.400,00	100,00%	77.417.400,00	21.337.000,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai politik PPI	0,00	0,00	100,00%	54.492.000,00	-54.492.000,00
Jumlah	1.362.024.250,00	1.362.024.250,00	100,00%	1.302.894.600,00	59.129.650,00

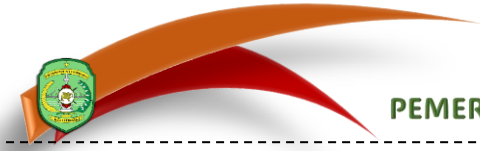
5.1.2.1.5. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial pada TA 2024 direalisasikan dalam bentuk pemberian bantuan keuangan kepada masyarakat senilai Rp25.188.000.000,00 yang diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 5 . 1 . 27 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
Belanja Bantuan Sosial kepada Individu					
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	26.297.117.000,00	25.188.000.000,00	95,78%	40.893.375.000,00	-15.705.375.000,00
Jumlah	26.297.117.000,00	25.188.000.000,00	95,78%	40.893.375.000,00	-15.705.375.000,00

Belanja Bantuan Sosial TA 2024 direncanakan sebesar Rp26.297.117.000,00 dengan realisasi sebesar Rp25.188.000.000,00 atau 95,78%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp40.893.375.000,00 maka realisasi Belanja Bantuan Sosial tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp15.705.375.000,00 atau 38,41%. Bantuan sosial sebesar Rp25.188.000.000,00 adalah belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu, yaitu:



1. Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu (GRAB, GOJEK, MAXIM, ABK) Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 Kabupaten/Kota pada Dinas Perhubungan sebesar Rp474.000.000,00;
2. Santunan Bagi Veteran dan Janda Veteran, Warga Miskin Lanjut Usia Terlantar Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar dan Penerima Bantuan Pendidikan Di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara pada Dinas Sosial sebesar Rp5.941.500.000,00;
3. Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan Kepada Individu pada kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha (Penanganan Dampak Inflasi) pada Dinas Perikanan dan Kelautan sebesar Rp18.772.500.000,00;

5.1.2.2. Belanja Modal

Akun Belanja Modal merupakan pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan pengadaan barang dalam rangka penambahan aset tetap daerah. Belanja Modal tersebut meliputi Pengadaan Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya. Berikut adalah Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara di tahun 2024 diuraikan pada tabel berikut.

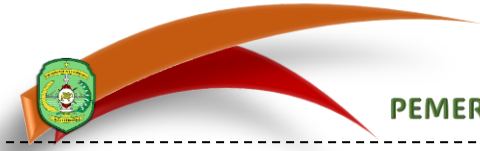
Tabel 5 . 1 .28 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
Belanja Tanah	69.771.831.992,00	62.606.649.543,00	89,73	48.525.311.811,00	14.081.337.732,00
Belanja Peralatan dan Mesin	1.485.656.834.108,66	1.303.090.381.381,00	87,71	1.186.122.189.231,00	116.968.192.150,00
Belanja Bangunan dan Gedung	1.961.404.549.197,50	1.646.496.068.022,73	83,94	884.289.334.911,00	762.206.733.111,73
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.541.849.901.434,60	2.281.781.596.417,52	89,77	1.351.028.784.039,16	930.752.812.378,36
Belanja Aset Tetap Lainnya	11.047.354.497,00	5.811.543.160,00	52,61	42.977.977.499,00	-37.166.434.339,00
Belanja Modal Aset Lainnya	18.654.683.567,00	15.659.928.500,00	83,95	664.053.500,00	14.995.875.000,00
Jumlah	6.088.385.154.796,76	5.315.446.167.024,25	87,30	3.513.607.650.991,16	1.801.838.516.033,09

Dari tabel di atas terlihat di tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah menganggarkan Belanja Modal sebesar Rp6.088.385.154.796,76 dan telah terealisasi sebesar Rp5.315.446.167.024,25 atau 87,30%, dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal di tahun 2023 sebesar Rp3.513.607.650.991,16 mengalami peningkatan sebesar Rp1.801.838.516.033,09 atau 51,28%.

5.1.2.2.1. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran yang dilakukan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan, balik nama pematangan tanah sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah yang dimaksud dalam kondisi



siap pakai. Untuk TA 2024 Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan Belanja Modal Tanah diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 5 . 1 .29 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
Belanja Modal Tanah					
Belanja Modal Tanah Persil	13.724.902.692,00	9.720.126.331,00	70,82	12.593.994.136,00	-2.873.867.805,00
Belanja Modal Tanah Non-Persil	17.000.000.000,00	15.354.000.000,00	90,32	0,00	15.354.000.000,00
Belanja Modal Lapangan	39.046.929.300,00	37.532.523.212,00	96,12	35.931.317.675,00	1.601.205.537,00
Jumlah	69.771.831.992,00	62.606.649.543,00	89,73	48.525.311.811,00	14.081.337.732,00

Belanja Modal Tanah tahun 2024 direncanakan sebesar Rp69.771.831.992,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp62.606.649.543,00 atau 89,73%, dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp48.525.311.811,00 maka realisasi Belanja Modal Tanah tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp14.081.337.732,00 atau 29,02%.

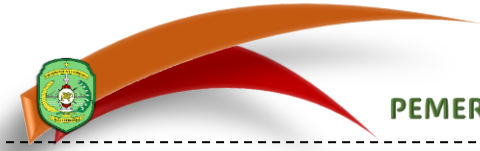
Pada tahun 2024 terdapat realisasi pembayaran Utang Belanja Modal Tanah sebesar Rp159.307.000,00 dengan rincian dapat dilihat pada **Lampiran 1**.

5.1.2.2.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

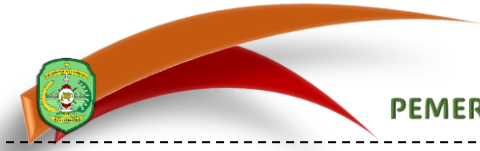
Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya – biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Berikut rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 5 . 1 .30 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
Belanja Modal Alat Besar					
Belanja Modal Alat Besar Darat	47.427.542.652,00	42.972.321.185,00	90,61	8.520.430.000,00	34.451.891.185,00
Belanja Modal Alat Bantu	10.774.892.900,35	10.545.080.000,00	97,87	2.429.201.850,00	8.115.878.150,00
Belanja Modal Alat Angkutan					
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	101.106.666.878,00	95.228.459.100,00	94,19	160.810.766.464,00	-65.582.307.364,00
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	0,00	0,00	0,00	342.610.000,00	-342.610.000,00
Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	2.432.386.400,00	1.944.500.000,00	79,94	3.146.485.800,00	-1.201.985.800,00
Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	69.832.320,00	68.600.000,00	98,24	4.694.270.000,00	-4.625.670.000,00

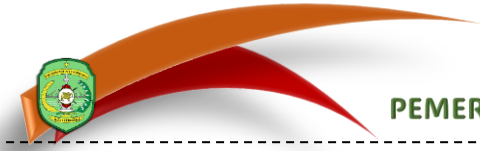


Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur					
Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	856.993.800,00	705.042.000,00	82,27	268.000.000,00	437.042.000,00
Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	24.420.000,00	24.420.000,00	100,00	160.850.000,00	-136.430.000,00
Belanja Modal Alat Ukur	2.896.746.318,00	2.754.725.000,00	95,10	2.932.667.000,00	-177.942.000,00
Belanja Modal Alat Pertanian					
Belanja Modal Alat Pengolahan	2.930.916.340,00	1.314.938.000,00	44,86	0,00	1.314.938.000,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					
Belanja Modal Alat Kantor	264.609.548.138,16	224.637.672.339,00	84,89	227.169.816.026,00	-2.532.143.687,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	105.813.670.680,00	89.148.836.853,00	84,25	66.183.789.656,00	22.965.047.197,00
Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5.479.155.150,00	4.678.807.509,00	85,39	5.611.010.119,00	-932.202.610,00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					
Belanja Modal Alat Studio	7.874.202.302,04	7.080.545.000,00	89,92	16.325.663.285,00	-9.245.118.285,00
Belanja Modal Alat Komunikasi	1.120.533.000,00	927.510.000,00	82,77	191.660.000,00	735.850.000,00
Belanja Modal Peralatan Pemancar	6.627.290.422,00	6.271.740.000,00	94,64	0,00	6.271.740.000,00
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan					
Belanja Modal Alat Kedokteran	272.928.859.351,82	258.603.281.206,00	94,75	210.408.133.179,00	48.195.148.027,00
Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	13.203.398.840,00	12.699.306.265,00	96,18	32.063.704.736,00	-19.364.398.471,00
Belanja Modal Alat Laboratorium					
Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	6.468.800.192,00	6.267.810.700,00	96,89	16.171.188.827,00	-9.903.378.127,00
Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	161.109.534.145,00	121.277.320.000,00	75,28	97.463.686.800,00	23.813.633.200,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	2.682.322.560,00	2.234.000.000,00	83,29	0,00	2.234.000.000,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	596.292.000,00	546.075.000,00	91,58	50.885.000,00	495.190.000,00
Belanja Modal Komputer					
Belanja Modal Komputer Unit	345.119.937.206,19	323.876.014.222,00	93,84	242.189.514.962,00	81.686.499.260,00
Belanja Modal Peralatan Komputer	48.965.604.869,00	43.218.807.181,00	88,26	48.786.921.149,00	-5.568.113.968,00
Belanja Modal Alat Eksplorasi					
Belanja Modal Alat Eksplorasi Topografi	0,00	0,00	0,00	57.540.000,00	-57.540.000,00
Belanja Modal Alat Produksi,					



Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
Pengolahan, dan Pemurnian					
Belanja Modal Sumur	100.000.000,00	99.906.170,00	99,91	0,00	99.906.170,00
Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi					
Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	2.761.133.065,10	2.462.149.000,00	89,17	1.735.289.500,00	726.859.500,00
Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja					
Belanja Modal Alat Deteksi	0,00	0,00	0,00	98.000.000,00	-98.000.000,00
Belanja Modal Alat Pelindung	387.176.920,00	360.000.000,00	92,98	15.790.383.000,00	-15.430.383.000,00
Belanja Modal Alat SAR	895.250.000,00	887.375.000,00	99,12	57.180.000,00	830.195.000,00
Belanja Modal Alat Peraga					
Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	22.225.836,00	20.300.000,00	91,34	363.636.000,00	-343.336.000,00
Belanja Modal Rambu-Rambu					
Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	2.192.399.999,00	2.187.854.000,00	99,79	3.130.535.440,00	-942.681.440,00
Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	4.454.644.100,00	4.440.195.550,00	99,68	0,00	4.440.195.550,00
Belanja Modal Peralatan Olahraga					
Belanja Modal Peralatan Olahraga	1.002.818.900,00	979.650.000,00	97,69	2.666.041.000,00	-1.686.391.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS					
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	36.777.332.000,00	26.308.358.201,00	71,53	0,00	26.308.358.201,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP					
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	0,00	0,00	0,00	15.914.322.788,00	-15.914.322.788,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD	0,00	0,00	0,00	388.006.650,00	-388.006.650,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD					
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	25.944.306.824,00	8.318.781.900,00	32,06	0,00	8.318.781.900,00
Jumlah	1.485.656.834.108,66	1.303.090.381.381,00	87,71	1.186.122.189.231,00	116.968.192.150,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2024 direncanakan sebesar Rp1.485.656.834.108,66 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.303.090.381.381,00 atau 81,71% dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp1.186.122.189.231,00 maka realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp116.968.192.150,00 atau 9,86%.



Pada tahun 2024 terdapat realisasi pembayaran Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp150.844.539.030,00 dengan rincian dapat dilihat pada **Lampiran 1**.

5.1.2.2.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian gedung dan bangunan sampai dengan bangunan dan gedung dimaksud dalam kondisi siap digunakan. Berikut rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara di tahun 2024 dapat diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 5 . 1 .31 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan

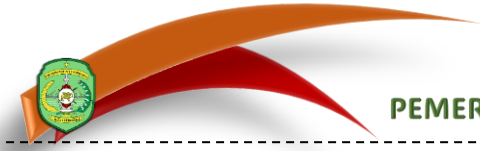
Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
Belanja Modal Bangunan Gedung					
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.770.695.667.799,50	1.471.699.262.441,73	83,11	873.351.985.215,00	598.347.277.226,73
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	511.232.700,00	486.462.137,00	95,15	565.294.853,00	-78.832.716,00
Belanja Modal Bangunan Menara					
Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan	0,00	0,00	0,00	2.262.106.949,00	-2.262.106.949,00
Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti					
Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	4.668.185.750,00	4.059.456.058,00	86,96	8.109.947.894,00	-4.050.491.836,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD					
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	185.529.462.948,00	170.250.887.386,00	91,76	0,00	170.250.887.386,00
Jumlah	1.961.404.549.197,50	1.646.496.068.022,73	83,94	884.289.334.911,00	762.206.733.111,73

Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2024 direncanakan sebesar Rp1.961.404.549.197,50 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.646.496.068.022,73 atau 83,94%, dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp884.289.334.911,00 maka realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp762.206.733.111,73 atau 86,19%.

Pada tahun 2024 terdapat realisasi pembayaran Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp47.191.796.776,00 dengan rincian dapat dilihat pada **Lampiran 1**.

5.1.2.2.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

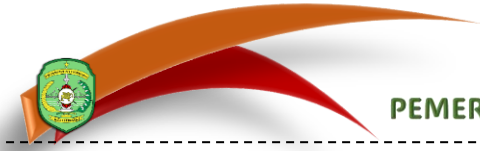
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran untuk memperoleh jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Dalam belanja ini termasuk biaya untuk penambahan dan penggantian yang meningkatkan masa



manfaat, menambah nilai aset, dan di atas batas minimal nilai kapitalisasi jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan. Berikut rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 5 . 1 .32 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
Belanja Modal Jalan dan Jembatan					
Belanja Modal Jalan	1.715.676.124.818,87	1.630.493.022.050,29	95,04	900.162.497.259,16	730.330.524.791,13
Belanja Modal Jembatan	326.621.598.785,00	232.638.953.722,34	71,23	71.378.746.506,00	161.260.207.216,34
Belanja Modal Bangunan Air					
Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	141.612.540.598,00	111.239.007.145,00	78,55	15.254.538.416,00	95.984.468.729,00
Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	141.909.753.676,00	121.285.281.660,00	85,47	65.383.647.746,00	55.901.633.914,00
Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	0,00	0,00	0,00	598.000.000,00	-598.000.000,00
Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	0,00	0,00	0,00	143.080.245,00	-143.080.245,00
Belanja Modal Bangunan Air Kotor	58.304.643.532,73	57.179.877.180,89	98,07	47.051.343.917,00	10.128.533.263,89
Belanja Modal Instalasi					
Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	0,00	0,00	0,00	782.860.350,00	-782.860.350,00
Belanja Modal Instalasi Air Kotor	2.450.000.000,00	2.247.000.000,00	91,71	4.610.702.000,00	-2.363.702.000,00
Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	80.760.000,00	80.316.000,00	99,45	1.314.093.812,00	-1.233.777.812,00
Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	9.876.751.000,00	5.240.000.000,00	53,05	3.449.670.000,00	1.790.330.000,00
Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik	0,00	0,00	0,00	196.075.000,00	-196.075.000,00
Belanja Modal Instalasi Lain	0,00	0,00	0,00	3.121.250.290,00	-3.121.250.290,00
Belanja Modal Jaringan					
Belanja Modal Jaringan Air Minum	144.317.729.024,00	121.378.138.659,00	84,10	237.191.638.138,00	-115.813.499.479,00
Belanja Modal Jaringan Listrik	0,00	0,00	0,00	390.640.360,00	-390.640.360,00



Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD					
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	2.541.849.901.434,60	2.281.781.596.417,52	89,77	1.351.028.784.039,16	930.752.812.378,36

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2024 direncanakan sebesar Rp2.541.849.901.434,60 dan telah direalisasikan sebesar Rp2.281.781.596.417,52 atau 89,77%, dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp1.351.028.784.039,16 maka realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp930.752.812.378,36 atau 68,89%.

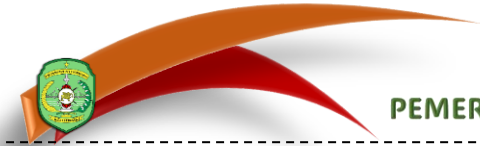
Pada tahun 2024 terdapat realisasi pembayaran Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp145.906.705.701,00 dengan rincian dapat dilihat pada **Lampiran 1**.

5.1.2.2.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan / penambahan / penggantian / peningkatan pembangunan / pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam kriteria Belanja Modal Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, dan Jalan, Irigasi dan Jaringan. Berikut rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 5 . 1 .33 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
Belanja Modal Bahan Perpustakaan					
Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	2.771.269.497,00	2.738.081.160,00	98,80	28.009.977.600,00	-25.271.896.440,00
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga					
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	3.126.085.000,00	2.980.000.000,00	95,33	1.917.624.999,00	1.062.375.001,00
Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	183.370.000,00	-183.370.000,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud					
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	12.867.004.900,00	-12.867.004.900,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS					
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	5.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD					
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	150.000.000,00	93.462.000,00	62,31	0,00	93.462.000,00
Jumlah	11.047.354.497,00	5.811.543.160,00	52,61	42.977.977.499,00	-37.166.434.339,00



Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tahun 2024 direncanakan sebesar Rp11.047.354.497,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp5.811.543.160,00 atau 52,61%, dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp42.977.977.499,00 maka realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp37.166.434.339,00 atau 86,48%.

Pada tahun 2024 terdapat realisasi pembayaran Utang Belanja Modal sebesar Rp130.267.000,00 dengan rincian dapat dilihat pada **Lampiran 1**.

5.1.2.2.6. Belanja Modal Aset Lainnya

Belanja Modal Aset Lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan / penambahan / penggantian / peningkatan pembangunan / pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam kriteria Belanja Modal Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, dan Jalan, Irigasi dan Jaringan. Berikut rincian Belanja Modal Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 5 . 1 .34 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud					
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	18.639.083.567,00	15.645.228.500,00	83,94	664.053.500,00	14.981.175.000,00
Belanja Modal Aset Lainnya BLUD					
Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	15.600.000,00	14.700.000,00	94,23	0,00	14.700.000,00
Jumlah	18.654.683.567,00	15.659.928.500,00	83,95	664.053.500,00	14.995.875.000,00

Belanja Modal Aset Lainnya tahun 2024 direncanakan sebesar Rp18.654.683.567,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp15.659.928.500,00 atau 83,95%, dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp664.053.500,00 maka realisasi Belanja Modal Aset Lainnya tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp14.995.875.000,00 atau 2.256,02%.

5.1.2.3. Belanja Tak Terduga

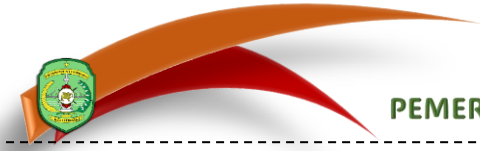
Tidak terdapat realisasi Belanja Tak Terduga (BTT) TA 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 dari anggaran sebesar Rp10.000.000.000,00.

5.1.2.4. Belanja Transfer

Transfer/Bagi Hasil TA 2024 direncanakan sebesar Rp1.124.150.859.605,00 dengan realisasi sebesar Rp1.119.682.510.459,00 atau 99,60%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp881.070.582.898,00 maka realisasi Bagi Hasil Pendapatan Lainnya tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp238.611.927.561,00 atau 27,08%. diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 5 . 1 .35 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan

URAIAN	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
Belanja Bagi Hasil					



URAIAN	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	16.000.000.000,00	16.000.000.000,00	100,00	0,00	16.000.000.000,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	754.282.000,00	754.282.000,00	100,00	0,00	754.282.000,00
Belanja Bantuan Keuangan					
Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	302.828.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	1.107.093.748.702,00	1.102.928.228.459,00	99,62	881.070.582.898,00	221.857.645.561,00
Jumlah	1.124.150.859.605,00	1.119.682.510.459,00	99,60	881.070.582.898,00	238.611.927.561,00

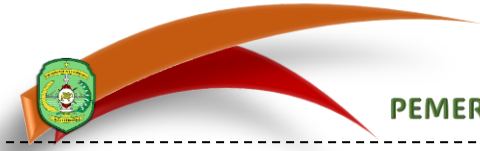
Belanja Transfer pada TA 2024 terdiri atas Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan. Belanja Bagi Hasil terdiri atas Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Daerah dan Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa. Belanja Bantuan Keuangan terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Kabupaten/Kota, Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa, dan Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.

5.1.3. Surplus/(Defisit) Realisasi Anggaran

Pada tahun anggaran 2024 Realisasi pendapatan daerah sebesar Rp12.702.146.936.113,90 sedangkan realisasi belanja daerah sebesar Rp11.688.457.730.184,60 dan realisasi belanja transfer bantuan keuangan sebesar Rp1.119.682.510.459,00, dari realisasi pendapatan, belanja dan transfer TA 2024 diperoleh defisit sebesar Rp105.993.304.529,69. Defisit Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menurun jika dibandingkan defisit TA 2023 sebesar Rp2.404.225.451.368,90.

5.1.4. Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara meliputi Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah, dengan anggaran dan realisasi TA 2024 serta realisasi TA 2023 dapat diuraikan pada tabel berikut.



Tabel 5 . 1 .36 Anggaran dan Realisasi Pembiayaan

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
Penerimaan Pembiayaan	295.974.053.392,00	295.974.725.354,16	100,00	2.806.073.504.761,35	-2.510.098.779.407,19
Pengeluaran Pembiayaan	77.000.000.000,00	24.045.000.000,00	31,23	105.874.000.000,00	-81.829.000.000,00
Pembiayaan Netto	218.974.053.392,00	271.929.725.354,16	124,18	2.700.199.504.761,35	-2.428.269.779.407,19

5.1.4.1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan daerah merupakan penerimaan yang berasal dari penggunaan SiLPA tahun lalu, adapun anggaran/realisasi TA 2024 dan realisasi TA 2023 dapat diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 5 . 1 .37 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	295.974.053.392,00	295.974.725.354,16	100,00	2.806.073.504.761,35	-2.510.098.779.407,19
Jumlah	295.974.053.392,00	295.974.725.354,16	100,00	2.806.073.504.761,35	-2.510.098.779.407,19

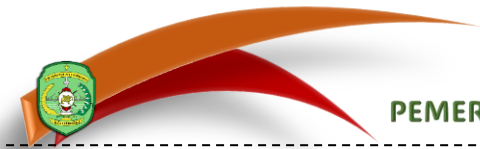
Penerimaan Pembiayaan TA 2024 direncanakan sebesar Rp295.974.725.354,16 dengan realisasi sebesar Rp295.974.725.353,43 atau 100,00% menurun sebesar Rp2.510.098.779.407,19 dibanding realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2023 sebesar Rp2.806.073.504.761,35 atau 89,45%.

5.1.4.2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan Daerah merupakan pengeluaran yang penggunaannya untuk penyertaan modal daerah. Pengeluaran Pembiayaan TA 2024 direncanakan sebesar Rp77.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp24.045.000.000,00. Nilai tersebut merupakan pengeluaran pembiayaan untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Bank Kaltimta Tahun sebesar Rp24.045.000.000,00. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Bank Kaltimta tahun 2024 sebagai pemenuhan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah ke dalam Bank Kaltim yang dituangkan dalam Surat Saham Kolektif Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 2137/A-2/BPD-PST/IX/2024 tanggal 04 September 2024.

5.1.5. Pembiayaan Neto

Pembiayaan Neto merupakan perhitungan dari penerimaan pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan, realisasi dari Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp295.974.725.354,16 dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp24.045.000.000,00 diperoleh Pembiayaan Neto sebesar Rp271.929.725.354,16 menurun sebesar Rp2.428.269.779.407,19 jika dibandingkan dengan Pembiayaan Neto TA 2023 sebesar Rp2.700.199.504.761,35.



5.1.6. Sisa Lebih Pembiayaan APBD TA 2024 (SiLPA)

SiLPA merupakan selisih antara Surplus/(Defisit) dengan Pembiayaan Neto SiLPA TA 2024 adalah sebesar Rp165.936.420.824,47 TA 2024 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 5 . 1 . 38 Rincian SiLPA Tahun Anggaran 2024

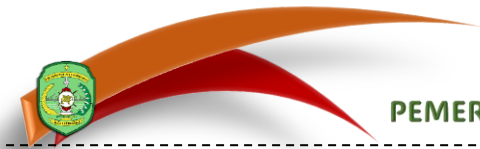
Uraian	Saldo (Rp)
Kas di Kas Daerah	106.995.793.268,66
Kas di BLUD	48.391.409.995,03
Kas Dana BOS	973.904.881,78
Kas Lainnya	150.386.003,73
Setara Kas	0,00
Kas Dana BOK Puskesmas	9.449.344.761,00
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Dinas Pendidikan dan	-24.418.085,73
Jumlah	165.936.420.824,47

a. Kas di Kas Daerah

Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh BUD untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah. Saldo Kas di Kas Daerah sebesar Rp106.995.793.268,66 merupakan saldo kas Pemerintah Daerah yang tersimpan di rekening Kas Daerah pada PT BPD Kaltim Kaltara Cabang Tenggarong dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Tenggarong yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 5 . 1 . 39 Rincian Kas di Kas Daerah

Uraian	Saldo (Rp)
Kas Daerah Pada PT BPD Kaltim Kaltara Cab Tenggarong	
Rek. 0041300016	98.239.554.013,64
Rek. 0041300019	1.872.550,00
Rek. 0041300051	7.893.043.025,02
Kas Daerah Pada BRI Cab Tenggarong	
Rek. 0212-01-000791-30-3	861.323.680,00
Jumlah Kas Daerah	106.995.793.268,66
Dana Earmark yang ada di dalam Kas Daerah Tahun 2024	
Sisa DAK Fisik TAYL s.d. Tahun 2023	11.484.186.176,00
DAK Fisik 2024	5.088.805.601,00
DAK Non Fisik 2024	10.490.351.433,00
DBH Sawit TA 2024	109.769.686,40
Dana Alokasi Umum Penggajian Formasi PPPK	0,00
Dana Alokasi Umum Pendanaan Kelurahan	0,00
Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan	4.689.624.000,00
Dana Alokasi Umum Bidang Kesehatan	0,00
Dana Alokasi Umum Bidang Pekerjaan Umum	21.802.600,00
Dana Insentif Kategori Kinerja Tahun Berjalan	1.701.360.783,00
Dana Insentif Kategori (Insentif Fiskal) Periode I KMK 295	1.790.043.653,00
Dana Insentif Kategori (Insentif Fiskal) Kesmas KMK 353	472.817.600,00
Bankeu Non Spesifik APBD 2024	1.929.620.790,00
Bankeu Spesifik APBD 2024	225.184.535,00
DBH Reboisasi 2024	7.412.417,00
FCPF 2023 sd 2024	370.906.669,00
Jumlah Dana Earmark	38.381.885.943,40



b. Kas di BLUD

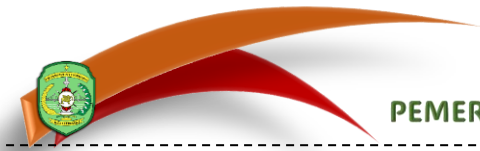
Saldo Kas di BLUD adalah saldo kas di RSUD Dayaku Raja, RSUD AM. Parikesit, RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja, BLUD 32 (tiga puluh dua) Puskesmas dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan saldo kas berdasarkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja Daerah (SP2B) melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 5 . 1 .40 Rincian Kas di BLUD

Uraian	Saldo (Rp)
Puskesmas Bunga Jadi	41.630.394,11
Puskesmas Prangat	375.415.794,48
Puskesmas Badak Baru	96.998.552,20
Puskesmas Rimba Ayu	54.979.276,00
Puskesmas Jonggon Jaya	169.991.139,82
Puskesmas Muara Badak	52.279.487,71
Puskesmas Loa Duri	164.359.647,81
Puskesmas Rapak Mahang	174.025.125,33
Puskesmas Sanga-Sanga	73.964.451,37
Puskesmas Muara Kaman	88.569.581,53
Puskesmas Marang Kayu	84.037.335,65
Puskesmas Kahala	146.607.573,23
Puskesmas Ritan	54.348.724,61
Puskesmas Muara Wis	499.744.167,96
Puskesmas Sungai Meriam	245.431.062,83
Puskesmas Loa Kulu	870.371.542,86
Puskesmas Muara Muntai	192.426.975,72
Puskesmas Mangkurawang	289.585.682,98
Puskesmas Batuah	195.710.949,85
Puskesmas Tabang	288.244.750,72
Puskesmas Muara Jawa	776.575.162,04
Puskesmas Teluk Dalam	104.730.053,48
Puskesmas Loa Ipuh	499.236.003,04
Puskesmas Handil Baru	44.855.779,75
Puskesmas Kota Bangun	38.413.612,50
Puskesmas Separi 3	249.055.650,56
Puskesmas Loa Janan	267.656.037,08
Puskesmas Sebulu 2	60.623.152,52
Puskesmas Samboja	60.817.791,79
Puskesmas Kembang Janggut	307.528.266,35
Puskesmas Sei Merdeka	508.188.292,95
Puskesmas Sebulu 1	289.091.375,65
RSUD Aji Muhammad Parikesit	11.889.632.427,80
RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	5.703.398.285,33
RSUD Dayaku Raja	23.079.936.914,42
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	352.948.973,00
Jumlah	48.391.409.995,03

c. Kas di Bendahara BOS

Saldo Kas di Bendahara BOS sebesar Rp973.904.881,78 merupakan dana yang masih berada di tangan Bendahara BOS, pada 43 TKN, 441 SDN dan 109 SMPN pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan SP2B melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan diuraikan pada tabel berikut.



Tabel 5 . 1 .41 Rincian Kas di Bendahara BOS

Sekolah	Saldo (Rp)
Taman Kanak-Kanak Negeri (TKN)	26.691.018,55
Sekolah Dasar Negeri (SDN)	340.269.963,51
Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN)	606.943.899,72
Jumlah	973.904.881,78

d. Kas Lainnya

Saldo Kas Lainnya sebesar Rp150.386.003,73 terdiri dari utang pajak yang belum disetor sebesar Rp21.569.886,73 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebesar Rp2.848.199,00.

Juga terdapat dana *Block Grant* pada SMPN 5 Tenggarong Seberang di rekening BRI nomor 021201002465306 sebesar Rp125.967.918,00. Dana ini sudah ada sejak tahun 2011. Diperkirakan dana tersebut tidak cukup untuk membiayai pembangunan ruang kelas sehingga pekerjaan tidak dilaksanakan. Akan dilakukan penelusuran atas wewenang dana tersebut dengan tujuan pengembalian kepada pemerintah. Lebih lanjut diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 5 . 1 .42 Rincian Kas Lainnya

SKPD	Kas Lainnya (Rp)	Keterangan (Rp)	
		Utang pajak yang belum disetor	Dana Block Grant
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	147.537.804,73	21.569.886,73	125.967.918,00
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.848.199,00	2.848.199,00	0,00
Jumlah	150.386.003,73	24.418.085,73	125.967.918,00

e. Kas Dana BOK Puskesmas

Saldo Kas Dana BOK Puskesmas sebesar Rp9.449.344.761,00 adalah dana alokasi khusus non-fisik yang disalurkan langsung ke rekening Puskesmas untuk mendukung kegiatan operasional kesehatan, terutama di Puskesmas.

f. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang Perhitungan Pihak Ketiga tersebut menggambarkan hasil perhitungan antara nilai hak pihak ketiga yang tersimpan dalam kas daerah atau SKPD. Utang PFK sebesar Rp24.418.085,73 adalah utang PFK dana BOSP di Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.



5.2. Penjelasan Pos – Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) menyajikan pos-pos berikut, yaitu Saldo Anggaran Lebih Awal (saldo tahun sebelumnya), Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) tahun berjalan, Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya, lain-lain dan Saldo Anggaran Lebih Akhir untuk periode berjalan. Pos-pos tersebut disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya. LPSAL dimaksudkan untuk memberikan ringkasan atas pemanfaatan saldo anggaran dan pembiayaan pemerintah, sehingga suatu entitas pelaporan harus menyajikan rinci lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat di LPSAL dalam CaLK. LPSAL Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara TA 2024 dapat dirincikan dalam tabel 5.2.1 berikut.

Tabel 5 . 2 . 1 Rincian Laporan Perubahan SAL

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Sisa Anggaran Lebih Awal	295.974.053.392,45	2.806.136.462.965,82
2	Penggunaan Saldo Anggaran Lebih	295.974.725.354,16	2.806.073.504.761,35
3	Subtotal (1-2)	-671.961,71	62.958.204,47
4	SiLPA/(SiKPA)	165.936.420.824,47	295.974.053.392,45
5	Subtotal (3+4)	165.935.748.862,76	296.037.011.596,92
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	671.961,71	-62.958.204,47
7	Lain-Lain	0,00	0,00
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)	165.936.420.824,47	295.974.053.392,45

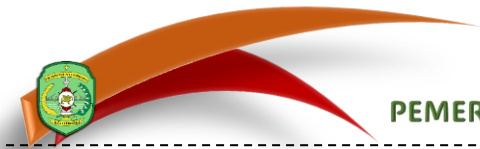
5.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih Awal adalah gabungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Saldo Anggaran Lebih Awal per 1 Januari 2024 Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang merupakan nilai akhir tahun sebelumnya sebesar Rp295.974.053.392,45 dengan rincian pada tabel 5.2.2 berikut.

Tabel 5 . 2 . 2 Rincian Saldo Anggaran Lebih Awal

Uraian	Saldo (Rp)
Kas di Kas Daerah	137.349.994.388,22
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00
Kas di Badan Layanan Umum Daerah	103.816.434.030,49
Kas di Bendahara BOS	764.590.873,45
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0,00
Kas Lainnya	4.451.523.292,09
Setara Kas	50.000.000.000,00
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-38.199.772,37
Utang Belanja yang belum disalurkan ke penerima per 31 Desember 2024 (Kecamatan Samboja Barat dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)	-370.234.000,00
Utang Belanja atas Penutupan Rekening (Kecamatan Samboja Barat)	-55.419,43
Jumlah SILPA	295.974.053.392,45

Tabel di atas menunjukkan Saldo Anggaran Lebih Awal tahun 2024 sebesar Rp295.974.053.392,45 terdiri dari:



a. Kas di Kas Daerah

Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh BUD untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah. Saldo Kas di Kas Daerah sebesar Rp137.349.994.388,22 merupakan saldo kas Pemerintah Daerah yang tersimpan di rekening Kas Daerah pada PT BPD Kaltim Kaltara Cabang Tenggarong dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Tenggarong yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 5 . 2 .3 Rincian Kas di Kas Daerah

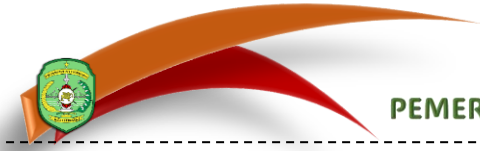
Uraian	Saldo (Rp)
Kas Daerah Pada PT BPD Kaltim Kaltara Cab Tenggarong	
Rek. 0041300016	132.213.637.843,64
Rek. 0041300019	1.698.227,00
Rek. 0041300051	4.280.214.174,58
Kas Daerah Pada BRI Cab Tenggarong	
Rek. 0212-01-000791-30-3	854.444.143,00
Jumlah Kas Daerah	137.349.994.388,22
Dana Earmark yang ada di dalam Kas Daerah Tahun 2024	
DAK Fisik 2024	1.695.192.930,00
DAK Non Fisik 2024	16.743.059.760,00
DBH Sawit TA 2024	19.731.608.000,00
Dana FCPF TA 2024	1.011.026.699,00
Dana Alokasi Umum Pendanaan Kelurahan	2.003.722,00
Dana Alokasi Umum Bidang Kesehatan	428.319.477,00
Dana Alokasi Umum Bidang Pekerjaan Umum	501.247.040,00
Dana Insentif Kategori Kinerja dalam rangka pengendalian inflasi (Periode 2)	93.204.568,00
Dana Insentif Kategori Kinerja Penggunaan Produk Dalam Negeri (Insentif Fiskal) (Kesehatan Masyarakat)	229.548.000,00
Dana Insentif Kategori Kinerja dalam rangka pengendalian inflasi (Periode 3)	298.727.000,00
Bankeu Non Spesifik APBD 2024	1.417.698.406,00
Bankeu Spesifik APBD 2024	1.954.422.782,00
DBH Reboisasi 2024	497.749.567,00
Jumlah Dana Earmark	44.603.807.951,00

b. Kas di BLUD

Saldo Kas di BLUD adalah saldo kas di RSUD Dayaku Raja, RSUD AM. Parikesit, RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja, BLUD 32 (tiga puluh dua) Puskesmas dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan saldo kas berdasarkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja Daerah (SP2B) melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 5 . 2 .4 Rincian Kas di BLUD

Nama Sub unit SKPD	Nama Rekening	Saldo Kas BLUD
Puskesmas Bunga Jadi	Kas di BLUD	115.226.266,42
Puskesmas Muara Kaman	Kas di BLUD	189.546.990,61



Nama Sub unit SKPD	Nama Rekening	Saldo Kas BLUD
Puskesmas Marang Kayu	Kas di BLUD	70.593.506,20
Puskesmas Kahala	Kas di BLUD	89.921.736,40
Puskesmas Ritan	Kas di BLUD	69.273.991,76
Puskesmas Muara Wis	Kas di BLUD	37.594.487,71
Puskesmas Sungai Meriam	Kas di BLUD	150.929.903,03
Puskesmas Loa Kulu	Kas di BLUD	166.270.112,57
Puskesmas Muara Muntai	Kas di BLUD	75.661.688,69
Puskesmas Mangkurawang	Kas di BLUD	55.240.046,25
Puskesmas Batuah	Kas di BLUD	68.247.759,39
Puskesmas Prangat	Kas di BLUD	104.545.444,23
Puskesmas Tabang	Kas di BLUD	59.096.783,98
Puskesmas Muara Jawa	Kas di BLUD	319.439.695,95
Puskesmas Teluk Dalam	Kas di BLUD	91.934.813,26
Puskesmas Loa Ipuh	Kas di BLUD	485.774.119,42
Puskesmas Handil Baru	Kas di BLUD	173.194.409,69
Puskesmas Kota Bangun	Kas di BLUD	118.088.713,07
Puskesmas Separi 3	Kas di BLUD	98.048.891,04
Puskesmas Loa Janan	Kas di BLUD	73.085.871,16
Puskesmas Sebulu 2	Kas di BLUD	476.804.003,83
Puskesmas Samboja	Kas di BLUD	97.990.569,04
Puskesmas Badak Baru	Kas di BLUD	335.042.408,64
Puskesmas Kembang Janggut	Kas di BLUD	106.414.008,73
Puskesmas Sei Merdeka	Kas di BLUD	48.444.325,98
Puskesmas Sebulu 1	Kas di BLUD	134.167.111,29
Puskesmas Rimba Ayu	Kas di BLUD	257.559.013,48
Puskesmas Jonggon Jaya	Kas di BLUD	57.594.012,67
Puskesmas Muara Badak	Kas di BLUD	177.327.301,41
Puskesmas Loa Duri	Kas di BLUD	358.367.386,55
Puskesmas Rapak Mahang	Kas di BLUD	204.741.521,80
Puskesmas Sanga-Sanga	Kas di BLUD	192.595.103,46
RSUD Aji Muhammad Parikesit	Kas di BLUD	62.050.300.785,27
RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	Kas di BLUD	11.387.421.911,16
RSUD Dayaku Raja	Kas di BLUD	25.182.485.363,35
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kas di BLUD	137.463.973,00
Jumlah		103.816.434.030,49

c. Kas di Bendahara BOS

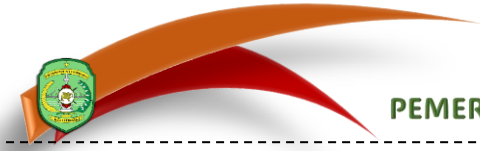
Saldo Kas di Bendahara BOS sebesar Rp764.590.873,45 merupakan dana yang masih berada di tangan Bendahara BOS, pada 24 TKN, 440 SDN dan 105 SMPN pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan SP2B melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 5 . 2 .5 Rincian Kas di Bendahara BOS

Sekolah	Saldo (Rp)
Taman Kanak-Kanak Negeri (TKN)	10.968.847,68
Sekolah Dasar Negeri (SDN)	119.876.105,76
Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN)	633.745.920,01
Jumlah	764.590.873,45

d. Kas Lainnya

Saldo Kas Lainnya sebesar Rp4.451.523.292,09 terdiri dari utang pajak yang yang belum disetor sebesar Rp18.982.861,00 pada Dinas Pendidikan, saldo kas BOK Puskesmas pada Dinas Kesehatan sebesar Rp3.918.003.787,00, SP2D LS



di rekening Bendahara yang belum dibayarkan pada tanggal 31 Desember 2024 pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebesar Rp46.630.000,00, Kecamatan Samboja Barat sebesar Rp323.604.000,00, proses penutupan rekening sebesar Rp55.419,43 dan Kas BOSKAB sebesar Rp18.279.306,66. Juga terdapat dana *Block Grant* pada SMPN 5 Tenggarong Seberang di rekening BRI nomor 021201002465306 sebesar Rp125.967.918,00. Dana ini sudah ada sejak tahun 2011. Diperkirakan dana tersebut tidak cukup untuk membiayai pembangunan ruang kelas sehingga pekerjaan tidak dilaksanakan. Akan dilakukan penelusuran atas wewenang dana tersebut dengan tujuan pengembalian kepada pemerintah. Lebih lanjut diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 5 . 2 . 6 Rincian Kas Lainnya

SKPD	Kas Lainnya (Rp)	Keterangan (Rp)				
		Utang pajak yang belum disetor	Kas BOK	SP2D LS di Rekening Bendahara	Dana <i>Block Grant</i>	Kas BOSKAB
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	163.230.085,66	18.982.861,00	0,00	0,00	125.967.918,00	18.279.306,66
Dinas Kesehatan	3.918.003.787,00	0,00	3.918.003.787,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	46.630.000,00	0,00	0,00	46.630.000,00	0,00	0,00
Kecamatan Samboja Barat	323.659.419,43	0,00	0,00	323.659.419,43	0,00	0,00
Jumlah	4.451.523.292,09	18.982.861,00	3.918.003.787,00	370.289.419,43	125.967.918,00	18.279.306,66

e. Setara Kas

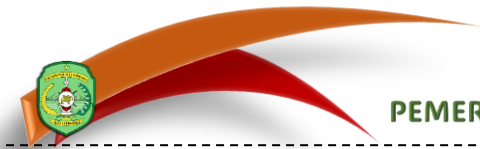
Saldo Setara Kas sebesar Rp50.000.000.000,00 terdiri dari saldo deposito berjangka pada RSUD Aji Muhammad Parikesit sebesar Rp10.000.000.000,00 dan RSUD Dayaku Raja sebesar Rp40.000.000.000,00 yang merupakan investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 5 . 2 . 7 Rincian Setara Kas

No.	Uraian	Nama Bank	Nomor Sertifikat	Nominal (Rp)
1	Deposito Berjangka RSUD Aji Muhammad Parikesit	Bank Syariah Indonesia	AB00165149	10.000.000.000,00
2	Deposito Berjangka RSUD Dayaku Raja	Bankaltimtura	AD092603	20.000.000.000,00
3	Deposito Berjangka RSUD Dayaku Raja	Bankaltimtura	AD092604	20.000.000.000,00
	Jumlah			50.000.000.000,00

f. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang Perhitungan Pihak Ketiga tersebut menggambarkan hasil perhitungan antara nilai hak pihak ketiga yang tersimpan dalam kas daerah atau SKPD. Utang PFK sebesar Rp38.199.772,37 adalah utang PFK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta terdapat utang PFK yang sudah digunakan langsung oleh sekolah sebesar Rp19.216.911,37.



g. Utang Belanja

Utang Belanja yang belum disalurkan ke penerima per 31 Desember 2024 sebesar Rp370.234.000,00 adalah SP2D LS di rekening Bendahara yang belum dibayarkan pada tanggal 31 Desember 2024 pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebesar Rp46.630.000,00 dan pada Kecamatan Samboja Barat sebesar Rp323.604.000,00 serta Utang Belanja atas Penutupan Rekening Kecamatan Samboja Barat sebesar Rp55.419,43.

5.2.2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Saldo Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Awal per 31 Desember 2024 Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar Rp295.974.725.354,16. Jumlah tersebut merupakan saldo Penggunaan SAL yang berasal dari rekening Pembiayaan Penerimaan Daerah atas Penggunaan SiLPA tahun berjalan sebesar Rp295.974.053.392,45 dikurang koreksi atas SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp671.961,71.

5.2.3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

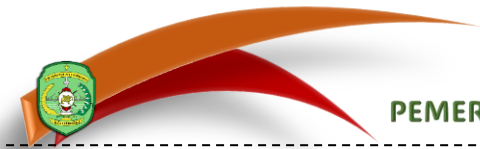
Saldo SiLPA/SiKPA tahun 2024 sebesar Rp165.936.420.824,47 yang terdiri dari total realisasi Pendapatan, Belanja dan Transfer serta Pembiayaan Penerimaan dan Pembiayaan Pengeluaran Daerah yang diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 5 . 2 . 8 Rincian Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Pendapatan Daerah	12.702.146.936.113,90	7.787.223.822.360,59
Belanja Daerah	11.688.457.730.184,60	9.310.378.690.831,49
Belanja Transfer	1.119.682.510.459,00	881.070.582.898,00
Surplus / (Defisit)	-105.993.304.529,69	2.272.085.734.823,41
Penerimaan Pembiayaan	295.974.725.354,16	2.806.073.504.761,35
Pengeluaran Pembiayaan	24.045.000.000,00	105.874.000.000,00
Pembiayaan Neto	271.929.725.354,16	2.700.199.504.761,35
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	165.936.420.824,47	2.594.206.200.231,66

Rincian Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) sebagai berikut.

- a. Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara TA 2024 sebesar Rp12.702.146.936.113,90 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
- b. Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara TA 2024 sebesar Rp11.688.457.730.184,60 terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga;
- c. Transfer Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara TA 2024 sebesar Rp1.119.682.510.459,00 terdiri dari Transfer/Bagi Hasil Ke Desa;
- d. Defisit sebesar Rp105.993.304.529,69 merupakan hasil pengurangan antara Pendapatan Daerah Belanja Daerah dan Transfer;
- e. Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara TA 2024 sebesar Rp295.974.725.354,16 yang merupakan SiLPA TA 2023;



- f. Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara TA 2024 sebesar Rp24.045.000.000,00 yang merupakan penyertaan modal pada Bank Kaltimtura;
- g. Pembiayaan Neto sebesar Rp271.929.725.354,16; dan
- h. SiLPA TA 2024 sebesar Rp165.936.420.824,47.

5.2.4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya sebesar Rp671.961,71 adalah koreksi kesalahan pembukuan Penerimaan PAD-Jasa Giro dengan cara pemindahbukuan dari kas daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara nomor rekening 0041300019 ke Rekening Kas Umum Provinsi Kalimantan Timur nomor rekening 0011203706 sebesar Rp265.643,00 dan Koreksi Kas Dana *Block Grant* sebesar Rp937.604,71.

5.2.5. Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo Anggaran Lebih Akhir Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara per 31 Desember 2024 sebesar Rp165.936.420.823,74 yang merupakan penjumlahan dari SiLPA ditambah koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya serta lain-lain, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5 . 2 . 9 Rincian Saldo Anggaran Lebih Akhir

Uraian	Saldo (Rp)
Kas di Kas Daerah	106.995.793.268,66
Kas di BLUD	48.391.409.995,03
Kas Dana BOS	973.904.881,78
Kas Lainnya	150.386.003,73
Setara Kas	0,00
Kas Dana BOK Puskesmas	9.449.344.761,00
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan BOSP dan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	-24.418.085,73
Jumlah	165.936.420.824,47



5.3. Penjelasan Pos – Pos Neraca

5.3.1. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa yang akan datang diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dengan andal dalam satuan mata uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dapat dipelihara, karena alasan sejarah dan budaya. Saldo Aset per 31 Desember 2024 sebesar Rp26.006.463.209.083,22 atau mengalami peningkatan sebesar Rp2.782.297.744.465,08 atau 11,98% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp23.224.165.464.618,12 yang dirinci pada tabel 5.3.1 berikut.

Tabel 5 . 3 . 1 Perbandingan Nilai Aset

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
Jumlah Aset	26.006.463.209.083,22	23.224.165.464.618,12	2.782.297.744.465,10	11,98

Aset di Neraca terdiri atas Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Aset Lainnya dengan rincian pada tabel 5.3.2 berikut.

Tabel 5 . 3 . 2 Rincian Aset

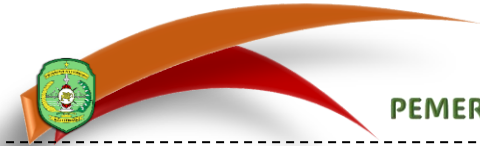
Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
Aset Lancar	2.786.120.432.603,39	535.626.624.203,81	2.250.493.808.399,58	420,16
Investasi Jangka Panjang	1.044.600.184.115,45	1.032.352.289.883,78	12.247.894.231,67	1,19
Aset Tetap	20.272.164.802.251,41	17.141.453.256.661,32	3.130.711.545.590,09	18,26
Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Lainnya	1.305.989.861.910,97	4.514.733.293.869,21	-3.208.743.431.958,24	-71,07
Properti Investasi	597.587.928.202,00	0,00	597.587.928.202,00	100,00
Jumlah	26.006.463.209.083,22	23.224.165.464.618,12	2.782.297.744.465,10	11,98

5.3.1.1. Aset Lancar

Aset Lancar meliputi Kas dan Setara Kas, Investasi Jangka Pendek, Piutang, Beban Dibayar di Muka, dan Persediaan. Pos-pos Investasi Jangka Pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos Piutang antara lain Piutang Pajak, Retribusi, Denda, Penjualan Angsuran, dan Piutang Lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan. Saldo Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.786.120.432.603,39 dengan rincian pada tabel 5.3.3 berikut.

Tabel 5 . 3 . 3 Rincian Aset Lancar

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
Kas di Kas Daerah	106.995.793.268,66	137.349.994.388,22	-30.354.201.119,56	-22,10
Kas di BLUD	48.391.409.995,03	103.816.434.030,49	-55.425.024.035,46	-53,39



Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
Kas Dana BOS	973.904.881,78	764.590.873,45	209.314.008,33	27,38
Kas Lainnya	150.386.003,73	4.451.523.292,09	-4.301.137.288,36	-96,62
Setara Kas	0,00	50.000.000.000,00	-50.000.000.000,00	-100,00
Kas Dana BOK Puskesmas	9.449.344.761,00	0,00	9.449.344.761,00	100,00
Piutang Pajak Daerah	86.898.735.022,44	96.966.778.420,20	-10.068.043.397,76	-10,38
Piutang Retribusi Daerah	14.558.159.691,00	13.595.091.877,00	963.067.814,00	7,08
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	6.989.797.182,86	30.199.102.139,38	-23.209.304.956,52	-76,85
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	2.310.936.584.000,00	0,00	2.310.936.584.000,00	100,00
Piutang Transfer Antar Daerah	89.935.597.000,00	63.759.961.000,00	26.175.636.000,00	41,05
Piutang Lainnya	2.514.895.903,00	2.593.320.350,00	-78.424.447,00	-3,02
Penyisihan Piutang	-72.854.754.837,36	-75.041.241.389,54	2.186.486.552,18	-2,91
Beban Dibayar Dimuka	1.406.070.904,75	5.193.541.007,38	-3.787.470.102,63	-72,93
Persediaan	179.774.508.826,50	101.977.528.215,14	77.796.980.611,36	76,29
Jumlah	2.786.120.432.603,39	535.626.624.203,81	2.250.493.808.399,58	420,16

5.3.1.1.1. Kas di Kas Daerah

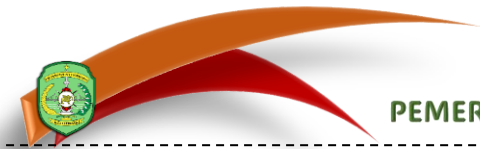
Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Kas di Kas Daerah	106.995.793.268,66	137.349.994.388,22

Kas di Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh BUD untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah. Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp106.995.793.268,66 merupakan saldo kas pemerintah daerah yang tersimpan di rekening Kas Daerah pada PT BPD Kaltim Kaltara Cabang Tenggarong dan BRI Cabang Tenggarong yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu.

Tabel 5 . 3 . 4 Rincian Kas di Kas Daerah

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
Kas Di Kas Daerah Pengeluaran Nomor Rekening: 0041300016	98.239.554.013,64	132.213.637.843,64	-33.974.083.830,00	-25,70
Kas di Kas Daerah Dana Transfer Nomor Rekening: 0041300051	7.893.043.025,02	4.280.214.174,58	3.612.828.850,44	84,41
Kas di Kas Daerah PAD Nomor Rekening: 0041300019	1.872.550,00	1.698.227,00	174.323,00	10,26
Kas di Kas Daerah BRI Pengeluaran Nomor Rekening: 0212-01-000791-30-3	861.323.680,00	854.444.143,00	6.879.537,00	0,81
Jumlah	106.995.793.268,66	137.349.994.388,22	-30.354.201.119,56	-22,10

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp106.995.793.268,66 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp137.349.994.388,22, dibandingkan saldo Kas di Kas Daerah tahun sebelumnya mengalami penurunan sebesar Rp30.354.201.119,56 atau 22,10%.



Pada saldo kas daerah terdapat dana BLUD RS AM Dayaku Raja senilai Rp40.000.000.000,00 yang di mutasi ke rekening kas umum daerah pada akhir tahun dengan tujuan untuk menutupi kekurangan saldo kas daerah saat itu.

Pada tahun 2024 dari saldo Kas di Daerah yang disajikan di atas, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara juga memiliki rekening PT BPD Kaltim Kaltara atas nama Dinas Pertambangan Energi dengan nomor rekening 0041541750 yang bersaldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp11.005.827.210,23. Saldo pada rekening ini merupakan dana jaminan kesungguhan dan tidak disajikan pada Neraca karena sedang dalam proses penyerahan ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

5.3.1.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00

Kas di Bendahara Penerimaan adalah aset lancar berupa kas yang tersimpan pada rekening SKPD atas nama Bendahara Penerima. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan di tahun 2024 sebesar Rp0,00. Seluruh saldo Kas di Bendahara Penerimaan telah disetor ke Kas di Daerah.

5.3.1.1.3. Kas di Bendahara Pengeluaran

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah aset lancar berupa kas yang tersimpan pada rekening SKPD atas nama Bendahara Pengeluaran SKPD. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran di tahun 2024 adalah sebesar Rp0,00. Seluruh saldo Kas di Bendahara Pengeluaran telah disetor ke Kas di Daerah.

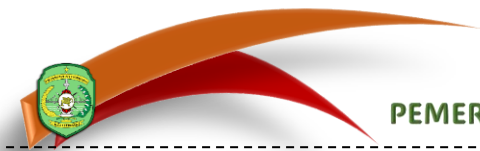
5.3.1.1.4. Kas di Badan Layanan Umum Daerah

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Kas di BLUD (Badan Layanan Umum Daerah)	48.391.409.994,43	103.816.434.030,49

Saldo Kas di BLUD sebesar Rp48.391.409.994,43 merupakan saldo Kas di BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas Kabupaten Kutai Kartanegara per 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut.

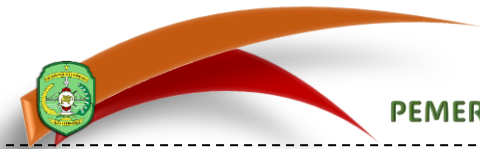
Tabel 5 . 3 . 5 Rincian Kas di BLUD

SKPD	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
Puskesmas Bunga Jadi	41.630.394,11	115.226.266,42	-73.595.872,31	-63,87
Puskesmas Prangat	146.607.573,23	104.545.444,23	42.062.129,00	40,23
Puskesmas Badak Baru	499.236.003,04	335.042.408,64	164.193.594,40	49,01
Puskesmas Rimba Ayu	267.656.037,08	257.559.013,48	10.097.023,60	3,92
Puskesmas Jonggon Jaya	60.623.152,52	57.594.012,67	3.029.139,85	5,26
Puskesmas Muara Badak	60.817.791,79	177.327.301,41	-116.509.509,62	-65,70



SKPD	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
Puskesmas Loa Duri	307.528.266,35	358.367.386,55	-50.839.120,20	-14,19
Puskesmas Rapak Mahang	508.188.292,95	204.741.521,80	303.446.771,15	148,21
Puskesmas Sanga-Sanga	289.091.375,65	192.595.103,46	96.496.272,19	50,10
Puskesmas Muara Kaman	375.415.794,48	189.546.990,61	185.868.803,87	98,06
Puskesmas Marang Kayu	96.998.552,20	70.593.506,20	26.405.046,00	37,40
Puskesmas Kahala	54.979.276,00	89.921.736,40	-34.942.460,40	-38,86
Puskesmas Ritan	169.991.139,82	69.273.991,76	100.717.148,06	145,39
Puskesmas Muara Wis	52.279.487,71	37.594.487,71	14.685.000,00	39,06
Puskesmas Sungai Meriam	164.359.647,81	150.929.903,03	13.429.744,78	8,90
Puskesmas Loa Kulu	174.025.125,33	166.270.112,57	7.755.012,76	4,66
Puskesmas Muara Muntai	73.964.451,37	75.661.688,69	-1.697.237,32	-2,24
Puskesmas Mangkurawang	88.569.581,53	55.240.046,25	33.329.535,28	60,34
Puskesmas Batuah	84.037.335,65	68.247.759,39	15.789.576,26	23,14
Puskesmas Tabang	54.348.724,61	59.096.783,98	-4.748.059,37	-8,03
Puskesmas Muara Jawa	499.744.167,96	319.439.695,95	180.304.472,01	56,44
Puskesmas Teluk Dalam	245.431.062,83	91.934.813,26	153.496.249,57	166,96
Puskesmas Loa Ipuh	870.371.542,86	485.774.119,42	384.597.423,44	79,17
Puskesmas Handil Baru	192.426.975,72	173.194.409,69	19.232.566,03	11,10
Puskesmas Kota Bangun	289.585.682,98	118.088.713,07	171.496.969,91	145,23
Puskesmas Separi 3	195.710.949,85	98.048.891,04	97.662.058,81	99,61
Puskesmas Loa Janan	288.244.750,72	73.085.871,16	215.158.879,56	294,39
Puskesmas Sebulu 2	776.575.162,04	476.804.003,83	299.771.158,21	62,87
Puskesmas Samboja	104.730.053,48	97.990.569,04	6.739.484,44	6,88
Puskesmas Kembang Janggut	44.855.779,75	106.414.008,73	-61.558.228,98	-57,85
Puskesmas Sei Merdeka	38.413.612,50	48.444.325,98	-10.030.713,48	-20,71
Puskesmas Sebulu 1	249.055.650,56	134.167.111,29	114.888.539,27	85,63
RSUD Aji Muhammad Parikesit	11.889.632.427,80	62.050.300.785,27	-50.160.668.357,47	-80,84
RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	5.703.398.285,33	11.387.421.911,16	-5.684.023.625,83	-49,91
RSUD Dayaku Raja	23.079.936.914,42	25.182.485.363,35	-2.102.548.448,93	-8,35
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	352.948.973,00	137.463.973,00	215.485.000,00	156,76
Jumlah	48.391.409.995,03	103.816.434.030,49	-55.425.024.035,46	-53,39

Saldo Kas di BLUD adalah saldo kas berdasarkan Laporan Keuangan RSUD AM. Parikesit, RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti dan RSUD Dayaku Raja yang sudah *Audited* serta dan 32 (tiga puluh dua) Puskesmas BLUD TA 2024 *Unaudited*. Selain itu terdapat dana Kas BLUD dari RS Dayaku Raja senilai



Rp40.000.000.000,00 yang di mutasi ke rekening kas umum daerah pada akhir tahun dengan tujuan untuk menutupi kekurangan saldo kas daerah saat itu.

5.3.1.1.5. Kas di Bendahara BOS

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Kas di Bendahara BOS	973.904.881,78	764.590.873,45

Saldo Kas di Bendahara BOS sebesar Rp973.904.881,78 merupakan dana yang masih berada di tangan Bendahara BOS, pada 43 TKN, 441 SDN dan 109 SMPN pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan SP2B melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 5 . 3 . 6 Rincian Kas di Bendahara BOS

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
Taman Kanak-Kanak Negeri (TKN)	26.691.018,55	10.968.847,68	15.722.170,87	143,33
Sekolah Dasar Negeri (SDN)	340.269.963,51	119.876.105,76	220.393.857,75	183,85
Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN)	606.943.899,72	633.745.920,01	-26.802.020,29	-4,23
Jumlah	973.904.881,78	764.590.873,45	209.314.008,33	27,38

5.3.1.1.6. Kas Lainnya

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Kas Lainnya	150.386.003,73	4.451.523.292,09

Saldo Kas Lainnya sebesar Rp150.386.003,73 terdiri dari utang pajak yang belum disetor sebesar Rp21.569.886,73 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebesar Rp2.848.199,00.

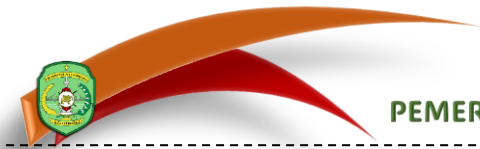
Juga terdapat dana *Block Grant* pada SMPN 5 Tenggarong Seberang di rekening BRI nomor 021201002465306 sebesar Rp125.967.918,00. Dana ini sudah ada sejak tahun 2011. Diperkirakan dana tersebut tidak cukup untuk membiayai pembangunan ruang kelas sehingga pekerjaan tidak dilaksanakan. Akan dilakukan penelusuran atas wewenang dana tersebut dengan tujuan pengembalian kepada pemerintah. Lebih lanjut diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 5 . 3 . 7 Rincian Kas Lainnya

SKPD	Kas Lainnya (Rp)	Keterangan (Rp)	
		Utang pajak yang belum disetor	Dana Block Grant
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	147.537.804,73	21.569.886,73	125.967.918,00
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.848.199,00	2.848.199,00	0,00
Jumlah	150.386.003,73	24.418.085,73	125.967.918,00

5.3.1.1.7. Setara Kas

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Setara Kas	0,00	50.000.000.000,00



Setara Kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek, yaitu 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.

5.3.1.1.8. Kas Dana BOK Puskesmas

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Kas Dana BOK Puskesmas	9.449.344.761,00	0,00

Saldo Kas Dana BOK Puskesmas sebesar Rp9.449.344.761,00 merupakan saldo Kas Dana BOK seluruh Puskesmas Kabupaten Kutai Kartanegara per 31 Desember 2024 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non-Fisik yang disalurkan langsung ke rekening Puskesmas untuk mendukung kegiatan operasional kesehatan, terutama di Puskesmas.

Pada tahun 2023 saldo Kas Dana BOK Puskesmas disajikan pada Kas Lainnya mengingat kode rekening akun Kas Dana BOK Puskesmas di aplikasi pengelola keuangan yang digunakan pada saat penyusunan laporan keuangan tahun 2023 tidak dapat mengakomodir penambahan rekening sehingga saldo Kas Dana BOK Puskesmas sebesar Rp3.918.003.787,00 dimasukkan dalam penyajian saldo Kas Lainnya.

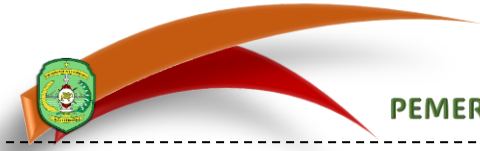
5.3.1.1.9. Piutang Pajak Daerah

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Piutang Pajak Daerah	86.898.735.022,44	96.966.778.420,20

Saldo Piutang Pajak Daerah merupakan piutang atas pajak daerah yang telah dikeluarkan surat ketetapan nya tetapi belum dilunasi sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023. Rincian Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut.

Tabel 5 . 3 . 8 Rincian Piutang Pajak Daerah

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan Piutang Pajak Daerah	Pengurangan Pelunasan Piutang Pajak Daerah	Pengurangan SK Penghapusan Piutang Pajak Daerah	31 Desember 2024 (Rp)
Piutang Pajak Hotel	839.983.703,00	0,00	76.154.909,00	735.780.639,00	28.048.155,00
Piutang Pajak Restoran	12.544.196.316,46	69.800,00	7.760.360.990,00	642.929.971,04	4.140.975.155,42
Piutang Pajak Hiburan	14.988.400,00	0,00	2.919.300,00	0,00	12.069.100,00
Piutang Pajak Reklame	450.321.297,00	144.190.211,00	45.220.475,00	0,00	549.291.033,00
Piutang Pajak Penerangan Jalan	1.099.070.562,22	0,00	14.534.288,00	0,00	1.084.536.274,22
Piutang Pajak Parkir	9.497.500,00	0,00	9.197.500,00	0,00	300.000,00
Piutang Pajak Air Tanah	522.816.095,52	47.225.302,00	128.492.858,72	0,00	441.548.538,80
Piutang Pajak Sarang Burung Walet	990.000,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00
Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	6.440.679,00	0,00	0,00	0,00	6.440.679,00
Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	81.478.473.867,00	11.316.619.973,00	1.860.030.344,00	10.300.527.409,00	80.634.536.087,00
Jumlah	96.966.778.420,20	11.508.105.286,00	9.896.910.664,72	11.679.238.019,04	86.898.735.022,44



Saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp86.898.735.022,44 mengalami penurunan sebesar Rp10.068.043.397,76 atau 10,38% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp96.966.778.420,20 secara rinci dapat dilihat pada Tabel diatas.

Rincian perhitungan Piutang Pajak Daerah berdasarkan umur piutang dapat dilihat di **Lampiran 2**.

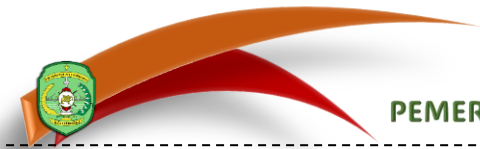
Terkait piutang PBB-P2 yang tersaji, terdapat piutang yang telah kadaluarsa setelah melampaui waktu 5 tahun sejak terutang pajak sebesar Rp43.563.059.297,00.

Pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah melakukan penghapusan piutang Pajak Daerah melalui:

- 1) Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 121/SK-BUP/HK/2024 Tentang Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Pajak 2008 sebesar Rp3.096.606.416,00;
- 2) Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 212/SK-BUP/HK/2024 Tentang Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Pajak 2009 sebesar Rp3.368.269.581,00;
- 3) Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 624/SK-BUP/HK/2024 Tentang Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Pajak 2010 dan Pajak Daerah Lainnya Tahun Pajak 2008 sebesar Rp3.349.744.746,04; dan
- 4) Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 755/SK-BUP/HK/2024 Tentang Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Pajak 2010 sebesar Rp1.864.617.276,00.

Pada daftar Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), masih terdapat piutang pajak yang berasal dari bukan Objek Pajak daerah. Hal tersebut terjadi PT Rea Kaltim Plantations dengan nilai piutang senilai Rp845.201.380,00. PT Rea Kaltim Plantations merupakan perusahaan perkebunan kelapa sawit sehingga merupakan objek pajak Pemerintah Pusat yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi, Pertambangan Mineral atau Batubara, dan Sektor Lainnya (PBB-P5L) senilai Rp845.201.380,00. Selain itu PT Rea Kaltim Plantations tidak lagi mencatat utang kepada Pemkab Kukar senilai Rp845.201.380,00. PT Rea Kaltim Plantations sudah menjadi WP Pemerintah Pusat dan sudah membayarkan PBB-P5L ke rekening negara.

Selain piutang diatas, Bapenda juga memiliki hak tagih atas beberapa WP *self assessment* yang telah melaporkan kewajiban perpajakannya namun belum melakukan pelunasan senilai Rp7,831,822,262,00. Nominal tersebut tidak tercatat dalam neraca karena menurut kebijakan akuntansi Pemkab Kukar, jenis pajak *self assessment* akan dicatat sebagai Pendapatan-LO pada saat dilakukan pembayaran sehingga tidak akan timbul piutang.



5.3.1.1.10. Piutang Retribusi

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Piutang Retribusi	14.558.159.691,00	13.595.091.877,00

Saldo Piutang Retribusi merupakan piutang atas retribusi daerah yang telah dikeluarkan surat ketetapannya tetapi belum dilunasi sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023. Rincian Piutang Retribusi per 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut:

Tabel 5 . 3 . 9 Rincian Piutang Retribusi

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan Piutang Pajak Daerah	Pengurangan Pelunasan Piutang Pajak Retribusi	31 Desember 2024 (Rp)
Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	11.839.015.135,00	1.223.236.914,00	260.169.100,00	12.802.082.949,00
Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.602.376.367,00	0,00	0,00	1.602.376.367,00
Piutang Retribusi Izin Gangguan	153.700.375,00	0,00	0,00	153.700.375,00
Jumlah	13.595.091.877,00	1.223.236.914,00	260.169.100,00	14.558.159.691,00

Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2024 sebesar Rp14.558.159.691,00 mengalami kenaikan sebesar Rp963.067.814,00 atau 7,08% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp13.595.091.877,00. Piutang Retribusi Pelayanan Pasar mengalami kenaikan Rp963.067.814,00 karena terjadi penambahan piutang dari Wajib Retribusi di tahun 2024.

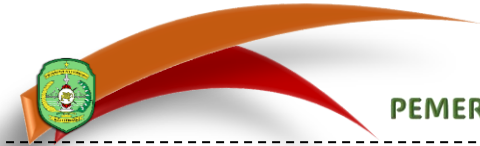
5.3.1.1.11. Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	6.989.797.182,86	30.199.102.139,38

Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024 sebesar Rp6.989.797.182,86 terdiri atas Piutang Pendapatan Denda Pajak, Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Piutang Pendapatan BLUD, Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah, dan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya serta Piutang Remunerasi Dana Bagi Hasil *Treasury Deposit Facility* (TDF). Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut.

Tabel 5 . 3 . 10 Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
Piutang Pendapatan Denda Pajak	760.925.196,00	0,00	760.925.196,00	100,00
Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	105.895.764,86	89.348.000,00	16.547.764,86	18,52
Piutang Pendapatan BLUD	1.960.518.927,00	26.029.727.273,00	-24.069.208.346,00	-92,47
Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	4.070.728.600,00	4.078.512.600,00	-7.784.000,00	-0,19



Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya	0,00	1.514.266,38	-1.514.266,38	-100,00
Piutang Remunerasi Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)	91.728.695,00	0,00	91.728.695,00	100,00
Jumlah	6.989.797.182,86	30.199.102.139,38	-23.209.304.956,52	-76,85

Berdasarkan tabel di atas Piutang Pendapatan BLUD sebesar Rp1.960.518.927,00 dengan Rincian Piutang BLUD tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5 . 3 . 11 Rincian Piutang BLUD

SKPD	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
Dinas Kesehatan	22.258.000,00	5.200.000,00	17.058.000,00	328,04
RSUD Aji Muhammad Parikesit	1.335.475.803,00	21.983.899.897,00	-20.648.424.094,00	-93,93
RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	602.785.124,00	4.040.338.276,00	-3.437.553.152,00	-85,08
RSUD Dayaku Raja	0,00	289.100,00	-289.100,00	-100,00
Jumlah	1.960.518.927,00	26.029.727.273,00	-24.069.208.346,00	-92,47

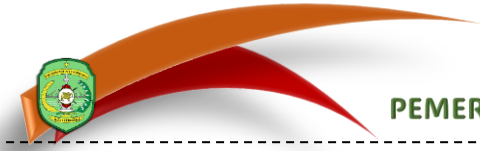
5.3.1.1.12. Piutang Transfer Pemerintah Pusat

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	2.310.936.584.000,00	0,00

Saldo Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan merupakan hak Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang belum disalurkan oleh Pemerintah Pusat sampai dengan 31 Desember 2024 sesuai dengan PMK 89 Tahun 2024 tentang penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Tahun 2024 serta KMK 44 Tahun 2024 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2024. Rincian saldo Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 5 . 3 . 12 Rincian Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Jenis dan Rincian DBH	PMK 89 2024 Kurang Bayar	PMK 89 2024 Lebih Bayar	Realisasi KMK 44 2024 Tunai	Penyaluran Kurang Bayar setelah Pemotongan Melalui TDF dengan KMK 44 2024	Sisa DBH Kurang Bayar
Dsana Bagi Hasil Pajak	793.413.648.000,00	20.000,00	1.000,00	170.260.159.000,00	607.039.126.000,00
PPH	38.525.772.000,00	0,00	0,00	0,00	29.475.988.000,00
PPH Pasal 21	38.091.202.000,00	0,00	0,00	0,00	29.143.499.000,00
PPH Pasal 25/29 OP	434.570.000,00	0,00	0,00	0,00	332.489.000,00
PBB	754.887.875.000,00	0,00	0,00	170.260.159.000,00	577.563.138.000,00
DBH PBB Perkebunan	579.410.000,00	0,00	0,00	136.105.000,00	443.305.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Jenis dan Rincian DBH	PMK 89 2024 Kurang Bayar	PMK 89 2024 Lebih Bayar	Realisasi KMK 44 2024 Tunai	Penyaluran Kurang Bayar setelah Pemotongan Melalui TDF dengan KMK 44 2024	Sisa DBH Kurang Bayar
DBH PBB Perhutanan	13.041.438.000,00	0,00	0,00	3.063.461.000,00	9.977.977.000,00
Transfer DBH PBB Migas untuk Kabupaten/Kota	247.225.114.000,00	0,00	0,00	51.009.116.000,00	189.151.420.000,00
DBH PBB Non Migas Lainnya	493.882.937.000,00	0,00	0,00	116.014.131.000,00	377.868.806.000,00
Transfer DBH PBB Biaya Pemungutan migas untuk Kabupaten/kota	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
DBH PBB Sektor Lainnya Bagian Daerah	158.973.000,00	0,00	0,00	37.343.000,00	121.630.000,00
Transfer DBH Biaya/Upah Pungut PBB Pertambangan Non Migas lainnya untuk Kabupaten/kota	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
Biaya Pemungutan Perkebunan	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Biaya Pemungutan Perhutanan	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
CHT	1.000,00	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00
CHT	1.000,00	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	2.227.031.892.000,00	16.114.342.000,00	0,00	523.134.434.000,00	1.703.897.458.000,00
DBH-SDA Minyak Bumi & Gas Bumi	165.685.147.000,00	0,00	0,00	38.919.786.000,00	126.765.361.000,00
Minyak Bumi	30.359.366.000,00	0,00	0,00	7.131.478.000,00	23.227.888.000,00
DBH Minyak Bumi 15%	30.359.366.000,00	0,00	0,00	7.131.478.000,00	23.227.888.000,00
DBH Minyak Bumi 0.5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DBH-SDA Gas Bumi	135.325.781.000,00	0,00	0,00	31.788.308.000,00	103.537.473.000,00
DBH Gas Bumi 30%	135.325.781.000,00	0,00	0,00	31.788.308.000,00	103.537.473.000,00
DBH-SDA Pertambangan Umum	2.061.346.741.000,00	0,00	0,00	484.214.644.000,00	1.577.132.097.000,00
DBH Pertambangan Umum - luran Tetap	1.702.291.000,00	0,00	0,00	399.872.000,00	1.302.419.000,00
DBH Pertambangan Umum - Royalti	2.059.644.450.000,00	0,00	0,00	483.814.772.000,00	1.575.829.678.000,00
DBH-SDA Kehutanan	4.000,00	4.394.148.000,00	0,00	4.000,00	0,00
DBH Kehutanan - PSDH	1.000,00	4.261.348.000,00	0,00	1.000,00	0,00
DBH Kehutanan - Dana Reboisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IIUPH	3.000,00	132.800.000,00	0,00	3.000,00	0,00
DBH Perikanan	0,00	1.579.785.000,00	0,00	0,00	0,00
DBH Perikanan	0,00	1.579.785.000,00	0,00	0,00	0,00
DBH Sawit	0,00	10.140.409.000,00	0,00	0,00	0,00
DBH Sawit	0,00	10.140.409.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	3.020.445.540.000	16.114.362.000	1.000	693.394.593.000	2.310.936.584.000

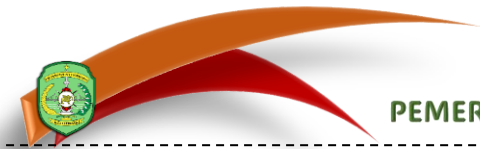
5.3.1.1.13. Piutang Transfer Pemerintah Antar Daerah

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Piutang Transfer Pemerintah Antar Daerah	89.935.597.000,00	63.759.961.000,00

Saldo Piutang Transfer Pemerintah Antar Daerah merupakan hak Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang belum disalurkan oleh Pemerintah Provinsi

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024



Kalimantan Timur sampai dengan 31 Desember 2024, yang ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.3.13 Rincian Piutang Transfer Antar Daerah

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
Piutang Bagi Hasil Pajak	89.935.597.000,00	63.759.961.000,00	26.175.636.000,00	41,05%
Jumlah	89.935.597.000,00	63.759.961.000,00	26.175.636.000,00	41,05%

Jumlah tersebut di atas sesuai dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/0419-V/BPKAD tentang Penetapan Nilai Kurang Salur Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi kepada Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur Tahun 2024.

5.3.1.1.14. Piutang Lainnya

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Piutang Lainnya	2.514.895.903,00	2.593.320.350,00

Saldo Piutang Lainnya sebesar Rp2.514.895.903,00 merupakan saldo Piutang Lain-lain per 31 Desember 2024. Rincian Piutang Lainnya per 31 Desember 2024 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5.3.14 Rincian Piutang Piutang Lainnya

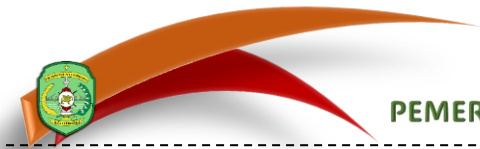
Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Investasi Nonpermanen Kepada BUMD	2.514.895.903,00	2.593.320.350,00	-78.424.447,00	-3,02
Jumlah	2.514.895.903,00	2.593.320.350,00	-78.424.447,00	-3,02

Berdasarkan tabel di atas, piutang lainnya merupakan Piutang Bagi Hasil Laba Perusahaan Daerah Kukar Sejahtera Dambaan Etam per 31 Desember tahun 2024 sebesar Rp2.514.895.903,00. Piutang Bagi Hasil Laba Perusahaan Daerah Kukar Sejahtera Dambaan Etam mengalami penurunan sebesar Rp78.424.447,00 dari saldo awal sebesar Rp2.593.320.350,00. Perubahan saldo ini terjadi karena mutasi kurang atas penyetoran sebesar Rp210.453.687,00 oleh PT. Kukar Sejahtera Dambaan Etam dan mutasi tambah perhitungan piutang berdasarkan kertas kerja pembayaran dividen PT. Kukar Sejahtera Dambaan Etam sebesar Rp132.029.240,00.

5.3.1.1.15. Penyisihan Piutang

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Penyisihan Piutang	-72.854.754.837,36	-75.041.241.389,54

Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2024 sebesar Rp72.854.754.837,36 mengalami penurunan sebesar Rp2.186.486.552,18 atau 2,91% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp75.041.241.389,54. Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2024 berdasarkan umur piutang sebagai berikut.



Tabel 5 . 3 . 15 Rincian Penyisihan Piutang

Uraian Jenis Piutang	Umur Piutang					Saldo Per 31 Des 2024
	Diatas 4 tahun	Diatas 3 - 4 tahun	Diatas 2 - 3 tahun	Diatas 1 - 2 tahun	0 - 1 tahun	
Piutang Pajak Daerah	47.581.287.915,42	8.807.685.041,60	8.866.241.270,32	10.234.972.148,10	11.408.548.647,00	86.898.735.022,44
Persentase Penyisihan	100%	50%	25%	10%	0%	
Nilai Penyisihan	47.581.287.915,42	4.403.842.520,80	2.216.560.317,58	1.023.497.214,81	0,00	55.225.187.968,61
Piutang Retribusi	11.562.341.927,00	786.373.725,00	680.051.700,00	566.324.525,00	963.067.814,00	14.558.159.691,00
Persentase Penyisihan	100%	50%	25%	10%	0%	
Nilai Penyisihan	11.562.341.927,00	393.186.862,50	170.012.925,00	56.632.452,50	0,00	12.182.174.167,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.798.120.600,00	482.500.000,00	496.000.000,00	796.108.000,00	498.000.000,00	4.070.728.600,00
Persentase Penyisihan	100%	50%	25%	10%	0%	
Nilai Penyisihan	1.798.120.600,00	241.250.000,00	124.000.000,00	79.610.800,00	0,00	2.242.981.400,00
Piutang BLUD	848.945.814,00	19.115.200,00	13.233.700,00	16.436.160,00	1.131.252.053,00	2.028.982.927,00
Persentase Penyisihan	100%	100%	50%	25%	0%	
Nilai Penyisihan	848.945.814,00	19.115.200,00	6.616.850,00	4.109.040,00	0,00	878.786.904,00
Piutang Lain-Lain	2.276.760.976,00	0,00	0,00	195.453.687,00	148.577.004,86	2.620.791.667,86
Persentase Penyisihan	100%	100%	50%	25%	0%	
Nilai Penyisihan	2.276.760.976,00	0,00	0,00	48.863.421,75	0,00	2.325.624.397,75
Jumlah Penyisihan Piutang	64.067.457.232,42	5.057.394.583,30	2.517.190.092,58	1.212.712.929,06	0,00	72.854.754.837,36

5.3.1.1.16. Beban Dibayar Dimuka

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Beban Dibayar Dimuka	1.406.070.904,75	5.193.541.007,38

Beban Dibayar Dimuka terdiri dari belanja sewa gedung kantor (sewa rumah jabatan dan sewa gedung kantor) dan sewa sarana mobilitas darat yang sudah dilakukan pembayaran namun masih terdapat sisa manfaat ekonomis setelah 31 Desember 2024. Saldo Beban Dibayar Dimuka sebesar Rp1.406.070.904,75 merupakan nilai beban yang belum jatuh tempo per 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5 . 3 . 16 Rincian Beban Dibayar Dimuka

No.	SKPD	Uraian	Beban Dibayar Dimuka	
			Hari	(Rp)
1	Dinas Kesehatan	Belanja sewa rumah untuk tempat tinggal tenaga kesehatan Dokter Internship puskesmas Teluk Dalam, SPK No. B-355/DINKES/SDK-SDMK/100.3.7.1/02/2024, Tanggal 1 Februari 2024, SP2D No. 64.02/04.0/001364/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2024 Tanggal 19 Desember 2024	32	2.323.705,72
2	Dinas Kesehatan	Belanja sewa rumah untuk tempat tinggal tenaga kesehatan Dokter penugasan khusus Nusantara Sehat UPTD puskesmas Tabang, SPK No. B-5755/DINKES/SDK-SDMK/100.3.7.1/09/2024 Tanggal 2 September 2024, SP2D No. 64.02/04.0/001392/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2024 Tanggal 19 Desember 2024	240	33.967.213,13



No.	SKPD	Uraian	Beban Dibayar Dimuka	
			Hari	(Rp)
3	Dinas Kesehatan	Belanja sewa rumah untuk tempat tinggal tenaga kesehatan Dokter penugasan khusus Nusantara Sehat UPTD puskesmas Ritan, SPK No. B-5737/DINKES/SDK-SDMK/100.3.7.1/06/2024 Tanggal 3 Juni 2024, SP2D No. 64.02/04.0/001389/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2024 Tanggal 19 Desember 2024	148	8.006.557,38
4	Dinas Kesehatan	Belanja sewa rumah untuk tempat tinggal tenaga kesehatan Dokter Internship puskesmas Samboja, SPK No. B-5785/DINKES/SDK-SDMK/100.3.7.1/12/2024 Tanggal 3 Desember 2024, SP2D No. 64.02/04.0/001389/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2024 Tanggal 19 Desember 2024	33	8.511.904,76
5	Dinas Kesehatan	Belanja sewa rumah untuk tempat tinggal tenaga kesehatan Dokter Internship puskesmas Handil Baru. SPK No. B-363/DINKES/SDK-SDMK/100.3.7.1/02/2024 Tanggal 19 Februari 2024, SP2D No. 64.02/04.0/001348/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2024 Tanggal 19 Desember 2024.	50	6.049.046,32
6	Dinas Kesehatan	Belanja sewa rumah untuk tempat tinggal tenaga kesehatan Dokter Internship puskesmas Muara Jawa. SPK No. B-5773/DINKES/SDK-SDMK/100.3.7.1/09/2024 Tanggal 30 September 2024, SP2D No. 64.02/04.0/001393/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2024 Tanggal 19 Desember 2024.	143	10.945.679,01
7	Dinas Kesehatan	Belanja sewa rumah untuk tempat tinggal tenaga kesehatan Dokter Internship puskesmas Batuah. SPK No. B-5774/DINKES/SDK-SDMK/100.3.7.1/09/2024 Tanggal 2 Agustus 2024, SP2D No. 64.02/04.0/001363/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2024 Tanggal 19 Desember 2024	214	12.980.327,87
8	Dinas Kesehatan	Belanja sewa rumah untuk tempat tinggal tenaga kesehatan Dokter Internship puskesmas Sungai Merdeka. SPK No. B-359/DINKES/SDK-SDMK/100.3.7.1/02/2024 Tanggal 12 Februari 2024, SP2D No. 64.02/04.0/001362/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2024 Tanggal 19 Desember 2024.	43	6.936.239,78
9	Dinas Kesehatan	Belanja sewa rumah untuk tempat tinggal tenaga kesehatan Dokter Internship puskesmas Samboja. SPK No. B-5743/DINKES/SDK-SDMK/100.3.7.1/06/2024 Tanggal 3 Juni 2024, SP2D No. 64.02/04.0/001390/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2024 Tanggal 19 Desember 2024	82	4.973.770,49
10	Dinas Kesehatan	Belanja sewa rumah untuk tempat tinggal tenaga kesehatan Dokter Internship puskesmas Sungai Merdeka. SPK No. B-5767/DINKES/SDK-SDMK/100.3.7.1/10/2024 Tanggal 4 Oktober 2024, SP2D No. 64.02/04.0/001391/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2024 Tanggal 19 Desember 2024.	91	5.519.672,13
11	Dinas Kesehatan	Belanja sewa rumah untuk tempat tinggal tenaga kesehatan Dokter Internship RSUD AM.Parikesit dan UPTD puskesmas Rapak Mahang, SPK No. B-5761/DINKES/SDK-SDMK/100.3.7.1/06/2024 Tanggal 14 Juni 2024, SP2D No. 64.02/04.0/001391/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2024 Tanggal 19 Desember 2024	165	26.688.524,59
12	Dinas Kesehatan	Belanja sewa rumah untuk tempat tinggal tenaga kesehatan Dokter Internship RSUD AM.Parikesit dan UPTD puskesmas Rapak Mahang. SPK No. B-367/DINKES/SDK-SDMK/100.3.7.1/03/2024 Tanggal 6 Maret 2024, SP2D No. 64.02/04.0/001391/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2024 Tanggal 19 Desember 2024	65	19.713.114,75
13	Dinas Pekerjaan Umum	Kelebihan Pembayaran atas Utang Kegiatan Penanganan banjir Kota Tenggarong Rp. 70.890.474,63 dan Kegiatan Rehabilitasi Jembatan Kutai Kartanegara Rp. 174.971.330,84 (Koreksi BPK atas LK 2021 JK6)	JBKP	245.861.805,47



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No.	SKPD	Uraian	Beban Dibayar Dimuka	
			Hari	(Rp)
14	Dinas Pekerjaan Umum	Pembayaran atas Pembebasan Lahan di Desa Jongkang atas Kesepakatan No: P.522/DPU-TK/027/11/2020 (Rp. 220.000.000,00; Kesepakatan No: 080/BAK/PPK-LAHAN JONGKANG/DPU/12/21 (Rp. 2.799.896.377,00)	JBKP	30.000.000,00
15	Dinas Perumahan Dan Permukiman	Belanja Sewa Kendaraan Operasional atau Lapangan Dinas Perumahan Dan Permukiman (PT. SERASI AUTORAYA) SPK No : P-4133/PPKOM/SET/000.3.1/05/2024 Tanggal 13 Mei 2024, SP2D No. 64.02/04.0/000347/LS/1.04.1.03.2.11.01.0000/M/6/2024 Tanggal 06 Juni 2024	12	5.955.918,37
16	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	Belanja Sewa Kendaraan Operasional atau Lapangan Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang (PT. SERASI AUTORAYA) SPK No : P-161/DPPR/Sewa Operasional/027/10/2024 Tanggal 22 Oktober 2024 SP2D No. 64.02/04.0/000113/LS/2.10.1.03.0.00.01.0000/PR/11/2024 Tanggal 20 Nopember 2024	294	139.186.849,32
17	Dinas Pemberdayaan Dan Pemerintahan Desa	Belanja Sewa Kendaraan Operasional atau Lapangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PT. SERASI AUTORAYA) SPK No : P.01/DPMPD/000.3.2/01/2024 Tanggal 17 Januari 2024, SP2D No. 64.02/04.0/000162/LS/2.13.0.00.0.00.01.0000/M/6/2024 Tanggal 28 Juni 2024	16	22.418.360,66
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	Belanja BHP ISR Periode Pembayaran 20 Maret 2024 s.d 19 Maret 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika (KEMENKOMINFO) INVOICE No : 3244093 Tanggal 1 20 Januari 2024 dengan nomor bukti 007/BD/DISKOMINFO/2024	78	447.865,32
19	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Belanja Sewa Kendaraan Operasional atau Lapangan Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah (PT. SERASI AUTORAYA) SPK No : 06/DISKOPUKM/PBJ/SET/02/2024 Tanggal 1 01 Februari 2024, SP2D No. 64.02/04.0/000010/LS/2.17.0.00.0.00.01.0000/M/3/2024 Tanggal 21 Maret 2024	32	14.679.891,01
20	Dinas Pertanian Dan Peternakan	Belanja Sewa Kendaraan Operasional atau Lapangan Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang (PT. SERASI AUTORAYA) SPK No : P-161/DPPR/Sewa Operasional/027/10/2024 Tanggal 22 Oktober 2024, SP2D No. 64.02/04.0/000521/LS/3.27.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2024 Tanggal 17 Desember 2024.	89	100.125.000,00
21	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Belanja Sewa Kendaraan Operasional atau Lapangan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan (PT. Idea Borneo Nusantara) SPK No : 44/SPK-Sw.kEND/PPK-DPP/APBDP/11/2024 Tanggal 12 November 2024, SP2D No. 64.02/04.0/000257/LS/3.31.3.30.0.00.01.0000/PR/12/2024 Tanggal 19 Desember 2024	70	33.504.273,50
22	Sekretariat Daerah	Belanja Sewa Asrama Pelajar / Mahasiswa Sekretariat Daerah (CV. ND SEJAHTERA UTAMA / WINDA SRIWAHYUNI) SPK No : B-107/KESRA/02/2024 Tanggal 23 Februari 2024, SP2D No. 64.02/04.0/000020/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/M/3/2024 Tanggal 21 Maret 2024.	52	22.723.287,67
23	Sekretariat Daerah	Belanja Sewa Asrama Pelajar / Mahasiswa Sekretariat Daerah (CV. ND SEJAHTERA UTAMA / WINDA SRI WAHYUNI) SPK No : B-117/KESRA/02/2024 Tanggal 28 Februari 2024, SP2D No. 64.02/04.0/000021/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/M/3/2024 Tanggal 21 Maret 2024.	57	23.346.575,34
24	Sekretariat Daerah	Belanja Sewa Asrama Pelajar / Mahasiswa Sekretariat Daerah (CV. DE EM PROJECT / CALDERA DHEA SUKMAYA) SPK No : B-209/KESRA/05/2024 Tanggal 20 Mei 2024, SP2D No. 64.02/04.0/000130/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/M/6/2024 Tanggal 07 Juni 2024.	139	68.167.123,29

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024

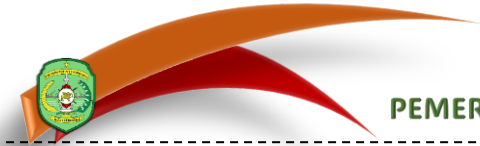


No.	SKPD	Uraian	Beban Dibayar Dimuka	
			Hari	(Rp)
25	Sekretariat Daerah	Belanja Sewa Asrama Pelajar / Mahasiswa Sekretariat Daerah (CV. DE EM PROJECT / CALDERA DHEA SUKMAYA) SPK No : B-223/KESRA/06/2024 Tanggal 11 Juni 2024, SP2D No. 64.02/04.0/000176/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/M/7/2024 Tanggal 03 Juli 2024.	161	76.971.232,88
26	Sekretariat Daerah	Belanja Sewa Asrama Pelajar / Mahasiswa Sekretariat Daerah (CV. DE EM PROJECT) SPK No : B-498/KESRA/08/2024 Tanggal 29 Agustus 2024 SP2D No. 64.02/04.0/000424/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2024 Tanggal 15 Oktober 2024,	240	100.931.506,85
27	Badan Pendapatan Daerah	Belanja Sewa Menyewa Gedung / Kantor UPT Kec.Sanga Sanga No.P.366-BAPENDA-SET.1-0001.4/02/2024 Tanggal 15 Februari 2024, SP2D No. 64.02/04.0/000310/LS/6.01.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2024 Tanggal 12 Juni 2024 dan SP2D No. 64.02/04.0/000255/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2024 Tanggal 26 Nopember 2024.	46	5.013.623,69
28	Badan Pendapatan Daerah	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Operasional (PT. SERASI AUTORAYA) SPK No. 07/PPK/SP/BAPENDA-SET.1/02/2024 Tanggal 20 Februari 2024, SP2D No. 64.02/04.0/000042/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/4/2024 Tanggal 5 April 2024	52	11.622.000,00
29	Badan Pendapatan Daerah	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Operasional (PT. SERASI AUTORAYA) SPK No. 08/PPK/SP/BAPENDA-SET.1/02/2024 Tanggal 20 Februari 2024, SP2D No. 64.02/04.0/000044/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/4/2024 Tanggal 05 April 2024	51	12.302.733,00
30	Inspektorat Kabupaten	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Operasional (PT. SERASI AUTORAYA) SPK no :B-370/ITDA/SET.I/000.3.2/05/2024 Tanggal 16 Mei 2024, SP2D No. 64.02/04.0/000182/LS/6.01.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2024 Tanggal 07 Oktober 2024	135	67.463.013,70
31	Inspektorat Kabupaten	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud - Franchise dan Lisensi (CV. Buana Gatra Gemilang SP No. B-1135/ITDA/IP.III/000.3.2/11/2024 Tanggal 14 November 2024 64.02/04.0/000310/LS/6.01.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2024 Tanggal 30 Desember 2024	346	120.389.041,10
32	Kecamatan Muara Jawa	Belanja Sewa Kendaraan Operasional atau Lapangan Kecamatan Muara Jawa (CV. AZMYA CAR TRANSINDO) SPK No : P-18/KEC.MJAWA/SPK-EPURCH/000.3/APBD-P/11/2004 TANGGAL 1 NOVEMBER 2024, SP2D No. 64.02/04.0/000429/LS/7.01.1.03.0.00.07.0000/PR/11/2024 Tanggal 12 Nopember 2024	304	147.419.178,08
33	Kecamatan Samboja Barat	Belanja Sewa Kendaraan Operasional atau Lapangan Kecamatan Samboja Barat (PT. SERASI AUTORAYA) SPK No : 328/SPK-JL/SAMBAR/2024, SP2D No. 64.02/04.0/001087/LS/7.01.0.00.0.00.20.0000/PR/12/2024 Tanggal 24 Desember 2024.	22	10.925.869,57
Jumlah				1.406.070.904,75

5.3.1.1.17. Persediaan

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Persediaan	179.774.508.826,50	101.977.528.215,14

Saldo persediaan sebesar Rp179.774.508.826,50 merupakan nilai persediaan barang material atau barang habis pakai yang umur ekonomisnya diperkirakan tidak lebih dari setahun dan barang yang akan dimaksudkan untuk diserahkan ke masyarakat/pihak lain per 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut:



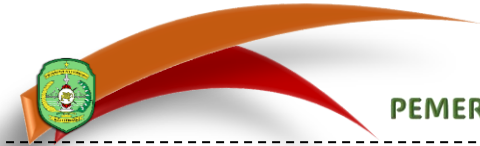
Tabel 5.3.17 Rincian Persediaan

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
Bahan	35.807.268.269,99	35.149.707.495,73	657.560.774,26	1,87
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	17.190.825.809,94	12.342.857.502,94	4.847.968.307,00	39,28
Obat-obatan	41.662.363.032,84	44.787.730.481,75	-3.125.367.448,91	-6,98
Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	78.045.380.029,57	1.581.176.939,00	76.464.203.090,57	4.835,90
Natura dan Pakan	7.068.671.684,16	8.116.055.795,72	-1.047.384.111,56	-12,91
Jumlah	179.774.508.826,50	101.977.528.215,14	77.796.980.611,36	76,29

Saldo persediaan tersebut merupakan nilai persediaan dari 59 perangkat daerah termasuk di dalam nilai tersebut persediaan 32 Puskesmas BLUD yang terakumulasi di persediaan Dinas Kesehatan. Rincian persediaan dapat dilihat di **Lampiran 3**.

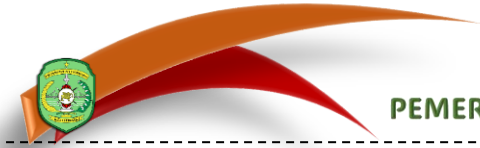
Terkait saldo persediaan yang disajikan tersebut, terdapat kondisi sebagai berikut.

- Persediaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp1.779.922.271,00 di dalamnya terdapat Persediaan beban alat/bahan untuk kegiatan kantor sebesar Rp1.570.371.577,00 Persediaan bahan bakar pelumas dan bahan bangunan konstruksi sebesar Rp192.750.594,00 serta Persediaan obat-obatan dan Natura sebesar Rp16.800.100,00. Termasuk di dalam barang persediaan ini persediaan akhir seluruh sekolah baik Sekolah Dasar Negeri maupun Sekolah Menengah Pertama Negeri yang berada di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan per 31 Desember 2024.
- Persediaan pada Dinas Kesehatan dan BLUD Puskesmas sebesar Rp24.726.548.668,27 di dalamnya terdapat *dropping* barang kategori persediaan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi pada tahun 2024 yang telah dicatat dalam laporan keuangan Tahun 2024 berupa obat program dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) sebesar Rp9.421.145.285,00, Persediaan bahan obat-obatan sebesar Rp10.723.437.088,60 dan bahan natura dan pakan lainnya sebesar Rp2.803.397.395,16.
- Pada Dinas Pekerjaan Umum, nilai persediaan akhir tahun sebesar Rp32.218.931.182,74, didalamnya terdapat persediaan Bahan Baku Bangunan dan Konstruksi sebesar Rp31.904.557.801,94 yang terdiri dari Pembangunan Sekolah Polisi Negara (SPN) sebesar Rp2.831.575.750,00, sisa tiang pancang jembatan Kutai Kartanegara sebesar Rp5.239.417.722,14, sisa tiang pancang jembatan Tangkon sebesar Rp18.482.239,80, dan sisa tiang pancang Jalan Loleng-Muara Kaman sebesar Rp88.128.000,00, sisa tiang pancang Jembatan Muafaf sebesar Rp157.256.670,00.

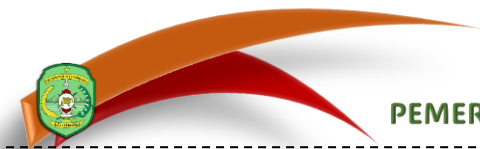


Terdapat mutasi tambah persediaan pada Dinas Pekerjaan Umum atas

- 1) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat berupa bangunan yang belum selesai dan belum BAST senilai Rp37.005.893.143,80;
 - 2) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat berupa bangunan yang sudah selesai dibangun namun belum ada BAST senilai Rp37.593.821.913,77; dan
 - 3) Pipa PDAM yang baru ditemukan senilai Rp4.632.000,00.
- d. Dinas Pekerjaan Umum masih mencatat persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga berupa bangunan Brigade Mobil (Brimob), Sekolah Polisi Negara (SPN) dan Polisi Resor (Polres) sebesar Rp23.569.697.420,00.
- e. Persediaan pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp880.263.960,00 di dalamnya terdapat persediaan bahan sebesar Rp593.935.180,00 atas pembelian induk ikan Patin, Nila, Mas, Lele Sangkuriang, dan Gurame serta pengisian tabung oksigen, obat Aquades/NaCl, persediaan pakan ikan apung sebesar Rp267.084.680,00 dan persediaan Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor sebesar Rp19.244.100,00.
- f. Persediaan pada Dinas Sosial Sebesar Rp351.378.900,00, di dalamnya terdapat persediaan barang yang belum diserahkan ke masyarakat terdiri atas stok bantuan bencana sebesar Rp146.451.300,00 dan alat bantu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dasar dan lainnya sebesar Rp44.274.200,00. Seluruh persediaan bersumber dari APBD dan APBD-Perubahan Kabupaten Kutai Kartanegara. Persediaan barang diserahkan ke masyarakat yang bersumber dari *dropping* pusat dan provinsi telah seluruhnya diserahkan ke masyarakat serta persediaan Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor sebesar Rp160.653.400,00.
- g. Persediaan pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja sebesar Rp553.355.200,00 didalamnya terdapat persediaan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp382.500.000,00 merupakan nilai persediaan tanah kampung lainnya 36 Ha x Rp6.944.444,00 dari tahun 2007 sebesar Rp250.000.000,00 dan tanah kampung lainnya 14 Ha x Rp5.000.000,00 pada tahun 2008 sebesar Rp70.000.000,00 dan biaya Administrasi surat menyurat untuk tanah tersebut 50 Ha x Rp1.250.000,00 pada tahun 2008 sebesar Rp62.500.000,00 dan kegiatan pengembangan pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja sebesar Rp150.520.000,00 yang akan diserahkan kepada masyarakat sampai tahun 2024 belum dapat diserahkan karena terdapat kendala di lapangan serta persediaan Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor sebesar Rp20.335.200,00.
- h. Persediaan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp179.398.275,00 di dalamnya terdapat persediaan alat kesehatan dan obat kontrasepsi yang berasal dari *dropping* Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2024 sebesar Rp141.371.755,00.
- i. Persediaan Dinas Perhubungan sebesar Rp6.489.962.462,00 di dalamnya terdapat persediaan belanja alat listrik dan elektronik sebesar Rp6.221.316.108,00 yang sebagian besar adalah alat persediaan lampu



- penerangan jalan umum (LPJU) sisa dari Sub Kegiatan Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dan Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor tahun anggaran 2024.
- j. Persediaan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebesar Rp2.285.248.480,00 di dalamnya terdapat persediaan atas Alat Tulis Kantor sebesar Rp1.711.255.005,00 dan bahan cetakan sebesar Rp563.867.475,00 serta Persediaan Perabot Kantor sebesar Rp10.126.000,00.
 - k. Persediaan pada Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp4.339.506.830,00 di dalamnya terdapat persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp516.000.000,00 berupa Pupuk dan obat-obatan untuk Pertanian, dan belanja natura dan pakan sebesar Rp3.811.650.611,00 berupa beras yang berasal dari kegiatan pengadaan cadangan pangan pemerintah tahun 2024.
 - l. Persediaan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp531.563.358,00 di dalamnya terdapat belanja pengadaan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor sebesar Rp373.995.400,00, pengadaan belanja bahan kimia laboratorium lingkungan sebesar Rp157.567.958,00 tahun 2024.
 - m. Persediaan pada Dinas Pertanian dan Peternakan sebesar Rp1.880.022.560,00 di dalamnya terdapat persediaan obat-obatan untuk pertanian dan peternakan sebesar Rp1.597.114.310,00, dan alat/bahan untuk kegiatan kantor sebesar Rp282.908.250,00.
 - n. Persediaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp1.598.620.948,00 di dalamnya terdapat persediaan barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat berupa persediaan Belanja Tak Terduga (BTT 2021) sebesar Rp22.963.000,00, dan persediaan Barang Hibah dari BPBD Provinsi Kalimantan Timur serta persediaan Logistik/pemenuhan dasar korban bencana di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar Rp886.246.472,00.
 - o. Persediaan RSUD Aji Muhammad Parikesit sebesar Rp12.237.935.077,00 di dalamnya terdapat persediaan beban alat/bahan untuk kegiatan kantor sebesar Rp872.433.729,00, persediaan bahan bakar dan pelumas sebesar Rp171.645.914,00, persediaan natura dan pakan lainnya sebesar Rp88.022.898,00, serta persediaan obat-obatan sebesar Rp11.634.603.312,00 Pada tahun 2024 RSUD Aji Muhammad Parikesit menerima *dropping* barang kategori persediaan, berupa obat program dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dari Dinas Kesehatan dengan Nilai Rp603.331.765,00 yang sudah dicatat dalam laporan keuangan tahun 2024 dan tidak ada barang persediaan yang kedaluwarsa dan yang rusak.
 - p. Terdapat mutasi tambah atas Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat ke Persediaan pada Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp835.430.000,00. Barang tersebut merupakan pembelian *sound system* yang akan diserahkan kepada masyarakat namun belum terdapat BAST atas barang tersebut sehingga masih dicatat di persediaan.



5.3.1.2. Investasi Jangka Panjang

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Investasi Jangka Panjang	1.044.600.184.115,45	1.032.352.289.883,78

Saldo Investasi Jangka Panjang sebesar Rp1.044.600.184.115,45 merupakan nilai Investasi Jangka Panjang Nonpermanen dan Permanen Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara per 31 Desember 2024. Rincian Investasi Jangka Panjang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5 . 3 . 18 Rincian Investasi Jangka Panjang

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
Investasi Jangka Panjang Nonpermanen	18.718.812.944,00	19.128.018.025,00	-409.205.081,00	-2,14
Investasi Jangka Panjang Permanen	1.025.881.371.171,45	1.013.224.271.858,78	12.657.099.312,67	1,25
Jumlah	1.044.600.184.115,45	1.032.352.289.883,78	12.247.894.231,67	1,19

5.3.1.2.1. Investasi Jangka Panjang Nonpermanen

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Investasi Jangka Panjang Nonpermanen	18.718.812.944,00	19.128.018.025,00

Saldo Investasi Jangka Panjang Nonpermanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk tidak dimiliki secara berkelanjutan. Investasi Jangka Panjang Nonpermanen Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp18.718.812.944,00 dan Rp19.128.018.025,00.

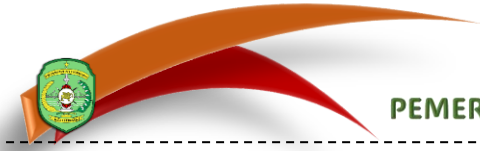
Saldo Investasi Nonpermanen Lainnya sebesar Rp18.718.812.944,00 merupakan dana bergulir yang dapat dirinci sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5 . 3 . 19 Rincian Investasi Jangka Panjang Nonpermanen

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
Kredit Usaha Kecil Pedesaan Tahun 2006				
Nilai Plafon	76.700.000.000,00	76.700.000.000,00	0,00	0,00
Saldo Plafon	76.700.000.000,00	76.700.000.000,00	0,00	0,00
KUKP yang diragukan dapat ditagih	-57.981.187.056,00	-57.571.981.975,00	-409.205.081,00	0,71
Penyisihan Penyaluran	-41.250.679.461,00	-41.284.351.656,00	33.672.195,00	-0,08
Penyisihan Pengguliran	-16.730.507.595,00	-16.287.630.319,00	-442.877.276,00	2,72
Nilai Wajar Investasi	18.718.812.944,00	19.128.018.025,00	-409.205.081,00	-2,14

Saldo Investasi Jangka Panjang Nonpermanen sebesar Rp18.718.812.944,00 adalah saldo dari dana bergulir Program Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Program Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2006 dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara No.500/474/POKJA/VIII/2006 tanggal 28 Agustus 2006 perihal



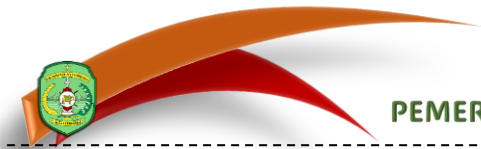
Petunjuk Pelaksanaan Kredit Usaha Kecil Pedesaan (KUKP) Tahun 2006 dengan nilai sebesar Rp76.700.000.000,00. Nilai KUKP dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) sebesar plafon yang ditunggak dengan penyajian yang tidak tertagih. Penetapan nilai KUKP yang diragukan dapat ditagih ditentukan berdasarkan perhitungan sesuai Kebijakan Akuntansi. Nilai KUKP tahun 2006 yang diragukan dapat ditagih diperoleh dari nilai penyaluran yang dilakukan pada tahun 2006 yang belum diselesaikan oleh peminjam sampai disusunnya laporan keuangan ini sebesar Rp57.981.187.056,00. Nilai tunggakan KUKP tahun 2006 diperoleh dari Laporan Lembaga Pinjaman Desa (LPD) yang dihimpun oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah per 31 Desember 2024.

Tujuan dari program ini adalah untuk menumbuhkan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan dan pengembangan unit usaha kecil pedesaan yang mandiri, yang sudah berjalan sehingga usaha kecil dapat berkembang sebagaimana diharapkan dengan memanfaatkan dan mendayagunakan potensi yang ada di pedesaan/kelurahan.

Adapun sasarannya adalah agar terbentuknya unit-unit usaha kecil pedesaan yang kuat/mandiri dan terciptanya perekonomian desa berbasis kerakyatan, meningkatkan permodalan usaha kecil pedesaan, produktivitas, volume usaha dan nilai tambah serta membuka peluang penyerapan tenaga kerja yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

KUKP Tahun 2006 adalah program pinjaman kredit bersyarat lunak tanpa bunga dan jaminan dalam jangka waktu pengembalian 24 bulan dalam bentuk *Block Grant* yang terus bergulir di tengah-tengah masyarakat dimana dana KUKP yang telah dikembalikan oleh Debitur UKP kepada LPD dapat digulirkan kembali/dipinjamkan kepada Debitur UKP lainnya secara berkelanjutan dengan jangka waktu pengembalian antara 6, 12, atau 24 bulan dan dengan berjalannya waktu kemudian diberlakukan bunga maksimal 12% per tahun dan menggunakan agunan/jaminan sesuai dengan kesepakatan seluruh pengurus LPD pada hasil Rakor LPD se-Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 18 Desember 2008 dan ini telah berjalan mulai awal tahun 2009.

Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan LKM yang mengatur seluruh Lembaga Keuangan Mikro harus memiliki badan hukum dari instansi yang berwenang dan izin usaha dari OJK, terdapat penyesuaian 8 Januari 2016 LPD sebagai Lembaga Keuangan Mikro yang belum berbadan hukum dimana LPD harus bertransformasi menjadi sebuah institusi yang berbadan hukum dan berbadan usaha menjadi Koperasi dan tidak diperkenankan lagi untuk menggulirkan kembali dana KUKP jika belum bertransformasi berbadan hukum. Atas hal tersebut, dari 226 LPD, terdapat sebanyak 15 (lima belas) LPD yang sudah berubah menjadi lembaga berbadan hukum koperasi, yaitu LPD Tanjung Limau (Kecamatan Muara Badak), LPD Perangat Selatan, LPD Santan Ilir (Kecamatan Marang Kayu), LPD Bukit Raya, LPD Handil Baru



(Kecamatan Samboja), Kota Bangun Ulu, LPD Kota Bangun Ilir (Kecamatan Kota Bangun), LPD Sumber Sari, LPD Sebulu Ulu, LPD Sebulu Ilir (Kecamatan Sebulu), LPD Jantur Selatan (Kecamatan Muara Muntai), LPD Panji, LPD Sukarame, LPD Melayu, dan LPD Timbau (Kecamatan Tenggarong).

Perkembangan KUKP per 31 Desember 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a. Dana penyaluran sebesar Rp76.700.000.000,00 telah dibayar/dikembalikan sebesar Rp35.449.320.539,00 (46,22%) dengan sisa pinjaman Rp41.250.679.461,00 (53,78%) dengan nilai penyisihan dana penyaluran Rp41.250.679.461,00;
- b. Dana yang digulirkan kembali kepada Debitur UKP secara berkelanjutan kepada 14.658 UKP sebesar Rp82.824.956.952,00 dan telah dibayar sebesar Rp64.491.653.922,00 dengan sisa pinjaman Rp18.333.303.030,00 (22,13%) dengan nilai penyisihan pengguliran Rp16.476.338.345,00;
- c. Penghapusan Nilai Investasi Jangka Panjang Nonpermanen pada kondisi per 31 Desember 2024 untuk penyaluran awal sebesar Rp4.674.431.865,00 dan pengguliran sebesar Rp1.897.422.649,00 sehingga total keseluruhan penghapusan Nilai Investasi Nonpermanen KUKP 2006 adalah sebesar Rp6.571.854.514,00;
- d. Dana penyaluran sebesar Rp76.700.000.000,00 dikurangi dengan penyisihan dana penyaluran Rp41.250.679.461,00 lalu dikurangi dengan penyisihan pengguliran Rp16.476.338.345,00 adalah nilai KUKP 2006 dapat ditagih yaitu sebesar Rp18.718.812.944,00.

Rincian atas perkembangan KUKP dapat dilihat pada **Lampiran 4**.

5.3.1.2.2. Investasi Jangka Panjang Permanen

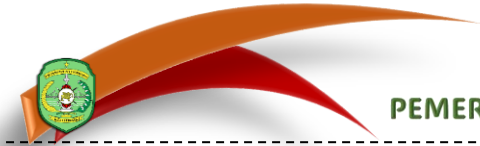
Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	1.025.881.371.171,45	1.013.224.271.858,78

Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp1.025.881.371.171,45 merupakan nilai Investasi Jangka Panjang Permanen Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara per 31 Desember 2024. Nilai yang disajikan dalam laporan keuangan adalah nilai berdasarkan laporan keuangan audited PT Mahakam Gerbang Raja Migas (Perseroda) dan PT Tunggang Parangan (Perseroda), laporan keuangan unaudited PT Kukar Sejahtera Dambaan Etam dan Perumda Tirta Mahakam serta perusahaan investasi lain yang sampai dengan berakhirnya penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah belum menyampaikan Laporan Keuangan *Audited*.

Rincian Investasi Jangka Panjang Permanen dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5 . 3 . 20 Rincian Investasi Jangka Panjang Permanen

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Perusahaan Daerah			
1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT BPD Kaltim Kaltara	596.225.000.000,00	572.180.000.000,00
2	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM Tirta Mahakam	254.491.232.924,00	246.395.011.729,48

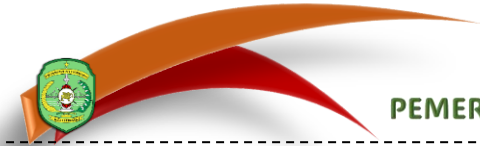


No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
3	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusda Tunggang Parangan	5.406.233.811,00	2.266.341.822,00
4	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Kukar Sejahtera Dambaan Etam	52.415.795.081,00	57.925.359.047,00
5	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Mahakam Gerbang Raja Migas	99.391.109.355,45	116.505.559.260,30
Jumlah Penyertaan pada Perusahaan Daerah		1.007.929.371.171,45	995.272.271.858,78
Perusahaan Swasta			
1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Graha 165 (ESQ)	12.500.000.000,00	12.500.000.000,00
2	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Menara Mitra Energi	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
3	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT BPR Ingetad	452.000.000,00	452.000.000,00
Jumlah Penyertaan pada Perusahaan Swasta		17.952.000.000,00	17.952.000.000,00
Jumlah Seluruhnya		1.025.881.371.171,45	1.013.224.271.858,78

- Nilai investasi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pada PDAM Tirta Mahakam, Perusahaan Daerah Tunggang Parangan dan Perusahaan Daerah Kukar Sejahtera Dambaan Etam (KSDE) adalah sebesar 100% dan PT Mahakam Gerbang Raja Migas modal sebesar 99%, sehingga nilai Investasi pada keempat Perseroda diatas dihitung menggunakan metode ekuitas.
- Nilai Investasi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pada PT Graha 165 (ESQ), PT Menamas Mitra Energi, PT BPR Ingetad dan PT BPD Kaltim Kaltara dihitung berdasarkan metode biaya karena Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan pemegang saham minoritas.
- Nilai Investasi Jangka Panjang Permanen Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pada PT BPD Kaltim Kaltara per 31 Desember 2024 sebesar Rp596.225.000.000,00 mengalami peningkatan sebesar 4,20% dibanding Tahun 2023 sebesar Rp572.180.000.000,00. Peningkatan ini karena adanya penambahan penyeteroran modal oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar Rp24.050.000.000,00 pada tanggal 13 Juni 2024 sehingga modal keseluruhan yang disetor sebesar Rp596.225.000.000,00 atau sejumlah 119.245 lembar saham. Pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah menerima setoran dividen dari PT BPD Kaltim Kaltara atas laba tahun buku 2023 sebesar Rp24.045.324.774,59 pada tanggal 3 April 2024.
- Komponen modal PDAM merupakan akumulasi dari penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dan Pemerintah Pusat, dengan rincian pada tabel berikut.

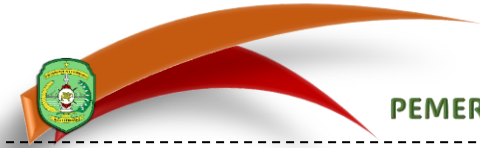
Tabel 5 . 3 . 21 Rincian Ekuitas PDAM Tirta Mahakam

Uraian		Tahun 2024
A.	Bersumber dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara	233.406.856.992,00
1	Penyertaan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014	142.189.525.594,50
2	Kegiatan pengadaan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang diakui penambah penyertaan modal di Tahun 2022 pada PDAM	110.388.511.976,17
3	Penyampaian Nilai Akumulasi Penyusutan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Tahun 2022. Surat Nomor : P-3403/BPKAD/BAS.1/900.1/12/2024	-19.171.180.578,67



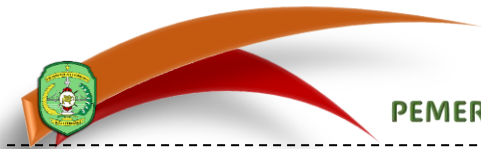
Uraian		Tahun 2024
B.	Bersumber Bukan dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara	167.477.100.722,45
1	Kegiatan Pengadaan Pemerintah Pusat (APBN) dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk Dipergunakan PDAM	162.047.614.814,00
2	Penyertaan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (Kegiatan Pengadaan Pemerintah Pusat (APBN) untuk Dipergunakan oleh PDAM (Sebelum Tahun 1999))	3.666.295.908,45
3	Modal Hibah AMDK	1.763.190.000,00
C	Laba / Rugi Tahun ini	21.084.375.932,00
	Jumlah (A+B+C)	421.968.333.646,45

- e. Komponen modal PDAM Tirta Mahakam yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar total Rp233.406.856.992,00 kemudian diakumulasikan dengan laba tahun 2024 *audited* sebesar Rp21.084.375.932,00 sehingga nilai investasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp254.491.232.924,00. Nilai tersebut terdiri dari Penyertaan Modal sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal ke Dalam PDAM Tirta Mahakam Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar Rp142.189.525.594,50, kegiatan pengadaan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang diakui penambah penyertaan modal di Tahun 2023 pada PDAM sebesar Rp110.388.511.976,17 dan Penyampaian Nilai Akumulasi Penyusutan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Tahun 2022. Surat Nomor : P-3403/BPKAD/BAS.1/900.1/12/2024 sebesar Rp19.171.180.578,67.
- f. PDAM Tirta Mahakam juga memiliki komponen modal yang diperoleh bukan dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Komponen modal berasal dari Kegiatan Pengadaan Pemerintah Pusat (APBN) dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk dipergunakan PDAM sebesar Rp162.047.614.814,00 dan Penyertaan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya yang berasal dari Kegiatan Pengadaan Pemerintah Pusat (APBN) dalam Proyek Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih (P3AB) dan Proyek Pembangunan Sarana Air Bersih (PPSAB) yang dilaksanakan sebelum tahun 1999 sebesar Rp3.666.295.908,45 yang dokumen pendukung penyertaan modal tersebut belum diarsipkan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Pusat.
- g. Pada Tahun 2023 sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 19 Oktober 2023 tentang Perubahan Bentuk Hukum PDAM Tirta Mahakam menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mahakam, PDAM Tirta Mahakam berubah nama menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mahakam. Di tahun 2023 juga Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menambah Penyertaan Modal kepada PDAM Tirta Mahakam sebesar Rp20.000.000.000,00 berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 543/SK-BUP/HK/2023 tentang Penyertaan Modal Daerah ke dalam PDAM Tirta Mahakam Tahun 2023 tanggal 27 November 2023.
- h. Pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menerbitkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 197/SK-SEKDA/HK/2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah yang telah dijadikan sebagai penyertaan modal ke Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mahakam.



Barang Milik Daerah yang dihapus sebesar Rp110.388.511.976,17 merupakan barang pengadaan yang telah dipergunakan PDAM tetapi masih tercatat dalam neraca Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara TA 2021.

- i. Saldo Investasi Permanen Tunggang Parangan sebesar Rp5.406.233.811,00 merupakan nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pada Perusahaan Daerah Tunggang Parangan berdasarkan Laporan Keuangan *audited* Tahun 2024. Penerimaan dividen atas laba tahun 2023 telah diterima Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar Rp381.800.000,00 pada tanggal 24 September 2024.
- j. Investasi Permanen sebesar Rp52.415.795.081,00 merupakan nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pada PT KSDE berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2024 *unaudited*. Pada tahun 2024 telah diterima setoran dividen atas laba PT KSDE Tahun 2022 sebesar Rp195.453.687,00 pada tanggal 18 April 2024 dan sebesar Rp15.000.000,00 pada tanggal 13 Agustus 2024.
- k. PT Mahakam Gerbang Raja Migas adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak dalam bidang usaha minyak dan gas bumi. BUMD ini dibentuk sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2017 yang diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2021. Nilai Investasi pada PT Mahakam Gerbang Raja Migas per 31 Desember 2024 dihitung dengan metode ekuitas karena modal dimiliki 99% oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Atas kepemilikan tersebut, nilai investasi yang dicatat oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebesar Rp99.391.109.355,45 didasarkan pada laporan keuangan *audited* BUMD. Pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menerima setoran dividen atas laba tahun buku 2023 dari PT Mahakam Gerbang Raja Migas sebesar Rp3.551.996.071,00 pada tanggal 3 September 2024 dan Rp60.000.000.000,00 pada tanggal 1 Oktober 2024.
- l. Investasi Permanen sebesar Rp12.500.000.000,00 merupakan nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pada PT Graha 165 (ESQ) per 31 Desember 2024 dengan persentase kepemilikan sebesar 9,56%. Tidak ada penambahan penyertaan modal pada tahun 2024. PT Graha 165 (ESQ) adalah sebuah perusahaan swasta nasional yang bergerak pada usaha penyewaan gedung dan pelatihan. Pada TA 2024 PT Graha 165 (ESQ) tidak membagikan dividen kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- m. Investasi Permanen sebesar Rp5.000.000.000,00 merupakan nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pada PT Menamas Mitra Energi per 31 Desember 2024. PT Menamas adalah perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang kontraktor perdagangan umum dan industri. Pada TA 2024 PT Menamas tidak membagikan dividen kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Sampai dengan penyelesaian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara TA 2024, PT Menamas Mitra Energi belum menyampaikan Laporan Keuangan Tahun 2024.



- n. Investasi Permanen sebesar Rp452.000.000,00 merupakan nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pada PT BPR Ingertad per 31 Desember 2024 dengan persentase kepemilikan sebesar 6,46%. Tidak ada penambahan penyertaan modal pada tahun 2024. PT BPR Ingertad Bangun Utama adalah sebuah bank perkreditan rakyat yang bertempat di Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara. Pada TA 2024, PT BPR Ingertad membagikan dividen sebesar Rp193.685.205,00 pada tanggal 14 Mei 2024 berdasarkan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham tahun buku 2023.

5.3.1.3. Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Saldo Aset Tetap yang disajikan per 31 Desember 2024 sebesar Rp20.272.164.802.251,41 merupakan nilai Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara setelah dikurangi Akumulasi Penyusutan. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp3.130.711.545.590,12 atau 18,26% dari kondisi per 31 Desember 2023 sebesar Rp17.141.453.256.661,32. Rincian Aset Tetap tersebut disajikan pada tabel berikut.

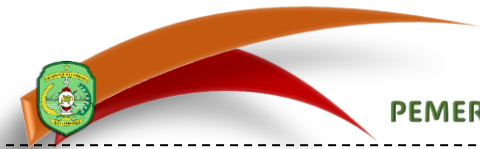
Tabel 5 . 3 . 22 Rincian Aset Tetap

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
Tanah	2.318.610.399.385,31	2.322.147.663.826,31	-3.537.264.441,00	-0,15
Peralatan dan Mesin	5.212.133.528.626,34	4.114.752.480.462,76	1.097.381.048.163,58	26,67
Gedung dan Bangunan	8.066.136.115.302,99	7.172.457.039.592,84	893.679.075.710,15	12,46
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	18.468.306.654.320,00	15.799.159.522.083,60	2.669.147.132.236,40	16,89
Aset Tetap Lainnya	476.129.465.784,92	471.695.435.252,72	4.434.030.532,20	0,94
Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.324.003.203.152,65	1.760.783.708.237,39	-436.780.505.084,74	-24,81
Akumulasi Penyusutan	-15.593.154.564.320,80	-14.499.542.592.794,30	-1.093.611.971.526,50	7,54
Jumlah	20.272.164.802.251,41	17.141.453.256.661,32	3.130.711.545.590,09	18,26

Penyajian nilai Aset Tetap dilakukan melalui mekanisme rekonsiliasi aset di setiap SKPD dengan melibatkan Pengurus Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang dilaksanakan setiap triwulan. Perbedaan nilai antara Aset Tetap Neraca per 31 Desember 2024 dengan nilai BMD pada Laporan BMD merupakan nilai BMD yang tidak memenuhi definisi Aset Tetap sehingga direklasifikasi ke Aset Lainnya yaitu:

- a. Barang Rusak Berat.
- b. Barang Hilang; dan
- c. Barang yang harga satuannya di bawah nilai minimum kapitalisasi.

Uraian mengenai Aset Tetap yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dijelaskan sebagai berikut.



5.3.1.3.1. Tanah

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Tanah	2.318.610.399.385,31	2.322.147.663.826,31

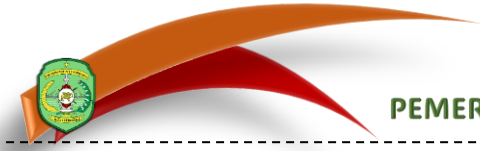
Saldo Aset Tetap Tanah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.318.610.399.385,31 jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp2.322.147.663.826,31 mengalami penurunan sebesar Rp3.537.264.441,00 atau 0,15%. Ringkasan mutasi Aset Tetap Tanah selama tahun 2024 dijelaskan pada **Lampiran 5** dan dirangkum sebagai berikut.

Tabel 5 . 3 . 23 Mutasi Aset Tetap – Tanah

No	Uraian	Tanah (Rp)
1	Saldo 31 Desember 2023	2.322.147.663.826,31
2	Mutasi Tambah	
1	Belanja Modal Januari s/d 31 Desember 2024	62.606.649.543,00
2	Koreksi Saldo Tahun 2023 Belum Diakomodir Pada LKPD (Menambah)	14.000.000,00
3	Hibah/Pendapatan Aset Dari Pemerintah Pusat/Pihak Lain	6.013.116.080,00
4	Pengadaan BMD Yang Dianggarkan Dalam Belanja Barang dan Jasa	97.991.000,00
3	Barang Temuan Baru (Murni Tahun 2024)	16.476.391.450,00
4	Mutasi Masuk Dari OPD Lain	17.087.434.142,00
5	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)	
	a antar KIB A - KIB C	346.273.486,00
	b antar KIB A - KIB D	1.659.320.000,00
	Jumlah Mutasi Tambah	104.301.175.701,00
3	Mutasi Kurang	
1	Belanja Modal yang Merupakan Pembayaran Hutang Tahun Sebelumnya	159.307.000,00
2	Penghapusan Aset tetap Dengan SK Penghapusan	24.199.000,00
3	Mutasi Keluar OPD lain	17.087.434.142,00
4	Reklasifikasi Aset Tetap ke Properti Investasi Tanah	90.567.500.000,00
	Jumlah Mutasi Kurang	107.838.440.142,00
4	Saldo Per 31 Desember 2024	2.318.610.399.385,31

Beberapa informasi terkait Aset Tetap Tanah sebagai berikut.

1. Terdapat Koreksi Tambah Saldo Awal sejumlah Rp14.000.000,00 dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Hibah/Pendapatan Aset Dari Pemerintah Pusat/Pihak Lain sejumlah Rp6.013.116.080,00 terdiri dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp5.604.185.000,00, Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp307.989.000,00, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (Pembantu Pengelola) sebesar Rp100.942.080,00.
3. Kesalahan penganggaran atas BMD yang dianggarkan pada Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp97.991.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum.

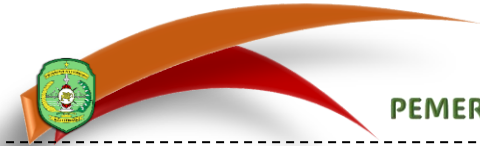


4. Barang Temuan Baru (Murni Tahun 2024) sejumlah Rp16.476.391.450,00 terdiri dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp16.239.391.450,00 dan Kecamatan Samboja Barat sebesar Rp237.000.000,00.
5. Mutasi Masuk dari OPD Lain sejumlah Rp17.087.434.142,00, terdiri dari Dinas Pariwisata ke Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp397.316.000,00, dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah ke Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebesar Rp1.231.680.000,00, dari Satuan Polisi Pamong Praja ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp1.146.000.000,00, dari Dinas Kesehatan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp343.750.000,00, dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang ke Dinas Perhubungan sebesar Rp1.183.681.294,00, dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp10.603.678.949,00, dari Dinas Perhubungan ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp1.006.400.000,00, dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang ke Kecamatan Muara Badak sebesar Rp545.250.699,00, dari Dinas Perkebunan ke Kecamatan Sebulu sebesar Rp57.600.000,00, dari Dinas Perkebunan ke Kecamatan Tabang sebesar Rp15.000.000,00, dari Kecamatan Kota Bangun ke Kecamatan Kota Bangun Darat sebesar Rp183.062.500,00, dari Kecamatan Samboja ke Kecamatan Samboja Darat sebesar Rp374.014.700,00.
6. Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB) sejumlah Rp2.005.593.486,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Reklasifikasi pencatatan aset dari Tanah ke Gedung dan Bangunan sejumlah Rp346.273.486,00 terdiri dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp177.133.800,00 dan Kecamatan Marang Kayu sebesar Rp169.139.686,00;
 - b. Reklasifikasi pencatatan aset dari Tanah ke Jaringan dan Irigasi di sebesar Rp1.659.320.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum.
7. Belanja Modal yang Merupakan Pembayaran Hutang Tahun Sebelumnya sejumlah Rp159.307.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum.
8. Penghapusan Aset tetap Dengan SK Penghapusan sejumlah Rp24.199.000,00 terdiri dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp10.000.000,00 dan Kecamatan Loa Janan sebesar Rp14.199.000,00.
9. Reklasifikasi Aset Tetap Tanah ke Properti Investasi Tanah sebesar Rp90.567.500.000,00.

5.3.1.3.2. Peralatan dan Mesin

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Peralatan dan Mesin	5.212.133.528.626,34	4.114.752.480.462,76

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara per 31 Desember 2024 sejumlah Rp5.212.133.528.626,34 jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp4.114.752.480.462,76 mengalami peningkatan sebesar Rp1.097.381.048.163,58 atau 26,67%. Ringkasan mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin selama tahun 2024 dijelaskan pada **Lampiran 6** dan dirangkum sebagai berikut.

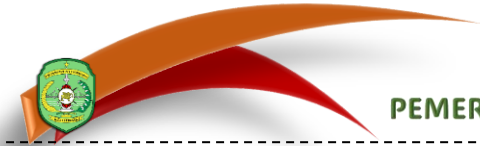


Tabel 5 . 3 . 24 Mutasi Aset Tetap – Peralatan dan Mesin

No	Uraian	Peralatan dan Mesin (Rp)
1	Saldo 31 Desember 2023	4.114.752.480.462,76
2	Mutasi Tambah	
1	Belanja Modal Januari S/D 31 Desember 2024	1.277.969.271.280,00
2	Belanja BLUD Januari S/D 31 Desember 2024	8.318.781.900,00
3	Belanja Modal BOS-P Tahun 2024	16.802.328.201,00
4	Hibah/Pendapatan Aset dari Pemerintah Pusat/Pihak Lain	6.823.138.899,00
5	Pengadaan BMD yang Dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa	19.464.321.447,00
6	Barang Temuan Baru (Murni Tahun 2024)	75.000.000,00
7	Pengkuan Hutang Tahun Berjalan	61.080.832.500,00
8	Mutasi Masuk dari OPD Lain	83.657.613.980,57
9	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)	
	a antar KIB B - KIB C	81.060.653.718,00
	b antar KIB B - KIB D	5.383.237.802,00
	c antar KIB B - KIB E	193.540.000,00
	d antar KIB B - KIB F	415.251.277,00
	Jumlah Mutasi Tambah	1.561.243.971.004,57
3	Mutasi Kurang	
1	Koreksi Double Catat	1.210.000,00
2	Belanja Barang dan Jasa yang Dianggarkan Dalam Belanja Modal	67.499.310.019,00
3	Belanja Barang dan Jasa yang Dianggarkan Dalam Belanja Modal Dibawah Tahun 2024	14.190.000,00
4	Pengadaan Belanja Modal Diserahkan ke Masyarakat	204.450.000,00
5	Belanja Modal yang Merupakan Pembayaran Hutang Tahun Sebelumnya	145.553.579.030,00
6	Mutasi Keluar ke OPD Lain	83.657.613.980,57
7	Reklasifikasi ke Aset Lainnya	
	a. Barang Rusak Berat	61.755.821.866,42
	b. Aset Tak Berwujud	674.780.000,00
8	Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomptabel	
	a. Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	95.402.641.764,00
9	Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin	
	a. antar KIB B – KIB C	5.133.447.080,00
	b. antar KIB B – KIB D	1.770.527.260,00
	c. antar KIB B – KIB E	2.156.347.065,00
10	Pengurangan Nilai Aset Karena Kelebihan Pembayaran	39.004.776,00
	Jumlah Mutasi Kurang	463.862.922.840,99
4	Saldo Per 31 Desember 2024	5.212.133.528.626,34

Beberapa informasi terkait aset tetap peralatan dan mesin sebagai berikut :

1. Hibah/Pendapatan Aset dari Pemerintah Pusat/Pihak Lain sejumlah Rp6.823.138.899,00 terdiri dari aset peralatan dan mesin yang diterima Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Masyarakat sebesar Rp277.300.000,00, Dinas Kesehatan sebesar Rp363.000.000,00, Dinas Lingkungan Hidup dan



Kehutanan sebesar Rp4.653.715.054,00, dan Dinas Perhubungan sebesar Rp1.529.123.845,00.

2. Kesalahan Penganggaran Pengadaan BMD yang dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp19.464.321.447,00, jumlah tersebut dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa namun setelah direalisasikan masuk ke dalam Belanja Modal. Rincian per SKPD sebagai berikut:.

Tabel 5 . 3 . 25 Pengadaan BMD yang dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa

No.	SKPD	Nilai (Rp)
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2.611.730.000,00
2	Dinas Kesehatan	21.700.000,00
3	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.561.885.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum	286.937.000,00
5	Dinas Perhubungan	7.907.225.000,00
6	Dinas Perkebunan	23.950.000,00
7	Dinas Pertanian dan Peternakan	67.369.000,00
8	Dinas Sosial	54.578.000,00
9	Sekretariat DPRD	255.595.000,00
10	RSUD AM Parikesit	6.644.830.000,00
11	RSUD Dayaku Raja	13.745.000,00
12	Kecamatan Anggana	14.777.447,00
Jumlah		19.464.321.447,00

3. Barang Temuan Baru (Murni Tahun 2024) sejumlah Rp75.000.000,00 pada Dinas Perkebunan.
4. Pengakuan Utang Tahun Berjalan sejumlah Rp61.080.832.500,00 terdiri dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp56.841.332.500,00 dan RSUD AM Parikesit sebesar Rp4.239.500.000,00.
5. Mutasi masuk dan keluar antar SKPD sebesar Rp83.657.613.980,57 diuraikan pada tabel berikut

Tabel 5 . 3 . 26 Mutasi Masuk dan Keluar dari SKPD

No	Mutasi Keluar	Mutasi Masuk	Nilai (Rp)
1	Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Masyarakat	BPKAD Pengelola	399.900.000,00
2	Badan Pendapatan Daerah	BPKAD Pengelola	620.254.000,00
		Dinas Komunikasi dan Informatika	317.631.450,00
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	14.900.000,00
		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	15.928.000,00
		Kecamatan Loa Kulu	13.074.700,00
3	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	BPKAD Pengelola	781.151.000,00
4	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	BPKAD Pengelola	1.453.660.390,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Dinas Pemadam Kebakaran	37.029.807.396,98
6	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	BPKAD Pengelola	790.439.330,00
7	Dinas Kesehatan	RSUD Aji Batara Agung	9.122.793.300,00
		BPKAD Pengelola	2.242.702.140,00
8	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kecamatan Kembang Janggut	730.855.000,00
		Kecamatan Kenohan	730.855.000,00
		Kecamatan Loa Janan	528.855.000,00

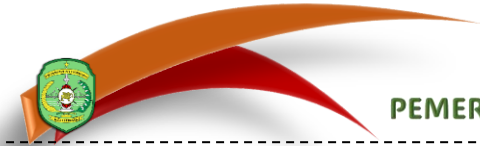


PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No	Mutasi Keluar	Mutasi Masuk	Nilai (Rp)
		Kecamatan Loa Kulu	530.765.000,00
		Kecamatan Marang Kayu	528.855.000,00
		Kecamatan Muara Badak	528.855.000,00
		Kecamatan Muara Muntai	170.040.000,00
		Kecamatan Muara Wis	528.855.000,00
		Kecamatan Sanga-Sanga	586.105.000,00
		Kecamatan Sebulu	528.855.000,00
		Kecamatan Tabang	1.538.855.000,00
		Kecamatan Tenggarong Seberang	55.000.000,00
		RSUD AM Parikesit	617.269.100,00
9	Dinas Pariwisata	BPKAD Pengelola	1.801.242.499,00
10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	BPKAD Pengelola	129.492.000,00
11	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	BPKAD Pengelola	250.760.000,00
		Badan Pendapatan Daerah	14.900.000,00
12	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	BPKAD Pengelola	943.461.100,00
13	Dinas Perhubungan	BPKAD Pengelola	99.730.000,00
14	Dinas Perkebunan	BPKAD Pengelola	330.663.000,00
		Kecamatan Sebulu	5.549.556,00
		Kecamatan Tabang	2.774.778,00
		Kecamatan Loa Kulu	12.300.000,00
		Badan Pendapatan Daerah	24.509.490,00
15	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	BPKAD Pengelola	686.625.000,00
16	Dinas Pertanian dan Peternakan	BPKAD Pengelola	1.196.148.375,00
17	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	BPKAD Pengelola	36.970.000,00
18	Dinas Sosial	BPKAD Pengelola	999.191.500,00
19	Satpol PP	BPKAD Pengelola	40.000.000,00
20	Sekretariat Daerah	BPKAD Pengelola	393.356.700,00
21	Sekretariat DPRD	BPKAD Pengelola	467.205.000,00
22	RSUD AM Parikesit	BPKAD Pengelola	456.516.400,00
23	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	BPKAD Pengelola	282.375.000,00
24	Kecamatan Kota Bangun	Kecamatan Kota Bangun Darat	1.073.483.990,00
25	Kecamatan Loa Kulu	BPKAD Pengelola	543.037.700,00
26	Kecamatan Muara Muntai	BPKAD Pengelola	369.269.000,00
27	Kecamatan Samboja	BPKAD Pengelola	803.534.950,00
		Kecamatan Samboja Barat	9.378.421.906,73
28	Kecamatan Tabang	BPKAD Pengelola	741.855.700,00
29	Kecamatan Tenggarong Seberang	BPKAD Pengelola	299.000.000,00
30	BPKAD Pengelola	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	649.712.000,00
		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	33.798.600,00
		Dinas Pariwisata	39.325.000,00
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	888.193.928,86
		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	257.950.000,00
Jumlah			83.657.613.980,57

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024

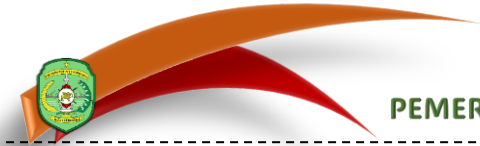


6. Reklasifikasi pencatatan aset dari Gedung dan Bangunan ke Peralatan dan Mesin sejumlah Rp81.060.653.718,00 terdiri dari Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp149.257.260,00, Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp4.196.034.000,00, Dinas Pemadam Kebakaran sebesar Rp2.181.376.234,00, Dinas Perhubungan sebesar Rp74.177.155.900,00 dan Kecamatan Anggana sebesar Rp356.830.324,00.
7. Reklasifikasi pencatatan aset dari Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Peralatan dan Mesin sejumlah Rp5.383.237.802,00 terdiri dari Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp57.500.000,00, Dinas Perikanan dan Kelautan sebesar Rp17.742.240,00, Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp5.159.355.562,00, dan Dinas Perhubungan sebesar Rp148.640.000,00.
8. Reklasifikasi pencatatan aset dari Aset Tetap Lainnya ke Peralatan dan Mesin sejumlah Rp193.540.000,00 terdiri dari Dinas Kesehatan sebesar Rp14.700.000,00 dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp178.840.000,00.
9. Reklasifikasi pencatatan aset dari Konstruksi dalam Pengerjaan ke Peralatan dan Mesin sejumlah Rp415.251.277,00 pada Dinas Komunikasi dan Informatika.
10. Koreksi Double Catat sejumlah Rp1.210.000,00 pada RSUD Dayaku Raja.
11. Kesalahan Penganggaran Belanja Barang dan Jasa yang Dianggarkan Dalam Belanja Modal sejumlah Rp67.499.310.019,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 . 3 . 27 Belanja Barang dan Jasa yang Dianggarkan Dalam Belanja Modal

No.	SKPD	Nilai (Rp)
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	524.540,00
2	Dinas Komunikasi dan Informatika	113.230.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum	15.100.000,00
4	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.368.000,00
5	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9.935.000,00
6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	59.925.754.492,00
7	Dinas Pertanian dan Peternakan	83.610.000,00
8	Dinas Sosial	32.700.000,00
9	Sekretariat Daerah	1.360.000,00
10	Sekretariat DPRD	7.176.169.987,00
11	Kecamatan Kembang Janggut	8.861.000,00
12	Kecamatan Muara Jawa	70.447.000,00
13	Kecamatan Muara Muntai	56.000.000,00
14	Kecamatan Tenggarong Seberang	4.250.000,00
Jumlah		67.499.310.019,00

12. Kesalahan Penganggaran Belanja Barang dan Jasa yang dianggarkan Dalam Belanja Modal di bawah Tahun 2024 sejumlah Rp14.190.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
13. Kesalahan Penganggaran Belanja Persediaan yang Diserahkan kepada Masyarakat ke Belanja Modal sejumlah Rp204.450.000,00 terdiri dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp122.250.000,00 dan Kecamatan Loa Kulu sebesar Rp82.200.000,00.
14. Belanja Modal yang Merupakan Pembayaran Hutang Tahun Sebelumnya sejumlah Rp145.553.579.030,00 terdiri dari Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp119.150.000,00, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar



Rp145.380.629.030,00, dan Dinas Pertanian dan Peternakan sebesar Rp53.800.000,00.

15. Reklasifikasi ke Rusak Berat sebesar Rp61.755.821.866,42 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 5 . 3 . 28 Reklasifikasi ke Rusak Berat

No.	Nama SKPD	Nilai (Rp)
1	Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Masyarakat	195.755.894,46
2	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	10.590.579.964,10
3	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	209.165.580,00
4	Dinas Perikanan dan Kelautan	673.559.700,00
5	Dinas Kesehatan	1.766.825.000,00
6	Dinas Pariwisata	2.587.046.679,17
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.654.332.867,00
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	933.060.126,00
9	Dinas Perhubungan	2.728.966.756,00
10	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	7.686.689.087,16
11	Inspektorat Daerah	2.895.768.827,19
12	RSUD AM Parikesit	27.605.879.110,02
13	Kecamatan Kota Bangun	275.066.400,00
14	Kecamatan Loa Janan	710.569.333,00
15	Kec. Muara Kaman	2.440.000,00
16	Kecamatan Muara Muntai	851.444.142,32
17	Kecamatan Sebulu	388.672.400,00
Jumlah		61.755.821.866,42

16. Reklasifikasi ke Aset Tak Berwujud sejumlah Rp674.780.000,00 terdiri dari Dinas Pariwisata sebesar Rp12.500.000,00 dan Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp662.280.000,00.

17. Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomptabel sebesar Rp95.402.641.764,00 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 5 . 3 . 29 Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomptabel

No.	Nama SKPD	Nilai (Rp)
1	Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Masyarakat	191.500.000,00
2	Badan Pendapatan Daerah	10.750.000,00
3	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	78.180.000,00
4	Dinas Perikanan dan Kelautan	2.640.000,00
5	Dinas Pemuda dan Olahraga	2.943.720,00
6	Dinas Kesehatan	164.890.000,00
7	Dinas Komunikasi dan Informatika	17.940.000,00
8	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	5.778.000,00
9	Dinas Pekerjaan Umum	19.000.000,00
10	Dinas Pemadam Kebakaran	39.264.548,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	985.000,00
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	24.980.000,00
13	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	22.795.699.112,00
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7.680.000,00
15	Dinas Perhubungan	71.566.781.745,00
16	Dinas Perkebunan	975.000,00
17	Dinas Pertanian dan Peternakan	26.320.000,00
18	Dinas Sosial	18.350.000,00
19	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.777.600,00
20	Inspektorat Daerah	16.250.000,00
21	Sekretariat Daerah	8.838.000,00
22	Sekretariat DPRD	194.778.750,00
23	RSUD AM Parikesit	51.756.180,00



No.	Nama SKPD	Nilai (Rp)
24	Rsu Aji Batara Agung Dewa Sakti	56.453.320,00
25	RSUD Dayaku Raja	5.363.789,00
26	Kecamatan Anggana	3.200.000,00
27	Kecamatan Kenohan	900.000,00
28	Kecamatan Sanga-Sanga	1.780.000,00
29	Kecamatan Tenggarong	67.277.000,00
30	Kecamatan Tenggarong Seberang	7.600.000,00
31	Kecamatan Kota Bangun Darat	910.000,00
32	Kecamatan Samboja Barat	11.100.000,00
Jumlah		95.402.641.764,00

18. Reklasifikasi dari Peralatan Mesin ke Gedung dan Bangunan sejumlah Rp5.133.447.080,00, terdiri dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp158.169.000,00, Dinas Perhubungan sebesar Rp2.989.780.830,00, Sekretariat DPRD sebesar Rp1.814.248.500,00 dan RSUD AM Parikesit sebesar Rp171.248.750,00.
19. Reklasifikasi dari Peralatan Mesin ke Jalan Irigasi dan Jaringan sejumlah Rp1.770.527.260,00 terdiri dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp615.185.000,00, Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp923.937.360,00, Sekretariat DPRD sebesar Rp197.954.900,00 dan RSUD AM Parikesit sebesar Rp33.450.000,00.
20. Reklasifikasi dari Peralatan Mesin ke Aset Tetap Lainnya sebesar Rp2.156.347.065,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
21. Pengurangan Nilai Aset Karena Kelebihan Pembayaran sebesar Rp39.004.776,00 terdiri dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp36.791.776,00 dan Kecamatan Kota Bangun Darat sebesar Rp2.213.000,00.

5.3.1.3.3. Gedung dan Bangunan

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Gedung dan Bangunan	8.066.136.115.302,99	7.172.457.039.592,84

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara per tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp8.066.136.115.302,99 jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp7.172.457.039.592,84 mengalami peningkatan sebesar Rp893.679.075.710,15 atau 12,46%. Ringkasan mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan selama tahun 2024 dijelaskan pada **Lampiran 7** dan dirangkum sebagai berikut.

Tabel 5 . 3 . 30 Mutasi Aset Tetap – Gedung dan Bangunan

No	Uraian	Gedung dan Bangunan (Rp)
1	Saldo 31 Desember 2023	7.172.457.039.592,84
2	Mutasi Tambah	
1	Belanja Modal Tahun 2024	1.476.245.180.636,31
2	Belanja Modal BLUD Tahun 2024	170.250.887.386,00
3	Hibah/Pendapatan Aset dari Pemerintah Pusat/Pihak Lain	8.291.260.000,00
4	Pengadaan BMD yang Dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa	22.075.589.662,10
5	Barang Temuan Baru (Murni Tahun 2024)	641.235.000,00
6	Pengakuan Utang Tahun Berjalan	166.858.349.776,15
7	Mutasi Masuk dari SKPD Lain	57.601.631.052,78



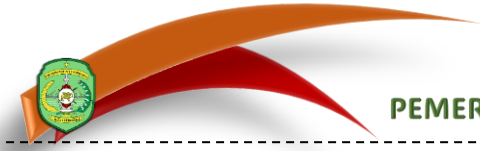
No	Uraian	Gedung dan Bangunan (Rp)
8	Reklasifikasi dari Aset Ekstrakomptabel	
a.	Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	717.740.362,00
9	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)	
a.	antar KIB B - KIB C	5.133.447.080,00
b.	antar KIB C - KIB D	3.978.213.740,67
c.	antar KIB C - KIB F	275.536.444.183,60
10	Pengembalian Belanja atas Temuan BPK	1.838.468.291,70
Jumlah Mutasi Tambah		2.189.168.447.171,31
3	Mutasi Kurang	
1	Koreksi Dobel Catat	1.210.000,00
2	Belanja Barang dan Jasa yang Dianggarkan Dalam Belanja Modal	12.036.550.000,00
3	Belanja Modal yang Merupakan Pembayaran Utang Tahun Sebelumnya	26.298.031.721,00
4	Penghapusan Aset Tetap dengan SK Penghapusan	1.243.490.700,00
5	Mutasi Keluar ke SKPD Lain	57.601.631.052,78
6	Reklasifikasi ke Aset Lainnya	
a.	Barang Rusak Berat	10.691.033.039,00
b.	Aset Tak Berwujud	160.000.000,00
7	Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomptabel	
a.	Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	176.746.500,00
8	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)	
a.	antar KIB A - KIB C	346.273.486,00
b.	antar KIB B - KIB C	81.060.653.718,00
c.	antar KIB C - KIB D	24.936.229.213,31
d.	antar KIB C - KIB E	1.283.067.250,00
e.	antar KIB C - KIB F	334.966.225.049,96
9	Pengurangan Nilai Aset Karena Kelebihan Pembayaran	425.833.600,00
10	Reklasifikasi Aset Tetap ke Properti Investasi Gedung dan Bangunan	738.685.409.512,00
11	Jurnal Koreksi atas Kekurangan Volume Pekerjaan atas Temuan Pemeriksaan TA2024	5.576.986.619,11
Jumlah Mutasi Kurang		1.295.489.371.461,16
4	Saldo Per 31 Desember 2024	8.066.136.115.302,99

Beberapa informasi terkait Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebagai berikut.

1. Hibah/Pendapatan Aset dari Pemerintah Pusat/Pihak Lain sebesar Rp8.291.260.000,00 merupakan Aset Gedung dan Bangunan yang diterima Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (Pembantu Pengelola) sebesar Rp4.494.380.000,00 dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp3.796.880.000.
2. Kesalahan panganggaran Belanja Modal yang dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp22.075.589.662,10 namun setelah direalisasikan barang tersebut masuk kategori aset tetap yang seharusnya dianggarkan di Belanja Modal. Rincian per SKPD sebagai berikut.

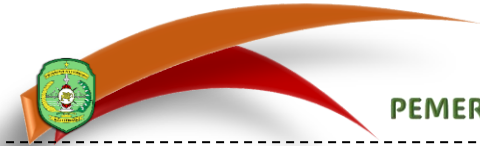
Tabel 5 . 3 . 31 Pengadaan BMD yang dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa

No.	SKPD	Nilai (Rp)
1	Badan Pendapatan Daerah	1.131.324.673,00
2	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	914.835.600,00
3	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	341.373.695,00
4	Dinas Perikanan dan Kelautan	234.749.500,00

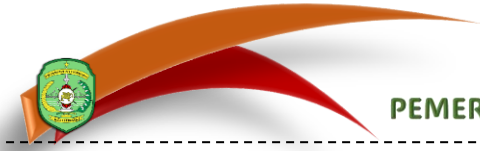


No.	SKPD	Nilai (Rp)
5	Dinas Pemuda dan Olahraga	181.246.289,00
6	Dinas Komunikasi dan Informatika	25.246.950,00
7	Dinas Pekerjaan Umum	740.442.333,00
8	Dinas Pemadam Kebakaran	135.028.840,00
9	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	15.697.836.194,00
10	Dinas Perhubungan	1.010.030.000,00
11	Dinas Perkebunan	12.676.866,00
12	Dinas Pertanian dan Peternakan	223.633.392,00
13	RSUD Aji Muhammad Parikesit	1.019.369.476,10
14	RSUD Dayaku Raja	370.230.000,00
15	Kecamatan Anggana	8.377.447,00
16	Kecamatan Sebulu	25.618.647,00
17	Kecamatan Tenggarong	3.569.760,00
Jumlah		22.075.589.662,10

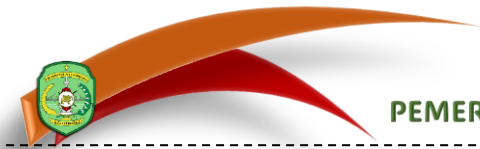
- Barang Temuan Baru (Murni Tahun 2024) sebesar Rp641.235.000,00 pada Kecamatan Sebulu.
- Pengakuan Utang Tahun Berjalan (2024) sebesar Rp166.858.349.776,15 terdiri dari RSUD Aji Muhammad Parikesit sebesar Rp15.082.577.899,13, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp5.906.485.800,00, Dinas Perhubungan sebesar Rp381.211.225,00, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp71.629.672.065,00, Dinas Pekerjaan Umum Rp57.523.934.430,00, Dinas Pariwisata Rp13.752.874.045,22, Dinas Kesehatan sebesar Rp666.080.329,00, Dinas Pemuda dan Olahraga Rp618.634.152,80, Dinas Perikanan dan Kelautan Rp826.009.830,00 dan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebesar Rp470.870.000,00.
- Mutasi antar SKPD sebesar Rp57.601.631.052,78 terdiri dari Badan Keuangan dan Aset Daerah ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (Pembantu Pengelola) sebesar Rp923.903.707,00, Kecamatan Samboja ke Kecamatan Samboja Barat sebesar Rp28.072.915.435,38, Kecamatan Kota Bangun ke Kecamatan Kota Bangun Darat sebesar Rp4.301.690.239,40, Dinas Pekerjaan Umum ke Kecamatan Tenggarong sebesar Rp1.816.944.500,00, Dinas Perkebunan ke Kecamatan Sebulu sebesar Rp30.900.000,00, Dinas Perhubungan ke Kecamatan Sanga-Sanga sebesar Rp1.110.862.600,00, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (Pembantu Pengelola) ke Dinas Perhubungan sebesar Rp1.121.649.382,00, Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah ke Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebesar Rp17.920.790.385,00, Satuan Polisi Pamong Praja ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp676.500.000,00, Dinas Kesehatan ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp275.128.000,00, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan ke RSUD Aji Muhammad Parikesit sebesar Rp303.474.048,00 dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (Pembantu Pengelola) ke RSUD Aji Muhammad Parikesit sebesar Rp1.046.872.756,00.
- Reklasifikasi dari Aset di bawah kapitalisasi aset tetap sebesar Rp717.740.362,00 terdiri dari RSUD Dayaku Raja Rp16.416.900,00, RSUD Aji Muhammad Parikesit sebesar Rp631.759.350,00, Sekretariat Daerah sebesar Rp13.450.860,00, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar



- Rp44.614.000,00, dan Dinas Pariwisata sebesar Rp11.499.252,00.
7. Reklasifikasi pencatatan aset dari Peralatan dan Mesin ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp5.133.447.080,00 terdiri dari RSUD Aji Muhammad Parikesit sebesar Rp171.248.750,00, Sekretariat DPRD sebesar Rp1.814.248.500,00, Dinas Perhubungan sebesar Rp2.989.780.830,00, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp158.169.000,00.
 8. Reklasifikasi pencatatan aset dari Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp3.978.213.740,67, terdiri dari Kecamatan Samboja Barat sebesar Rp7.944.000,00, Kecamatan Tenggarong sebesar Rp191.101.390,00, Kecamatan Samboja sebesar Rp1.338.184.622,67, Dinas Perumahan dan Pemukiman sebesar Rp43.782.900,00, dan Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp2.397.200.828,00.
 9. Reklasifikasi pencatatan aset dari Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp275.536.444.183,60, terdiri dari RSUD Dayaku Raja sebesar Rp958.194.846,00, RSUD Aji Muhammad Parikesit sebesar Rp995.770.575,00, Sekretariat Daerah sebesar Rp456.178.800,00, Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp1.296.530.515,00, Dinas Perhubungan sebesar Rp13.007.458.329,00, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp6.011.333.562,00, Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp248.897.558.009,60, Dinas Kesehatan sebesar Rp767.107.291,00, Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp3.146.312.256,00.
 10. Pengembalian Belanja atas Temuan Pemeriksaan TA 2023 yang disetorkan TA 2024 sebesar Rp1.838.468.291,70 pada RSUD Aji Muhammad Parikesit.
 11. Koreksi double catat sebesar Rp1.210.000,00 pada RSUD Dayaku Raja berupa Honorarium PPKom Alat Kesehatan.
 12. Kesalahan panganggaran Belanja Barang dan Jasa yang Dianggarkan Dalam Belanja Modal sebesar Rp12.036.550.000,00 terdiri dari Kecamatan Samboja Barat senilai Rp280.575.791,00, Kecamatan Tenggarong sebesar Rp3.740.000,00, Kecamatan Samboja sebesar Rp256.891.500,00, Kecamatan Anggana Rp10.000,00, Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp2.417.171.015,00, Dinas Perhubungan sebesar Rp924.793.118,00, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp5.383.201.650,00, Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp2.323.439.456,00, Dinas Pariwisata sebesar Rp89.165.870,00, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp326.970.000,00 dan Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp30.591.600,00 dimana setelah belanja modal direalisasikan ternyata hasil belanja tidak masuk dalam kriteria aset tetap gedung dan bangunan.
 13. Belanja modal yang merupakan pembayaran utang tahun sebelumnya sebesar Rp26.298.031.721,00 yang terdiri dari Kecamatan Muara Badak sebesar Rp59.243.000,00, Sekretariat Daerah sebesar Rp1.095.553.005,00, Dinas Pertanian dan Peternakan sebesar Rp15.934.600,00, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp9.922.179.847,00, Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp12.030.554.074,00, Dinas Pariwisata sebesar Rp15.651.000,00 dan Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp3.158.916.195,00.



14. Penghapusan Aset Tetap dengan SK Penghapusan sebesar Rp1.243.490.700,00 terdiri dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp1.046.986.700,00 dan Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp196.504.000,00.
15. Reklasifikasi ke Aset Lainnya Barang Rusak Berat sebesar Rp10.691.033.039,00 terdiri dari Kecamatan Kota Bangun sebesar Rp22.130.000,00, Kecamatan Kenohan sebesar Rp272.885.000,00, Dinas Perhubungan sebesar Rp3.191.184.343,00, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp6.424.491.363,00 dan Dinas Pariwisata sebesar Rp780.342.333,00 merupakan barang yang berubah kondisi dari baik/kurang baik menjadi rusak berat.
16. Reklasifikasi pencatatan aset ke Aset Lainnya Aset Tak Berwujud sebesar Rp160.000.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum.
17. Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomptabel pada Aset Di bawah Kapitalisasi Aset Tetap sebesar Rp176.746.500,00 terdiri dari Dinas Pertanian dan Peternakan sebesar Rp135.408.000,00, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp12.720.000,00 dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp28.618.500,00.
18. Reklasifikasi pencatatan aset dari Gedung dan Bangunan ke Tanah sebesar Rp346.273.486,00 terdiri dari Kecamatan Marang Kayu sebesar Rp169.139.686,00 dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp177.133.800,00.
19. Reklasifikasi pencatatan aset dari Gedung dan Bangunan ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp81.060.653.718,00, terdiri dari Kecamatan Anggana sebesar Rp356.830.324,00, Dinas Perhubungan sebesar Rp74.177.155.900,00, Dinas Pemadam Kebakaran sebesar Rp2.181.376.234,00, Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp4.196.034.000,00 dan Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp149.257.260,00.
20. Reklasifikasi pencatatan aset dari Gedung dan Bangunan ke Jaringan, Jalan dan Irigasi sebesar Rp24.936.229.213,31, terdiri dari Kecamatan Samboja sebesar Rp352.843.115,31, Kecamatan Muara Jawa sebesar Rp11.966.019,00, RSUD Aji Muhammad Parikesit sebesar Rp203.937.500,00, Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp957.534.205,00, Dinas Perhubungan sebesar Rp205.800.000,00, Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp18.345.810.153,00, Dinas Pariwisata sebesar Rp992.309.152,00, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp222.764.133,00, Dinas Kesehatan sebesar Rp2.957.962.186,00 dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp685.302.750,00.
21. Reklasifikasi pencatatan aset Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap Lainnya sebesar Rp1.283.067.250,00 pada RSUD A.M. Parikesit.
22. Reklasifikasi pencatatan aset dari Gedung dan Bangunan ke Konstruksi dalam Pengerjaan sebesar Rp334.966.225.049,96, terdiri dari RSUD Dayaku Raja sebesar Rp547.356.681,00, RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti sebesar



Rp55.348.927.150,00, RSUD Aji Muhammad Parikesit sebesar Rp151.461.241.111,74, Sekretariat Daerah sebesar Rp6.370.618.313,00, Inspektorat senilai Rp15.934.564.922,00, Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp199.700.100,00, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp48.976.666.800,00, Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp27.019.836.517,00, Dinas Pariwisata sebesar Rp18.841.769.058,22, Dinas Kesehatan sebesar Rp9.317.031.097,00, Dinas Perikanan dan Kelautan sebesar Rp855.162.300,00 dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp93.351.000,00.

- 23. Pengurangan Nilai Aset Karena Kelebihan Pembayaran sebesar Rp425.833.600,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- 24. Reklasifikasi Aset Tetap ke Properti Investasi Gedung dan Bangunan sebesar Rp738.685.409.512,00.
- 25. Jurnal Koreksi atas Kekurangan Volume Pekerjaan atas Temuan Pemeriksaan TA 2024 sebesar Rp5.576.986.619,11.

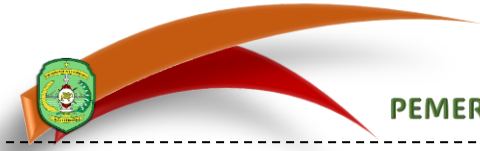
5.3.1.3.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	18.468.306.654.320,00	15.799.159.522.083,60

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara per 31 Desember 2024 sebesar Rp18.468.306.654.320,00 jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp15.799.159.522.083,60 mengalami peningkatan sebesar Rp2.669.147.132.236,43 atau 16,89%. Ringkasan mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan selama tahun 2024 dijelaskan pada **Lampiran 8** dan dirangkum sebagai berikut.

Tabel 5 . 3 . 32 Mutasi Aset Tetap - Jalan, Irigasi, dan Jaringan

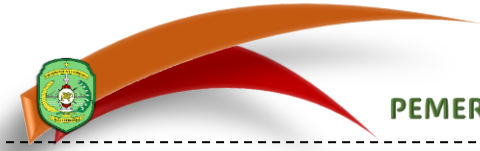
No	Uraian	Jaringan Jalan dan Irigasi (Rp)
1	Saldo 31 Desember 2023	15.799.159.522.083,60
2	Mutasi Tambah	
1	Belanja Modal Tahun 2024	2.281.781.596.417,52
2	Pengadaan BMD yang Dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa	17.482.209.874,00
3	Pengadaan BMD yang Dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa Dibawah Tahun 2024	18.065.000,00
4	Pengakuan Hutang Tahun Berjalan	78.168.198.662,00
5	Mutasi Masuk dari SKPD Lain	122.958.197.563,62
6	Reklasifikasi antar Aset Tetap (KIB)	
	a. antar KIB B - KIB D	1.770.527.260,00
	b. antar KIB C - KIB D	24.936.229.213,31
	c. antar KIB D - KIB F	718.807.002.110,82
	Jumlah Mutasi Tambah	3.245.922.026.101,27
3	Mutasi Kurang	
1	Koreksi Saldo tahun 2023 Belum Diakomodir pada LKPD (Megurangi)	2.335.450,00
2	Koreksi Double Catat	183.459.095,00



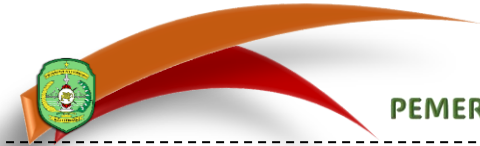
No	Uraian	Jaringan Jalan dan Irigasi (Rp)
3	Belanja Barang dan Jasa yang Dianggarkan Dalam Belanja Modal	8.334.331.029,00
4	Belanja Modal yang Merupakan Pembayaran Utang Tahun Sebelumnya	167.375.572.913,00
5	Mutasi Keluar ke SKPD Lain	122.958.197.563,62
6	Reklasifikasi antar Aset Tetap (KIB)	
	a. antar KIB A - KIB D	1.659.320.000,00
	b. antar KIB B - KIB D	5.383.237.802,00
	c. antar KIB C - KIB D	3.978.213.740,95
	e. antar KIB D - KIB F	252.943.226.349,00
7	Pengurangan Nilai Aset Karena Kelebihan Pembayaran	3.985.382.435,00
	Jurnal Koreksi atas Kekurangan Volume Pekerjaan atas Temuan Pemeriksa TA2024	9.971.617.487,27
Jumlah Mutasi Kurang		576.774.893.864,84
4	Saldo Per 31 Desember 2024	18.468.306.654.320,00

Beberapa informasi terkait Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan sebagai berikut:

1. Kesalahan penganggaran BMD yang dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp17.482.209.874,00 terdiri dari Dinas Perikanan dan Kelautan sebesar Rp137.289.500,00, Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp448.295.100,00, Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp15.235.423.192,00, Dinas Pertanian dan Peternakan sebesar Rp219.988.000,00, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp1.189.924.800,00, RSUD Dayaku Raja sebesar Rp4.250.000,00, Kecamatan Muara Jawa Rp226.704.082,00, Kecamatan Tenggarong Rp4.795.200,00 dan Kecamatan Samboja Barat sebesar Rp15.540.000,00.
2. Kesalahan penganggaran Belanja Modal yang dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa dibawah Tahun 2024 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp18.065.000,00.
3. Pengakuan Utang Tahun 2024 sejumlah Rp78.168.198.662,00 terdiri dari Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp52.006.900.702,00, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp26.137.321.328,00 dan Kecamatan Samboja Barat sebesar Rp23.976.632,00.
4. Mutasi antar SKPD sejumlah Rp122.958.197.563,62 terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah ke Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebesar Rp1.158.644.871,00, Kecamatan Kota Bangun ke Kecamatan Kota Bangun Darat sebesar Rp9.184.521.336,00 dan Kecamatan Samboja ke Kecamatan Samboja Barat sebesar Rp112.615.031.356,62.
5. Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin sejumlah Rp1.770.527.260,00 terdiri dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp615.185.000,00, Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp923.937.360,00, Sekretariat DPRD sebesar Rp197.954.900,00, dan RSUD Aji Muhammad Parikesit sebesar Rp33.450.000,00.



6. Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan sejumlah Rp24.936.229.213,31 terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp685.302.750,00, Dinas Kesehatan sebesar Rp2.957.962.186,00, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp222.764.133,00, Dinas Pariwisata Rp992.309.152,00, Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp18.345.810.153,00, Dinas Perhubungan sebesar Rp205.800.000,00, Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp957.534.205,00, RSUD Aji Muhammad Parikesit sebesar Rp203.937.500,00, Kecamatan Muara Jawa sebesar Rp11.966.019,00 dan Kecamatan Samboja sebesar Rp352.843.115,31.
7. Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan sejumlah Rp718.807.002.110,82 terdiri dari Dinas Perikanan dan Kelautan sebesar Rp102.489.000,00, Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp715.761.113.611,82, Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp394.189.850,00, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp2.404.628.499,00 dan Kecamatan Tenggarong sebesar Rp144.581.150,00.
8. Koreksi Saldo Awal pada Kecamatan Samboja sebesar Rp2.335.450,00.
9. Koreksi *Double* Catat pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp183.459.095,00.
10. Kesalahan penganggaran Belanja Barang dan Jasa yang dianggarkan dalam Belanja Modal sejumlah Rp8.334.331.029,00 terdiri dari Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp5.466.195.733,00, Dinas Perhubungan sebesar Rp36.000.000,00, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp2.197.847.100,00, Kecamatan Samboja sebesar Rp442.983.412,00 dan Kecamatan Tenggarong sebesar Rp191.304.784,00.
11. Belanja Modal yang Merupakan Pembayaran Utang Tahun Sebelumnya sejumlah Rp167.375.572.913,00 terdiri dari Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp145.906.705.701,00, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp5.240.000.000,00, Dinas Pertanian dan Peternakan sebesar Rp224.334.056,00, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp15.870.565.346,00, Kecamatan Muara Jawa sebesar Rp121.324.910,00 dan Kecamatan Samboja Barat sebesar Rp12.642.900,00.
12. Reklasifikasi ke Tanah pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp1.659.320.000,00.
13. Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp5.383.237.802,00 terdiri dari Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp57.500.000,00, Dinas Perikanan dan Kelautan sebesar Rp17.742.240,00, Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp5.159.355.562,00 dan Dinas Perhubungan sebesar Rp148.640.000,00.
14. Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan sejumlah Rp3.978.213.740,95 terdiri dari Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp2.397.200.828,00, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp43.782.900,00, Kecamatan Samboja sebesar Rp1.338.184.622,95, Kecamatan Tenggarong sebesar Rp191.101.390,00 dan Kecamatan Samboja Barat sebesar Rp7.944.000,00.



- 15. Reklasifikasi ke Konstruksi dalam Pengerjaan sejumlah Rp252.943.226.349,00 terdiri dari Dinas Perikanan dan Kelautan sebesar Rp88.869.500,00, Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp248.154.030.063,00, Dinas Pertanian dan Peternakan sebesar Rp15.717.933,00, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp4.625.834.353,00, dan Kecamatan Muara Jawa sebesar Rp58.774.500,00.
- 16. Kelebihan Pembayaran sebesar Rp3.985.382.435,00 terdiri dari Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp3.934.296.835,00 dan Kecamatan Samboja Barat sebesar Rp51.085.600,00.
- 17. Jurnal Koreksi atas Kekurangan Volume Pekerjaan atas Temuan Pemeriksaan TA2024 sebesar Rp9.971.617.487,27.

5.3.1.3.5. Aset Tetap Lainnya

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Aset Tetap Lainnya	476.129.465.784,92	471.695.435.252,72

Aset Tetap Lainnya merupakan Aset Tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Aset Tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset Tetap Lainnya di Neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku, barang bercorak seni/budaya/olahraga, dan lain-lain.

Saldo Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara per 31 Desember 2024 sebesar Rp476.129.465.784,92 jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp471.695.435.252,72 mengalami peningkatan sebesar Rp4.434.030.532,20 atau 0,94%. Ringkasan mutasi Aset Tetap Lainnya selama tahun 2024 dijelaskan pada **Lampiran 9** dan dirangkum sebagai berikut.

Tabel 5 . 3 . 33 Mutasi Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	Aset Tetap Lainnya (Rp)
1	Saldo 31 Desember 2024	471.695.435.252,72
2	Mutasi Tambah	
1	Belanja Modal Tahun 2024	21.363.309.660,00
2	Belanja BLUD Tahun 2024	108.162.000,00
3	Pengadaan BMD yang Dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa	271.490.482,00
4	Pengakuan Utang Tahun Berjalan	49.617.000,00
5	Mutasi Masuk dari OPD Lain	83.449.000,00
6	Reklasifikasi antar Aset Tetap (KIB)	
a.	antar KIB B - KIB E	2.156.347.065,00
b.	antar KIB C - KIB E	1.283.067.250,00
	Jumlah Mutasi Tambah	25.315.442.457,00
3	Mutasi Kurang	
1	Belanja Barang dan Jasa yang Dianggarkan Dalam Belanja Modal	1.669.200.000,00
2	Belanja Modal yang Merupakan Pembayaran Hutang Tahun Sebelumnya	130.267.000,00
3	Mutasi Keluar ke SKPD Lain	83.449.000,00
4	Reklasifikasi ke Aset Lainnya	



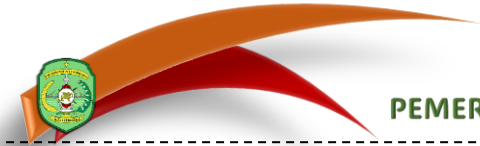
No	Uraian	Aset Tetap Lainnya (Rp)
	a. Rusak Berat	660.862.940,80
	b. Aset Tak Berwujud	16.929.604.010,00
5	Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomptabel	
	a. Aset dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	1.214.488.974,00
6	Reklasifikasi antar Aset Tetap (KIB)	
	a. antar KIB B - KIB E	193.540.000,00
Jumlah Mutasi Kurang		20.881.411.924,80
4	Saldo Per 31 Desember 2024	476.129.465.784,92

Beberapa informasi terkait Aset Tetap Lainnya sebagai berikut.

1. Kesalahan penganggaran BMD yang di anggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp271.490.482,00 terdiri dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp79.932.132,00, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp91.558.350,00, Sekertariat DPRD sebesar Rp100.000.000,00.
2. Pengakuan Utang berjalan sejumlah Rp49.617.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum.
3. Mutasi antar OPD pada Kecamatan Samboja ke Kecamatan Samboja Barat senilai Rp83.449.000,00.
4. Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin sejumlah Rp2.156.347.065,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
5. Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan sejumlah Rp1.283.067.250,00 pada RSUD Aji Muhammad Parikesit.
6. Kesalahan penganggaran Belanja Barang dan Jasa yang dianggarkan dalam Belanja Modal senilai Rp1.669.200.000,pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
7. Belanja Modal yang Merupakan Pembayaran Hutang Tahun Sebelumnya sebesar Rp130.267.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum.
8. Reklasifikasi ke Rusak Berat sebesar Rp660.862.940.80,00 terdiri dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah sebesar Rp95.680.999,80, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebesar Rp35.930.000,00 dan Dinas Pariwisata sebesar Rp529.251.941,00.
9. Reklasifikasi ke Aset Tak Berwujud sebesar Rp16.929.604.010,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5 . 3 . 34 Reklasifikasi ke Aset Tak Berwujud

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	Badan Pendapatan Daerah	545.710.000,00
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	74.980.000,00
3	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebesar	1.080.005.160,00
4	Dinas Pemuda dan Olahraga	101.010.000,00
5	Dinas Komunikasi dan Informatika	13.949.000.000,00
6	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	201.740.000,00
7	Dinas Pekerjaan Umum	98.512.500,00



No	SKPD	Nilai (Rp)
8	Dinas Pemadam Kebakaran	99.000.000,00
9	Dinas Pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	146.320.000,00
10	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	36.186.000,00
11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	91.558.350,00
12	Inspektorat	199.620.000,00
13	Sekretariat Daerah	112.500.000,00
14	Sekretariat DPRD	100.000.000,00
15	RSUD Aji Muhammad Parikesit	93.462.000,00
Jumlah		16.929.604.010,00

10. Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomptabel sebesar Rp1.214.488.974,00 terdiri dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp24,280.974,00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebesar Rp1.186.940.000,00 dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp3.268.000,00.
11. Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp193.540.000,00 terdiri dari Dinas Kesehatan senilai Rp14.700.000,00 dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp178.840.000,00.

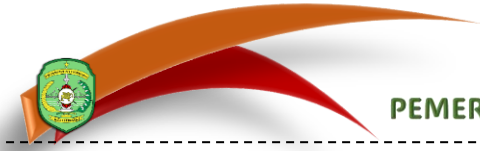
5.3.1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.324.003.203.152,65	1.760.783.708.237,39

Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah Aset Tetap berwujud, yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 belum selesai dikerjakan dan tidak dapat dikelompokkan dalam Aset Tetap bersangkutan. Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.324.003.203.152,65 dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp1.760.783.708.237,39 mengalami penurunan sebesar Rp436.780.505.084,74 atau 24,81%. Ringkasan mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan selama tahun 2024 dijelaskan pada **Lampiran 10** dan dirangkum sebagai berikut.

Tabel 5 . 3 . 35 Mutasi Aset Tetap – Konstruksi Dalam Pengerjaan

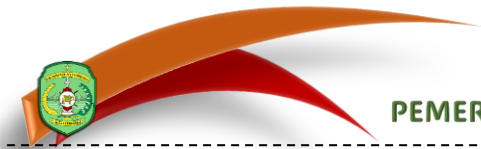
No	Uraian	Konstruksi Dalam Pengerjaan (Rp)
1	Saldo 31 Desember 2023	1.760.783.708.237,39
2	Mutasi Tambah	
1	Pengakuan Hutang Berjalan	2.207.177.262,00
2	Mutasi Masuk dari OPD Lain	42.185.000,00
3	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)	
b.	antar KIB C - KIB F	334.966.225.049,96
c.	antar KIB D - KIB F	252.943.226.349,00
Jumlah Mutasi Tambah		590.158.813.660,96
3	Mutasi Kurang	
1	Koreksi Saldo Tahun 2024 Belum Diakomodir pada LKPD (Mengurangi)	1.850.168.291,70
2	Koreksi Double Catat	503.735.650,00



No	Uraian	Konstruksi Dalam Pengerjaan (Rp)
3	Belanja Barang dan Jasa yang Dianggarkan Dalam Belanja Modal Dibawah Tahun 2024	11.382.128.657,58
4	Belanja Modal yang Merupakan Pembayaran Hutang Tahun Sebelumnya	16.340.445.585,00
5	Mutasi Keluar ke OPD Lain	42.185.000,00
6	Reklasifikasi ke Aset Lainnya	
	a. Aset Tak Berwujud	1.923.781.850,00
7	Reklasifikasi ke Aset Ekstrakompatabel	
	a. Aset Di bawah Kapitalisasi Aset Tetap	138.176.140,00
8	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)	
	a. antar KIB B - KIB F	415.251.277,00
	b. antar KIB C - KIB F	275.536.444.183,60
	c. antar KIB D - KIB F	718.807.002.110,82
Jumlah Mutasi Kurang		1.026.939.318.745,70
4	Saldo Per 31 Desember 2024	1.324.003.203.152,65

Beberapa informasi terkait Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan sebagai berikut.

1. Pengakuan Hutang Berjalan sejumlah Rp2.207.177.262,00 pada Inspektorat Daerah.
2. Mutasi antar OPD dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah ke Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan senilai Rp42.185.000,00.
3. Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Kontruksi Dalam Pekerjaan sejumlah Rp334.966.225.049,96 terdiri dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp93.351.000,00, Dinas Perikanan dan Kelautan sebesar Rp855.162.300,00, Dinas Kesehatan sebesar Rp9.317.031.097,00, Dinas Pariwisata Rp18.841.769.058,22, Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp27.019.836.517,00, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp48.976.666.800,00, Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp199.700.100,00, Inspektorat Daerah Rp15.934.564.922,00, Sekretariat Daerah sebesar Rp6.370.618.313,00, RSUD Aji Muhammad Parikesit sebesar Rp151.461.241.111,74, RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti sebesar Rp55.348.927.150,00, dan RSUD Dayaku Raja sebesar Rp547.356.681,00.
4. Reklasifikasi dari Aset Jaringan, Irigasi dan Jalan ke Konstruksi Dalam Pengerjaan sejumlah Rp252.943.226.349,00 terdiri dari Dinas Perikanan dan Kelautan sebesar Rp88.869.500,00, Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp248.154.030.063,00, Dinas Pertanian dan Peternakan sebesar Rp15.717.933,00, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp4.625.834.353,00 dan Kecamatan Muara Jawa sebesar Rp58.774.500,00.
5. Koreksi saldo awal sejumlah Rp1.850.162.291,70 terdiri dari Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp11.700.000,00 dan RSUD Aji Muhammad Parikesit sebesar Rp1.838.468.291,70.
6. Koreksi *double* catat sejumlah Rp503.735.650,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

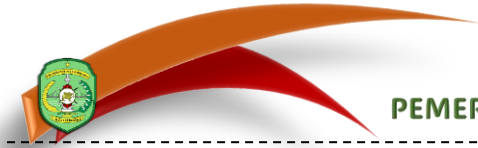


7. Kesalahan penganggaran Belanja Barang dan Jasa yang dianggarkan dalam Belanja Modal Tahun 2024 sejumlah Rp11.382.128.657,58 pada Dinas Pekerjaan Umum.
8. Belanja Modal yang Merupakan Pembayaran Hutang Tahun Sebelumnya sebesar Rp16.340.445.858,00 pada RSUD. AM. Parikesit.
9. Reklasifikasi ke Aset Tidak Berwujud sejumlah Rp1.923.781.850,00 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
10. Reklasifikasi ke Aset Ekstrakompetabel sejumlah Rp138.176.140,00 terdiri dari Dinas Pariwisata sebesar Rp45.780.840,00, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp77.295.300,00 dan Sekretariat Daerah sebesar Rp15.100.000,00.
11. Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin pada Dinas Komunikasi dan Informasi sebesar Rp415.251.277,00.
12. Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan sejumlah Rp275.536.443.383,60 terdiri dari Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp3.146.312.256,00, Dinas Kesehatan Rp767.107.291,00, Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp248.897.558.009,00, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp6.011.333.562,00, Dinas Perhubungan sebesar Rp13.007.458.329,00, Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp1.296.530.515,00, RSUD Aji Muhammad Parikesit sebesar Rp995.770.575,00, RSUD Dayaku Raja sebesar Rp958.194.846,00 dan Sekretariat Daerah sebesar Rp456.178.000,00.
13. Reklasifikasi ke Jaringan, Irigasi dan Jalan ke Kondisi/Konstruksi Dalam Pekerjaan sejumlah Rp718.807.002.110,82 terdiri dari Dinas Perikanan dan Kelautan sebesar Rp102.489.000,00, Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp715.761.113.611,82, Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp394.189.850,00, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp2.404.628.499,00, Kecamatan Tenggarong sebesar Rp144.581.150,00.

5.3.1.3.7. Akumulasi Penyusutan

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Akumulasi Penyusutan	-15.593.154.564.320,80	-14.499.542.592.794,30

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Kebijakan Akuntansi tersebut menyebutkan bahwa Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan Aset Tetap tersebut dikurangi Akumulasi Penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka Aset Tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun Aset Tetap. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) yang dihitung secara semesteran. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai Beban Penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset. Nilai Akumulasi Penyusutan atas Aset Tetap disajikan



menggunakan data yang berasal dari aplikasi SIMDA BMD. Jumlah akumulasi penyusutan per 31 Desember 2024 sebesar Rp15.593.154.564.320,80 dibandingkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp14.499.542.592.794,30 mengalami peningkatan sebesar Rp1.093.611.971.526,50 atau 7,54%. Rincian Akumulasi Penyusutan sebagai berikut :

Tabel 5 . 3 . 36 Rincian Akumulasi Penyusutan

No	Aset Tetap	Akumulasi Penyusutan 2024
1	Peralatan dan Mesin	2.866.757.314.372,03
2	Gedung dan Bangunan	1.286.788.325.151,00
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	11.436.002.866.769,50
4	Aset Tetap Lainnya	3.606.058.028,23
Jumlah		15.593.154.564.320,80

5.3.1.4. Aset Lainnya

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Aset Lainnya	1.305.989.861.910,97	4.514.733.293.869,21

Aset Lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, dan Dana Cadangan meliputi Tagihan Piutang Penjualan Angsuran, Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tidak Berwujud, dan Aset Lain-lain. Saldo Aset Lainnya sebesar Rp1.305.989.861.910,97 dan Rp4.514.733.293.869,21 adalah nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023. Rincian Aset Lainnya dapat dilihat pada tabel berikut.

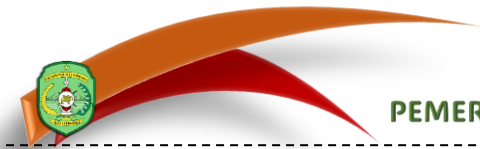
Tabel 5 . 3 . 37 Mutasi Aset Lainnya

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
Tagihan Penjualan Angsuran	15.237.903.400,00	15.237.903.400,00	0,00	0,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	36.700.142.228,44	36.712.092.228,44	-11.950.000,00	-0,03
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	59.942.331.583,00	59.942.331.583,00	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	219.562.245.737,14	199.874.079.877,14	19.688.165.860,00	9,85
Aset Lain-lain	524.491.933.379,75	441.676.599.909,77	82.815.333.469,98	18,75
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-179.060.499.731,14	-163.255.677.129,14	-15.804.822.602,00	9,68
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	-64.302.784.786,22	0,00	-64.302.784.786,22	100,00
Kas Yang Dibatasi Penggunaannya	693.418.590.100,00	3.924.545.964.000,00	-3.231.127.373.900,00	-82,33
Jumlah	1.305.989.861.910,97	4.514.733.293.869,21	-3.208.743.431.958,24	-71,07

5.3.1.4.1. Tagihan Penjualan Angsuran

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Tagihan Penjualan Angsuran	15.237.903.400,00	15.237.903.400,00

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran sebesar Rp15.237.903.400,00 dan sebesar Rp15.237.903.400,00 merupakan nilai per 31 Desember 2024 dan 2023 berupa



Tagihan Penjualan Angsuran Dan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5 . 3 . 38 Mutasi Tagihan Penjualan Angsuran

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
Tagihan Angsuran Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas	15.237.903.400,00	15.237.903.400,00	0,00	0,00%
Jumlah	15.237.903.400,00	15.237.903.400,00	0,00	0,00%

a. Tagihan Penjualan Angsuran

Penjualan angsuran *hand tractor* bersubsidi dilakukan pada tahun 2001. Penjualan ini didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor SK./180.188/HK.249/2001 tanggal 25 April 2001 tentang Penetapan Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pengembangan Alat Mesin Pertanian Pola *revolving* bersubsidi. Nilai Tagihan Penjualan Angsuran *hand tractor* ditetapkan sebesar Rp15.210.198.000,00 sesuai Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2012 tentang Kebijakan Perlakuan Aset Lainnya atas Tagihan Alat Mesin Pertanian berupa *hand tracktor* tahun 2001 sampai dengan 2003.

Penjualan kendaraan roda dua dan roda empat, sesuai dengan SK Nomor 180.188/HK-112/2003 pada tanggal 10 Februari 2003. Sesuai dengan keputusan tersebut, pembayaran dilakukan secara tunai. Sampai pada tahun 2024, masih ada tagihan sekitar Rp27.705.400,00.

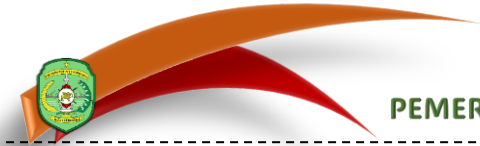
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pernah menyampaikan usulan penghapusan atas tagihan penjualan angsuran *hand tractor* kepada:

- 1) Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai surat Bupati Kutai Kartanegara Nomor 032/490/BPKAD/III/2012 tanggal 26 Maret 2012, tidak diperoleh tanggapan atas usulan tersebut;
- 2) Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai surat Bupati Kutai Kartanegara Nomor DPD-0196/H-1/II/2016 tanggal 17 Februari 2016 namun tidak diperoleh tanggapan atas usulan tersebut; dan
- 3) Kepada Ketua Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MPTPTGR) sesuai surat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 561/979-BPD-D/IV/2017 tanggal 10 April 2017.

5.3.1.4.2. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	36.700.142.228,44	36.712.092.228,44

Saldo Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp36.700.142.228,44 dan sebesar Rp36.712.092.228,44 merupakan nilai per 31 Desember 2024 dan 2023 berupa Kerugian Daerah yang penanggung jawabnya Bendahara sebesar



Rp10.833.079.618,35, Kerugian Daerah yang penanggung jawabnya Bukan Bendahara sebesar Rp25.867.062.610,09. Terdapat penurunan sebesar Rp11.950.000,00 pada tahun 2024 atas Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Daerah pada Non bendahara, dikarenakan adanya pembayaran sebesar Rp11.950.000,00. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada SDN 11 dan SDN 009 Tabang yang sudah digunakan oleh mantan Kepala Sekolah sebesar Rp19.216.911,37.

Tabel 5 . 3 . 39 Mutasi Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara	10.833.079.618,35	10.833.079.618,35	0,00	0,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	25.867.062.610,09	25.879.012.610,09	-11.950.000,00	-0,05
Jumlah	36.700.142.228,44	36.712.092.228,44	-11.950.000,00	-0,03

5.3.1.4.3. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

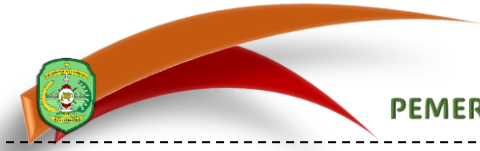
Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	59.942.331.583,00	59.942.331.583,00

Saldo tersebut merupakan nilai aset yang masih dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam bentuk KSO (Kerjasama Operasi) dengan PT Bakrie Graha Investama (Hotel Lesong Batu dan Grand Elty Singgasana) dan aset BGS (Bangun Guna Serah) dengan PT Citra Gading Asri Tama (Royal World Plaza) per 31 Desember 2024. Rincian aset yang dikerjasamakan dengan pihak-pihak tersebut sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5 . 3 . 40 Rincian Kemitraan dengan Pihak Ketiga

No.	Uraian	Hotel Sinngasana	Hotel Lesong Batu	Tanah untuk Royal World Plaza	Jumlah
1	Tanah	5.838.000.000,00	865.698.000,00	3.217.667.250,00	9.921.365.250,00
2	Peralatan dan Mesin	3.174.051.000,00	701.542.000,00	0,00	3.875.593.000,00
3	Gedung dan Bangunan	40.258.533.333,00	5.867.840.000,00	0,00	46.126.373.333,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	19.000.000,00	0,00	0,00	19.000.000,00
	Jumlah	49.289.584.333,00	7.435.080.000,00	3.217.667.250,00	59.942.331.583,00

1. Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pada 14 April 2010 Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah melakukan kerja sama pemanfaatan aset daerah atas Hotel Grand Elty Singgasana dan Hotel Lesong Batu dengan PT Bakrie Graha Investama. Atas kerja sama tersebut, kedua belah pihak menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Aset Daerah Nomor 02/KSP/KABUPATENKUKAR/IV.2010, Nomor 01-02/KSP/ADD/KABUPATENKUKAR/II/2011 dengan perubahan terakhir Nomor 003/BGI-HET-DIR/LGL/ADD-KK/12/2023.
2. Pada tanggal 14 Januari 2013 Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan kerja sama dengan PT Citra Gading Asritama melalui SPK Nomor 000.644/519/BAPPEDA/2013 tentang Pembangunan dan Pengelolaan Pusat



Perkantoran dan Perdagangan/Jasa di Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara atau dikenal juga dengan Pembangunan Royal World Plaza. Bentuk kerja sama yang disepakati dalam perjanjian tersebut adalah dalam bentuk Bangun Guna Serah (BGS). Selanjutnya pada tanggal 7 November 2023, Pengadilan Negeri Surabaya melalui Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby-HP.01 menyatakan Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Citra Gading Asritama dalam keadaan pailit dan segala akibat hukumnya.

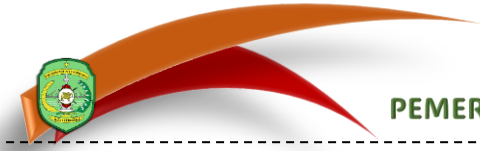
5.3.1.4.4. Aset Tidak Berwujud

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Aset Tidak Berwujud	219.562.245.737,14	199.874.079.877,14

Aset Tidak Berwujud terdiri dari lisensi dan *franchise*, *software*, kajian, aset tidak berwujud yang mempunyai nilai sejarah/budaya, dan aset tidak berwujud lainnya. Saldo Aset Tidak Berwujud TA 2024 sebesar Rp219.562.245.737,14 mengalami peningkatan sebesar Rp19.688.165.860,00 bila dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp199.874.079.877,14. Rincian Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024 sebagai berikut.

Tabel 5 . 3 . 41 Rincian Aset Tak Berwujud

No	SKPD	Software	Lisensi	Kajian	Aset Tidak Berwujud Lainnya	Jumlah
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	310.549.350,00	0,00	0,00	0,00	310.549.350,00
2	Badan Pendapatan Daerah	3.161.623.336,00	0,00	0,00	0,00	3.161.623.336,00
3	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.728.467.210,00	0,00	0,00	983.000.000,00	3.711.467.210,00
4	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	687.305.500,00	0,00	0,00	0,00	687.305.500,00
5	Dinas Komunikasi dan Informatika	17.706.946.714,00	1.871.791.420,00	0,00	0,00	19.578.738.134,00
6	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	457.008.100,00	0,00	0,00	680.000,00	457.688.100,00
7	Dinas Pariwisata	468.933.000,00	0,00	4.172.600.473,00	548.587.000,00	5.190.120.473,00
8	Dinas Pekerjaan Umum	1.489.843.100,00	160.000.000,00	12.557.376.485,78	0,00	14.207.219.585,78
9	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	99.000.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000.000,00
10	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.040.643.955,00	131.480.000,00	22.765.580.390,00	0,00	24.937.704.345,00
11	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	338.770.050,00	0,00	268.701.200,00	0,00	607.471.250,00
12	Sekretariat Daerah	1.548.050.100,00	0,00	0,00	0,00	1.548.050.100,00
13	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	222.355.000,00	0,00	0,00	0,00	222.355.000,00
14	Inspektorat Kabupaten	313.181.000,00	199.620.000,00	0,00	0,00	512.801.000,00

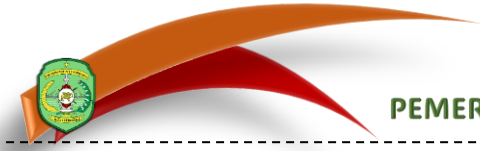


PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No	SKPD	Software	Lisensi	Kajian	Aset Tidak Berwujud Lainnya	Jumlah
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.084.993.500,00	530.513.440,00	0,00	146.320.000,00	5.761.826.940,00
16	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.301.177.400,00	0,00	0,00	1.298.321.500,00	2.599.498.900,00
17	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8.533.364.851,00	0,00	0,00	4.500.000,00	8.537.864.851,00
18	Dinas Kesehatan	3.698.752.340,00	668.550.000,00	1.220.909.535,00	0,00	5.588.211.875,00
19	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.416.745.433,00	27.445.000,00	0,00	0,00	1.444.190.433,00
20	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	117.237.000,00	0,00	0,00	0,00	117.237.000,00
21	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	2.551.759.300,00	0,00	13.501.628.120,00	0,00	16.053.387.420,00
22	Badan Riset dan Inovasi Daerah	31.000.000,00	0,00	0,00	24.600.000,00	55.600.000,00
23	Kelautan dan Perikanan	0,00	0,00	964.355.200,00	0,00	964.355.200,00
24	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	375.923.300,00	0,00	0,00	0,00	375.923.300,00
25	Dinas Ketahanan Pangan	179.582.100,00	0,00	0,00	0,00	179.582.100,00
26	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	286.815.000,00	0,00	0,00	0,00	286.815.000,00
27	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	70.400.000,00	0,00	0,00	0,00	70.400.000,00
28	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	74.300.000,00	0,00	0,00	0,00	74.300.000,00
29	Dinas Perhubungan	1.040.175.620,00	0,00	33.004.072.150,00	0,00	34.044.247.770,00
30	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	311.812.925,00	0,00	375.760.000,00	0,00	687.572.925,00
31	Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang	57.323.000,00	0,00	55.065.052.099,36	0,00	55.122.375.099,36
32	Dinas Pertanian Dan Peternakan	877.620.000,00	0,00	889.103.500,00	0,00	1.766.723.500,00
33	Dinas Sosial	215.175.000,00	0,00	0,00	0,00	215.175.000,00
34	Kecamatan Anggana	50.550.000,00	0,00	0,00	0,00	50.550.000,00
35	Kecamatan Muara Badak	29.959.000,00	0,00	0,00	0,00	29.959.000,00
36	Kecamatan Samboja	115.279.100,00	0,00	0,00	0,00	115.279.100,00
37	Kecamatan Tenggarong	163.280.600,00	0,00	0,00	0,00	163.280.600,00

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024



No	SKPD	Software	Lisensi	Kajian	Aset Tidak Berwujud Lainnya	Jumlah
38	Kecamatan Tenggarong Seberang	53.280.000,00	0,00	0,00	0,00	53.280.000,00
39	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	5.484.371.583,00	0,00	0,00	0,00	5.484.371.583,00
40	RSUD Am Parikesit	2.990.011.057,00	0,00	0,00	0,00	2.990.011.057,00
41	RSUD Dayaku Raja	1.314.113.100,00	0,00	0,00	0,00	1.314.113.100,00
42	Satuan Polisi Pamong Praja	58.000.000,00	31.020.600,00	0,00	0,00	89.020.600,00
43	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	95.000.000,00	95.000.000,00
JUMLAH		36.657.669.915,00	3.620.420.460,00	144.785.139.153,14	3.006.008.500,00	219.562.245.737,14

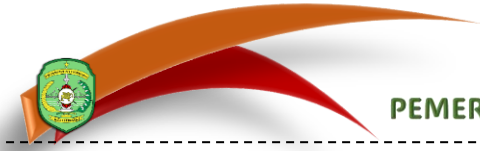
5.3.1.4.5. Aset Lain-lain

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Aset Lain-lain	524.491.933.379,75	441.676.599.909,77

Saldo Aset Lain-Lain TA 2024 sebesar Rp524.491.933.379,75 mengalami peningkatan sebesar Rp82.815.333.469,98, bila dibandingkan TA 2023 sebesar Rp441.676.599.909,77. Rincian Aset Lain-lain tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5 . 3 . 42 Rincian Aset Lain-lain

SKPD	Aset Rusak Berat/Usang (Rp)	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah (Rp)	Kekuarangan Volume / Harga Satuan Melebihi SSH / Harga Satuan Timpang (Rp)	Jumlah (Rp)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	42.354.362.820,86	41.234.910.696,00	1.259.725.716,50	84.848.999.233,36
Dinas Kesehatan	17.173.264.135,00	0,00	1.312.518.622,59	18.485.782.757,59
RSUD Aji Muhammad Parikesit	50.785.765.681,69	14.380.000,00	481.723.191,00	51.281.868.872,69
RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	309.708.626,00	0,00	0,00	309.708.626,00
RSUD Dayaku Raja	1.532.138.700,00	0,00	139.925.445,00	1.672.064.145,00
Dinas Pekerjaan Umum	3.679.050.602,00	107.792.401.217,33	15.393.266.221,86	126.864.718.041,19
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	34.918.189.348,86	0,00	910.568.293,65	35.828.757.642,51
Satuan Polisi Pamong Praja	1.811.458.240,99	0,00	0,00	1.811.458.240,99
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	666.186.389,18	0,00	0,00	666.186.389,18
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.570.623.117,00	0,00	0,00	7.570.623.117,00
Dinas Sosial	260.000.000,00	0,00	0,00	260.000.000,00
Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	89.092.000,00	26.393.500,00	0,00	115.485.500,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.054.296.342,00	0,00	0,00	2.054.296.342,00
Dinas Ketahanan Pangan	49.900.000,00	48.932.818,00	0,00	98.832.818,00

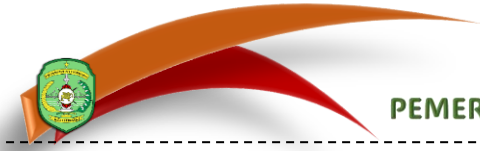


PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

SKPD	Aset Rusak Berat/Usang (Rp)	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah (Rp)	Kekurangan Volume / Harga Satuan Melebihi SSH / Harga Satuan Timpang (Rp)	Jumlah (Rp)
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	18.095.000,00	0,00	18.095.000,00
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	1.376.452.160,00	0,00	0,00	1.376.452.160,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.654.332.867,00	1.093.606.250,00	0,00	2.747.939.117,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.510.122.000,00	0,00	0,00	1.510.122.000,00
Dinas Perhubungan	9.019.776.250,50	0,00	0,00	9.019.776.250,50
Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	9.920.854,00	0,00	9.920.854,00
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	178.750.000,00	197.100.000,00	0,00	375.850.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.680.100.796,00	68.456.000,00	0,00	3.748.556.796,00
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	21.250.000,00	13.650.000,00	0,00	34.900.000,00
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.520.365.188,00	0,00	0,00	2.520.365.188,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	1.070.109.700,00	536.205.000,00	0,00	1.606.314.700,00
Dinas Pariwisata	5.013.594.403,17	14.473.750,00	44.586.000,00	5.072.654.153,17
Dinas Perkebunan	9.024.458.839,00	0,00	0,00	9.024.458.839,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	0,00	150.309.230,00	150.309.230,00
Dinas Pertanian dan Peternakan	6.792.444.021,93	11.208.111.123,00	0,00	18.000.555.144,93
Sekretariat Daerah	51.273.958.760,00	3.779.775.000,00	0,00	55.053.733.760,00
Inspektorat Kabupaten	3.024.543.327,19	98.725.000,00	0,00	3.123.268.327,19
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	14.740.114.273,90	68.500.000,00	0,00	14.808.614.273,90
Badan Pendapatan Daerah	3.324.083.132,00	16.480.000,00	0,00	3.340.563.132,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	8.611.234.943,00	85.063.732,00	0,00	8.696.298.675,00
Badan Riset dan Inovasi Daerah	470.535.008,00	184.155.778,00	0,00	654.690.786,00
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1.534.642.320,00	2.221.459.202,00	0,00	3.756.101.522,00
Kecamatan Tenggarong	356.403.975,00	4.713.776.828,00	76.291.224,61	5.146.472.027,61
Kecamatan Tenggarong Seberang	767.897.698,00	0,00	0,00	767.897.698,00
Kecamatan Loa Kulu	351.425.000,00	26.250.000,00	0,00	377.675.000,00
Kecamatan Loa Janan	790.089.333,00	232.196.000,00	0,00	1.022.285.333,00
Kecamatan Muara Badak	3.222.348.451,40	68.000.000,00	0,00	3.290.348.451,40
Kecamatan Marangkayu	531.916.399,00	89.960,00	0,00	532.006.359,00
Kecamatan Muara Jawa	4.980.858.273,82	19.970.000,00	0,00	5.000.828.273,82
Kecamatan Samboja	7.886.669.051,00	179.290.540,00	46.720.045,17	8.112.679.636,17
Kecamatan Sebulu	972.314.175,00	0,00	0,00	972.314.175,00
Kecamatan Muara Kaman	663.299.754,00	0,00	0,00	663.299.754,00
Kecamatan Kota Bangun	700.041.400,00	60.800.000,00	0,00	760.841.400,00

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024



SKPD	Aset Rusak Berat/Usang (Rp)	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah (Rp)	Kekurangan Volume / Harga Satuan Melebihi SSH / Harga Satuan Timbang (Rp)	Jumlah (Rp)
Kecamatan Muara Muntai	851.444.142,32	0,00	0,00	851.444.142,32
Kecamatan Kenohan	1.647.082.900,00	0,00	0,00	1.647.082.900,00
Kecamatan Kembang Janggut	125.480.000,00	0,00	0,00	125.480.000,00
Kecamatan Tabang	699.593.575,00	14.954.027.000,00	0,00	15.653.620.575,00
Kecamatan Muara Wis	111.475.000,00	63.350.000,00	0,00	174.825.000,00
Kecamatan Sanga Sanga	2.393.088.471,73	26.050.000,00	0,00	2.419.138.471,73
Kecamatan Anggana	402.073.948,50	0,00	0,00	402.073.948,50
Kecamatan Kota Bangun Darat	0,00	0,00	2.213.000,00	2.213.000,00
Kecamatan Samboja Barat	0,00	0,00	51.085.600,00	51.085.600,00
Jumlah	315.548.405.541,04	189.074.595.248,33	19.868.932.590,38	524.491.933.379,75

5.3.1.4.6. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-179.060.499.731,14	-163.255.677.129,14

Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud TA 2024 sebesar Rp179.060.499.731,14 mengalami peningkatan sebesar Rp15.804.822.602,00, bila dibandingkan TA 2023 sebesar Rp163.255.677.129,14. Rincian Aset Lain-lain tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5 . 3 . 43 Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

SKPD	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-8.127.522.183,00	-7.965.731.183,00	-161.791.000,00	2,03
Dinas Kesehatan	-2.594.562.393,00	-1.728.444.518,00	-866.117.875,00	50,11
RSUD Aji Muhammad Parikesit	-1.292.729.114,00	-770.539.037,00	-522.190.077,00	67,77
RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	-1.769.862.094,00	-802.664.776,00	-967.197.318,00	120,50
RSUD Dayaku Raja	-743.763.100,00	-594.663.100,00	-149.100.000,00	25,07
Dinas Pekerjaan Umum	-12.805.961.986,78	-12.515.101.046,78	-290.860.940,00	2,32
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	-22.527.229.537,00	-22.013.398.919,00	-513.830.618,00	2,33
Satuan Polisi Pamong Praja	-82.420.600,00	-75.220.600,00	-7.200.000,00	9,57
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-110.508.667,00	-102.434.667,00	-8.074.000,00	7,88
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-122.440.017,00	-78.519.017,00	-43.921.000,00	55,94
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	-3.300.000,00	0,00	-3.300.000,00	100,00
Dinas Sosial	-215.175.000,00	-215.175.000,00	0,00	0,00
Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	-485.239.253,00	-462.736.837,00	-22.502.416,00	4,86

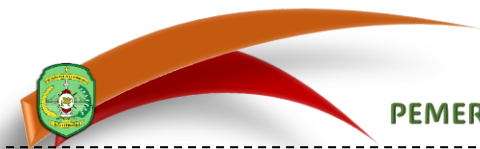


PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

SKPD	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-56.150.000,00	-46.250.000,00	-9.900.000,00	21,41
Dinas Ketahanan Pangan	-94.784.550,00	-72.663.450,00	-22.121.100,00	30,44
Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	-52.080.849.147,36	-45.302.215.628,36	-6.778.633.519,00	14,96
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-178.782.933,00	-139.323.100,00	-39.459.833,00	28,32
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	-361.243.247,00	-340.723.167,00	-20.520.080,00	6,02
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-70.400.000,00	-70.400.000,00	0,00	0,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-22.166.667,00	-3.166.667,00	-19.000.000,00	600,00
Dinas Perhubungan	-33.719.028.344,00	-32.817.299.330,00	-901.729.014,00	2,75
Dinas Komunikasi dan Informatika	-5.486.209.508,00	-4.397.001.224,00	-1.089.208.284,00	24,77
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	-286.815.000,00	-270.940.200,00	-15.874.800,00	5,86
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-3.169.521.119,00	-2.207.319.998,00	-962.201.121,00	43,59
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	-417.029.792,00	-305.336.092,00	-111.693.700,00	36,58
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	-1.255.153.432,00	-594.660.334,00	-660.493.098,00	111,07
Dinas Kelautan dan Perikanan	-964.355.200,00	-964.355.200,00	0,00	0,00
Dinas Pariwisata	-4.199.840.050,00	-3.484.474.888,00	-715.365.162,00	20,53
Dinas Pertanian dan Peternakan	-1.416.643.992,00	-1.238.823.292,00	-177.820.700,00	14,35
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-658.540.258,00	-619.845.904,00	-38.694.354,00	6,24
Sekretariat Daerah	-1.287.738.100,00	-1.223.155.900,00	-64.582.200,00	5,28
Inspektorat Kabupaten	-276.541.333,00	-251.414.333,00	-25.127.000,00	9,99
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-16.019.280.087,00	-15.999.764.087,00	-19.516.000,00	0,12
Badan Pendapatan Daerah	-2.020.430.684,00	-1.710.550.493,00	-309.880.191,00	18,12
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-2.260.461.117,00	-2.099.738.970,00	-160.722.147,00	7,65
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-1.382.759.742,00	-1.313.311.821,00	-69.447.921,00	5,29

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024



SKPD	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
Badan Riset dan Inovasi Daerah	-36.740.000,00	-26.653.333,00	-10.086.667,00	37,84
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	-100.520.667,00	-90.508.000,00	-10.012.667,00	11,06
Kecamatan Tenggarong	-163.280.600,00	-163.280.600,00	0,00	0,00
Kecamatan Tenggarong Seberang	-22.200.000,00	-11.544.000,00	-10.656.000,00	92,31
Kecamatan Muara Badak	-6.491.117,00	-499.317,00	-5.991.800,00	1.200,00
Kecamatan Samboja	-115.279.100,00	-115.279.100,00	0,00	0,00
Kecamatan Anggana	-50.550.000,00	-50.550.000,00	0,00	0,00
Jumlah	-179.060.499.731,14	-163.255.677.129,14	-15.804.822.602,00	9,68

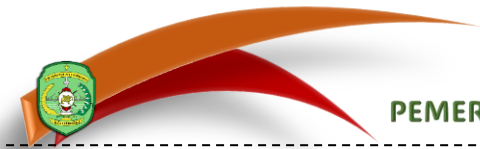
5.3.1.4.7. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	-64.302.784.786,22	0,00

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat. Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya sebesar TA 2024 Rp64.302.784.786,22 mengalami peningkatan 100,00% karena saldo aset lainnya TA 2023 disajikan sebesar nilai buku. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5 . 3 . 44 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

SKPD	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.386.393.840,00	0,00	1.386.393.840,00	100,00
Dinas Kesehatan	1.766.825.000,00	0,00	1.766.825.000,00	100,00
RSUD Aji Muhammad Parikesit	27.335.964.876,00	0,00	27.335.964.876,00	100,00
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	7.525.077.391,00	0,00	7.525.077.391,00	100,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	192.589.727,00	0,00	192.589.727,00	100,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	933.060.126,00	0,00	933.060.126,00	100,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.636.728.694,00	0,00	1.636.728.694,00	100,00
Dinas Perhubungan	3.301.636.577,00	0,00	3.301.636.577,00	100,00
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	175.427.488,00	0,00	175.427.488,00	100,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	673.559.700,00	0,00	673.559.700,00	100,00



SKPD	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
Dinas Pariwisata	3.160.649.136,00	0,00	3.160.649.136,00	100,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	10.598.772.187,00	0,00	10.598.772.187,00	100,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	504.115.000,00	0,00	504.115.000,00	100,00
Inspektorat Kabupaten	2.856.195.032,00	0,00	2.856.195.032,00	100,00
Kecamatan Loa Janan	707.854.183,00	0,00	707.854.183,00	100,00
Kecamatan Sebulu	383.586.046,00	0,00	383.586.046,00	100,00
Kecamatan Muara Kaman	2.440.000,00	0,00	2.440.000,00	100,00
Kecamatan Kota Bangun	282.184.883,00	0,00	282.184.883,00	100,00
Kecamatan Muara Muntai	851.444.142,00	0,00	851.444.142,00	100,00
Kecamatan Kenohan	28.280.756,00	0,00	28.280.756,00	100,00
Jumlah	64.302.784.784,00	0,00	64.302.784.784,00	100,00

5.3.1.4.8. Kas Yang Dibatasi Penggunaannya

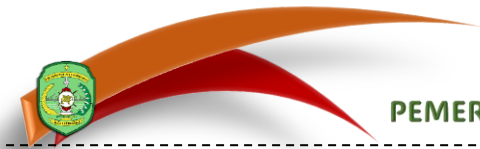
Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Kas Yang Dibatasi Penggunaannya	693.418.590.100,00	3.924.545.964.000,00

Saldo Dana Kas yang Dibatasi Penggunaannya terdiri dari saldo Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF) dan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan nilai per 31 Desember 2024 sebesar Rp693.418.590.100,00.

Saldo TDF sebesar Rp693.394.593.000,00 per 31 Desember 2024 adalah saldo sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 44/KM.7/2024 Tahun 2024 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2024 yang masih terdapat direkening Bank Indonesia, dengan rincian sebagai berikut :

1. Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp170.260.159.000,00;
2. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar Rp523.134.434.000,00.

Saldo CSR sebesar Rp23.997.100,00 adalah dana yang dititipkan dalam Rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu Kelurahan Sungai Seluang Kecamatan Samboja yang sampai dengan 31 Desember 2024. Dana ini berasal dari PT. Pertamina Hulu Sanga Sanga (PHSS) dalam rangka pembiayaan pekerjaan yang sifatnya CSR antara pihak Kelurahan Sungai Seluang dengan PT. PHSS. Dana CSR biasanya langsung diberikan secara tunai bertahap sesuai dengan progres pekerjaan kepada pihak masyarakat akan tetapi kemudian mekanisme diubah dengan mentransfer dana tersebut ke rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu Kelurahan Sungai Seluang. Pada tanggal 13 Desember 2024 PT. PHSS menyalurkan dana CSR sebesar Rp23.997.100,00 yang tidak sempat untuk dikeluarkan karena tidak cukup waktu dan ada kendala sistem bank.



5.3.2. Properti Investasi

Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

- a. digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
- b. dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Saldo Properti Investasi baru terdapat di TA 2024 disebabkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara baru mengatur mengenai Properti Investasi pada tahun 2024.

Saldo Properti Investasi yang disajikan per 31 Desember 2024 sebesar Rp829.252.909.512,00 merupakan nilai perolehan tanah sebesar Rp90.567.500.000,00 serta gedung dan bangunan sebesar Rp738.685.409.512,00 yang direklasifikasi dari Aset Tetap ke Properti Investasi sebesar dengan rincian sebagai berikut:

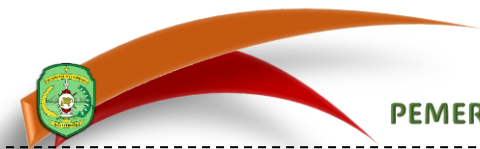
Tabel 5 . 3 . 45 Rincian Properti Investasi

Nama OPD	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Aset Tetap Tanah	90.567.500.000,00	0,00	90.567.500.000,00
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Aset Tetap Gedung dan Bangunan	85.419.271.620,00	16.247.858.475,00	69.171.413.145,00
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Aset Tetap Gedung dan Bangunan	653.266.137.892,00	215.417.122.835,00	437.849.015.057,00
	Jumlah	829.252.909.512,00	231.664.981.310,00	597.587.928.202,00

Penyajian nilai Properti Investasi dilakukan berdasarkan penetapan daftar Properti Investasi sesuai dengan kriteria yang diatur dalam regulasi kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Properti Investasi yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara diuraikan sebagai berikut:

- a. Properti Investasi Tanah sebesar Rp90.567.500.000,00,00 merupakan lahan parkir Stadion Rondong Demang milik Dinas Kepemudaan dan Olahraga.
- b. Properti Investasi Gedung dan Bangunan sebesar Rp653.266.137.892,00 pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga terdiri dari:
 - 1) Gedung PBSI senilai Rp18.070.991.800,00
 - 2) Velodrome senilai Rp137.837.176.997,00
 - 3) Wisma Atlet senilai Rp18.221.701.800,00
 - 4) Gedung Bela Diri senilai Rp115.219.962.316,00
 - 5) Mini Soccer Aji Imbut Rp40.749.291.960,00
 - 6) Stadion Aji Imbut senilai Rp320.805.230.360,00
 - 7) Junjung Buyah senilai Rp2.361.782.659,00



- c. Properti Investasi Gedung dan Bangunan sebesar Rp85.419.271.620,00 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan kompleks rumah sewa yang terletak di Kelurahan Mangkurawang yang disewakan kepada masyarakat

5.3.3. Kewajiban

Kewajiban Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang masih harus dibayar per 31 Desember 2024 sebesar Rp515.976.850.280,50 yang seluruhnya merupakan Kewajiban Jangka Pendek yang terdiri dari:

5.3.2.1. Kewajiban Jangka Pendek

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Kewajiban Jangka Pendek	515.976.850.280,50	551.376.524.420,86

Saldo Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp515.976.850.280,50 dan Rp551.376.524.420,86 merupakan nilai Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara per 31 Desember 2024 dan 2023 yang diharapkan dapat diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Tabel 5 . 3 . 46 Rincian Kewajiban Jangka Pendek

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	24.418.085,73	38.199.772,37	-13.781.686,64	-36,08
Pendapatan Diterima Dimuka	3.415.434.133,70	3.978.859.706,79	-563.425.573,09	-14,16
Utang Belanja	512.536.998.061,07	547.359.464.941,70	-34.822.466.880,63	-6,36
Jumlah	515.976.850.280,50	551.376.524.420,86	-35.399.674.140,36	-6,42

5.3.2.1.1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

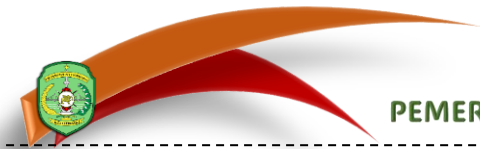
Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	24.418.085,73	38.199.772,37

Saldo Utang PFK atau perhitungan pihak ketiga sebesar Rp24.418.085,73 dan Rp38.199.772,37 merupakan saldo per 31 Desember 2024 dan 2023. Utang Perhitungan Pihak Ketiga tersebut menggambarkan hasil perhitungan antara nilai hak pihak ketiga yang tersimpan dalam kas daerah atau SKPD. Utang PFK sebesar Rp21.569.886,73 adalah saldo utang PFK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan sebesar Rp2.848.199,00 pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

5.3.2.1.2. Pendapatan Diterima Dimuka

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Pendapatan Diterima Dimuka	3.415.434.133,70	3.978.859.706,79

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp3.415.434.133,70 merupakan pendapatan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang menjadi hak tahun berikutnya namun telah diterima selama tahun 2024. Perhitungan Pendapatan Diterima Dimuka menggunakan metode harian. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka dapat disajikan sebagai berikut.



Tabel 5 . 3 . 47 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka

SKPD	Pendapatan Diterima Dimuka (Rp)
Dinas Pekerjaan Umum	2.321.582.351,72
Badan Pendapatan Daerah	109.659.696,24
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	984.192.085,74
Jumlah	3.415.434.133,70

Pendapatan diterima dimuka Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp2.321.582.351,72 adalah pendapatan atas sewa tanah milik pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara oleh pihak ketiga yaitu :

1. Untuk pembuatan *underpass* pada jalan poros yang berlokasi di Desa Ritan Kecamatan Tabang oleh PT. Fajar Sakti Prima;
2. Pemanfaatan ruas jalan desa Batuah Kecamatan Loa Janan oleh PT Karya Putra Borneo dan PT. Ghani Raya Mandiri untuk kegiatan operasional penambangan batubara;
3. Pemanfaatan jalan dan ruas jalan yang digunakan untuk aktivitas pertambangan batubara di bawah lahan dan ruas jalan desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang oleh PT. Khotai Makmur Insan Abadi;

Pendapatan diterima dimuka Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp109.659.696,24 adalah pendapatan atas Pajak Reklame. Pendapatan diterima Dimuka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp984.192.085,74 adalah pendapatan dari sewa barang milik daerah antara lain sewa gedung untuk tempat usaha, gerai ATM, Kantor Kas Bank, Wisma PKK serta pendapatan dari sewa tanah untuk pembangunan tower komunikasi mikro seluler dan sewa tanah untuk PT. Indo Perkasa.

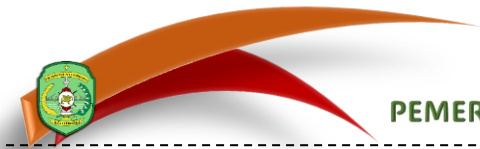
5.3.2.1.3. Utang Belanja

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Utang Belanja	512.536.998.061,07	547.359.464.941,70

Saldo Utang Belanja sebesar Rp512.536.998.061,07 merupakan Utang Belanja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara per 31 Desember 2024 atas tagihan telepon, listrik, tagihan air, tunjangan tambahan penghasilan, uang makan, beban barang dan jasa lainnya dan belanja modal yang akan direalisasikan pada tahun berikutnya. Rincian Utang Belanja tersebut diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 5 . 3 . 48 Rincian Utang Belanja

Uraian	Saldo Awal (Audited 2023) (Rp)	Mutasi Kurang (Realisasi Pembayaran Utang TA 2023) (Rp)	Sisa Utang TA 2023 (Rp)	Sisa Utang TA 2023 Yang Masih Ditagihkan di TA 2024 (Rp)	Mutasi Tambah (Utang TA 2024) (Rp)	Jumlah (Rp)
Utang Belanja Pegawai	43.367.354.136,00	43.154.948.275,86	212.405.860,14	143.237.500,00	58.550.981.088,43	58.694.218.588,43
Utang Belanja Barang dan Jasa	102.045.440.278,32	92.114.271.017,21	9.931.169.261,11	9.168.025.977,11	89.579.894.082,40	98.747.920.059,51
Utang Belanja Modal	401.946.670.527,38	354.617.254.623,40	47.329.415.903,98	46.780.301.212,97	308.314.558.200,15	355.094.859.413,13
Jumlah	547.359.464.941,70	489.886.473.916,47	57.472.991.025,23	56.091.564.690,08	456.445.433.370,98	512.536.998.061,07



Rincian Utang Belanja Pegawai dapat dilihat pada **Lampiran 11**, rincian Utang Belanja Barang dan Jasa dapat dilihat pada **Lampiran 12** sedangkan rincian Utang Belanja Modal dapat dilihat pada **Lampiran 13**

5.3.2.2. Kewajiban Jangka Panjang

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tidak memiliki saldo Kewajiban Jangka Panjang selama Tahun 2024 dan 2023.

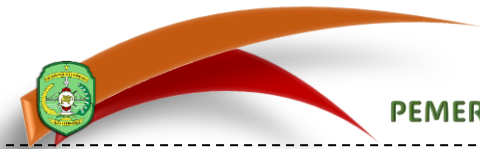
5.3.4. Kewajiban Kontingensi

Kewajiban Kontingensi merupakan kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu, dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu peristiwa atau lebih pada masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah. Kewajiban Kontingensi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara secara rinci dapat dilihat pada **Lampiran 14**.

5.3.5. Ekuitas

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Ekuitas	25.490.486.358.802,72	22.672.788.940.197,26

Ekuitas merupakan kekayaan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang tertanam dalam aset Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara setelah dikurangi dengan kewajiban. Nilai Ekuitas Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara per 31 Desember 2024 sebesar Rp25.490.486.358.802,72 dan mengalami peningkatan sebesar Rp2.817.697.418.605,46 atau 12,43%. Jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp22.672.788.940.197,26.



5.4. Penjelasan Pos – Pos Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah Ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari Pendapatan – LO, Beban, Kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa. Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 disajikan komparatif dengan tahun 2023 sesuai Standar Akuntansi Berbasis Akrual berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

5.4.1. Pendapatan - LO

Pendapatan LO merupakan pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan telah diklasifikasikan menurut jenis Pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah, dengan realisasi periode 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp11.680.612.174.218,31 mengalami peningkatan sebesar Rp227.568.868.884,79 atau 1,99% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp11.453.043.305.333,50 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5 . 4 . 1 Rincian Pendapatan – LO

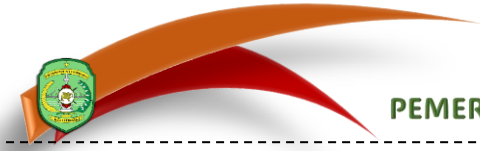
Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	834.082.799.734,89	751.796.407.992,42	82.286.391.742,47	10,95
Pendapatan Transfer	10.744.468.904.196,73	10.683.484.205.332,10	60.984.698.864,63	0,57
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	102.060.470.286,69	17.762.692.009,00	84.297.778.277,69	474,58
Jumlah	11.680.612.174.218,31	11.453.043.305.333,50	227.568.868.884,79	1,99

5.4.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO

Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO merupakan realisasi PAD pada Laporan Operasional untuk periode TA 2024 dan 2023. PAD pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp834.082.799.734,89 mengalami peningkatan sebesar Rp82.286.391.742,47 atau 10,95% dibandingkan dengan tahun 2023 yang terealisasi sebesar Rp751.796.407.992,42 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5 . 4 . 2 Rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO

Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Pendapatan Pajak Daerah	167.446.734.175,44	152.426.618.465,16	15.020.115.710,28	9,85
Pendapatan Retribusi Daerah	6.842.801.610,00	6.834.375.210,00	8.426.400,00	0,12
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	154.936.901.154,15	143.185.477.684,89	11.751.423.469,26	8,21
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	504.856.362.795,30	449.349.936.632,37	55.506.426.162,93	12,35
Jumlah	834.082.799.734,89	751.796.407.992,42	82.286.391.742,47	10,95



5.4.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah - LO

Pendapatan Pajak Daerah – LO merupakan Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dan dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pendapatan Pajak Daerah pada Laporan Operasional disajikan dengan basis akrual, pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada tahun 2024, sehingga nilai Pendapatan Pajak Daerah pada Laporan Operasional adalah sebesar ketetapan yang diterbitkan pada tahun 2024 ditambah dengan penerimaan pajak tanpa ketetapan tahun 2024. Pembayaran atas piutang tahun sebelumnya tidak masuk pada Pendapatan Laporan Operasional melainkan masuk pada pendapatan LRA.

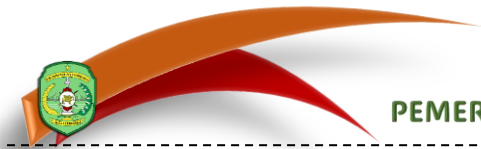
Pendapatan Pajak Daerah – LO pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp167.446.734.175,44 mengalami peningkatan sebesar Rp15.020.115.710,28 atau 9,85% dibandingkan dengan tahun 2023 yang terealisasi sebesar Rp152.426.618.465,16 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5 . 4 . 3 Rincian Pendapatan Pajak Daerah – LO

Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Pajak Hotel-LO	1.561.675.985,00	1.897.488.823,00	-335.812.838,00	-17,70
Pajak Restoran-LO	45.322.901.298,40	53.229.871.723,14	-7.906.970.424,74	-14,85
Pajak Hiburan-LO	541.384.764,00	660.823.165,00	-119.438.401,00	-18,07
Pajak Reklame-LO	2.722.700.234,76	2.293.788.063,78	428.912.170,98	18,70
Pajak Penerangan Jalan-LO	88.194.394.586,00	64.091.170.708,08	24.103.223.877,92	37,61
Pajak Parkir-LO	256.221.135,00	218.650.500,00	37.570.635,00	17,18
Pajak Air Tanah-LO	2.600.419.604,28	2.635.041.114,16	-34.621.509,88	-1,31
Pajak Sarang Burung Walet-LO	68.370.000,00	103.850.000,00	-35.480.000,00	-34,16
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO	2.545.756.837,00	1.298.471.609,00	1.247.285.228,00	96,06
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	17.035.677.747,00	12.530.680.249,00	4.504.997.498,00	35,95
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	6.597.231.984,00	13.466.782.510,00	-6.869.550.526,00	-51,01
Jumlah	167.446.734.175,44	152.426.618.465,16	15.020.115.710,28	9,85

Dalam pendapatan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) - LO, meliputi ketetapan untuk pelaporan pajak dari Perusahaan Swasta sebesar Rp3.024.746.341,00 dan penerimaan pajak tanpa ketetapan sebesar Rp85.169.648.245,00 dari Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Pada jenis pajak meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, PBB-P2, dan BPHTB, nilai ketetapan tahun 2024 sesuai dengan pendapatan pajak daerah – LO.



5.4.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah - LO

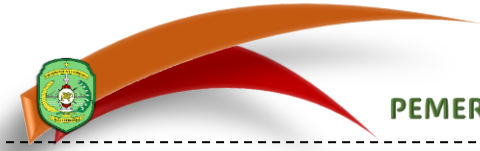
Pendapatan Retribusi Daerah – LO pada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dipungut dan dikelola oleh Pendapatan Retribusi Daerah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Perhubungan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Perkebunan, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai unit penghasil. Pendapatan Retribusi Daerah – LO terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Retribusi pada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pendapatan Retribusi Daerah – LO pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp6.842.801.610,00 mengalami peningkatan sebesar Rp8.426.400,00 atau 0,12% dibandingkan dengan tahun 2023 yang terealisasi sebesar Rp6.834.375.210,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5 . 4 . 4 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah – LO

Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan-LO	52.400.000,00	102.725.000,00	-50.325.000,00	-48,99
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	54.765.000,00	53.800.000,00	965.000,00	1,79
Retribusi Pelayanan Pasar-LO	963.067.814,00	1.391.723.210,00	-428.655.396,00	-30,80
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	4.968.400,00	430.377.800,00	-425.409.400,00	-98,85
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta-LO	0,00	41.100.000,00	-41.100.000,00	-100,00
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-LO	6.862.500,00	81.125.000,00	-74.262.500,00	-91,54
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang-LO	0,00	223.443.000,00	-223.443.000,00	-100,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	54.755.542,00	84.525.000,00	-29.769.458,00	-35,22
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-LO	569.688.458,00	0,00	569.688.458,00	100,00
Retribusi Terminal-LO	21.465.000,00	18.315.000,00	3.150.000,00	17,20
Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO	258.670.000,00	166.012.000,00	92.658.000,00	55,81
Retribusi Rumah Potong Hewan-LO	35.100.000,00	40.275.000,00	-5.175.000,00	-12,85
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO	319.649.000,00	296.074.800,00	23.574.200,00	7,96
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	1.692.704.000,00	1.376.651.000,00	316.053.000,00	22,96



Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO	681.166.002,00	24.980.000,00	656.186.002,00	2626,85
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	2127539894	2.503.248.400,00	-375.708.506,00	-15,01
Jumlah	6.842.801.610,00	6.834.375.210,00	8.426.400,00	10,89

Pendapatan Retribusi Daerah – LO pada tabel tersebut di atas merupakan pendapatan Laporan Operasi tahun 2024 yang dipungut oleh SKPD pemungut dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5 . 4 . 5 Rincian SKPD Pemungut Retribusi Daerah

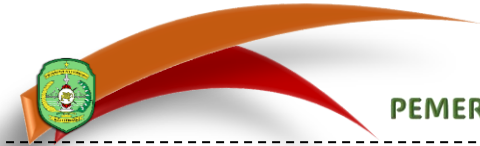
SKPD	Tahun Anggaran 2024 (Rp)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	13.100.000,00
Dinas Pekerjaan Umum	54.755.542,00
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	25.962.500,00
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	33.300.000,00
Dinas Perhubungan	659.517.400,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.127.539.894,00
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	13.500.000,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	50.025.000,00
Dinas Pariwisata	1.666.104.000,00
Dinas Pertanian dan Peternakan	35.100.000,00
Dinas Perkebunan	631.141.002,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.532.756.272,00
Jumlah	6.842.801.610,00

5.4.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO merupakan penyajian atas laba pada Badan Usaha Milik Daerah dengan pencatatan metode ekuitas serta atas penerimaan dividen dari penyertaan modal pada perusahaan dengan pencatatan metode biaya. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO pada TA 2024 tersaji sebesar Rp154.936.901.154,15 mengalami peningkatan sebesar Rp11.751.423.469,26 atau 8,21% dibandingkan dengan tahun 2023 yang tersaji sebesar Rp143.185.477.684,89 secara rinci terdiri atas:

Tabel 5 . 4 . 6 Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

No	BUMD	Dividen	Penyesuaian Penyertaan Modal	Jumlah
1	PT. BPD Kaltimara	24.045.324.774,59	0,00	24.045.324.774,59
2	PT. BPR Ingertad Bangun Utama	193.685.205,00	0,00	193.685.205,00
3	PT. Mahakam Gerbang Raja Migas	63.551.996.071,00	47.213.831.653,56	110.765.827.724,56
4	PT. Tunggang Parangan	381.800.000,00	2.949.977.437,00	3.331.777.437,00
5	PT. Kukar Sejahtera Dambaan Etam	132.029.240,00	-4.616.119.159,00	-4.484.089.919,00
6	PDAM Tirta Mahakam	0,00	21.084.375.932,00	21.084.375.932,00
	Total	88.304.835.290,59	66.632.065.863,56	154.936.901.154,15

**5.4.1.1.4. Lain-lain PAD yang Sah - LO**

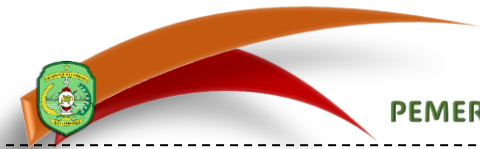
Lain-lain PAD yang Sah merupakan Pendapatan Asli Daerah di luar Pendapatan Pajak, Retribusi, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Lain-lain PAD yang Sah - LO yang tersaji untuk periode TA 2024 adalah sebesar Rp504.856.362.795,30 dan mengalami kenaikan sebesar Rp55.506.426.162,93 atau 12,35% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp449.349.936.632,37. Pendapatan tersebut berasal antara lain dari pendapatan Jasa Giro, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, Pendapatan dari Pengembalian, Pendapatan dari BLUD, Pendapatan Dana Kapitasi JKN, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5 . 4 . 7 Rincian Lain-lain PAD yang Sah – LO

Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	926.732.590,00	804.467.805,00	122.264.785,00	15,20
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	2.618.089.003,33	3.120.839.425,76	-502.750.422,43	-16,11
Jasa Giro-LO	29.141.732.358,63	70.419.488.793,59	-41.277.756.434,96	-58,62
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO	0,00	-54.170.023,00	54.170.023,00	-100,00
Pendapatan Bunga-LO	107.573.854.686,00	-84.669.722,68	107.658.524.408,68	-127.151,15
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	0,00	-47.725.780,00	47.725.780,00	-100,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	662.091.995,76	262.259.177,00	399.832.818,76	152,46
Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	1.295.649.773,00	447.254.146,32	848.395.626,68	189,69
Pendapatan dari Pengembalian-LO	27.312.134.088,23	19.179.849.711,47	8.132.284.376,76	42,40
Pendapatan dari BLUD-LO	335.326.078.300,35	316.888.659.187,40	18.437.419.112,95	5,82
Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)-LO	0,00	29.799.502.186,51	-29.799.502.186,51	-100,00
Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak-LO	0,00	8.614.181.725,00	-8.614.181.725,00	-100,00
Jumlah	504.856.362.795,30	449.349.936.632,37	55.506.426.162,93	12,35

Kondisi yang mempengaruhi perbedaan nilai Lain-lain PAD yang Sah LRA dan LO TA 2024 antara lain:

1. Pengakuan Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp6.989.797.182,86;
2. Pembayaran Piutang Lain-lain PAD yang Sah TA 2023 sebesar Rp30.199.102.139,38;
3. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Diterima Dimuka TA 2024 sebesar Rp3.305.774.437,46;



4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Diterima Dimuka TA 2023 sebesar Rp3.904.228.552,79;
5. Koreksi Saldo Awal Silpa Tahun sebelumnya sebesar Rp265.643,00; dan
6. Piutang beban jasa transaksi keuangan TA 2024 sebesar Rp870.300,00 pada RSUD Aji Muhammad Parikesit.

5.4.1.2. Pendapatan Transfer - LO

Pendapatan Transfer – LO merupakan pendapatan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi yang diterima dan dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun realisasi Pendapatan Transfer untuk periode tahun 2024 sebesar Rp10.744.468.904.196,70 mengalami peningkatan sebesar Rp60.984.698.864,64 atau 0,57% dibandingkan dengan tahun 2023 yang terealisasi sebesar Rp10.683.484.205.332,10 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5 . 4 . 8 Rincian Pendapatan Transfer – LO

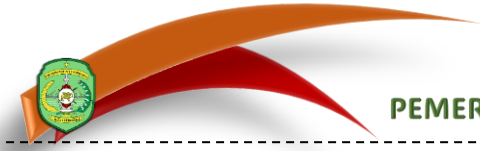
Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	10.036.648.437.127,70	9.692.235.357.955,09	344.413.079.172,64	3,55
Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	34.790.318.000,00	219.907.187.000,00	-185.116.869.000,00	-84,18
Transfer Pemerintah Provinsi	673.030.149.069,00	771.341.660.377,00	-98.311.511.308,00	-12,75
Jumlah	10.744.468.904.196,70	10.683.484.205.332,10	60.984.698.864,64	0,57

5.4.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk periode tahun 2024 secara total terealisasi sebesar Rp10.036.648.437.127,73 mengalami peningkatan sebesar Rp344.413.079.172,64 atau 3,55% bila dibandingkan dengan tahun 2023 yang terealisasi sebesar Rp9.692.235.357.955,09 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5 . 4 . 9 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	8.920.769.454.170,00	8.754.895.418.983,00	165.874.035.187,00	1,89%
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	608.978.151.168,00	493.817.232.160,00	115.160.919.008,00	23,32%
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	152.452.133.560,00	110.616.686.334,00	41.835.447.226,00	37,82%
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	354.448.698.229,73	332.906.020.478,09	21.542.677.751,64	6,47%
Jumlah	10.036.648.437.127,73	9.692.235.357.955,09	344.413.079.172,64	3,55%



Peningkatan pendapatan transfer disebabkan adanya penyaluran *Treasury Deposit Facility* (TDF) sebesar Rp3.924.545.964.000,00 dengan rincian :

- 1) Kurang bayar berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 38/KM.07/2023 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2024 sebesar Rp2.749.038.553.000,00;
- 2) Pemotongan lebih salur sebesar Rp150.785.991.000,00 yang disalurkan dalam bentuk non tunai atau *Treasury Deposit Facility* (TDF); dan
- 3) Penambahan dana *Treasury Deposit Facility* (TDF) karena adanya Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159 Tahun 2023 sebesar Rp1.326.293.402.000,00.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor 89 Tahun 2024, Penetapan Kurang Bayar untuk Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebesar Rp3.020.445.540.000,00. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 44/KM.7/2024 Tahun 2024 menjelaskan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp16.114.362.000,00 dikurangi realisasi penyaluran DBH Cukai Hasil Tembakau sebesar Rp1.000,00 secara tunai pada tanggal 31 Desember 2024. Sehingga total kurang salur Dana Bagi Hasil Tahun 2024 sebesar Rp3.020.445.539.000,00. Dari sejumlah tersebut telah dilakukan penyaluran secara non tunai atau *Treasury Deposit Facility* (TDF) sebesar Rp693.394.593.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp170.260.159.000,00;
2. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar Rp523.134.434.000,00.

Sehingga terdapat sisa piutang pemerintah pusat sebesar Rp2.310.936.584.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp607.039.126.000,00;
2. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar Rp1.703.897.458.000,00.

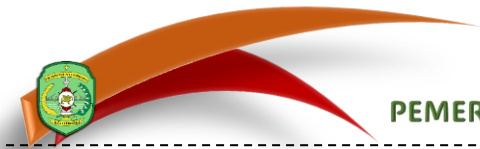
Kondisi yang mempengaruhi perbedaan nilai Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat LRA dan LO TA 2024 antara lain :

1. Dana *Treasury Deposit Facility* (TDF) tahun 2023 yang terbayarkan pada tahun 2024 sebesar Rp3.924.545.964.000,00;
2. Dana *Treasury Deposit Facility* (TDF) tahun 2024 belum terbayarkan sebesar Rp693.394.593.000,00; dan
3. Piutang Transfer Pemerintah Pusat yang Kurang Bayar berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89 Tahun 2024 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp2.310.936.584.000,00.

5.4.1.2.2. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya

Pada TA 2024 Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mendapatkan alokasi Dana Insentif Fiskal sebesar Rp34.790.318.000,00 dengan realisasi sebesar Rp34.790.318.000,00. Rincian Dana Insentif Fiskal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Insentif



Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun sebelumnya Pada Tahun Anggaran 2024 mendapatkan alokasi sebesar Rp22.831.843.000,00;

2. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295 Tahun 2024 tentang Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kategori Pengendalian Inflasi Daerah Periode Pertama Menurut Provinsi Kabupaten/Kota mendapatkan alokasi sebesar Rp6.115.990.000,00; dan
3. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 353 Tahun 2024 tentang Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kelompok Kategori Kesejahteraan Masyarakat menurut Provinsi Kabupaten/Kota mendapatkan alokasi sebesar Rp5.842.485.000,00.

5.4.1.2.3. Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO

Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO untuk tahun 2024 secara total terealisasi sebesar Rp673.030.149.069,00 dan tahun 2023 yang terealisasi sebesar Rp771.341.660.377,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5 . 4 . 10 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi – LO

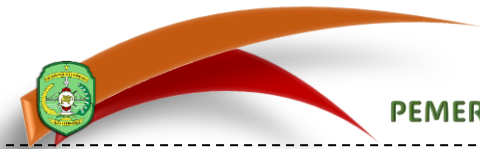
Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO	614.590.149.069,00	733.221.660.377,00	-118.631.511.308,00	-16,18
Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	58.440.000.000,00	38.120.000.000,00	20.320.000.000,00	53,31
Jumlah	673.030.149.069,00	771.341.660.377,00	-98.311.511.308,00	-12,75

Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LO sebesar Rp614.590.149.069,00 terdiri atas :

1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO sebesar Rp49.900.615.000,00;
2. Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO sebesar Rp61.788.521.000,00;
3. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO sebesar Rp465.924.627.000,00;
4. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan-LO sebesar Rp1.054.547.000,00;
5. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO sebesar Rp35.921.839.069,00.

Penyajian Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LO sebesar Rp614.590.149.069,00 tersebut telah mengakumulasi Pendapatan-LO dari Kurang Salur Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari Pemerintah Provinsi Kepada Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024, sebagaimana Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor Tentang Penetapan Nilai Kurang Salur Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Kepada Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Timur Tahun 2024 Nomor: 100.3.3.1/0419-V/BPKAD dengan rincian sebagai berikut:

1. Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp5.427.223.000,00;
2. Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp6.114.102.000,00;
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp78.296.657.000,00;
4. Air Permukaan sebesar Rp97.615.000,00;



Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi sebesar Rp58.440.000.000,00 berdasarkan Surat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 900.1/17865/BPKAD-III, tanggal 28 Desember 2023 tentang Alokasi Belanja Bantuan keuangan pada APBD TA.2024 setelah Klarifikasi.

5.4.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO

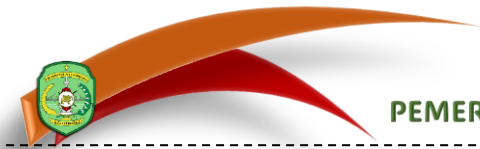
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp102.060.470.286,69 mengalami kenaikan sebesar Rp84.297.778.277,69 atau 474,58% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp17.762.692.009,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5 . 4 . 11 Rincian Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO

Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Pendapatan Hibah-LO	21.127.514.979,00	8.803.206.867,00	12.324.308.112,00	140,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	80.932.955.307,69	8.959.485.142,00	71.973.470.165,69	803,32
Jumlah	102.060.470.286,69	17.762.692.009,00	84.297.778.277,69	474,58

Pendapatan Hibah sebesar Rp21.127.514.979,00 terdiri dari:

- Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat (Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur) Kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berupa 1 (satu) unit mobil operasional untuk Keperluan Tim Pemantau Perkembangan Politik Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara) sesuai BAST Nomor : 000.2.3/1898.4/Kesbangpol.TU sebesar Rp277.300.000,00;
- Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral) Kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pada Dinas Perhubungan berupa penerangan jalan umum (PJU) sesuai SK No.121/BAST/BN.07/KPB/2024 Tanggal 12 Juli 2024 sebesar Rp1.529.123.845,00;
- Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) Kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan berupa alat laboratorium dan mesin untuk menunjang kegiatan kedinasan sesuai SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.7684/MENLHK-SETJEN/ROUM/KAP.3/7/2023 sebesar Rp4.653.715.054,00;
- Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat (Kementerian Kesehatan) Kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pada Dinas Kesehatan berupa PROBE USG LINEAR (Alat Deteksi Kanker Payudara) sebesar Rp363.000.000,00;
- Pendapatan Hibah berupa Tanah dan Bangunan dari Yayasan Mitra Husada Tenggarong kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Naskah Hibah Nomor: B-547/BPKAD/032/03/2023 sebesar Rp4.595.322.080,00;



- f. Pendapatan Hibah berupa Tanah dari Kelompok Masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp5.604.185.000,00.

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO adalah Pendapatan Lainnya sebesar Rp80.932.955.307,69 yang terdiri dari :

- a. Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar Rp78.329.955.307,69 adalah pendapatan dari beberapa perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) PT. Kaltim Prima Coal sebesar Rp54.611.131.775,69;
 - 2) PT. Kideco Jaya Agung sebesar Rp9.767.213.171,00;
 - 3) PT. Multi Harapan Utama sebesar Rp13.951.610.361,00.
- b. Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia-LO sebesar Rp2.603.000.000,00 adalah Pengembalian Hibah dari Kementerian Agama Republik Indonesia.

5.4.2. Beban

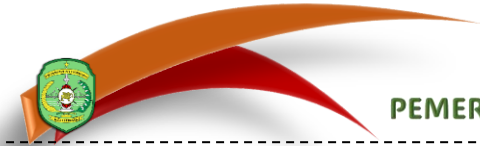
Beban merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar-benar sudah dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional pemerintah selama satu tahun. Beban ini baik yang telah berupa kas atau tunai maupun yang masih berupa kewajiban membayar. Realisasi Beban Daerah untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp8.771.428.963.513,30 mengalami peningkatan sebesar Rp952.644.679.481,13 atau 12,18% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp7.818.784.284.032,17 dan dapat diuraikan sebagai berikut.

5.4.2.1. Beban Operasi

Beban Operasi pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp7.846.852.208.054,30 mengalami peningkatan sebesar Rp909.138.506.920,13 atau 13,10% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp6.937.713.701.134,17 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5 . 4 . 12 Rincian Beban Operasi

Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Operasi				
Beban Pegawai	2.046.697.864.196,43	1.671.151.431.835,81	375.546.432.360,62	22,47
Beban Barang	1.972.614.559.311,95	2.076.245.387.696,64	-103.630.828.384,69	-4,99
Beban Jasa	924.616.052.783,17	826.131.573.244,40	98.484.479.538,77	11,92
Beban Pemeliharaan	309.734.946.813,60	244.044.725.955,68	65.690.220.857,92	26,92
Beban Perjalanan Dinas	379.980.355.944,00	342.931.296.961,00	37.049.058.983,00	10,80
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	122.430.241.027,00	135.465.204.527,04	-13.034.963.500,04	-9,62
Beban Barang dan Jasa BOS	142.933.206.658,40	128.016.970.851,02	14.916.235.807,38	11,65



Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	18.481.510.227,00	0,00	18.481.510.227,00	100,00
Beban Barang dan Jasa BLUD	247.477.980.618,71	194.637.679.065,42	52.840.301.553,29	27,15
Beban Subsidi	101.040.120,00	64.400.000,00	36.640.120,00	56,89
Beban Hibah	249.874.687.493,00	279.196.310.801,00	-29.321.623.308,00	-10,50
Beban Bantuan Sosial	25.188.000.000,00	40.893.375.000,00	-15.705.375.000,00	-38,41
Beban Penyisihan Piutang	1.339.952.821,25	8.018.968.398,13	-6.679.015.576,88	-83,29
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.405.381.810.039,79	990.916.376.798,03	414.465.433.241,76	41,83
Jumlah	7.846.852.208.054,30	6.937.713.701.134,17	909.138.505.920,13	13,10

5.4.2.1.1. Beban Pegawai

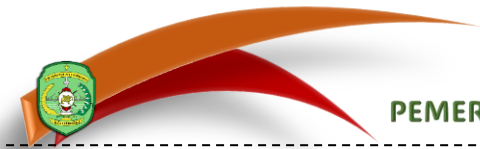
Beban Pegawai merupakan saldo Beban Pegawai periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 yang terealisasi sebesar Rp2.046.697.864.196,43 mengalami peningkatan sebesar Rp375.546.432.360,62 atau 22,47% jika dibandingkan dengan Beban Pegawai tahun 2023 yang terealisasi sebesar Rp1.671.151.431.835,81 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5 . 4 . 13 Rincian Beban Pegawai

Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	983.816.581.709,00	872.788.244.672,94	111.028.337.036,06	12,72
Beban Tambahan Penghasilan ASN	755.623.007.462,43	484.167.254.168,87	271.455.753.293,56	56,07
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	253.600.972.701,00	254.776.109.088,00	-1.175.136.387,00	-0,46
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	33.749.043.579,00	33.722.650.359,00	26.393.220,00	0,08
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	751.998.410,00	730.625.680,00	21.372.730,00	2,93
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	802.090.000,00	971.660.000,00	-169.570.000,00	-17,45
Beban Pegawai BOS	7.129.522.500,00	7.151.227.500,00	-21.705.000,00	-0,30
Beban Pegawai BOSP	0	1.791.570.100,00	-1.791.570.100,00	-100,00
Beban Pegawai BLUD	11.224.647.835,00	15.052.090.267,00	-3.827.442.432,00	-25,43
Jumlah	2.046.697.864.196,43	1.671.151.431.835,81	375.546.432.360,62	22,47

Selisih antara Beban Pegawai dengan Belanja Pegawai LRA disebabkan :

- 1) Pengakuan Utang Pegawai TA 2024 yaitu Utang Tambahan Tunjangan Penghasilan (TTP) sebesar Rp58.694.218.588,43;
- 2) Pembayaran Utang TTP dan Utang Pegawai BLUD Tahun 2023 sebesar Rp43.161.339.635,00;
- 3) Koreksi tambah atas kesalahan penganggaran TA 2024 sebesar



- Rp52.460.000,00 yang terdiri dari Dinas Perhubungan sebesar Rp36.000.000,00, Sekretariat Daerah sebesar Rp16.460.000,00;
- 4) Koreksi kurang atas kesalahan penganggaran TA 2024 beban pegawai pada RSUD Dayaku Raja Samboja reklasifikasi beban pegawai BLUD ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin BLUD sebesar Rp21.825.000,00; dan
 - 5) Koreksi kurang saldo awal Utang Belanja Pegawai TA 2024 sebesar Rp62.777.001,00.

5.4.2.1.2. Beban Barang

Beban Barang merupakan saldo Beban Barang periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 yang terealisasi sebesar Rp1.972.614.559.311,95 dan mengalami penurunan sebesar Rp103.630.828.384,69 atau 4,99% jika dibandingkan dengan beban barang tahun 2023 yang terealisasi sebesar Rp2.076.245.387.696,64 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5 . 4 . 14 Rincian Beban Barang

Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Barang Pakai Habis	1.972.895.455.666,49	2.076.111.565.196,64	-103.216.109.530,15	-4,97
Beban Barang Tak Habis Pakai	0,00	133.822.500,00	-133.822.500,00	-100,00
Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	-280.896.354,54	0,00	-280.896.354,54	100,00
Jumlah	1.972.614.559.311,95	2.076.245.387.696,64	-103.630.828.384,69	-4,99

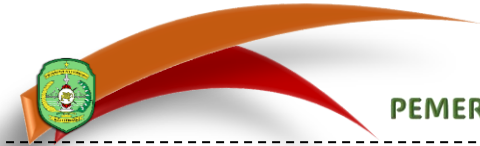
Beban Barang/Persediaan disajikan dengan basis akrual, yaitu beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*). Dengan penggunaan metode fisik maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik dikalikan dengan nilai per unit sesuai dengan metode Masuk Pertama Keluar Pertama (MPKP) atau *First in First Out* (FIFO).

Selisih antara Beban Barang dengan Belanja Barang LRA disebabkan :

- 1) Persediaan awal TA 2024 sebesar Rp101.977.528.215,14;
- 2) Pengakuan Utang Beban Barang TA 2024 sebesar Rp28.271.869.357,00;
- 3) Koreksi Tambah Beban Barang TA 2024 sebesar Rp273.914.177.982,90;
- 4) Pembayaran Utang Belanja Barang Tahun 2023 sebesar Rp27.669.939.759,78;
- 5) Koreksi Kurang Beban Barang TA 2024 sebesar Rp15.692.083.930,94;
- 6) Persediaan Akhir TA 2024 Rp104.334.731.768,93; dan
- 7) Koreksi Kurang Temuan Pemeriksaan TA 2024 Beban Barang sebesar Rp75.435.145.057,57.

5.4.2.1.3. Beban Jasa

Beban Jasa adalah beban jasa yang sudah diterima selama periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 yang terealisasi sebesar Rp924.616.052.783,17 mengalami peningkatan sebesar Rp98.484.479.538,77 atau 11,92% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp826.131.573.244,40.



Tabel 5 . 4 . 15 Rincian Beban Jasa

Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Jasa Kantor	739.177.860.550,68	586.179.510.682,32	152.998.349.868,36	26,10
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	90.114.449.117,00	67.049.993.418,00	23.064.455.699,00	34,40
Beban Sewa Tanah	194.611.700,88	609.144.036,27	-414.532.335,39	-68,05
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	31.257.211.143,77	48.033.127.032,91	-16.775.915.889,14	-34,93
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	2.855.275.412,94	4.169.292.993,90	-1.314.017.580,96	-31,52
Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	0,00	101.966.000,00	-101.966.000,00	-100,00
Beban Sewa Aset Tidak Berwujud	4.081.630.958,90	11.700.000,00	4.069.930.958,90	34.785,73
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	7.939.939.394,00	69.565.992.918,00	-61.626.053.524,00	-88,59
Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	8.828.398.434,00	11.274.123.175,00	-2.445.724.741,00	-21,69
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	392.430.000,00	725.120.000,00	-332.690.000,00	-45,88
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	39.774.246.071,00	38.411.602.988,00	1.362.643.083,00	3,55
Jumlah	924.616.052.783,17	826.131.573.244,40	98.484.479.538,77	11,92

Selisih antara Beban Jasa dengan Belanja Jasa LRA disebabkan :

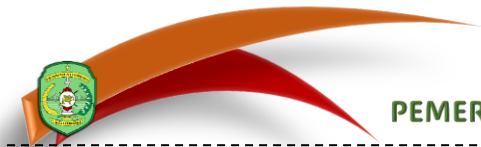
- 1) Pengakuan Utang Beban Jasa TA 2024 sebesar Rp6.493.197.579,95;
- 2) Pembayaran Utang Beban Jasa Tahun 2023 sebesar Rp20.709.337.427,32;
- 3) Koreksi Tambah Penyesuaian atas Beban Jasa TA 2024 sebesar Rp7.700.042.163,95; dan
- 4) Koreksi Kurang Penyesuaian atas Beban Jasa TA 2024 sebesar Rp26.139.978.296,41.

5.4.2.1.4. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan meliputi beban perawatan kendaraan bermotor, beban pemeliharaan aset tetap, beban pemeliharaan aset tidak berwujud untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 yang terealisasi sebesar Rp309.734.946.813,60 mengalami peningkatan sebesar Rp65.690.220.857,92 atau 26,92% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp244.044.725.955,68.

Tabel 5 . 4 . 16 Rincian Beban Pemeliharaan

Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Pemeliharaan Tanah	2.130.247.050,00	1.333.027.811,00	797.219.239,00	59,81
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	35.080.103.654,00	35.194.406.827,00	-114.303.173,00	-0,32
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	118.371.461.707,00	118.833.981.494,14	-462.519.787,14	-0,39



Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	153.918.134.402,60	88.683.309.823,54	65.234.824.579,06	73,56
Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	235.000.000,00	0,00	235.000.000,00	100,00
Jumlah	309.734.946.813,60	244.044.725.955,68	65.690.220.857,92	26,92

Selisih antara Beban Pemeliharaan dengan Belanja Pemeliharaan LRA disebabkan :

- 1) Pengakuan Utang Beban Pemeliharaan TA 2024 sebesar Rp8.283.479.672,00;
- 2) Pembayaran Utang Beban Pemeliharaan Tahun 2023 sebesar Rp18.392.169.996,00;
- 3) Koreksi Tambah Beban Pemeliharaan TA 2024 sebesar Rp7.673.150.340,60; dan
- 4) Koreksi Kurang Beban Pemeliharaan TA 2024 sebesar Rp10.610.239.903,00.

5.4.2.1.5. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas adalah Beban Perjalanan Dinas periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 yang terealisasi sebesar Rp379.980.355.944,00 mengalami peningkatan sebesar Rp37.049.058.983,00 atau 10,80% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp342.931.296.961,00.

Tabel 5 . 4 . 17 Rincian Beban Perjalanan Dinas

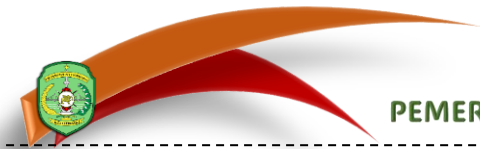
Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	378.512.516.004,00	339.158.902.993,00	39.353.613.011,00	11,60
Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	1.467.839.940,00	3.772.393.968,00	-2.304.554.028,00	-61,09
Jumlah	379.980.355.944,00	342.931.296.961,00	37.049.058.983,00	10,80

Selisih antara Beban Perjalanan Dinas dengan Belanja Perjalanan Dinas LRA disebabkan :

- 1) Pengakuan Utang Beban Perjalanan Dinas TA 2024 sebesar Rp104.880.000,00; dan
- 2) Pembayaran Utang Beban Perjalanan Dinas TA 2024 sebesar Rp108.910.000,00.

5.4.2.1.6. Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat merupakan saldo Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 yang terealisasi sebesar Rp122.430.241.027,00 mengalami penurunan sebesar Rp13.034.963.500,04 atau 9,62% jika dibandingkan dengan Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat tahun 2023 yang terealisasi sebesar Rp135.465.204.527,04

**Tabel 5 . 4 . 18 Rincian Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**

Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	115.679.147.835,00	121.267.887.229,00	-5.588.739.394,00	-4,61
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.751.093.192,00	14.197.317.298,04	-7.446.224.106,04	-52,45
Jumlah	122.430.241.027,00	135.465.204.527,04	-13.034.963.500,04	-9,62

5.4.2.1.7. Beban Barang dan Jasa BOS

Beban Barang dan Jasa BOS merupakan saldo Beban Barang dan Jasa BOS yang bersumber dari dana BOS periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 yang terealisasi sebesar Rp142.933.206.658,40 mengalami kenaikan sebesar Rp14.916.235.807,38 atau 11,65% jika dibandingkan dengan Beban Barang dan Jasa BOS tahun 2023 yang terealisasi sebesar Rp128.016.970.851,02.

Tabel 5 . 4 . 19 Rincian Beban Barang dan Jasa BOS

Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Barang dan Jasa BOS	142.933.206.658,40	128.016.970.851,02	14.916.235.807,38	11,65
Jumlah	142.933.206.658,40	128.016.970.851,02	14.916.235.807,38	11,65

5.4.2.1.8. Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas

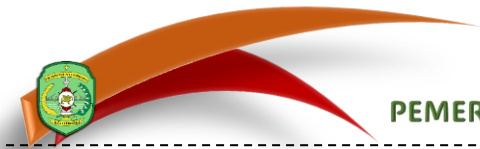
Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas merupakan saldo Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 yang terealisasi sebesar Rp18.481.510.227,00 mengalami peningkatan sebesar 100% jika dibandingkan dengan Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas tahun 2023 yang tidak ada realisasi dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5 . 4 . 20 Rincian Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas

Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	18.481.510.227,00	0,00	18.481.510.227,00	100,00
Jumlah	18.481.510.227,00	0,00	18.481.510.227,00	100,00

5.4.2.1.9. Beban Barang dan Jasa BLUD

Beban Barang dan Jasa BLUD merupakan saldo Beban Barang dan Jasa BLUD periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 yang terealisasi sebesar Rp247.477.980.618,71 mengalami peningkatan sebesar Rp52.840.301.553,29 atau 27,15% jika dibandingkan dengan Beban Barang dan Jasa BLUD tahun 2023 yang terealisasi sebesar Rp 194.637.679.065,42 dengan rincian sebagai berikut



Tabel 5 . 4 . 21 Rincian Beban Barang dan Jasa BLUD

Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
Beban Barang dan Jasa BLUD	247.477.980.618,71	194.637.679.065,42	52.840.301.553,29	27,15
Jumlah	247.477.980.618,71	194.637.679.065,42	52.840.301.553,29	27,15

5.4.2.1.10. Beban Subsidi

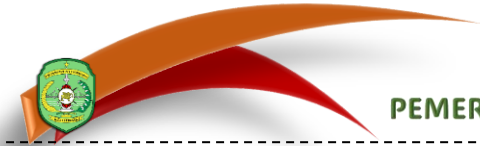
Beban subsidi TA 2024 sebesar Rp101.040.120,00 adalah beban subsidi kepada BUMN dan Badan Usaha Milik Swasta. Beban subsidi pada tahun 2024 diberikan kepada Perum Damri berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: P-264/DISHUB/HUBDAT/500.11.8/01/2024 melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara yang dianggarkan pada Sub kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota sebesar Rp101.040.120,00.

5.4.2.1.11. Beban Hibah

Beban Hibah merupakan saldo Beban Hibah periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 yang terealisasi sebesar Rp249.874.687.493,00 mengalami penurunan sebesar Rp29.321.623.308,00 atau 10,50% jika dibandingkan dengan Beban Hibah tahun 2023 yang terealisasi sebesar Rp279.196.310.801,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5 . 4 . 22 Rincian Beban Hibah

Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	9.250.000.000,00	4.654.673.000,00	4.595.327.000,00	98,73
Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	0,00	3.895.000.000,00	-3.895.000.000,00	-100,00
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	176.744.337.861,00	198.486.898.961,00	-21.742.561.100,00	-10,95
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	5.244.190.000,00	0,00	5.244.190.000,00	100,00
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	38.726.385.382,00	51.020.884.240,00	-12.294.498.858,00	-24,10
Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	200.000.000,00	349.310.000,00	-149.310.000,00	-42,74
Beban Hibah Uang Dana BOS yang	5.949.600.000,00	5.680.800.000,00	268.800.000,00	4,73



Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
Diterima oleh Satdikdas Swasta				
Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	7.844.400.000,00	7.829.700.000,00	14.700.000,00	0,19
Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta	4.553.750.000,00	5.976.150.000,00	-1.422.400.000,00	-23,80
Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.362.024.250,00	1.302.894.600,00	59.129.650,00	4,54
Jumlah	249.874.687.493,00	279.196.310.801,00	-29.321.623.308,00	-10,50

1. Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp9.250.000.000,00 adalah beban hibah kepada pemerintah pusat atas nama Komando Daerah Militer VI Mulawarman berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor: P-42/DISKOMINFO/NPHD/500.12.16.3/03/2024, Nomor: NPHD/2/III/2024, (Hibah sistem informasi di wilayah IKN dan perbatasan Malaysia) sub kegiatan pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik pada Dinas Komunikasi dan Informatika.
2. Pada tahun 2024 tidak ada Hibah Barang dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara kepada Pemerintah Pusat.
3. Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp176.744.337.861,00 adalah beban atas hibah dana kepada:
 - a. Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp98.586.421.361,00 diberikan sebagaimana tabel di bawah ini

Tabel 5 . 4 . 23 Rincian Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

No	Penerima	Jumlah (Rp)
1	Komando Distrik Militer 0906/KKR	2.073.953.000,00
2	Kepolisian Resor Bontang	1.289.990.000,00
3	Komando Distrik Militer 0908/BTG	624.305.000,00
4	Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)	7.857.916.000,00
5	Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU)	8.420.272.200,00
6	Komisi Pemilihan Umum (KPU)	45.633.468.161,00
7	Kepolisian Resor Kutai Kartanegara	8.156.377.000,00
8	Masyarakat Miskin atau Tidak Mampu	13.875.000.000,00
9	PMI Cabang Kabupaten Kutai Kartanegara	10.655.140.000,00
	Jumlah	98.586.421.361,00

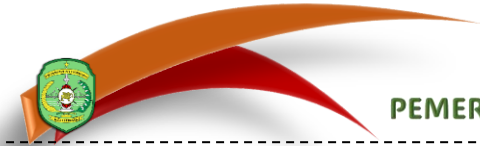
- b. Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp78.157.916.500,00 adalah Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana tabel di bawah ini:



Tabel 5 . 4 . 24 Rincian Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

No	Penerima	Jumlah (Rp)
1	SMP Muhammadiyah Loa Janan	177.659.000,00
2	MTS AT-TADZIR Loa Janan	177.402.000,00
3	SMP PGRI 15 Tenggarong Seberang	3.030.786.200,00
4	TK. Kemala Bhayangkari 7 Tenggarong, TK. AL-Hikmah Kota Bangun, dan TK. Pertiwi Sebulu	53.939.250,00
5	Madrasah Ibtidaiyah Darul Mujahidin Kec. Tenggarong Seberang	349.187.900,00
6	KB Amanah Sanga-Sanga	224.024.000,00
7	KB. Mahakam Muara Jawa	216.883.000,00
8	Kelompok Bermain Arsa Muda Kec. Tenggarong Seberang	180.925.000,00
9	PAUD	6.085.327.000,00
10	SD Swasta	16.277.505.000,00
11	SMP SPT Separi Tenggarong Seberang	762.118.100,00
12	SMP Swasta	41.370.398.000,00
13	SMP-IT Pesisir Samboja	198.030.000,00
14	TK ABA 3 Kecamatan Tenggarong Seberang	10.780.000,00
15	TK AL-Hikmah Kota Bangun	10.717.000,00
16	TK Dahlia 2 Jembayan Kec. Loa Janan	10.780.000,00
17	TK Handayani 1 Kota Bangun	857.920.000,00
18	TK Harapan Mandiri Loa Janan	236.305.000,00
19	TK Harapan Mandiri Loa Janan, KB Mahakam Muara Jawa dan KB Amanah Sanga-Sanga	86.196.000,00
20	TK IT AN Nur Sebulu	186.967.000,00
21	TK Kartika V 65 Samboja dan TK Tunas Muda Samboja	32.975.000,00
22	TK Kartika V-65 Samboja	534.921.000,00
23	TK Kemala Bhayangkari 7 Tenggarong	313.128.000,00
24	TK Kuntum Melati Kecamatan Muara Kaman	49.938.000,00
25	TK Maju Lestari Desa Batuah	214.541.000,00
26	TK Melati Putih Loa Kulu	840.999.000,00
27	TK Panca Dharma Tenggarong Seberang	28.687.000,00
28	TK PAUD Pesisir Kampung Kamal Kec. Samboja	98.736.000,00
29	TK Pertiwi Sebulu	190.989.000,00
30	TK Tunas Muda Samboja	105.873.000,00
31	TK. ABA 3 Kecamatan Tenggarong Seberang	181.752.000,00
32	TK. AL-Hikmah Kota Bangun	175.531.000,00
33	TK. Dahlia 2 Jembayan Kec. Loa Kulu	370.939.000,00
34	TK. Harapan Mandiri Loa Janan	210.281.000,00
35	TK. Islam Al Maraghi Tenggarong	49.994.000,00
36	TK. Kelurahan Sei Merdeka Kecamatan Samboja Barat	244.148.000,00
37	TK. Purnama MarangKayu	235.413.000,00
	Jumlah	74.382.694.450,00

Penyajian Nilai Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan



Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp78.157.916.500,00 dipengaruhi oleh jurnal penyesuaian beban hibah karena adanya pelunasan utang beban hibah barang tahun 2023 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar Rp3.385.847.200,00. Selain itu terdapat pengakuan utang beban hibah barang ke beberapa sekolah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 sebesar Rp7.161.069.250,00 dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pembangunan Gedung Sekolah TK. Panca Dharma Tenggarong Seberang (KDP) sebesar Rp331.389.000,00;
 - 2) Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP SPT SEPARI Tenggarong Seberang sebesar Rp2.032.901.050,00;
 - 3) Pembangunan Laboratorium IPA SMP SPT SEPARI Tenggarong Seberang sebesar Rp525.855.200,00;
 - 4) Pembayaran pekerjaan RKB SD Al Amin Desa bukit pariaman Tenggarong Seberang sebesar Rp681.924.000,00;
 - 5) Pekerjaan Pengadaan Laptop Administrasi untuk Sekolah Dasar Swasta sebesar Rp3.589.000.000,00.
4. Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar TA. 2024 sebesar Rp5.244.190.000,00 adalah Pengeluaran Pemerintah Daerah berupa uang kepada Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor : P-1684/BUD/NPHD/400.6/09/2024 dan 038.Sek-KD/KKKIM/IX/2024 tanggal 13 September 2024
5. Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp38.726.385.382,00 adalah dana hibah beban Hibah Barang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang diberikan sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 5 . 4 . 25 Rincian Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan

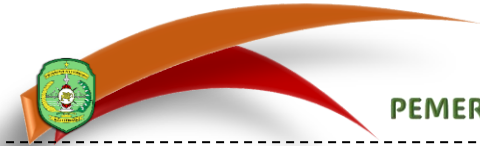
No	Penerima	Jumlah (Rp)
1	Yayasan Burdah Syifaul Qulum	2.544.739.000,00
2	Yayasan Pendidikan Ma'Arif Diponegoro Tenggarong Seberang	500.000.000,00
3	Yayasan Pondok Pesantren Al Mua'wanah	500.000.000,00
4	Yayasan Langgar An Nur Bukit Raya	200.000.000,00
5	Yayasan Darun Nidhom "Masjid Al Kahfi"	150.000.000,00
6	Yayasan Langgar Baitul Ikhsan Bukit Raya	200.000.000,00
7	Yayasan Pondok Pesantren Roudhotul Jannah Samboja	500.000.000,00
8	Yayasan Langgar Al Ikhlas Bukit Raya	200.000.000,00
9	Yayasan Al Falah Bukit Raya	200.000.000,00
10	Gereja Pantekosta Di Indonesia (Gpdi)	100.000.000,00
11	Yayasan Langgar Al Amin Samboja Barat	150.000.000,00
12	Yayasan Miftahul Jannah	200.000.000,00
13	Yayasan Langgar Al Himmah	150.000.000,00



No	Penerima	Jumlah (Rp)
14	Yayasan Pondok Pesantren Ishlahul Ummah Muara Kaman	250.000.000,00
15	Yayasan Masjid Maqomul Abidin	500.000.000,00
16	Yayasan Pondok Pesantren Salamul Huda	78.600.000,00
17	Panti Asuhan Al-Kahfi (Yayasan Umat Sejahtera)	900.000.000,00
18	Pondok Pesantren Sabilal Muhtadin	100.000.000,00
19	Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara	500.000.000,00
20	Yayasan Pendidikan Islam Al Barokah Karang Tunggal	200.000.000,00
21	Yayasan Langgar Al-Barakah Danau Semayang	100.000.000,00
22	Yayasan Masjid Al Iman Nurul Ihsan Bukit Biru	250.000.000,00
23	Yayasan Masjid Hidayatullah	300.000.000,00
24	Yayasan Masjid Jami' Kh. Muhammad Sadjid	1.000.000.000,00
25	Yayasan Masjid Jami Al Maarif Sanga Sanga Dalam	200.000.000,00
26	Yayasan Masjid Al Mujahidin Rahmatullah	200.000.000,00
27	Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Muara Belinau Tabang	232.415.000,00
28	Yayasan Darussalam Al Karim	200.000.000,00
29	Gkii Kota Bangun Ulu	500.000.000,00
30	Gereja Toraja Jemaat Bethel	350.000.000,00
31	Masjid Ar Rahim (Yayasan Arrahman)	200.000.000,00
32	Yayasan Masjid Nurul Khairah Desa Pela	500.000.000,00
33	Yayasan Masjid Jami' Nurul Huda Kuala Samboja	500.000.000,00
34	Yayasan Tpq Al-Fattah Durian Maluhu	250.000.000,00
35	Yayasan Musholla Al Ikhlas Kelurahan Argosari	190.781.000,00
36	Gereja Pantekosta Di Indonesia Jemaat Victory Jahab	100.000.000,00
37	Yayasan Masjid Al Hidayah Kota Bangun Darat	300.000.000,00
38	Yayasan Fasthabikul Khairat Kelurahan Panji	250.000.000,00
39	Yayasan Masjid Nurun Ala Nurin	498.577.000,00
40	Yayasan Langgar Anugerah Cahaya Ilahi	200.000.000,00
41	Yayasan Langgar Al Iman	100.000.000,00
42	Gereja Toraja Jemaat Ararat Santan Ulu	500.000.000,00
43	Gereja Kemah Injil Jemaat Jahab	86.967.000,00
44	Yayasan Masjid Al Kamal	500.000.000,00
45	Yayasan Masjid Baiturrahim	500.000.000,00
46	Yayasan Masjid Mafatikhul Hidayah Bendang Raya	150.000.000,00
47	Yayasan Masjid Miftahul Fajar Spontan	200.000.000,00
48	Yayasan Masjid Jami Al Mujahidin Jahab	425.000.000,00
49	Masjid Al Ikhlas Wonosari (Yayasan Barokah Kota Bangun Darat)	447.150.000,00
50	Yayasan Pondok Pesantren Am-Muminun Muara Muntai	309.275.000,00
51	Musholla Wisata Danau Tanjung Sarai (Yayasan Al Safar Desa Kedang Murung)	220.000.000,00
52	Yayasan Daarus Saadah Bengkinang	219.100.318,00
53	Yayasan Daarus Saadah Bengkinang	250.899.682,00
54	Gereja Kibaid Jemaat Pulau Pinang	377.095.682,00
55	Masjid Jami' Nuruddin Wonotirto (Yayasan Nuruddin Wonotirto Samboja)	200.000.000,00

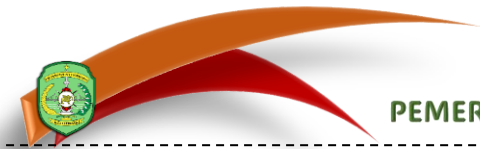


No	Penerima	Jumlah (Rp)
56	Masjid Baitul Amin (Yayasan Darul Amin)	500.000.000,00
57	Yayasan Masjid Al Hidayah Bensamar	250.000.000,00
58	Gereja Hkbp Tenggarong	500.000.000,00
59	Gpdi Jemaat Ekklesia Ds. Buluq Sen	352.747.700,00
60	Gereja Toraja Jemaat Buntu Marannu	200.000.000,00
61	Yayasan As Sakinah Kelurahan Maluhu	200.000.000,00
62	Yayasan Masjid Nur Hidayah Sukodadi	500.000.000,00
63	Gereja Katolik Kristus Raja Desa Bangun Rejo	150.000.000,00
64	Yayasan Bina Kasih Kutai Kartanegara	1.000.000.000,00
65	Gereja Gpdi Jemaat Filadelfia Muara Jawa	180.000.000,00
66	Yayasan Masjid Al Ikhlas Timbau	200.000.000,00
67	Yayasan Masjid Jami Al Muhtadin Loa Duri	200.000.000,00
68	Gereja Katolik Stasi St. Stefanus	150.000.000,00
69	Yayasan Masjid Al Muttaqien Handil Sembilan	350.000.000,00
70	Gpdi Jemaat Anugerah Sanga Sanga	200.000.000,00
71	Yayasan Masjid Baiturrahman Kutai Kartanegara	283.020.318,00
72	Yayasan Masjid Baiturrahman Kutai Kartanegara	716.979.682,00
73	Gkii Jemaat Muara Badak	500.000.000,00
74	Yayasan Masjid Dan Tpa Asy Syfaa Santan Tengah Marangkayu	350.000.000,00
75	Yayasan Masjid Al Ittihad Melintang	200.000.000,00
76	Yayasan Masjid Baiturrohman Desa Bukit Pariaman	200.000.000,00
77	Yayasan Musholla Jamiatun Al Ikhlas Desa Bukit Raya	150.000.000,00
78	Yayasan Masjid Nurul Fajar Desa Perdana	500.000.000,00
79	Yayasan Rumah Imam Langgar Babussalam	100.000.000,00
80	Yayasan Masjid Al Hijrah Unikarta	100.000.000,00
81	Yayasan Pendidikan Ar Rahman	250.000.000,00
82	Yayasan Masjid Al Hijrah Unikarta	108.844.000,00
83	Yayasan Al Khair Azzahra Kelurahan Bukit Merdeka	100.000.000,00
84	Parisada Hindu Dharma Indonesia	180.000.000,00
85	Yayasan Masjid Babussalam Perumahan Penerangan	150.000.000,00
86	Yayasan Masjid Al Ikhlas Pos Dua	200.000.000,00
87	Yayasan Masjid An Nisa Palacari	500.000.000,00
88	Yayasan Langgar Al Istiqomah Desa Liang	150.000.000,00
89	Langgar Nurul Iman (Yayasan Wiji Iro Dikromo)	200.000.000,00
90	Yayasan Paiketan Arya Wang Bang Pinatih	400.000.000,00
91	Gereja Hkbp Desa Kertabuana	150.000.000,00
92	Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Nahdlatul Wathan	100.000.000,00
93	Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara (Pesparawi)	4.499.194.000,00
94	Yayasan Al Falah Desa Kota Bangun Seberang	275.000.000,00
95	Yayasan Al Munawaroh Kota Bangun Seberang	200.000.000,00
96	Yayasan Putra Warman Al Abqory	100.000.000,00
97	Gereja Kerapatan Pantekosta Jemaat Batesda	200.000.000,00
98	Yayasan Baitur Rahim Anggana (Masjid Jami Ar Rahim)	500.000.000,00



No	Penerima	Jumlah (Rp)
99	Yayasan Masjid Nurul Iman	500.000.000,00
100	Yayasan Takmir Al Hilal Tenggarong	200.000.000,00
101	Yayasan Masjid Nurul Islam Bunga Jadi	300.000.000,00
102	Yayasan Masjid An Nuur Al Ikhlas	200.000.000,00
103	Yayasan Fiisabiillillah Balikpapan (Pondok Pesantren Tarbiyatul Qur'an)	100.000.000,00
104	Yayasan Al-Islami Nurul An-War (Pondok Pesantren Al Islami Nurul Anwar)	100.000.000,00
105	Yayasan Annur Al Ikhlas (Pondok Pesantren Annur Al Ikhlas)	100.000.000,00
106	Yayasan Al Muminun Bukit Biru	500.000.000,00
107	Yayasan Sabilul Muttaqin Benua Baru	500.000.000,00
108	Yayasan Asshobirin Koba Seberang	500.000.000,00
109	Yayasan Masjid Al Mujahidin Loa Ipuh Darat	500.000.000,00
	Jumlah Seluruhnya	38.726.385.382,00

6. Beban Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia TA. 2024 sebesar Rp200.000.000,00 adalah beban hibah atas dana Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia yang diberikan kepada Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum yang diberikan kepada Kerukunan Bubuhan Banjar Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kerukunan bubuhan Banjar Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024 Nomor : SK-33/BKBP/POLDAGRI-II/800/04/2024 dan Nomor : 031/B/PDKBB-KABKUKAR/04/2024 tertanggal 17 April 2024.
7. Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta sebesar Rp5.949.600.000,00 adalah Belanja hibah atas dana BOS Kabupaten untuk Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI).
8. Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta TA. 2024 sebesar Rp7.844.400.000,00 adalah beban hibah atas dana BOS Kabupaten untuk untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs).
9. Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta sebesar Rp4.553.750.000,00 adalah beban hibah atas dana BOS Kabupaten untuk Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP), BOP Kesetaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
10. Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik TA 2024 sebesar Rp1.362.024.250,00 adalah beban hibah kepada partai politik yang memperoleh suara pada pemilihan umum dan memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kutai Kartanegara. Besaran anggaran dan realisasi bantuan keuangan pada partai politik berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 182/SK-BUP/HK/2024 tentang Penetapan besaran bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapat kursi hasil pemilu Tahun 2019 pada Tahun 2024. Hibah kepada partai politik pada tahun 2024 dengan rincian beban sebagaimana tabel berikut.



Tabel 5 . 4 . 26 Rincian Beban Hibah Bantuan kepada Partai Politik

Uraian	Jumlah (Rp)
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai politik PKS	81.738.000,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai politik PDIP	331.104.150,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai politik Golkar	330.265.900,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai politik Gerindra	198.364.450,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai politik PAN	133.681.450,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai politik PPP	37.160.200,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai politik Hanura	27.508.850,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai politik PKB	123.446.850,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai politik NASDEM	98.754.400,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai politik PPI	0,00
Jumlah	1.362.024.250,00

5.4.2.1.12. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial merupakan saldo Beban Bantuan Sosial periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 yang terealisasi sebesar Rp25.188.000.000,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp15.705.375.000,00 atau 38,41% jika dibandingkan dengan Beban Bantuan Sosial tahun 2023 yang terealisasi sebesar Rp40.893.375.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5 . 4 . 27 Rincian Beban Bantuan Sosial

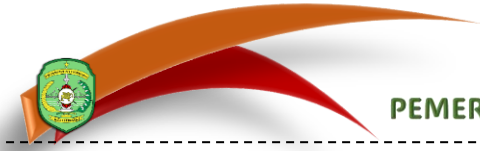
Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	25.188.000.000,00	40.893.375.000,00	-15.705.375.000,00	-38,41
Jumlah	25.188.000.000,00	40.893.375.000,00	-15.705.375.000,00	-38,41

Beban Bantuan Sosial TA 2024 sebesar Rp25.188.000.000,00 adalah beban bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 dengan peruntukan sebagai berikut yaitu:

1. Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu (GRAB, GOJEK, MAXIM, ABK) Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 Kabupaten/Kota pada Dinas Perhubungan sebesar Rp474.000.000,00;
2. Santunan Bagi Veteran dan Janda Veteran, Warga Miskin Lanjut Usia Terlantar Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar dan Penerima Bantuan Pendidikan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara pada Dinas Sosial sebesar Rp5.941.500.000,00;
3. Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan Kepada Individu pada kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha (Penanganan Dampak Inflasi) pada Dinas Perikanan dan Kelautan sebesar Rp18.772.500.000,00.

5.4.2.1.13. Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang merupakan saldo Beban Penyisihan Piutang periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 yang terealisasi sebesar



Rp1.339.952.821,25 mengalami penurunan sebesar Rp6.679.015.576,88 atau 83,29% jika dibandingkan dengan Beban Penyisihan Piutang tahun 2023 yang terealisasi sebesar Rp8.018.968.398,13.

Tabel 5 . 4 . 28 Rincian Beban Penyisihan Piutang

Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	0,00	5.425.361.282,88	-5.425.361.282,88	-100,00%
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	1.050.057.831,25	2.212.447.170,00	-1.162.389.338,75	-52,54%
Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	289.894.990,00	381.159.945,25	-91.264.955,25	-23,94%
Jumlah	1.339.952.821,25	8.018.968.398,13	-6.679.015.576,88	-83,29%

Pada TA 2024 tidak terdapat beban penyisihan piutang pajak daerah karena terdapat penurunan nilai akumulasi penyisihan piutang pajak daerah. Penurunan tersebut disebabkan adanya penghapusan piutang pajak daerah beserta dengan akumulasi penyisihan piutangnya.

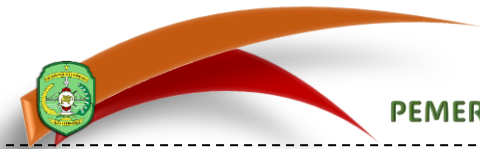
5.4.2.1.14. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 yang terealisasi sebesar Rp1.405.381.810.039,79 mengalami peningkatan sebesar Rp414.465.433.241,76 atau 41,83% jika dibandingkan dengan Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2023 yang terealisasi sebesar Rp990.916.376.798,03.

Tabel 5 . 4 . 29 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	491.758.386.890,83	236.673.800.304,08	255.084.586.586,75	107,78
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	145.346.207.112,00	129.071.054.222,00	16.275.152.890,00	12,61
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	751.814.529.299,96	610.046.384.265,95	141.768.145.034,01	23,24
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	657.864.135,00	364.861.599,00	293.002.536,00	80,31
Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	15.804.822.602,00	14.760.276.407,00	1.044.546.195,00	7,08
Jumlah	1.405.381.810.039,79	990.916.376.798,03	414.465.433.241,76	41,83

Pada tabel di atas beban penyusutan dan amortisasi sebesar Rp1.405.381.810.039,79 terdiri dari beban penyusutan sebesar Rp1.389.576.987.437,79 dan amortisasi sebesar Rp15.804.822.602,00.



5.4.2.1.15. Beban Transfer

Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Beban Transfer pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp924.576.755.459,00 mengalami peningkatan sebesar Rp43.506.172.561,00 atau 4,94% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp881.070.582.898,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5 . 4 . 30 Rincian Beban Bantuan Transfer

Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	16.000.000.000,00	0,00	16.000.000.000,00	100,00
Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	754.282.000,00	0,00	754.282.000,00	100,00
Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	907.822.473.459,00	881.070.582.898,00	26.751.890.561,00	3,04
Jumlah	924.576.755.459,00	881.070.582.898,00	43.506.172.561,00	4,94

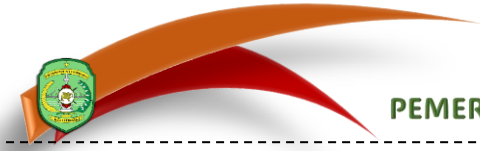
Beban transfer pada TA 2024 terdiri atas Beban Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa, Beban Bantuan Keuangan Umum Provinsi kepada Desa dan BUMDES, Alokasi Dana Desa (ADD), Penghasilan Tetap (SILTAP) Kepala Desa dan Perangkat Desa, Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa (BKKD) yang ditujukan untuk Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU), Tenaga Kesehatan, Rukun Tetangga dan Listrik Desa.

5.4.3. Surplus/Defisit Dari Operasi

Surplus/Defisit Dari Operasi adalah selisih antara Pendapatan dan Beban selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi. Surplus/Defisit Dari Operasi selama periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 surplus sebesar Rp2.909.183.210.705,00 mengalami penurunan sebesar Rp725.075.810.596,33 atau 19,95% dari tahun 2023 surplus sebesar Rp3.634.259.021.301,33.

5.4.4. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional

Kegiatan Non Operasional pada tahun 2024 terealisasi defisit sebesar Rp8.409.147.223,44 mengalami penurunan sebesar Rp50.488.178.748,48 atau 85,72% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 defisit sebesar Rp58.897.325.971,92 dengan rincian sebagai berikut.



Tabel 5 . 4 . 31 Rincian Kegiatan Non Operasional

Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Surplus Dari Kegiatan Non Operasional	3.302.349.108,18	123.732.366.726,00	-120.430.017.617,82	- 97,33
Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	11.711.496.331,62	182.629.692.697,92	-170.918.196.366,30	- 93,59
Jumlah	-8.409.147.223,44	-58.897.325.971,92	50.488.178.748,48	- 85,72

Rincian Kegiatan Non Operasional dijelaskan sebagai berikut :

1. Surplus Dari Kegiatan Non Operasional

Surplus Dari Kegiatan Non Operasional TA 2024 terealisasi surplus sebesar Rp3.302.349.108,18 mengalami penurunan sebesar Rp120.430.017.617,82 atau 97,33% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 surplus sebesar Rp123.732.366.726,00.

Tabel 5 . 4 . 32 Rincian Surplus Kegiatan Non Operasional

Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0,00	123.732.366.726,00	-123.732.366.726,00	-100,00
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	3.302.349.108,18	0,00	3.302.349.108,18	100,00
Jumlah Surplus Non Operasional-LO	3.302.349.108,18	123.732.366.726,00	-120.430.017.617,82	-97,33

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya merupakan surplus atas penurunan nilai penyisihan piutang tahun 2023 ke tahun 2024. Hal tersebut disebabkan adanya penghapusan Piutang Pajak Daerah pada tahun 2024 beserta dengan penyisihan piutang.

2. Defisit Dari Kegiatan Non Operasional

Defisit Dari Kegiatan Non Operasional TA 2024 terealisasi sebesar Rp3.302.349.108,18 mengalami penurunan sebesar Rp120.430.017.617,82 atau 97,33% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 surplus sebesar Rp123.732.366.726,00.

Tabel 5 . 4 . 33 Rincian Kegiatan Non Operasional

Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Defisit Penjualan Aset Non Lancar	11.290.341.250,62	170.513.400.259,77	-159.223.059.009,15	-93,38
Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	421.155.081,00	12.116.292.438,15	-11.695.137.357,15	-96,52
Jumlah Defisit Non Operasional-LO	11.711.496.331,62	182.629.692.697,92	-170.918.196.366,30	-93,59

Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari :

- 1) Defisit Penjualan Aset Non Lancar merupakan Defisit Penghapusan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang; dan
- 2) Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya merupakan penurunan nilai Dana Bergulir kepada Koperasi sebesar Rp409.205.081,00 dan penurunan nilai Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebesar Rp11.950.000,00.



5.4.5. Surplus/Defisit Dari Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa merupakan penyajian atas Beban Tidak Terduga. Defisit Pos Luar Biasa di TA 2024 adalah sebesar Rp0,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp0,00 dibanding defisit pos luar biasa pada tahun 2023 yang terealisasi sebesar Rp0,00. Penurunan defisit pada pos luar biasa disebabkan tidak ada kejadian luar biasa sehingga pendanaan tanggap darurat penanganan kasus luar biasa tidak ada.

5.4.6. Surplus/Defisit-LO

Surplus/Defisit-LO pada tahun 2024 terealisasi surplus sebesar Rp2.900.774.063.481,56 mengalami penurunan sebesar Rp810.015.135.931,00 atau 22,66% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 surplus sebesar Rp3.575.361.695.329,41.

5.5. Penjelasan Pos – Pos Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas bertujuan memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan. Sejak tahun 2011, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menyajikan Laporan Arus Kas yang mengkonsolidasi Laporan Arus Kas BUD dan BLUD. Dalam Laporan Arus Kas tersebut, saldo awal Kas dan saldo akhir Kas di BLUD masuk dalam perhitungan arus kas sesuai dengan posisi kas per 31 Desember. Arus Kas Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam tahun 2024 diuraikan sebagai berikut.

5.5.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tanpa mengandalkan sumber dana dari luar, dengan uraian sebagai berikut.

Tabel 5.5.1 Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Arus Kas Masuk	12.701.220.203.523,90	7.786.419.354.555,59
Arus Kas Keluar	7.492.694.073.619,34	6.677.841.622.738,33
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	5.208.526.129.904,56	1.108.577.731.817,26

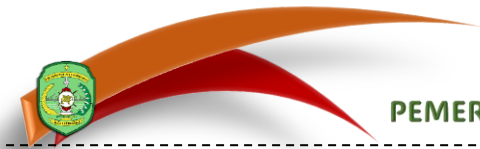
Berdasarkan realisasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi TA 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp5.208.526.129.904,56 dan Rp1.108.577.731.817,26 jika dibandingkan dengan tahun 2023 maka Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp4.099.948.398.087,30 atau 369,84%. Realisasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi dapat dirincikan sebagai berikut.

5.5.1.1. Arus Kas Masuk

Arus Kas Masuk dari aktivitas operasi selama TA 2024 dan 2023 sebesar Rp12.701.220.203.523,90 dan Rp7.786.419.354.555,59 jika dibandingkan maka Arus Kas Masuk bersih dari aktivitas operasi mengalami kenaikan sebesar Rp4.914.800.848.968,31 atau 63,12%. Rincian arus kas masuk tersebut dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.5.2 Rincian Aktivitas Operasi Arus Kas Masuk

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi		
Penerimaan Pajak Daerah	165.870.568.096,40	141.989.017.504,00
Penerimaan Retribusi Daerah	5.879.733.796,00	6.282.211.585,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	88.383.259.737,59	63.147.803.556,59
Penerimaan Lain - lain PAD yang sah	526.539.876.389,49	613.467.754.133,91
Penerimaan Dana Bagi Hasil	9.840.984.241.170,00	4.926.263.080.285,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	608.978.151.168,00	493.817.232.160,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik	152.452.133.560,00	110.616.686.334,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	354.448.698.229,73	332.906.020.478,09
Penerimaan Dana Insentif	0,00	27.486.716.000,00



Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Penerimaan Dana Desa	195.105.755.000,00	192.420.471.000,00
Penerimaan Insentif Fiskal	34.790.318.000,00	0,00
Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi	588.414.513.069,00	827.375.876.377,00
Penerimaan Bantuan Keuangan	58.440.000.000,00	38.120.000.000,00
Penerimaan Hibah	0,00	3.567.000.000,00
Penerimaan dari Pendapatan Lainnya	80.932.955.307,69	8.959.485.142,00
Jumlah Arus Masuk Kas Aktifitas Operasi	12.701.220.203.523,90	7.786.419.354.555,59

5.5.1.2. Arus Kas Keluar

Arus Kas Keluar dari aktivitas operasi selama TA 2024 dan 2023 sebesar Rp7.492.694.073.619,34 dan Rp6.677.841.622.738,33 jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya tahun 2023 maka Arus Kas Keluar tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp814.852.450.881,01 atau 12,20%. Adapun rincian dari Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi sebagai berikut.

Tabel 5 . 5 . 3 Rincian Aktivitas Operasi Arus Kas Keluar

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Arus Keluar Kas Aktifitas Operasi		
Pembayaran Pegawai	2.031.277.587.743,00	1.684.249.244.773,75
Pembayaran Barang dan Jasa	4.070.345.469.854,34	3.795.753.556.465,58
Pembayaran Subsidi	101.040.120,00	64.400.000,00
Pembayaran Belanja Hibah	246.099.465.443,00	275.810.463.601,00
Pembayaran Belanja Bantuan Sosial	25.188.000.000,00	40.893.375.000,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	16.754.282.000,00	0,00
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Desa	1.102.928.228.459,00	881.070.582.898,00
Jumlah Arus Keluar Kas Aktifitas Operasi	7.492.694.073.619,34	6.677.841.622.738,33

5.5.2. Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Arus Kas dari Aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang, dengan uraian sebagai berikut.

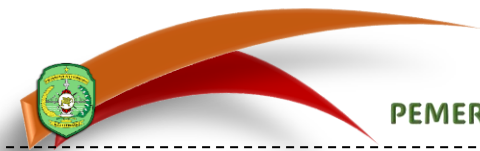
Tabel 5 . 5 . 4 Rincian Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
Arus Kas Masuk	926.732.590,00	804.467.805,00
Arus Kas Keluar	5.339.491.167.024,25	3.619.481.650.991,16
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	-5.338.564.434.434,25	-3.618.677.183.186,16

Realisasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi selama TA 2024 dan 2023 defisit sebesar Rp5.338.564.434.434,25 dan Rp3.618.677.183.186,16 jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp1.719.887.251.248,09 atau 47,53% yang merupakan selisih antara Arus Kas Masuk dikurangi Arus Kas Keluar, dengan uraian sebagai berikut.

5.5.2.1. Arus Kas Masuk

Arus Kas Masuk selama TA 2024 sebesar Rp926.732.590,00 dan Arus Kas Masuk pada tahun 2023 sebesar Rp804.467.805,00 terjadi kenaikan sebesar



Rp122.264.785,00 atau 15,20% Kas Masuk dari Aktivitas Investasi selama TA 2024. Arus Kas Masuk tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5 . 5 . 5 Rincian Aktivitas Investasi Arus Kas Masuk

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi		
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	926.732.590,00	317.316.000,00
Penjualan Aset Lainnya	0,00	487.151.805,00
Jumlah Arus Masuk Kas Aktifitas Investasi	926.732.590,00	804.467.805,00

5.5.2.2. Arus Kas Keluar

Arus Kas Keluar selama TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp5.339.491.167.024,25 dan Rp3.619.481.650.991,16 terjadi kenaikan sebesar Rp1.720.009.516.033,09 atau 47,52% Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi selama TA 2024. Rincian Arus Kas Keluar tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5 . 5 . 6 Rincian Aktivitas Investasi Arus Kas Keluar

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Arus Keluar Kas Aktifitas Investasi		
Perolehan Tanah	62.606.649.543,00	48.525.311.811,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	1.303.090.381.381,00	1.186.122.189.231,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	1.646.496.068.022,73	884.289.334.911,00
Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.281.781.596.417,52	1.351.028.784.039,16
Perolehan Aset Tetap Lainnya	5.811.543.160,00	42.977.977.499,00
Perolehan Aset Lainnya	15.659.928.500,00	664.053.500,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	24.045.000.000,00	105.874.000.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas Aktifitas Investasi	5.339.491.167.024,25	3.619.481.650.991,16

5.5.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan tahun 2024 dan tahun 2023 sebesar Rp0,00.

5.5.3.1. Arus Kas Masuk

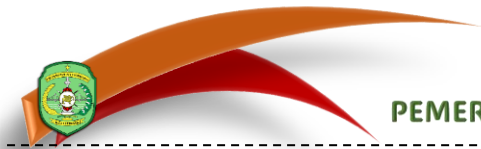
Tidak ada Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan selama TA 2024 dan 2023.

5.5.3.2. Arus Kas Keluar

Tidak ada Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan selama TA 2024 dan 2023.

5.5.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan maupun pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris tahun 2024 defisit sebesar Rp384.071.106,07 dan pada tahun 2023 surplus sebesar Rp192.884.270,96. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris tersebut diuraikan sebagai berikut.



Tabel 5 . 5 . 7 Rincian Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris		
Arus Kas Masuk	1.893.661.908.477,03	827.684.261.852,83
Arus Kas Keluar	1.894.045.979.583,10	827.491.377.581,87
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris	-384.071.106,07	192.884.270,96

5.5.4.1. Arus Kas Masuk

Arus Kas Masuk selama TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.893.661.908.477,03 dan Rp827.684.261.852,83. Rincian Arus Kas Masuk tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5 . 5 . 8 Rincian Aktivitas Transitoris Arus Kas Masuk

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris		
Penerimaan PFK Tahun Berjalan :		
luran	975.901.485.653,65	810.556.528.853,80
Pajak	917.738.852.936,65	16.715.467.251,23
Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	21.569.886,73	38.199.772,37
Penerimaan Transitoris:	0,00	0,00
Pendapatan atas belanja yang belum dibayarkan	0,00	370.289.419,43
Kas Bendahara BOSKAB	0,00	0,00
Pengembalian Panjar Kepada Kas BLUD	0,00	3.250.500,00
Koreksi Kas Lainnya (Dana Blockgrant)	0,00	526.056,00
Jumlah Arus Masuk Kas Aktifitas Transitoris	1.893.661.908.477,03	827.684.261.852,83

5.5.4.2. Arus Kas Keluar

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris selama tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp1.894.045.979.583,10 dan Rp827.491.377.581,87. Rincian arus kas keluar tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5 . 5 . 9 Rincian Aktivitas Transitoris Arus Kas Keluar

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Arus Keluar Kas Aktifitas Transitoris		
Pengeluaran PFK Tahun Berjalan :		
luran	975.901.485.653,65	810.556.528.853,80
Pajak	917.736.004.737,65	16.715.467.251,23
Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	38.199.772,37	52.241.894,37
Pengeluaran Transitoris:	0,00	0,00
Pendapatan atas belanja yang Telah dibayarkan	370.289.419,43	103.655.322,00
Koreksi Utang Jangka Pendek Lainnya BUD	0,00	0,00
Koreksi Kesalahan Tahun Sebelumnya (PBB P2)	0,00	9.451.960,00
Pengeluaran Kesalahan Pendebet Bank	0,00	0,00
Koreksi Kesalahan Tahun Sebelumnya (Kas Bendahara Bantuan Operasional Satuan Pendidikan)	0,00	54.032.300,47
Jumlah Arus Keluar Kas Aktifitas Transitoris	1.894.045.979.583,10	827.491.377.581,87



5.5.5. Kenaikan / Penurunan Kas

Dalam TA 2024 terjadi penurunan Kas BUD dan BLUD sebesar Rp130.422.375.635,76 yang bersumber dari arus kas bersih seluruh aktivitas dalam laporan arus kas. Hal ini dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 5 . 5 . 10 Rincian Kenaikan (Penurunan) Kas

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	5.208.526.129.904,56	1.108.577.731.817,26
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	-5.338.564.434.434,25	-3.618.677.183.186,16
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	-384.071.106,07	192.884.270,96
Kenaikan/Penurunan Kas	-130.422.375.635,76	-2.509.906.567.097,94

5.5.6. Saldo Akhir Kas di BUD, BLUD dan JKN

Saldo Akhir Kas di BUD dan BLUD per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp165.960.838.909,47 dan Rp296.382.542.584,25. Saldo akhir Kas per 31 Desember 2023 kemudian disajikan kembali sebagai saldo awal per 1 Januari 2024. Hal ini dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 5 . 5 . 11 Rincian Saldo Kas di BUD dan BLUD

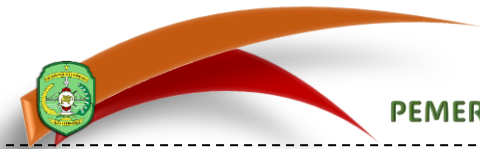
Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Kenaikan/Penurunan Kas	-130.422.375.635,76	-2.509.906.567.097,94
Saldo Awal Kas	296.382.542.584,25	2.806.352.067.886,66
Koreksi SILPA	671.961,71	-62.958.204,47
Saldo Awal Kas Setelah Koreksi	296.383.214.545,96	2.806.289.109.682,19
Saldo Akhir Kas	165.960.838.910,20	296.382.542.584,25

5.5.7. Saldo Kas di Neraca

Saldo Kas di Neraca per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp165.960.838.910,20 dan Rp296.382.542.584,25. Saldo Kas di Neraca tersebut terinci dalam tabel berikut.

Tabel 5 . 5 . 12 Rincian Saldo Kas di Neraca

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Saldo Akhir Kas		
Terdiri dari		
Kas di Kas Daerah	106.995.793.268,66	137.349.994.388,22
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	48.391.409.995,03	103.816.434.030,49
Kas Dana BOS	973.904.881,78	764.590.873,45
Kas Lainnya	150.386.003,73	4.451.523.292,09
Setara Kas	0,00	50.000.000.000,00
Kas Dana BOK Puskesmas	9.449.344.761,00	0,00
Saldo Kas di Neraca	165.960.838.910,20	296.382.542.584,25



5.6. Penjelasan Pos – Pos Laporan Perubahan Ekuitas

LPE adalah Laporan yang terdiri dari Saldo Akhir tahun lalu yang menjadi Saldo Awal Ekuitas, Surplus atau Defisit yang berasal dari Operasional tahun berjalan serta dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar. LPE merupakan laporan penghubung antara LO dengan Neraca yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tabel 5 . 6 . 1 Perbandingan Nilai Ekuitas

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Ekuitas Awal	22.672.788.940.197,26	18.926.786.426.696,10
Surplus/Defisit-LO	2.900.774.063.481,57	3.575.361.695.329,42
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:		
Koreksi Ekuitas	-83.076.644.876,11	170.640.818.171,74
Ekuitas Akhir	25.490.486.358.802,72	22.672.788.940.197,26

5.6.1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal merupakan kekayaan bersih pemerintah yang berasal dari selisih antara aset dan kewajiban pemerintah yang berasal dari tahun-tahun anggaran sebelumnya yang merupakan reklasifikasi dari ekuitas dana yang terdiri dari ekuitas dana lancar, dana investasi dan dana cadangan. Saldo Ekuitas Awal 1 Januari 2024 Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang merupakan nilai akhir tahun sebelumnya sebesar Rp22.672.788.940.197,26.

5.6.2. Surplus/Defisit-LO

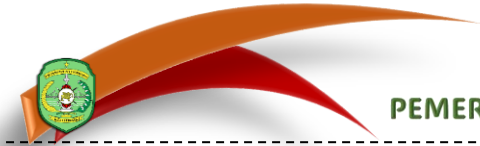
Surplus/Defisit – LO merupakan saldo yang berasal dari selisih antara Pendapatan-LO dan Beban selama tahun berjalan. Saldo Suplus/Defisit – LO Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024 sebesar Rp2.900.774.063.481,57.

5.6.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Pada Laporan Perubahan Ekuitas terdapat selisih sebesar Rp83.076.644.876,11 yang merupakan adanya dampak kumulatif karena koreksi yang disebabkan oleh adanya perubahan kebijakan atau kesalahan mendasar yang terjadi pada tahun sebelumnya yang dirinci sebagai berikut.

Tabel 5 . 6 . 2 Koreksi Ekuitas

SKPD	Uraian	Koreksi Ekuitas (Rp)
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Koreksi Ekuitas Lainnya	16.153.796.770,71
Dinas Kesehatan	Koreksi Ekuitas Lainnya	-0,42
RSUD Aji Muhammad Parikesit	Koreksi Ekuitas Lainnya	553.246.289,10
RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	Koreksi Ekuitas Lainnya	300.000,00
RSUD Dayaku Raja	Koreksi Ekuitas Lainnya	13.996.900,00
Dinas Pekerjaan Umum	Koreksi Ekuitas Lainnya	-11.731.200.417,58
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Koreksi Ekuitas Lainnya	92.248.750,00



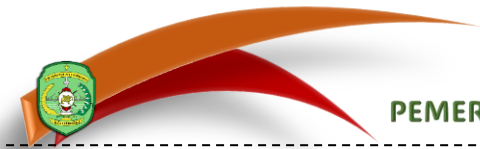
SKPD	Uraian	Koreksi Ekuitas (Rp)
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Koreksi Ekuitas Lainnya	7.214.069,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Koreksi Ekuitas Lainnya	16.200.000,00
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Koreksi Ekuitas Lainnya	4.355.723,00
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Koreksi Ekuitas Lainnya	3.147.311,00
Dinas Perhubungan	Koreksi Ekuitas Lainnya	20.918.000,00
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Koreksi Ekuitas Lainnya	2.755.481,00
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Koreksi Ekuitas Lainnya	271.505.211,00
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Koreksi Ekuitas Lainnya	8.598.219,00
Dinas Pariwisata	Koreksi Ekuitas Lainnya	15.813.882,00
Dinas Pertanian dan Peternakan	Koreksi Ekuitas Lainnya	-1.615.000,00
Dinas Perkebunan	Koreksi Ekuitas Lainnya	75.000.000,00
Sekretariat Daerah	Koreksi Ekuitas Lainnya	1.100.131,00
Badan Pendapatan Daerah	Koreksi Ekuitas Lainnya	-11.672.505.729,04
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Koreksi Ekuitas Lainnya	-77.795.876.285,55
Kecamatan Loa Kulu	Koreksi Ekuitas Lainnya	5.143.236,00
Kecamatan Muara Badak	Koreksi Ekuitas Lainnya	360,00
Kecamatan Muara Jawa	Koreksi Ekuitas Lainnya	-0,33
Kecamatan Samboja	Koreksi Ekuitas Lainnya	300.155,00
Kecamatan Sebulu	Koreksi Ekuitas Lainnya	641.912.069,00
Kecamatan Samboja Barat	Koreksi Ekuitas Lainnya	237.000.000,00
	Jumlah	-83.076.644.876,11

Tabel 5 . 6 . 3 Penjelasan atas Koreksi Ekuitas Lainnya

No	Uraian	Nilai
1	Koreksi Penghapusan Piutang	-11.679.238.019,04
2	Koreksi Penghapusan Penyisihan Piutang	11.903.328.284,29
3	Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	-141.415.602,00
4	Koreksi Barang Temuan Baru	17.192.626.450,00
5	Koreksi Double Catat	220.613.205,00
6	Koreksi Kelebihan Bayar Belanja Aset Tetap	-4.438.032.484,85
7	Jurnal Koreksi Mutasi Kurang atas Belanja Barang dan Jasa yang Dianggarkan Dalam Belanja Modal Dibawah Tahun 2024	-11.396.318.657,58
8	Jurnal Koreksi atas Reklasifikasi dari Aset Ekstra Kompatabel Aset Dibawah Kapitalisasi Dibawah Tahun 2024	648.176.250,35
9	Jurnal Koreksi Mutasi Tambah atas Koreksi Saldo Tahun 2024 Belum Diakomodir pada LKPD (Menambah)	14.000.000,00
10	Jurnal Koreksi Mutasi Tambah atas Koreksi Saldo Tahun 2024 Belum Diakomodir pada LKPD (Mengurangi)	-467.173.826,00
11	Jurnal Koreksi atas Penghapusan Lebih Catat Utang Belanja Pegawai	51.437.001,00
12	Jurnal Koreksi atas Penghapusan Lebih Catat Utang Belanja Barang dan Jasa	229.354.552,00
13	Jurnal Koreksi atas Utang Belanja Modal yang Sudah Tidak Ditagihkan Lagi	171.004.451,00
14	Koreksi Mutasi Kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan atas Honorarium PPKom yang Sudah Tidak Ditagihkan Lagi	-11.700.000,00



No	Uraian	Nilai
15	Jurnal Penyesuaian atas Koreksi Ekuitas dan Laba/(Rugi) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Tahun 2024	-58.848.785.972,28
16	Jurnal koreksi atas kesalahan pencatatan akumulasi penyisihan piutang yang dihapuskan (sebenarnya tidak diperhitungkan dari awal)	-11.679.238.019,04
17	Jurnal Penyesuaian atas Penyertaan Modal BUMD TA 2024	-19.171.180.578,67
18	Jurnal Koreksi atas Persediaan yang belum tercatat	4.632.000,00
19	Jurnal Koreksi atas Saldo Kas Block Grant pada SMP 5 Tgr Seberang di CAIK sebesar Rp125.030.314,02 menjadi Rp125.967.918,00 sesuai saldo rekening koran pada Bank BRI nomor 021201002465306	937.604,71
20	Jurnal Koreksi atas Kelebihan Pembayaran Volume Pekerjaan TA 2024	4.320.328.485,00
Jumlah		-83.076.644.876,11



5.7. Penjelasan - Penjelasan atas Dana - Dana Non APBD Kabupaten Kutai Kartanegara

Pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan program dan kegiatan yang berasal dari dana-dana non APBD Kabupaten Kutai Kartanegara yang terdiri dari Tugas Pembantuan (Dana Desa) dan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).

5.7.1. Tugas Pembantuan (Dana Desa)

Penyelenggaraan asas tugas pembantuan adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi penugasan. Tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa. Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada daerah dan/atau desa meliputi sebagian tugas-tugas pemerintah yang apabila dilaksanakan oleh daerah dan/atau desa akan lebih efisien dan efektif yaitu diantaranya adalah Dana Desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145/PMK.07/2023 tentang Pengelolaan Dana Desa dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 serta Keputusan Menteri Keuangan Nomor 352 Tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp195.105.755.000,00 dengan realisasi transfer ke desa sebesar Rp195.105.755.000,00. Laporan Target Anggaran dan Realisasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024 terinci dalam **Lampiran 16**

5.7.2. Dana Belanja Operasional Sekolah Pusat (BOSP)

Dana BOSP diperoleh berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang dihitung berdasarkan jumlah peserta didik TKN, SD dan SMP yang bersangkutan dengan besaran biaya TKN sebesar Rp600.000,00 per satu peserta didik per tahun, SD sebesar Rp900.000,00 per satu peserta didik per tahun, untuk satuan pendidikan SMP sebesar Rp1.100.000,00 per satu peserta didik per tahun. Pada TA 2024, berdasarkan SP2B telah disahkan penggunaan dana BOSP dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut.

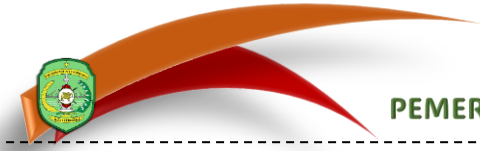
Tabel 5 . 7 . 1 Rincian SP2B BOSP Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Saldo Awal	: 764.590.873,45
	1). Pendapatan BOP/BOS Reguler	: 112.966.652.148,28



No	Uraian	Jumlah (Rp)
2).	Pendapatan BOP/BOS Afirmasi/Kinerja	: 2.547.500.000,00
3).	Pendapatan Bunga Rekening Bank / Jasa Giro	:
4).	Pengembalian Hasil Temuan/Pemeriksaan Inspektorat/BPK RI	:
2	Jumlah Pendapatan Tahun 2024	: 115.514.152.148,28
1).	Belanja Pegawai	: 0,00
2).	Belanja Barang dan Jasa	: 98.585.810.601,40
3).	Belanja Modal	16.802.328.201,00
3	Jumlah Pengeluaran Tahun 2024	: 115.388.138.802,40
	Saldo Akhir	: 890.604.219,33
4	Informasi Lain-Lain	
	Pendapatan Bunga Rekening Bank / Jasa Giro	: 56.468.863,77
	Pengembalian Hasil Temuan/Pemeriksaan Inspektorat/BPK RI	: 63.437.146,75
	Jumlah	: 119.906.010,52
	Setoran Pajak Rekening & Administrasi Buku Rekening / Pemindahanbuku Jasa Giro (KASDA)	: 36.605.348,07
	Jumlah	: 36.605.348,07
	Saldo Akhir	: 83.300.662,45
5	Total Saldo Akhir Per 31 Desember 2024	: 973.904.881,78

Terdapat Kas di Bendahara BOS sebesar Rp973.904.881,78 dan Kas Lainnya/Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar Rp21.569.886,73 sesuai dengan **Lampiran 17**.



BAB VI - PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Domisili dan Bentuk Hukum Entitas Pelaporan

Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan kelanjutan dari Kabupaten Kutai sebelum terjadi pemekaran wilayah pada tahun 1999. Wilayah Kabupaten Kutai, Kota Balikpapan, Kota Bontang, dan Kota Samarinda, sebelumnya merupakan wilayah kekuasaan Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura.

Pada tahun 1947, Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura dengan status daerah Swapraja Kutai masuk dalam Federasi Kalimantan Timur bersama empat Kesultanan lainnya seperti Bulungan, Sambaliung, Gunung Tabur, dan Pasir. Daerah Swapraja Kutai diubah menjadi Daerah Istimewa Kutai yang merupakan daerah otonom/daerah istimewa setingkat kabupaten berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953. Pada tahun 1959, status Daerah Istimewa Kutai yang dipimpin Sultan A.M. Parikesit dihapus dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, daerah ini dibagi menjadi 3 Daerah Tingkat II, yakni:

- a. Kotamadya Balikpapan dengan Ibu Kota Balikpapan;
- b. Kotamadya Samarinda dengan Ibu Kota Samarinda; dan
- c. Kabupaten Kutai dengan Ibu Kota Tenggarong.

Dengan berakhirnya Daerah Istimewa Kutai, maka berakhir pula kekuasaan Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura. Dalam Sidang Khusus DPRD Daerah Istimewa Kutai pada tanggal 21 Januari 1960, Sultan Kutai Kartanegara A.M. Parikesit secara resmi menyerahkan kekuasaan kepada Aji Raden Padmo selaku Bupati Kutai, Kapten Soedjono selaku Wali Kota Samarinda, dan A.R. Sayid Mohammad selaku Wali Kota Balikpapan.

Secara geografis Kabupaten Kutai Kartanegara terletak antara 115°26'28" BT–117°36'43" BT dan 1°28'21" LU–1°08'06" LS dengan batas administratif bagian Utara berbatasan dengan Kabupaten Malinau, bagian Timur dengan Kabupaten Kutai Timur, Kota Bontang dan Selat Makassar, bagian Selatan dengan Kabupaten Paser, dan bagian Barat dengan Kabupaten Kutai Barat.

Perkembangan lebih lanjut berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999, Wilayah Kutai dimekarkan menjadi empat daerah otonom yakni:

- a. Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Ibu Kota di Tenggarong;
- b. Kabupaten Kutai Barat dengan Ibu Kota di Sendawar;
- c. Kabupaten Kutai Timur dengan Ibu Kota di Sangatta; dan
- d. Kota Bontang dengan Ibu Kota di Bontang.

Pada saat ini, Kantor Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berada di Jalan Wolter Mongisidi, Tenggarong 75511

6.2. Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah Organisasi Pemerintah Daerah yang bersifat Nirlaba (tidak bertujuan mencari keuntungan), dengan kegiatan pokok

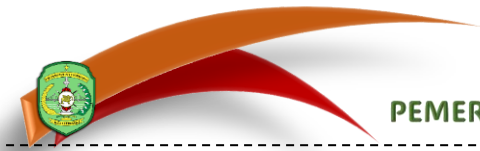


adalah pemberian layanan kepada Masyarakat, dan Peningkatan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan sasaran pembangunan yang terarah dan terintegrasi dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai amanat dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai bagian dari pemerintah pusat selain menyelenggarakan kewenangannya sendiri Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara juga menyelenggarakan kewenangan pemerintah pusat yang dilimpahkan ke daerah baik yang melalui desentralisasi maupun tugas pembantuan.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 3 ayat (1), Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tanggal 10 September 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, telah terjadi perubahan Struktur Organisasi Perangkat Daerah baik pemisahan maupun penggabungan dari 103 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menjadi 59 Perangkat Daerah. Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah diselenggarakan dengan berasaskan:

- a. Intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi daerah;
- b. Efisiensi;
- c. Efektivitas;
- d. Pembagian habis tugas;
- e. Rentang kendali;
- f. Tata kerja yang jelas; dan
- g. Fleksibilitas



BAB VII - PENUTUP

Catatan atas Laporan Keuangan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara atas pelaksanaan APBD TA 2024, dengan beberapa simpulan sebagai berikut.

- a. Total realisasi Pendapatan Daerah TA 2024 sebesar Rp12.702.146.936.113,90 atau 88,75% dari anggaran pendapatan yang ditargetkan pada tahun 2024 sebesar Rp14.312.025.946.608,00;
- b. Total realisasi Belanja Daerah TA 2024 sebesar Rp11.688.457.730.184,60 atau 87,18% dari anggaran belanja yang direncanakan pada tahun 2024 sebesar Rp13.406.849.140.395,00;
- c. Total realisasi Belanja Transfer TA 2024 sebesar Rp1.119.682.510.459,00 atau 99,60% dari anggaran Belanja Transfer yang direncanakan pada tahun 2024 sebesar Rp1.124.150.859.605,00;
- d. Total realisasi Pendapatan Daerah – LO TA 2024 sebesar Rp11.680.612.174.218,31;
- e. Total realisasi Beban Daerah – LO TA 2024 sebesar Rp8.771.428.963.513,30;
- f. Nilai Aset yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara per 31 Desember 2024 sebesar Rp26.006.463.209.083,22 mengalami peningkatan sebesar Rp2.782.297.744.465,10 dari nilai yang disajikan per 31 Desember 2023 sebesar Rp23.224.165.464.618,12;
- g. Nilai Kewajiban yang masih menjadi tanggungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara per 31 Desember 2024 sebesar Rp515.976.850.280,50 mengalami penurunan sebesar Rp35.399.674.140,36 dari nilai yang disajikan per 31 Desember 2023 sebesar Rp551.376.524.420,86; dan
- h. Nilai Ekuitas yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara per 31 Desember 2024 sebesar Rp25.490.486.358.802,72 mengalami peningkatan sebesar Rp2.817.697.418.605,46 dari nilai yang disajikan per 31 Desember 2023 sebesar Rp22.672.788.940.197,20.

Demikian laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Berbasis Akrual TA 2024 ini kami susun, agar dapat dipergunakan oleh semua pihak yang berkepentingan di Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Pusat Republik Indonesia di Jakarta dan dapat memperjelas dalam memahami Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kutai Kartanegara TA 2024.